



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif. Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tetapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah yang mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- i. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010;
- j. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- l. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2023;
- p. Perda Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Perda Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2023;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes;
- v. Perbup Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dalam tujuh bab yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 3. Sistematika Penyusunan CaLK
- Bab II : Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 2. Kebijakan Keuangan
 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan pemerintah daerah
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi
1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - a. Arus Kas dari Operasi
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Untuk mengetahui tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Brebes dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya. Dari perbandingan total PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi belum dapat dijadikan dasar sepenuhnya untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi namun jika diikuti dengan perkembangan penduduknya yang tinggi maka tingkat kemakmuran masyarakat belum dikatakan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat digunakan indikator tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran. Jika dilihat dari segi konsumsi berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kuantitasnya.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2018-2022, secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2018-2022 fluktuatif, berturut-turut sebesar 5,26%; 5,76%; -0,47%, 2,57 dan 5,61%. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	0,64	3,91	0,35	3,57
B	Pertambangan dan Penggalian	6,04	3,84	1,38	3,40	-3,12
C	Industri Pengolahan	5,27	12,98	-0,17	4,86	7,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	4,51	2,02	6,57	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,32	3,43	5,94	10,49
F	Konstruksi	6,08	5,2	-2,83	6,12	1,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75	6,56	-4,75	3,79	4,5
H	Transportasi dan Pergudangan	7,07	8,91	-30,75	2,59	53,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,51	8,61	-4,82	5,94	14,88
J	Informasi dan Komunikasi	14,52	12,2	11,32	4,16	2,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,69	3,73	0,96	2,49	0,86
L	Real Estate	5,74	5,81	-0,51	1,8	3,75
M, N	Jasa Perusahaan	10,05	11,07	-4,43	1,58	4,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	1,12	-0,92	-0,54	1,9



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
P	Jasa Pendidikan	8,58	7,97	-0,31	0,12	1,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	7,06	7,70	1,46	0,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,12	9,48	-4,89	0,63	1,72
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61

Sumber : BPS Kab. Brebes

a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk), sebagai ukuran kinerja pemerintah dan untuk sebagai dasar untuk alokator penentuan DAU. IPM menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang diukur dari empat indikator. Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut adalah:

1) Kesehatan/umur panjang dan hidup sehat

Untuk dimensi kesehatan yaitu berupa umur panjang dan hidup sehat (*a long life and healthy life*). Indikator yang diukur adalah :

(a) Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.

2) Pendidikan/pengetahuan

Berupa pengetahuan (*knowledge*). Indikator yang diukur adalah :

(b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years of Schooling* (MYS) dan

(c) Harapan Lama Sekolah (HLS) / *Expected Years of Schooling* (EYS)

3) Pengeluaran per kapita / standar hidup layak

Yaitu berupa standar hidup layak (*decent standard aliving*). Indikator yang diukur adalah :

(d) Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Perkembangan data IPM untuk Kabupaten Brebes selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perkembangan Data IPM Kabupaten Brebes

Tahun	IPM	UHH	HLS / EYS	RLS / MYS	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)
2021	66,32	69,54	12,05	6,22	10.152
2022	67,03	69,74	12,15	6,35	10.514
2023	67,95	69,96	12,44	6,40	10.993

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Hasil pembangunan manusia di Kabupaten Brebes pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Brebes tahun 2022 meningkat 0,71 poin dibanding dari tahun 2021 menjadi 67,03 dan pada tahun 2023 meningkat 0,92 menjadi 67,95.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan walaupun relative kecil. Angka pengangguran pada tahun 2020 sebesar 9,83%, kemudian pada tahun berikutnya sebesar 9,78%, tahun 2022 sebesar 9,48% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 8,98% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3
 Tingkat Pengangguran Kabupaten Brebes

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Brebes	9.83	9.78	9.48	8.98

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

c. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes, kemiskinan di Kabupaten Brebes masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan selain pengangguran. Oleh karena itu informasi tentang kemiskinan yang akurat menjadi sangat penting bagi kelancaran evaluasi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada tahun 2019 mencapai 293,18 ribu orang (16,22 persen), pada tahun 2020 mencapai 308,78 ribu orang (17,03 persen), dan pada tahun 2021 mencapai 314,95 (17,43 persen), sedangkan pada tahun 2022 mencapai 290,66 ribu orang (16,05 persen) dan tahun 2023 mencapai 286,14 ribu atau 15,78 persen.

d. *Gini Ratio*

Indeks gini atau *Gini Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan dari *Gini Ratio* adalah untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah.

Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2023 *Gini Ratio* di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin dibandingkan *Gini Ratio* September 2022 (0,366). Angka *Gini Ratio* yang mengalami kenaikan menunjukkan ketimpangan/kesenjangan pengeluaran semakin naik. Secara lengkap perkembangan *Gini Ratio* di Jawa Tengah selama kurun waktu tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
 Perkembangan Tingkat Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah (Semesteran)

Wilayah	Tingkat Gini Ratio					
	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Provinsi Jawa Tengah	Maret	September	Maret	September	Maret	September



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Wilayah	Tingkat Gini Ratio					
	0.372	0.368	0.374	0.366	0.369	-

Sedangkan perkembangan *Gini Ratio* di Kabupaten Brebes selama kurun waktu tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan Tingkat Gini Ratio Kabupaten Brebes (per tahun)

Wilayah	Tingkat Gini Ratio		
Kab. Brebes	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	0.35	0.34	0.33

2. Kebijakan Keuangan

APBD Kabupaten Brebes TA 2023 sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2023 berpedoman pada:

- Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022;
- Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Prioritas Kegiatan Pembangunan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Brebes Tahun 2022;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes TA 2023;
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Brebes TA 2023.

a. Struktur APBD TA 2023

- Pendapatan Daerah.
 - PAD, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;
 - Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Belanja Daerah
 - Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
 - Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;.

- c) Belanja Tidak Terduga;
- d) Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Struktur Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - Pencairan dana cadangan
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Penerimaan pinjaman daerah
 - Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah
- b) Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
 - Pembentukan dana cadangan
 - Penyertaan modal daerah
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - Pemberian pinjaman daerah

b. Kebijakan Umum APBD TA 2023

Penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2023 didasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) APBD, PPAS dan PPA. Penyusunan KUA APBD TA 2023 didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan Renstra, sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran yang pada



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

Prinsip Penyusunan APBD :

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

c. Kondisi dan Kebijakan APBD TA 2023

1) Pendapatan Daerah

a) Estimasi pendapatan daerah

Pada TA 2023 dianggarkan pendapatan daerah sebesar Rp3.102.607.861.008,00 terdiri dari:

- (1) PAD dianggarkan sebesar Rp492.051.389.008,00
- (2) Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.597.056.472.000,00;
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00.

b) Kebijakan umum pendapatan daerah

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes TA 2023 diarahkan untuk memacu kegiatan, penggalian, pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan memiliki implikasi terhadap meningkatnya belanja daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

(1) Pajak Daerah

a. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya

b. Peningkatan *Law Enforcement*

Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

c. Intensifikasi Pajak Daerah

- 1) Optimalisasi sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
- 2) Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek Pajak.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.

d. Ekstensifikasi Pajak Daerah

- 1) Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah.
- 2) Melakukan perluasan basis Pajak Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Melakukan reklasifikasi obyek penerimaan pajak.
 - (2) Retribusi Daerah
 - a. Peningkatan kemudahan sistem pembayaran pelayanan retribusi daerah.
 - b. Peningkatan *Law Enforcement*.
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD.
 - b. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - (4) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Melakukan koordinasi untuk kelancaran pencairan Hibah.
- 2) Belanja Daerah
- a) Estimasi Belanja Daerah
Pada TA 2023 dianggarkan belanja daerah sebesar Rp3.150.908.123.881,00 yang terdiri dari:
 - (1) Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.254.932.460.655,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.212.909.035.077,00
 - (b) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp881.655.191.878,00.
 - (c) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp152.852.338.200,00.
 - (d) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp7.515.895.500,00.
 - (2) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp377.792.479.210,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00
 - (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp102.070.537.516,00.
 - (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp54.880.808.720,00.
 - (d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp195.433.440.723,00.
 - (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp20.842.303.895,00.
 - (f) Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.305.388.356,00.
 - (3) Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp6.195.500.000,00.
 - (4) Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp511.987.684.016,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (a) Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp23.688.091.416,00.
- (b) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp488.299.592.600,00.

b) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode TA yang bersangkutan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam Tahun Anggaran 2023 pemerintah daerah Kabupaten Brebes akan menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan public daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan mendorong OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023 secara umum disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib:
 - a) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
 - b) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- 2) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD :
 - a) Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah Ketanggungan ditargetkan akan dioperasionalkan pada Tahun 2023 sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di wilayah utara Brebes yaitu yang mencakup pelayanan Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Kersana, Banjarharjo, Ketanggungan dan Larangan. Pengadaan peralatan medis dan kesehatan serta biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Ketanggungan diperlukan untuk menunjang operasionalnya.
 - c) Tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tahun 2024. Oleh karena hal tersebut pada Tahun 2023 ini akan mulai disusun persiapan awal terkait masa peralihan dan persiapan pendanaan PILKADA serentak tahun 2024.
 - d) Mengalokasikan belanja Hibah kepada KPU, Bawaslu, serta instansi vertikal lain dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan Pemilu serentak dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan time schedule di masing-masing instansi/lembaga.
 - e) Melanjutkan pembangunan-pembangunan baik berupa infrastruktur maupun non-infrastruktur guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tertunda pada tahun sebelumnya yang diakibatkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - f) Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- g) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - h) Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijangar melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 - i) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- 3) Pemerintah Kabupaten Brebes juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi COVID-19, sebagai berikut :
- a) Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup;
 - c) Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pinjaman usaha mikro dengan bunga rendah, pelaksanaan program padat karya dan penyelenggaraan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga;
 - d) Pembukaan tempat-tempat wisata, hotel, restoran dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan;
 - e) Penerapan adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman COVID-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) Ketenteraman, (6) Ketertiban umum, (7) Perlindungan masyarakat sosial.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, bahwa kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu penyusunannya harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja (budgeting performance system) yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Selanjutnya belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan urgensi kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pengelolaan belanja diarahkan pada:

- a) Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penentuan alokasi belanja menggunakan pendekatan money follow program, sehingga dana-dana yang dialokasikan adalah berdasarkan rencana program dan kegiatan yang diusulkan masing-masing perangkat daerah.
- b) Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.
- c) Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d) Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
- e) Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
- f) Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
- g) Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.

3) Pembiayaan Daerah

a) Estimasi Pembiayaan Daerah

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Brebes merencanakan anggaran pembiayaan daerah surplus sebesar Rp48.300.262.873,00 yang meliputi rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp70.800.262.873,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp22.500.000.000,00.

b) Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah TA 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (1) Penganggaran SiLPA Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :
 - (a) pelampauan penerimaan PAD;
 - (b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - (c) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - (d) pelampauan penerimaan pembiayaan;
 - (e) penghematan belanja;
 - (f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - (g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
 - (2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- c) Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan pengeluaran pembiayaan daerah TA 2023 adalah sebagai berikut :
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- (4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- (5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- (6) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (7) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) *Mandatory Spending*

Pemerintah setiap tahun selalu menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu. Alokasi belanja ini dikenal dengan istilah *mandatory spending* yaitu belanja atau pengeluaran yang besarnya sudah diatur oleh UU. Untuk TA 2023 *mandatory spending* untuk APBD Kabupaten Brebes yaitu:

- (a) Bidang Pendidikan (20% dari APBD)
Mandatory spending urusan pendidikan telah terpenuhi sebesar 33,00% atau sebesar Rp1.042.614.598.949,00 dari total APBD 2023 Rp3.150.908.123.881,00.
- (b) Bidang Kesehatan (Minimal 10% dari APBD di luar gaji)
Mandatory spending urusan kesehatan telah terpenuhi sebesar 25,15% atau sebesar Rp587.455.399.459,00 dari total APBD 2023 di luar gaji yaitu sebesar Rp2.335.724.736.998,00.
- (c) Infrastruktur Daerah (diarahkan 25% dari DTU)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja infrastruktur daerah belum terpenuhi sebesar 22,29% atau sebesar Rp588.236.832.556,00 dari total DTU sebesar Rp1.055.568.175.946,00.

- (d) ADD (10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK)
Mandatory spending ADD sebesar 12,00% atau sebesar Rp130.066.273.600,00 dari total dana perimbangan setelah dikurangi DAK yaitu sebesar Rp1.314.115.962.000,00.
- (e) Pengawasan (Kabupaten 0,5%, 0,75% dan 1%)
Mandatory spending untuk pengawasan tercapai sebesar 0,49% atau sebesar Rp15.392.134.006,00 dari total APBD 2023 sebesar Rp3.150.908.123.881,00, sehingga belum memenuhi *mandatory spending*.

e. Program dan Kegiatan TA 2023

Belanja Daerah sebesar Rp3.150.908.123.881,00 dialokasikan untuk delapan urusan, yakni Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp1.993.869.735.152,00 terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.042.614.598.949,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp587.455.399.459,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dan RSUD Bumiayu;
 - c) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp274.067.570.692,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang,
 - d) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp61.593.688.508,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp17.874.616.976,00 dilaksanakan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp12.526.360.568,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp172.174.241.788,00 terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp4.992.314.017,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp8.310.200.105,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp17.506.107.400,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dianggarkan sebesar Rp2.262.500.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp19.356.287.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp23.925.490.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah;
- g) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil dianggarkan sebesar Rp8.674.525.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- h) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkan sebesar Rp9.553.441.100,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan dianggarkan sebesar Rp22.250.066.424,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan;
- j) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp8.113.258.036,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- k) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Statistik dianggarkan sebesar Rp50.606.500,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- l) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan sebesar Rp15.824.131.082,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- m) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp6.754.904.514,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- n) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp11.145.294.880,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- o) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp7.712.592.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- p) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp5.465.956.930,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- q) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan dianggarkan sebesar Rp276.566.800,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan dianggarkan sebesar Rp26.272.651.130,00 terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp9.130.307.515,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perikanan;
 - b) Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp545.002.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian dianggarkan sebesar Rp14.302.526.082,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp1.215.624.650,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan;
 - e) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp1.079.190.883,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp130.380.284.647,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Pendukung Urusan pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp63.081.658.900,00 dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) Unsur Pendukung Urusan pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp67.298.625.747,00 00 dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat DPRD.
- 5) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan dianggarkan sebesar Rp711.902.509.728,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp8.732.987.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Keuangan dianggarkan sebesar Rp600.909.136.958,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
- c) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp99.144.184.770,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
- d) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp1.938.701.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
- e) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp1.177.500.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 6) Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan dianggarkan sebesar Rp15.392.134.006,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Inspektorat dianggarkan sebesar Rp15.392.134.006,00 dilaksanakan oleh SKPD Inspektorat;
- 7) Unsur Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp60.328.791.430,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan dianggarkan sebesar Rp60.328.791.430,00 dilaksanakan oleh SKPD seluruh Kecamatan Kabupaten Brebes;
- 8) Unsur Pemerintahan Umum dianggarkan sebesar Rp40.587.776.000,00 terdiri atas:
 - a) Unsur pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp40.587.776.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Brebes telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp3.075.011.179.072,01 dari yang ditargetkan sebesar Rp3.102.607.861.008,00 atau 99,11 %,

Sedangkan realisasi belanja untuk TA 2023 sebesar Rp2.989.014.635.072,00 dari anggaran sebesar Rp3.150.908.123.881,00 atau 94,86%. Secara ringkas pencapaian target kinerja keuangan yang berkaitan dengan realisasi APBD selama TA 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Rekap Anggaran dan Realisasi APBD

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan	3.102.607.861.008,00	3.075.011.179.072,01	(27.596.681.935,99)	99,11%
	Pendapatan Asli Daerah	492.051.389.008,00	479.936.145.391,01	(12.115.243.616,99)	97,54%
	Pendapatan Transfer	2.597.056.472.000,00	2.580.519.687.681,00	(16.536.784.319,00)	99,36%
	Lain-lain pendapatan daerah yg Sah	13.500.000.000,00	14.555.346.000,00	1.055.346.000,00	107,82%
2	Belanja	3.150.908.123.881,00	2.989.014.635.072,00	(161.893.488.809,00)	94,86%



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
	Belanja Operasi	2.254.932.460.655,00	2.118.778.276.541,00	(136.154.184.114,00)	93,96%
	Belanja Modal	377.792.479.210,00	357.922.041.899,00	(19.870.437.311,00)	94,74%
	Belanja Tak Terduga	6.195.500.000,00	1.187.275.000,00	(5.008.225.000,00)	19,16%
	Belanja Transfer	511.987.684.016,00	511.127.041.632,00	(860.642.384,00)	99,83%
	Surplus / (Defisit)	(48.300.262.873,00)	85.996.544.000,01	134.296.806.873,01	178,05%
3	Pembiayaan Netto	48.300.262.873,00	48.304.272.811,43	4.009.938,43	100,01%
	Penerimaan Daerah	70.800.262.873,00	70.804.272.811,43	4.009.938,43	100,01%
	Pengeluaran Daerah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	-	100,00%
	SILPA	-	134.300.816.811,44	134.300.816.811,44	100,00%



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada empat urusan yaitu urusan wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari 10 SKPD, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 10 SKPD, Urusan Pilihan terdiri dari empat SKPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 25 SKPD.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan pendapatan sebesar Rp3.102.607.861.008,00 dan terealisasi sebesar Rp3.075.011.179.072,01 atau sebesar 99,11%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 yang sebesar Rp2.989.821.990.874,14, realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp85.189.188.197,87 atau sebesar 0,03% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan sebesar Rp3.150.908.123.881,00 dan terealisasi sebesar Rp2.989.014.635.072,00 atau sebesar 94,86%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 yang sebesar Rp3.091.285.559.556,00, realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp102.270.924.484,00 atau sebesar 3,31%. Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 dan 2022 beserta realisasinya dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	3.102.607.861.008,00	3.075.011.179.072,01	99,11%	2.989.821.990.874,14
2	Belanja Daerah	3.150.908.123.881,00	2.989.014.635.072,00	94,86%	3.091.285.559.556,00

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	300.000.000,00	295.715.000,00	98,57	116.225.000,00
2	DINAS KESEHATAN	101.499.704.700,00	105.717.357.719,00	104,16	95.881.316.968,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	130.438.000.000,00	131.059.567.686,01	100,48	107.095.974.770,14
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	26.090.716.500,00	24.053.985.263,00	92,19	27.035.116.011,00
5	DPU	250.000.000,00	185.150.000,00	74,06	176.765.000,00
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	39.825.000,00	79,65	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60.000.000,00	31.595.750,00	52,66	30.975.766,00
8	DINAS LH DAN PENGELOLAAN SAMPAH	1.050.000.000,00	461.135.541,00	43,92	283.985.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	2.652.000.000,00	2.299.536.000,00	86,71	2.274.225.500,00
10	DINAS KOMINFOTIK	275.000.000,00	336.413.100,00	122,33	403.770.973,00
11	DINAS KOPERASI UM DAN PERDAGANGAN	7.025.000.000,00	5.993.068.300,00	85,31	5.861.954.600,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL & PERIJINAN TERPADU	9.235.000.000,00	2.221.899.585,00	24,06	5.748.978.048,00
13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.191.200.000,00	1.713.154.200,00	78,18	1.992.056.850,00
14	DINAS PERIKANAN	728.200.000,00	717.759.611,00	98,57	524.169.505,00
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	675.024.500,00	291.881.500,00	43,24	273.238.000,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.500.000.000,00	1.217.389.800,00	81,16	912.685.400,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	965.000.000,00	1.047.715.480,00	108,57	855.773.040,00
18	BPKAD	2.634.773.015.308,00	2.617.512.562.112,00	99,34	2.590.033.511.083,00
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	182.850.000.000,00	179.815.467.425,00	98,34	150.321.269.360,00
	Jumlah	3.102.607.861.008,00	3.075.011.179.072,01	99,11	2.989.821.990.874,14

Anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.053.759.893.829,00	1.023.566.516.782,00	97,13	923.508.941.930,00
2	DINAS KESEHATAN	369.898.094.833,00	355.743.984.393,00	96,17	303.562.703.051,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	173.131.086.558,00	161.374.548.001,00	93,21	199.596.925.117,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	44.426.218.068,00	40.671.111.011,00	91,55	36.298.288.499,00
5	DPU	212.840.881.152,00	204.287.804.417,00	95,98	295.467.945.058,00
6	DINAS PENGELOLAAN SDA DAN PENATAAN RUANG	61.226.689.540,00	59.465.072.307,00	97,12	71.244.050.964,00
7	DINAS PERUM RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	61.593.688.508,00	59.969.360.882,00	97,36	32.845.019.074,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.478.383.213,00	10.138.747.346,00	96,76	7.881.556.263,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.396.233.763,00	6.971.489.703,00	94,26	6.554.813.303,00
10	DINAS SOSIAL	12.526.360.568,00	11.602.471.782,00	92,62	9.393.624.895,00
11	DINAS LH DAN PENGELOLAAN SAMPAH	23.925.490.000,00	23.236.352.179,00	97,12	22.165.327.983,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.674.525.000,00	8.099.805.965,00	93,37	8.615.722.987,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.553.441.100,00	8.728.079.791,00	91,36	6.782.993.689,00
14	DP3KB	24.348.601.017,00	23.860.243.162,00	97,99	19.606.880.625,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	22.250.066.424,00	21.171.911.724,00	95,15	16.786.170.752,00
16	DINAS KOMINFOTIK	8.163.864.536,00	8.092.585.829,00	99,13	8.380.844.785,00
17	DINAS KOPERASI UM DAN PERDAGANGAN	17.039.755.732,00	15.988.734.861,00	93,83	20.718.845.916,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PERIJINAN TERPADU	6.754.904.514,00	6.019.915.488,00	89,12	4.977.532.061,00
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8.257.594.000,00	7.728.057.376,00	93,59	7.430.333.269,00
20	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5.742.523.730,00	5.511.639.570,00	95,98	12.357.105.516,00
21	DINAS PERIKANAN	9.130.307.515,00	8.791.375.707,00	96,29	8.276.407.886,00
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	22.628.903.600,00	21.907.918.104,00	96,81	24.402.198.845,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.179.729.882,00	8.731.000.671,00	95,11	18.456.193.078,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9.389.390.988,00	8.602.000.772,00	91,61	7.583.550.894,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	63.081.658.900,00	57.664.842.085,00	91,41	57.402.301.084,00
26	INSPEKTORAT	15.392.134.006,00	14.468.435.190,00	94,00	10.692.791.559,00
27	BAPERLITBANGDA	9.910.487.000,00	9.544.497.644,00	96,31	8.350.643.481,00
28	BPKAD	582.053.680.223,00	574.010.328.446,00	98,62	714.767.941.404,00
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	18.855.456.735,00	17.969.236.751,00	95,30	18.375.705.001,00
30	BKPSDMD	101.082.885.770,00	46.736.229.859,00	46,24	79.066.034.389,00
31	SEKRETARIAT DPRD	67.298.625.747,00	64.151.121.981,00	95,32	59.177.587.604,00
32	KECAMATAN BREBES	12.535.402.541,00	11.559.808.254,00	92,22	12.107.930.855,00
33	KECAMATAN JATIBARANG	3.298.094.000,00	3.006.645.484,00	91,16	3.133.129.082,00
34	KECAMATAN WANASARI	3.080.211.000,00	2.897.839.215,00	94,08	2.783.542.384,00
35	KECAMATAN SONGGOM	2.745.823.045,00	2.434.395.094,00	88,66	2.508.677.071,00
36	KECAMATAN BULAKAMBA	2.863.768.005,00	2.617.415.973,00	91,40	2.552.236.643,00
37	KECAMATAN TANJUNG	3.040.835.436,00	2.698.737.264,00	88,75	2.431.217.755,00
38	KECAMATAN LOSARI	3.206.617.000,00	2.612.721.892,00	81,48	3.327.351.096,00
39	KECAMATAN KERSANA	2.825.061.820,00	2.442.126.822,00	86,45	3.578.548.782,00
40	KECAMATAN KETANGGUNGAN	3.247.895.000,00	2.699.841.620,00	83,13	2.962.016.590,00
41	KECAMATAN BANJARHARJO	2.546.116.989,00	2.405.519.802,00	94,48	2.258.110.928,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
42	KECAMATAN LARANGAN	2.644.087.000,00	2.473.933.264,00	93,56	2.664.909.015,00
43	KECAMATAN TONJONG	3.352.741.109,00	3.161.095.343,00	94,28	3.002.946.625,00
44	KECAMATAN BUMIAYU	3.248.535.000,00	3.011.336.844,00	92,70	3.077.029.894,00
45	KECAMATAN PAGUYANGAN	3.067.401.000,00	2.990.126.690,00	97,48	3.094.787.239,00
46	KECAMATAN SIRAMPOG	2.842.973.297,00	2.740.100.629,00	96,38	2.565.762.413,00
47	KECAMATAN BANTARKAWUNG	2.787.974.430,00	2.717.732.521,00	97,48	2.865.430.729,00
48	KECAMATAN SALEM	2.995.254.758,00	2.844.698.488,00	94,97	3.286.920.949,00
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.587.776.000,00	38.895.140.094,00	95,83	12.358.030.544,00
	JUMLAH	3.150.908.123.881,00	2.989.014.635.072,00	94,86	3.091.285.559.556,00

2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- b. Berkurangnya alokasi dana perimbangan terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapat asli daerah belum tergali secara optimal.
- d. Belum optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.
- e. Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, khususnya PAD.
- f. Kurang optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berdampak belum tergalinya sumber-sumber pendapatan disebabkan sarana prasarana yang kurang memadai.
- g. Kurang akuratnya basis data pendapatan, khususnya PAD pada unit-unit kerja pengelola pendapatan yang berdampak kurang optimalnya pencapaian target pendapatan.

Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya adalah :

- a. Program dan kegiatan yang tertuang dalam prioritas kegiatan pembangunan setiap tahun belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan karena alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas dan belum memenuhi yang diharapkan.
- b. Dana bantuan baik dari provinsi maupun pusat (DAU dan DAK) yang telah terprogram untuk biaya kegiatan daerah seringkali mengalami perubahan.
- c. Kebutuhan belanja daerah yang diajukan oleh perangkat daerah belum seluruhnya dapat dialokasikan dalam APBD TA 2023 karena keterbatasan pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan yaitu:

- a. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
- c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran. Antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Entitas Akuntansi

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan entitas dibedakan menjadi dua yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 yaitu basis akrual. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten perlu menyajikan kembali Neraca tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD atau dikeluarkan oleh SKPD.

3. Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

a. Pengakuan Aset

Pengakuan Kas dan Setara Kas



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Secara umum pengakuan aset dilakukan :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Atas dasar butir b. tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 - b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/-mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengakuan Persediaan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengembangannya berpindah.

Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - a) Dividen Tunai;
 - b) Dividen Saham; dan
 - c) Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengakuan Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat :
 - a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat :
- Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 6) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

b. Pengakuan Kewajiban

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

- 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

c. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

d. Pengakuan Pendapatan LRA



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- e. Pengakuan Belanja
Belanja diakui pada saat :
 - 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- f. Pengakuan Transfer
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

g. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

h. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

i. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

j. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- 2) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- 3) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Contoh : Penerimaan kas atas pendapatan dengan metode *self assessment*, Penerimaan kas yang tidak diterbitkan dokumen penetapannya.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada akhir periode akuntansi, dengan alasan :
 - a) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - b) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

Pendapatan-LO dapat diakui pada akhir periode akuntansi apabila timbulnya hak atas pendapatan terjadi pada saat :

- a) Sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

- k. Pengakuan Beban

- 1) Beban diakui pada :
 - a) Saat timbulnya kewajiban;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
 - 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 - 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
 - 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - 9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan penyesuaian.
 - 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 12) Belanja barang yang mempengaruhi perhitungan Beban Persediaan adalah :
 - a) Belanja Barang
 - b) Belanja Barang BOS
 - c) Belanja Barang BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Persediaan
- 13) Barang Persediaan apabila dibelanjakan dengan belanja jasa/pemeliharaan maka dicatat sebagai Beban Persediaan dan mengurangi Beban Jasa/Beban Pemeliharaan yang bersangkutan.
- 14) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Jasa adalah :
 - a) Belanja Jasa
 - b) Belanja Jasa BOS
 - c) Belanja Jasa BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Jasa
- 15) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Pemeliharaan adalah :
 - a) Belanja Pemeliharaan
 - b) Belanja Pemeliharaan BOS
 - c) Belanja Pemeliharaan BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Pemeliharaan
- 16) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Perjalanan Dinas adalah :
 - a) Belanja Perjalanan Dinas
 - b) Belanja Perjalanan Dinas BOS
 - c) Belanja Perjalanan Dinas BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Perjalanan Dinas
- 17) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b) Beban Persediaan, selain Persediaan yang diadakan oleh Pemkab Brebes, Persediaan yang diperoleh dari hibah dicatat sebagai Beban Persediaan ketika Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban persediaan.
 - c) Beban Persediaan BLUD atas penggunaan barang yang bersumber dari



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dana BLUD.

- d) Beban Persediaan BOS atas penggunaan barang yang bersumber dari dana BOS.
- e) Beban Jasa dan Beban Pemeliharaan, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- f) Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BLUD.
- g) Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BOS.
- h) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.
- j) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- k) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- l) Beban yang mempengaruhi perhitungan Beban Dibayar di Muka.

4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

c. Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang ditentukan sebagai berikut :

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Pengukuran piutang transfer
 - a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima;
 - c) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi dan selain objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
 - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Denda Pajak/Retribusi dan Denda Non Pajak/Non Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo;
 - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 9) Kualitas piutang pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun
 - b) Kualitas Kurang, Lancar apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lbih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun
 - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 10) Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, apabila mempunyai umur piutang pajak 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - c) Kualitas Diragukan, apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - d) Kualitas Piutang Macet apabila:
 - mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan hasil pemutakhiran data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang pada tanggal laporan keuangan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar belum diterbitkan.
 - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 11) **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih** ditetapkan:
- a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
- 12) Penyisihan piutang tidak tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Piutang Bukan Pajak Khusus Objek Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2.	Piutang dengan Umur di atas 1-2 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 tahun	Diragukan	50 %
4.	Piutang dengan Umur di atas 3 tahun	Macet	100 %

Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2	Piutang dengan umur di atas 1-2 tahun	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang dengan umur di atas 2-3 tahun	Diragukan	50 %
4	Piutang dengan umur di atas 3 Tahun	Macet	100 %

Piutang Denda Pajak/Retribusi dan Denda Non Pajak/Non Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang belum jatuh tempo	Lancar	0,5 %
2	Piutang 0-1 tahun sejak jatuh tempo	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang di atas 1-2 tahun sejak jatuh tempo	Diragukan	50 %
4	Piutang di atas 2 tahun sejak jatuh tempo	Macet	100 %

Piutang Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2	Piutang dengan umur di atas 1-3 tahun	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang dengan umur di atas 3-5 tahun	Diragukan	50 %
4	Piutang dengan umur di atas 5 Tahun	Macet	100 %

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
-----	--------------	------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2.	Piutang dengan umur di atas 1-3 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	Piutang dengan umur di atas 3-5 tahun	Diragukan	50 %
4.	Piutang dengan umur di atas 5 tahun	Macet	100 %

- 13) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan umur piutangnya.
- 14) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. Pengukuran Beban Dibayar di Muka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan

e. Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan adalah *First In First Out* (FIFO). Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan penggunaan/pengeluaran, sehingga didapatkan saldo akhir persediaan, selanjutnya dikalikan nilai per unit.

Metode penyajian persediaan adalah sebagai berikut :

1) Disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian. biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Disajikan sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Disajikan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

- 4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

f. Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

g. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Jangka Panjang

- a) Pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b) Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut:
- a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) Investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*).

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

h. Pengukuran Aset Tetap

Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan di luar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.
- 3) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB,



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- 4) Batasan minimal kapitalisasi penambahan aset tetap (*capitalization thresholds*) setelah perolehan ditetapkan sebagai berikut:

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 300.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp. 10.000.000,00
	- Irigasi	Rp. 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp. 300.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya :	
	- Barang bercorak kesenian	Rp. 300.000,00
	- Hewan/Ternak/Tumbuhan	Tidak dibatasi
	- Buku dan Kepustakaan	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

i. Penyukuran Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat (dalam tahunan)}}$$

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana tercantum pada **Lampiran 4.1.**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bercorak Kesenian yaitu : barang bersejarah, tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokumen dan sejenisnya. selain itu Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman juga tidak disusutkan.

Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian yaitu : barang bersejarah, tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokumen, Buku-buku Perpustakaan, Hewan dan Ternak serta Tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dilakukan validasi untuk mengetahui yang rusak untuk dihapuskan.

Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik dan Barang Kerajinan **disusutkan** sesuai dengan ketentuan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap suatu aset tetap berupa renovasi/overhaul tidak diperkenankan melebihi masa manfaat aset tersebut.

Penambahan masa manfaat aset tetap atas *overhaul* dan renovasi disajikan pada **Lampiran 4.2.**

j. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 4) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- tempat lokasi pekerjaan
- (d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 5) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- (a) Asuransi;
 - (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 6) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- k. Properti Investasi

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 4) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - (a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - (b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- 5) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 6) Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- 7) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifkasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 8) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- 9) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:
 - (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 - (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- 10) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - (a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - (b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - (c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- 11) Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tan pa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- 12) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - (a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - (b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 13) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

- 14) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 15) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan.
- 16) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi
- 17) Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 18) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 19) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- 20) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 21) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 22) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- 23) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- 24) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, penentuan harga mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - (a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

25) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

l. Pengukuran Dana Cadangan

Pengukuran Dana Cadangan sebagai berikut:

- 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

m. Pengukuran Aset Lainnya

Pengukuran Aset Lainnya sebagai berikut:

- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- 2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diukur berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 3) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Diukur sebesar nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset yang diserahkan atau diterima oleh Pemerintah dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih atau nilai wajar yang tercatat pada saat perjanjian atau pada saat penerimaan aset. dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) diukur dengan harga perolehannya yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

6) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

7) Amortisasi Aset Lainnya

- (a) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5 tahun.
- (b) Pengukuran nilai amortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- (c) Masa manfaat amortisasi atas Aset Tidak Berwujud selain software dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

n. Pengukuran Kewajiban

Pengukuran kewajiban diklasifikasikan menjadi:

1) Kewajiban jangka pendek, meliputi:

a) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Kewajiban ini dicantumkan sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

c) Utang jangka pendek lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3) Bagian lancar utang jangka panjang

Kewajiban ini diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

4) Pendapatan Diterima di Muka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

5) Utang Beban

Kewajiban ini diukur sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

6) Kewajiban Jangka Panjang. merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi:

a) Utang dalam negeri

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk kewajiban ini adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Utang luar negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

c) Utang jangka panjang lainnya

Kewajiban ini diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan sebesar nilai yang belum dibayar.

o. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

p. Pengukuran Pendapatan-LRA

Semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD atau diterima oleh SKPD. Pendapatan ini meliputi :

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran (STS).

2) Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Diukur sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

q. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

r. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk kepentingan penyusunan LRA transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah, sedangkan beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

s. Pengukuran Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

t. Pengukuran Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

u. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5) Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Koreksi Kesalahan.

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan Tidak Berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun SAL
 - (2) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 - (3) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan pengurangan beban, mempengaruhi posisi kas namun tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Hal ini dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO.
 - (4) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - (5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (7) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- (8) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

b. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

6) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes TA 2023 telah menyajikan properti investasi mendasari pada Peraturan Menteri Keuangan no. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun Perubahan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Brebes yang mengatur penyajian Properti Investasi Kabupaten Brebes masih dalam proses penetapan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Brebes TA 2023 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun kodifikasi dan klasifikasi akun pada laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta telah disesuaikan dengan Perbup Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

Secara rinci penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah Kabupaten Brebes TA 2023 adalah sebagai berikut.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.075.011.179.072,01	2.989.821.990.874,14

Realisasi pendapatan TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Pendapatan-LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	PAD	492.051.389.008,00	479.936.145.391,01	97,54	419.395.415.995,14
2	Pendapatan Transfer	2.597.056.472.000,00	2.580.519.687.681,00	99,36	2.557.214.656.274,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.500.000.000,00	14.555.346.000,00	107,82	13.211.918.605,00
	Jumlah	3.102.607.861.008,00	3.075.011.179.072,01	99,11	2.989.821.990.874,14

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.102.607.861.008,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.075.011.179.072,01 atau sebesar 99,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp2.989.821.990.874,14 realisasi pada



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp85.189.188.197,87 atau sebesar 0,03%.

SKPD yang mengelola pendapatan daerah TA 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Pendapatan-LRA per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	300.000.000,00	295.715.000,00	98,57
2	DINAS KESEHATAN	101.499.704.700,00	105.717.357.719,00	104,16
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	130.438.000.000,00	131.059.567.686,01	100,48
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	26.090.716.500,00	24.053.985.263,00	92,19
5	DPU	250.000.000,00	185.150.000,00	74,06
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	39.825.000,00	79,65
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60.000.000,00	31.595.750,00	52,66
8	DINAS LH DAN PENGELOLAAN SAMPAH	1.050.000.000,00	461.135.541,00	43,92
9	DINAS PERHUBUNGAN	2.652.000.000,00	2.299.536.000,00	86,71
10	DINAS KOMINFOTIK	275.000.000,00	336.413.100,00	122,33
11	DINAS KOPERASI UM DAN PERDAGANGAN	7.025.000.000,00	5.993.068.300,00	85,31
12	DINAS PENANAMAN MODAL & PERIJINAN TERPADU	9.235.000.000,00	2.221.899.585,00	24,06
13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.191.200.000,00	1.713.154.200,00	78,18
14	DINAS PERIKANAN	728.200.000,00	717.759.611,00	98,57
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	675.024.500,00	291.881.500,00	43,24
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.500.000.000,00	1.217.389.800,00	81,16
17	SEKRETARIAT DAERAH	965.000.000,00	1.047.715.480,00	108,57
18	BPKAD	2.634.773.015.308,00	2.617.512.562.112,00	99,34
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	182.850.000.000,00	179.815.467.425,00	98,34
	JUMLAH	3.102.607.861.008,00	3.075.011.179.072,01	99,11

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, dan PAD lainnya yang sah.

Realisasi pendapatan asli daerah TA 2023 adalah sebesar Rp479.936.145.391,01 atau 97,54% dari anggaran sebesar Rp492.051.389.008,00. Realisasi PAD TA 2023 dan 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3
PAD

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pajak Daerah	182.850.000.000,00	179.815.467.425,00	98,34	150.321.269.360,00
2	Retribusi Daerah	27.675.424.500,00	18.490.738.080,00	66,81	19.577.537.040,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.176.082.128,00	12.681.024.043,00	113,47	10.978.000.615,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	270.349.882.380,00	268.948.915.843,01	99,48	238.518.608.980,14
	Jumlah	492.051.389.008,00	479.936.145.391,01	97,54	419.395.415.995,14

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah di Kabupaten Brebes berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada TA 2023 sebesar Rp179.815.467.425,00 atau sebesar 98,34% dari anggaran Rp182.850.000.000,00. Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Pendapatan Pajak Daerah				
1	Pajak Hotel	550.000.000,00	568.617.536,00	103,39	404.695.532,00
2	Pajak Restoran	7.000.000.000,00	6.839.408.823,00	97,71	5.443.995.193,00
3	Pajak Hiburan	500.000.000,00	506.850.680,00	101,37	315.932.383,00
4	Pajak Reklame	4.200.000.000,00	4.086.338.840,00	97,29	3.613.868.752,00
5	Pajak Penerangan Jalan	69.000.000.000,00	69.634.476.123,00	100,92	64.410.760.959,00
6	Pajak Parkir	600.000.000,00	527.671.946,00	87,95	399.207.377,00
7	Pajak Air Tanah	950.000.000,00	1.027.815.270,00	108,19	855.445.319,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.050.000.000,00	1.468.066.365,00	29,07	275.168.846,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	55.000.000.000,00	54.692.342.726,00	99,44	46.069.087.532,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40.000.000.000,00	40.463.879.116,00	101,16	28.533.107.467,00
	Jumlah	182.850.000.000,00	179.815.467.425,00	98,34	150.321.269.360,00

- a. Pajak Parkir yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 realisasinya sebesar Rp527.671.946,00 atau 87,95%, tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan tingkat kunjungan ke lokasi yang memiliki lahan parkir sebagai objek pajak mengalami penurunan;
- b. Realisasi untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan:
 - 3) penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan pada dokumen rencana penambangan masing masing wajib pajak lima



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

tahunan, namun realisasi kadang tidak sejalan dengan apa yang menjadi target rencana penambangan, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya berkurangnya permintaan pasar, faktor cuaca dan faktor kebijakan internal wajib pajak.

- 4) Untuk penambangan PT. Indocement tidak beroperasi secara maksimal dikarenakan masih berfokus penambangan di wilayah perbatasan Kabupaten Tegal.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah di Kabupaten Brebes adalah berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada TA 2023 sebesar Rp18.490.738.080,00 atau sebesar 66,81% dari anggaran Rp27.675.424.500,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2023 dan 2022 dengan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5
Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Retribusi Daerah				
1	Retribusi Jasa Umum	5.054.000.000,00	4.369.666.502,00	86,46	3.423.947.066,00
2	Retribusi Jasa Usaha	12.011.424.500,00	10.705.780.093,00	89,13	9.555.888.776,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	10.610.000.000,00	3.415.291.485,00	32,19	6.597.701.198,00
	Jumlah	27.675.424.500,00	18.490.738.080,00	66,81	19.577.537.040,00

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.054.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp4.369.666.502,00 atau sebesar 86,46%. Realisasi pendapatan retribusi jasa umum TA 2023 dan 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.6
Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
----	--------	-----------------------	------------------------	---	------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan		1.234.420.111,00	112,84	538.048.800,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.094.000.000,00	461.135.541,00	43,92	283.985.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.050.000.000,00	1.352.295.000,00	90,15	1.241.532.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	837.799.000,00	83,78	917.726.500,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	31.595.750,00	52,66	30.975.766,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	116.008.000,00	154,68	107.971.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000,00	336.413.100,00	122,33	303.708.000,00
	Jumlah	275.000.000,00	4.369.666.502,00	86,46	3.423.947.066,00

- (a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00 realisasinya sebesar Rp461.135.541,00 atau 43,92%, realisasi ini kurang dari target yang dianggarkan dapat dijelaskan sebagai berikut : target pendapatan di awal tahun 2023 adalah sebesar Rp250.000.000,00, kemudian seiring berjalannya waktu dan dalam rangka mengoptimalkan potensi PAD Kab. Brebes, maka dilakukan MOU antara DLH dan PDAM terkait penarikan retribusi sampah yang digabungkan dengan tagihan PDAM, kemudian disusunlah Perbup sebagai payung hukum atas pemberlakuan tagihan PDAM yang sudah termasuk tagihan Retribusi Sampah. Perbup tersebut disahkan pada bulan Oktober 2023, sehingga pada APBD Perubahan 2023 yang disahkan pada bulan Oktober 2023 target Pendapatan DLH yang semula sebesar Rp250.000.000,00 dinaikkan menjadi sebesar Rp1.050.000.000,00 namun dari bulan Oktober s/d Desember 2023, pelaksanaan penarikan tagihan Retribusi Sampah yang digabungkan dengan Tagihan PDAM belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih adanya penolakan dari unsur perwakilan masyarakat yang tergabung dalam wadah FORPAMBES (Forum Pelanggan Air Minum Brebes) terkait pemberlakuan Perbup tersebut. Sehingga Pelaksanaan teknis penarikan Retribusi Persampahan yang digabungkan dengan tagihan PDAM belum bisa dilaksanakan, yang berakibat pula pada tidak tercapainya realisasi pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan.
- (b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasinya sebesar Rp1.352.295.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 90,15%, retribusi ini belum sepenuhnya mencapai target yang dianggarkan karena kurangnya sarana dan fasilitas parkir, seperti rambu dan marka parkir serta kelengkapan petugas parkir sehingga menyebabkan tidak terjaringnya semua obyek parkir secara optimal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp837.799.000,00 atau 83,78%, retribusi ini tidak mencapai target yang dianggarkan dikarenakan kurangnya penegakan hukum terhadap kendaraan umum penumpang dan barang akan uji kendaraan, menyebabkan kurangnya kesadaran wajib uji untuk mengujikan kendaraannya.
- (d) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terealisasi sebesar Rp31.595.750,00 masih kurang dari target anggaran sebesar Rp60.000.000,00 atau 52,66%, hal ini dikarenakan perusahaan membutuhkan SKK (Sertifikat Keselamatan Kebakaran) bila mana ada audit dari buyer/pembeli yang menuntut adanya jaminan keselamatan kebakaran, selama tidak ada tuntutan buyer, SKK bagi mereka dianggap tidak terlalu serius/penting. Disamping karena hal tersebut, juga karena retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran masih jenis retribusi baru dan baru berjalan satu tahun sehingga masih memerlukan waktu untuk sosialisasi agar pelaku usaha sadar akan pentingnya proteksi kebakaran.
- (2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada TA 2023 adalah sebesar Rp12.011.424.500,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp10.705.780.093,00 atau sebesar 89,13%. Realisasi pendapatan retribusi jasa usaha TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.7
Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.175.570.000,00	1.969.186.482,00	167,51	891.874.271,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.999.990.000,00	5.935.890.800,00	84,80	5.804.873.600,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	583.200.000,00	608.489.611,00	104,34	434.244.055,00
4	Retribusi Terminal	150.000.000,00	107.424.000,00	71,62	112.945.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	475.000.000,00	501.025.900,00	105,48	450.000.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	583.464.500,00	187.451.000,00	32,13	179.643.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000,00	2.018.000,00	100,90	2.022.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.016.200.000,00	1.368.294.300,00	67,87	1.658.281.850,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	22.005.000,00
	Jumlah	12.011.424.500,00	10.705.780.093,00	89,13	9.555.888.776,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh beberapa SKPD yaitu BPKAD, DPU, Setda, DPMPTSP, Dinkominfotik dan DPKH. Adapun rincian realisasi pendapatan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.8
Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	BPKAD - Retribusi Penyewaan Tanah	400.000.000,00	1.383.068.162,00	345,77
2	DPU - Retribusi Pemakaian Alat	250.000.000,00	185.150.000,00	74,06
3	DINPERWASKIM - Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00	39.825.000,00	79,65
4	SETDA-Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	335.000.000,00	317.545.420,00	94,79
5	DPMPTSP-Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	125.000.000,00	23.997.900,00	19,20
6	DPKH-Retribusi Penyewaan Bangunan	15.570.000,00	19.600.000,00	125,88
	Jumlah	1.175.570.000,00	1.969.186.482,00	167,51

- (a) Pada BPKAD, retribusi penyewaan tanah dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.383.068.162,00 atau 345,77%, realisasinya melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya penambahan realisasi dari sewa ruko di 5 wilayah/tempat yaitu ruko pasar bawang lama Pebatan, pasar bawang Klampok, pasar Ketanggungan, pasar Jatibarang dan ruko eks terminal Bumiayu yang mulai diterima pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, dimana tanah/ruko-ruko tersebut sebelumnya dikelola oleh PT. Marianaguna Ekacipta Persada selama 30 tahun dan menurut perjanjian kerjasamanya berakhir pada tahun 2023.
- (b) Pada DPU, retribusi pemakaian alat, penerimaan ini berupa penyewaan truk dan alat-alat berat, dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 realisasinya sebesar Rp185.150.000,00 atau 74,06%, realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan:
- Alat tidak digunakan untuk disewakan tetapi digunakan untuk kepentingan dinas (bencana dan permintaan bantuan dari pihak desa yang bersifat sosial)
 - Pihak ketiga atau rekanan yang biasa menyewa sudah memiliki alat berat sendiri
- (c) Pada Dinperwaskim, retribusi penyewaan bangunan merupakan penerimaan dari sewa rumah susun yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 realisasinya sebesar Rp39.825.000,00 atau 79,65% dikarenakan dari 43 kamar yang tersedia tidak semua kamar ter huni.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (d) Pada Setda, retribusi penyewaan tanah dan bangunan merupakan penerimaan dari sewa rumah dinas, sewa kantin/kios KPT (Kantor Pemerintahan Terpadu) dan penerimaan dari sewa gedung islamic centre dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00 realisasinya sebesar Rp317.545.420,00 atau 94,79%, realisasinya masih kurang dari yang dianggarkan karena untuk penerimaan dari sewa gedung islamic centre belum memenuhi target dikarenakan masih belum banyak masyarakat yang menyewa/menggunakannya.
- (e) Pada DPMPTSP, retribusi penyewaan tanah dan bangunan yaitu berupa sewa tempat/lokasi untuk pemasangan reklame, dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 realisasinya sebesar Rp23.997.900,00 atau 19,20%, realisasi penerimaan ini tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sewa tanah reklame tahun 2023 hanya dikenakan untuk jalan kewenangan Kabupaten, untuk jalan kewenangan Propinsi dan Nasional tidak ditarik retribusi karena pengenaan biaya retribusi sesuai kewenangan.
- (f) Pada DPKH, retribusi penyewaan bangunan dianggarkan sebesar Rp15.570.000,00 realisasinya sebesar Rp19.600.000,00 atau 125,88%. Penerimaan ini diterima dari hasil sewa bangunan kawasan itik di Desa Limbangan Kecamatan Brebes.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikelola oleh Dinkopumdag dan DPKH dianggarkan sebesar Rp6.999.990.000,00 realisasinya sebesar Rp5.935.890.800,00 atau 84,80%. Pada DPKH dianggarkan sebesar Rp49.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.830.500,00 atau 117,68%. Sedangkan pada Dinkopumdag dianggarkan sebesar Rp6.950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.877.060.300,00 atau 84,56% realisasinya kurang dari yang dianggarkan dikarenakan :
- Banyaknya masyarakat/pembeli yang memanfaatkan belanja lewat online (banyak pedagang gulung tikar dan memilih untuk tutup)
 - Sejalan musim kemarau panjang dan gagal panen membuat daya beli masyarakat berkurang
 - Tidak masuknya pendapatan dari ijin penempatan kios/loos ke kas daerah karena adanya regulasi baru.
 - Hampir semua pasar se Kabupaten Brebes perlu adanya rehab total (fasilitas, sarana prasarana yang ada di pasar kurang mendukung dalam persaingan di era globalisasi/ modern, pasar tradisional kalah saing)
 - Terbatasnya anggaran pemeliharaan pasar sehingga banyak fasilitas pasar yang sudah tidak layak yang perlu diperbaiki namun anggaran tidak mencukupi yang mengakibatkan pembeli memilih belanja di toko-toko modern/grosir/on line.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

c. Retribusi Terminal

Retribusi terminal yang dikelola oleh Dinhub dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 realisasinya sebesar Rp107.424.000,00 atau 71,62%, realisasi ini kurang dari target yang dianggarkan dikarenakan semakin berkurangnya jumlah angkutan pedesaan dan angkutan AKDP yang beroperasi, otomatis semakin berkurang juga pendapatan retribusi terminal.

d. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh DPKH dianggarkan sebesar Rp583.464.500,00 realisasinya sebesar Rp187.451.000,00 atau hanya 32,13% dikarenakan adanya penambahan target retribusi sebesar 400 juta yang direncanakan akan dipenuhi dari retribusi Rumah Potong Unggas (RPU) di Limbangan Wetan. RPU ini direncanakan akan dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), namun sampai dengan saat ini belum ada calon pengguna RPU padahal proses lelang sudah dilakukan 2 kali akan tetapi belum ada yang mendaftarkan lelang sehingga sampai dengan berakhirnya tahun 2023 retribusi rumah potong hewan dari RPU tidak mencapai target yang dianggarkan.

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikelola oleh Dindikpora dan Dinbudpar dengan anggaran sebesar Rp2.016.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.368.294.300,00 atau 67,87%. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Dindikpora dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp156.166.000,00 atau 52,06%, realisasinya tidak tercapai dikarenakan banyak persaingan kolam renang yg lebih bagus dengan fasilitas yg lebih memadai sehingga berdampak akan mengurangi pengunjung yang datang di kolam renang GOR milik Pemkab Brebes.

Sedangkan pada Dinbudpar retribusi tempat rekreasi yang dianggarkan sebesar Rp1.716.200.000,00 terealisasi sebesar Rp1.212.128.300,00 atau hanya mencapai 70,63% dikarenakan terjadi penurunan pengunjung yang signifikan disebabkan beberapa hal yaitu :

- mobilisasi informasi cuaca ekstrem di medsos
- banyaknya fasilitas DTW yg rusak seperti MCK, bak penampungan air dan juga adanya sampah (di pantai Randusanga).
- akses jalan menuju obyek wisata banyak yang rusak dan tidak diperbaiki
- adanya kerusakan daya tarik utama seperti berkurangnya debit air di wisata pemandian, jembatan dan traking akibat longsor yang belum ditangani, atau sudah ditangani namun belum optimal
- pengaruh medsos dan pertumbuhan kompetitor DTW sekitar sumber retribusi

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebesar Rp10.610.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.415.291.485,00 atau sebesar 32,19%. Realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu TA 2023 dan 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000,00	900.000,00	9,00	4.200.000,00
3	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	-	-	-	-
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.500.000.000,00	1.217.389.800,00	81,16	912.685.400,00
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	9.100.000.000,00	2.197.001.685,00	24,14	5.680.815.798,00
	Jumlah	10.610.000.000,00	3.415.291.485,00	32,19	6.597.701.198,00

- a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 realisasinya sebesar Rp900.000,00 atau 9,00%, realisasi penerimaan ini kurang dari target yang dianggarkan dikarenakan untuk retribusi trayek sudah tidak diatur dalam Perda retribusi Kabupaten Brebes menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya, dengan kata lain izin trayek non retribusi.
- b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.217.389.800,00 atau 81,16%, realisasi retribusi ini belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan untuk tahun 2023 sebanyak kurang lebih 25 TKA masuk dalam status Exit Permitt Only (EPO) / resign atau apabila asumsi kurs dollar retribusi sebesar Rp18.000.00 per TKA maka dapat disimpulkan retribusi loss yaitu Rp450 juta. Adapun kriteria EPO yang dimaksud yaitu :
 - Kebijakan perusahaan yg sdh tidak lagi menggunakan TKA
 - TKA resign atas keinginan pribadi
 - TKA yang diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan Kinerja
 - Pengembangan jaringan perusahaan yang artinya menjadi beda penjamin
 - Perubahan management di perusahaan
 - Perusahaan yang tidak patuh pada peraturan retribusi daerah
- c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dianggarkan sebesar Rp9.100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp2.197.001.685,00 atau 24,14%,



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang dianggarkan dikarenakan untuk pengajuan/permohonan PBG memersyaratkan perizinan dasar berupa KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan persetujuan lingkungan untuk usaha besar (non UMK) menjadi kewenangan pusat. Dalam proses pengajuan perizinan tersebut membutuhkan waktu bertahun - tahun karena menunggu antrian seluruh indonesia yang hanya ditangani oleh pemerintah pusat, pada akhirnya menghambat proses penerbitan PBG sehingga retribusi yang terealisasi pun belum sesuai dengan yang ditargetkan.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini direncanakan dari deviden Bank Jateng, PD BPR-BKK Banjarharjo dan BPR Bank Brebes yang dianggarkan sebesar Rp11.176.082.128,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp12.681.024.043,00 atau 113,47%. Merupakan penerimaan deviden dari Bank Jateng sebesar Rp11.782.900.244,00, deviden dari PT BPR BKK Banjarharjo sebesar Rp508.510.419,00 dan deviden dari Perumda BPR Bank Brebes sebesar Rp389.612.380,00.

Anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.176.082.128,00	12.681.024.043,00	113,47	10.978.000.615,00
	Jumlah	11.176.082.128,00	12.681.024.043,00	113,47	10.978.000.615,00

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2023 sebesar Rp268.948.915.843,01 atau sebesar 99,48% dari anggaran Rp270.349.882.380,00. Lain-lain PAD yang sah TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.11
Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				-
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	345.000.000,00	1.065.255.075,00	308,77	2.023.911.450,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	95.540.245,00	-	100,00	134.819.446,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	630.000.000,00	730.170.060,00	115,90	706.314.960,00
4	Jasa Giro Kas Daerah	7.517.249.908,00	1.614.681.807,00	21,48	2.060.898.734,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	1.215.927,00	100,00	-
6	Pendapatan Bunga	4.827.671.027,00	1.624.480.487,00	33,65	1.090.567.791,00
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	54.200.000,00	100,00	34.816.000,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	737.502.887,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	-	12.488.757,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	-	3.275.454.407,00	100,00	2.232.230.006,00
11	Pendapatan BLUD	256.934.421.200,00	259.596.490.557,01	101,04	229.479.058.949,14
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	986.967.523,00	100,00	6.000.000,00
	Jumlah	270.349.882.380,00	268.948.915.843,01	99,48	238.518.608.980,14

Rincian dari masing-masing realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Hasil penjualan dari Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.065.255.075,00 atau 308,77% dari anggaran sebesar Rp345.000.000,00, merupakan penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat, penjualan alat berat serta penjualan barang bekas bangunan. Adapun hasil penjualan dari aset daerah yang tidak dipisahkan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.12
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	818.941.276,00	545,96	845.989.500,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	137.043.799,00	274,09	1.087.996.500,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	145.000.000,00	109.270.000,00	75,36	89.925.450,00
	Jumlah	345.000.000,00	1.065.255.075,00	308,77	2.023.911.450,00

- (a) Untuk hasil penjualan peralatan dan mesin merupakan penjualan alat-alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga serta alat kedokteran dan kesehatan yang kondisinya rusak berat/ yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Terealisasi sebesar Rp818.941.276,00 atau 545,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00. Penerimaan ini melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan untuk penjualan alat-alat angkutan/kendaraan bermotor



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

penjualannya melalui proses lelang di KPKNL Tegal sehingga hasil yang diperolehpun berdasarkan nilai lelang yang diterima. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan dari SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.13
Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Jumlah (Rp.)
1	BPKAD	807.441.276,00
2	Dinpermades	5.000.000,00
3	Inspektorat	6.500.000,00
	Jumlah	818.941.276,00

- (b) Untuk Hasil Penjualan Gedung dan bangunan merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan/bongkaran terealisasi sebesar Rp137.043.799,00 atau 274,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00. Penerimaan ini melampaui target yang ditetapkan dikarenakan ada hasil bongkaran gedung/bangunan pasar-pasar yang nilainya besar sehingga penjualannya melalui proses lelang di KPKNL Tegal sehingga hasil yang diperolehpun berdasarkan nilai lelang yang diterima.
- (c) Hasil penjualan aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp109.270.000,00 atau 75,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.000.000,00 merupakan penjualan hasil Balai Benih Ikan (BBI) Malahayu dan penjualan hasil produksi tambak dinas yang dikelola oleh Dinas Perikanan. Penerimaan ini tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan untuk BBI Malahayu ketersediaan sumber air yang masuk ke BBI sering tersendat karena cuaca ekstrem atau kemarau panjang menyebabkan suplai air dari waduk Malahayu menurun. Sementara pembenihan ikan nila memerlukan air yg mengalir sehingga menyebabkan produksi benih tdk optimal berpengaruh pada pendapatan penjualan ikan tidak bisa mencapai target yg direncanakan. Sedangkan untuk penerimaan dari tambak dinas karena terkendala adanya pembangunan petakan kolam budidaya udang berpengaruh pada mulainya tebar udang sehingga pada saat akhir tahun usia udang masih muda belum siap panen secara total hanya panen parsial atau sebagian menyebabkan target dari penerimaan tambak dinas tidak tercapai.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dianggarkan sebesar Rp95.540.245,00, penerimaan ini direncanakan dari kontribusi tahunan untuk kemitraan dengan pihak ketiga atas



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Bangun Kelola Serah antara Pemkab Brebes dengan CV Jaya Bae berupa pemanfaatan aset tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes, namun untuk tahun 2023 tidak ada realisasi kontribusi yang diterima oleh pemda Brebes.
- (3) Penerimaan hasil kerja sama daerah terealisasi sebesar Rp730.170.060,00 atau 115,11% dari anggaran sebesar Rp630.000.000,00 yang merupakan dana kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sumber air suci desa Dawuhan dan Kaligiri Kecamatan Sirampog.
 - (4) Penerimaan jasa giro kas daerah terealisasi sebesar Rp1.614.681.807,00 atau 21,48% dari anggaran sebesar Rp7.517.249.908,00, merupakan penerimaan jasa giro pada kas daerah dan jasa giro pada kas di bendahara. Penerimaan ini tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan saldo kas daerah minim sehingga jasa giro yang didapatkan juga rendah.
 - (5) Hasil pengelolaan dana bergulir ada realisasi sebesar Rp1.215.927,00 merupakan penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir pada Dinkopumdag dan Dinperinaker.
 - (6) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah berupa penerimaan dari bunga deposito sebesar Rp1.624.480.487,00 atau 33,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.827.671.027,00, merupakan penerimaan bunga deposito pada Bank Jateng cabang Brebes. Penerimaan ini tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan saldo kas daerah minim, sehingga tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam bentuk deposito.
 - (7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp54.200.000,00, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.14
Rincian penerimaan TGR

No	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp).
1	Setoran TP TGR an Indah Margiasih	KEC. KERSANA	1.000.000,00
2	Setoran TP TGR an Bambang Setiawan	DINPERMADES	5.200.000,00
3	Setoran TP TGR an Irawati Fatimah	BPKAD	5.000.000,00
4	Setoran TP TGR an Rosichin	BPKAD	800.000,00
5	Setoran TP TGR an Mardiyah	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	6.000.000,00
6	Setoran TP TGR an Sugianto	BPKAD	2.050.000,00
7	Setoran TP TGR an Cipto Sudrajat	DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	19.500.000,00
8	Setoran TP TGR an Mutia Shafira Nissa	DP3KB	13.500.000,00
9	Setoran TP TGR an Suharyanto	KEC. WANASARI	1.150.000,00
		Jumlah	54.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan untuk tahun lalu/ tahun 2022 ada realisasi sebesar Rp737.502.887,00 akan tetapi untuk tahun 2023 Pendapatan ini dialihkan pencatatannya ke Pendapatan dari pengembalian dan Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (9) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp3.275.454.407,00 merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan penerimaan pengembalian lainnya atas kegiatan tahun-tahun lalu serta semua penerimaan lain-lain baik dari penyeteroran dari SKPD maupun dari pihak ketiga termasuk penerimaan dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (10) Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp259.596.490.557,01 atau 101,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp256.934.421.200,00, merupakan penerimaan pada RSUD Brebes, RSUD Bumiayu dan penerimaan pada Dinkes-UPTD Puskesmas di Kabupaten Brebes. Adapun rincian penerimaan untuk masing-masing BLUD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.15
Rincian Pendapatan BLUD

NO	URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1	RSUD Brebes	131.059.567.686,01	107.095.974.770,14
2	RSUD Bumiayu	24.053.985.263,00	27.035.116.011,00
3	Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	19.317.439.606,00	17.859.632.452,00
4	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	23.823.352.745,00	22.056.421.140,00
5	Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	33.259.521.808,00	31.024.023.899,00
6	Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	14.813.249.236,00	12.253.723.872,00
7	Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	13.269.374.213,00	12.154.166.805,00
	JUMLAH	259.596.490.557,01	229.479.058.949,14

- (11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah terealisasi sebesar Rp986.967.523,00 yang merupakan penerimaan setoran dari hasil temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pendapatan denda dan juga penerimaan atas pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Rincian pendapatan dari pengembalian dan pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah disajikan dalam **lampiran 5.1**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Realisasi pendapatan transfer TA 2023 adalah sebesar Rp2.580.519.687.681,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp2.597.056.472.000,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.16
Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.312.674.969.000,00	2.322.199.357.153,00	100,41	2.304.332.717.766,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.381.503.000,00	258.320.330.528,00	90,84	252.881.938.508,00
	Jumlah	2.597.056.472.000,00	2.580.519.687.681,00	99,36	2.557.214.656.274,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2023 adalah sebesar Rp2.322.199.357.153,00 atau 100,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.312.674.969.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.17
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.978.603.791.000,00	1.982.277.753.553,00	100,19	1.850.513.017.766,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.837.859.000,00	5.837.859.000,00	100,00	-
3	Dana Desa	328.233.319.000,00	334.083.744.600,00	101,78	453.819.700.000,00
	Jumlah	2.312.674.969.000,00	2.322.199.357.153,00	100,41	2.304.332.717.766,00

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Aturan yang mendasari untuk penetapan besarnya alokasi dana perimbangan TA 2023 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 90 tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 90 tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023

Anggaran pendapatan dana perimbangan sebesar Rp1.978.603.791.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.982.277.753.553,00 atau sebesar 100,19%. Realisasi pendapatan dana perimbangan tahun 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.18
Rincian Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Pendapatan Dana Perimbangan				
1	Dana Transfer Umum-DBH	40.539.863.000,00	40.545.351.265,00	100,01	42.362.068.675,00
2	Dana Transfer Umum-DAU	1.314.115.962.000,00	1.331.727.139.428,00	101,34	1.230.091.817.360,00
3	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	114.585.382.000,00	108.178.591.500,00	94,41	119.268.684.105,00
4	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	509.362.584.000,00	501.826.671.360,00	98,52	458.790.447.626,00
	Jumlah	1.978.603.791.000,00	1.982.277.753.553,00	100,19	1.850.513.017.766,00

- (1) Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum-DBH disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.19
Rincian Dana Transfer Umum- DBH

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.568.871.674,00
2	DBH PPh Pasal 21	15.679.482.699,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	988.053.682,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.623.343.249,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	51.492.996,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	131.200.345,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	19.959.326,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	972.573,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	758.783.510,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.723.191.211,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
	Jumlah	40.545.351.265,00

- (2) Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum – DAU sebesar Rp1.331.727.139.428,00 atau 101,34% dari anggaran sebesar Rp1.314.115.962.000,00.
- (3) Realisasi pendapatan Dana Transfer Khusus – DAK Fisik sebesar Rp108.178.591.500,00 dari anggaran sebesar Rp114.585.382.000,00 atau 94,41%, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.20
Rincian DAK Fisik per Bidang

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.001.817.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	19.611.330.936,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.006.517.587,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	15.368.418.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	27.810.090.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.121.318.675,00
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.996.011.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.160.888.943,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	370.400.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.731.799.359,00
	Jumlah	108.178.591.500,00

- (4) Realisasi pendapatan Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik sebesar Rp501.826.671.360,00 atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp509.362.584.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.21
Rincian DAK Non Fisik per Bidang

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	200.664.421.564,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.877.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	199.531.604.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.137.394.320,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	25.119.484.200,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	12.166.995.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35.308.829.287,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	15.795.075.379,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	-
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	339.308.913,00
12	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	475.888.697,00
13	DAK Non Fisik-PK2UMK	410.170.000,00
	Jumlah	501.826.671.360,00

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

Realisasi pendapatan DID untuk TA 2023 adalah sebesar Rp5.837,859.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.837.859.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa dari pemerintah pusat untuk TA 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 98 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan RI nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Anggaran pendapatan Dana Desa adalah sebesar Rp328.233.319.000,00 dengan realisasinya adalah Rp334.083.744.600,00 atau sebesar 101,78%.

Adapun untuk TA 2022 dana desa yang diterima oleh Kabupaten Brebes yaitu sebesar Rp453.819.700.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp284.381.503.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp258.320.330.528,00 atau sebesar 90,84%.

Pendapatan transfer antar daerah TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.22
Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
----	--------	--------------------------	---------------------------	---	---------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	267.433.503.000,00	241.972.327.482,00	90,48	226.946.635.230,00
2	Bantuan Keuangan	16.948.000.000,00	16.348.003.046,00	96,46	25.935.303.278,00
	Jumlah	284.381.503.000,00	258.320.330.528,00	90,84	252.881.938.508,00

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi pendapatan bagi hasil TA 2023 sebesar Rp241.972.327.482,00 atau sebesar 90,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.433.503.000,00. Pendapatan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.23
Rincian Pendapatan Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	59.806.498.000,00	52.156.840.626,00	87,21	50.954.535.582,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.716.811.000,00	40.647.522.127,00	97,44	32.604.017.437,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	64.596.915.000,00	59.393.729.308,00	91,95	59.988.338.425,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	139.205.000,00	146.494.243,00	105,24	133.145.415,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	101.174.074.000,00	89.627.741.178,00	88,59	83.266.598.371,00
	Jumlah	267.433.503.000,00	241.972.327.482,00	90,48	226.946.635.230,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp16.348.003.046,00 atau sebesar 96,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.948.000.000,00. Pendapatan bantuan keuangan ini yaitu berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, dengan rincian penerimaan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.24
Rincian penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	27/03/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk TMMD	753.000.000,00
2	20/07/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Dishub	585.898.215,00
3	31/07/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk DPU	1.480.881.800,00
4	09/08/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Irigasi Bendung DI Kembang	524.978.200,00
5	31/08/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pendidikan	176.958.362,00
6	31/08/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pendidikan	214.474.298,00
7	21/09/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pendidikan	58.499.930,00
8	21/09/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pendidikan	53.623.652,00
9	25/09/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Perpustakaan SD	60.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

10	11/10/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Irigasi DI Kembang	2.099.912.800,00
11	24/10/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Drainase Lingkungan	586.697.400,00
12	18/12/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Drainase Lingkungan	1.368.960.600,00
13	18/12/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Terminal C Banjarharjo	2.343.592.860,00
14	18/12/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Jalan Poros Dk. Cilik	5.923.527.200,00
15	18/12/2023	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pendidikan	116.997.729,00
		Jumlah	16.348.003.046,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah TA 2023 sebesar Rp14.555.346.000,00 atau 107,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00. Lain-lain pendapatan daerah yang Sah ini terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.1.1.3.1 Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp14.555.346.000,00 atau 107,82% dari anggaran sebesar Rp13.500.000.000,00 merupakan pendapatan hibah air minum untuk perkotaan dari pemerintah pusat.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Merupakan pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk TA 2023 adalah Nihil.

5.1.2 Belanja

Belanja	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
	2.989.014.635.072,00	3.091.285.559.556,00

Belanja Daerah TA 2023 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode TA 2023 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu TA, dengan realisasi sebesar Rp2.989.014.635.072,00 atau 94,86 % dari anggaran belanja sebesar Rp3.150.908.123.881,00 dan turun 3,31% dari realisasi tahun lalu disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.25
Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.254.932.460.655,00	2.118.778.276.541,00	93,96	1.952.476.281.894,00
2	Belanja Modal	377.792.479.210,00	357.922.041.899,00	94,74	480.672.283.614,00
3	Belanja Tak Terduga	6.195.500.000,00	1.187.275.000,00	19,16	3.717.196.960,00
4	Belanja Transfer	511.987.684.016,00	511.127.041.632,00	99,83	654.419.797.088,00
	Jumlah	3.150.908.123.881,00	2.989.014.635.072,00	94,86	3.091.285.559.556,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi Belanja operasi TA 2023 dan 2022 sebesar Rp2.118.778.276.541,00 dan Rp1.952.476.281.894,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.26
Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.212.909.035.077,00	1.114.115.933.151,00	91,85	1.018.858.634.434,00
2	Belanja Barang dan Jasa	881.655.191.878,00	847.763.670.560,00	96,16	803.599.744.975,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	152.852.338.200,00	149.920.650.830,00	98,08	122.961.677.485,00
6	Belanja Bantuan Sosial	7.515.895.500,00	6.978.022.000,00	92,84	7.056.225.000,00
	Jumlah	2.254.932.460.655,00	2.118.778.276.541,00	93,96	1.952.476.281.894,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.114.115.933.151,00 atau 91,85 % dari anggaran sebesar Rp1.212.909.035.077,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.27
Rincian Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	815.171.386.883,00	734.964.130.409,00	90,16	667.685.387.607,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.463.812.721,00	116.839.789.604,00	93,87	95.110.992.176,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan	225.713.329.860,00	216.913.190.055,00	96,10	212.894.770.316,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35.518.953.000,00	34.998.476.535,00	98,53	32.072.815.654,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.579.552.613,00	1.515.132.613,00	95,92	1.717.461.128,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	756.000.000,00	738.500.000,00	97,69	958.000.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	9.706.000.000,00	8.146.713.935,00	83,93	8.419.207.553,00
	Jumlah	1.212.909.035.077,00	1.114.115.933.151,00	91,85	1.018.858.634.434,00

Rincian realisasi untuk masing-masing obyek belanja pegawai per SKPD disajikan dalam lampiran 5.2.

Tabel 5.28
Rincian Belanja Pegawai BLUD

NO	URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1	RSUD Brebes	850.880.255,00	1.218.240.897,00
2	RSUD Bumiayu	5.023.027.585,00	5.204.222.193,00
3	Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	726.008.297,00	492.330.765,00
4	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	299.676.334,00	643.565.716,00
5	Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	881.296.901,00	414.069.129,00
6	Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	186.403.272,00	144.293.943,00
7	Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	179.421.291,00	302.484.910,00
	JUMLAH	8.146.713.935,00	8.419.207.553,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp847.763.670.560,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp881.655.191.878,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.29
Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	106.988.686.465,00	99.864.295.121,00	93,34	93.007.018.161,00
2	Belanja Jasa	282.266.594.438,00	266.596.499.093,00	94,45	257.862.430.620,00
3	Belanja Pemeliharaan	39.139.837.246,00	37.965.574.530,00	97,00	40.187.217.354,00
4	Belana Perjalanan Dinas	47.735.971.375,00	44.325.760.627,00	92,86	41.012.390.551,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.441.204.783,00	2.371.307.442,00	97,14	3.051.738.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	153.846.568.349,00	153.773.482.028,00	99,95	155.950.116.158,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	249.236.329.222,00	242.866.751.719,00	97,44	212.528.833.431,00
	Jumlah	881.655.191.878,00	847.763.670.560,00	96,16	803.599.744.975,00

Rincian belanja barang dan jasa TA 2023 disajikan pada **lampiran 5.3**
Adapun realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk masing-masing BLUD dirinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.30
Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1	RSUD Brebes	117.426.293.166,00	97.584.037.311,00
2	RSUD Bumiayu	25.460.955.377,00	21.990.608.320,00
3	Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	19.070.296.752,00	17.423.577.712,00
4	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	22.344.512.335,00	22.236.476.337,00
5	Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	31.394.577.353,00	29.527.153.642,00
6	Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	14.124.250.563,00	12.434.394.668,00
7	Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	13.045.866.173,00	11.332.585.441,00
	JUMLAH	242.866.751.719,00	212.528.833.431,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga untuk TA 2023 adalah nihil.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah sebesar Rp149.920.650.830,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp152.852.338.200,00 atau 98,08%, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.31
Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.536.000.000,00	4.375.229.762,00	96,46	13.282.589.755,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	26.443.257.200,00	26.443.257.200,00	100,00	-
3	Belanja Hibah kepada BUMD	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	20.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	58.843.550.000,00	56.293.261.146,00	95,67	86.565.914.221,00
5	Belanja Hibah Dana BOS	60.141.880.000,00	59.921.251.722,00	99,63	21.669.348.009,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.847.651.000,00	2.847.651.000,00	100,00	1.423.825.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Jumlah	152.852.338.200,00	149.920.650.830,00	98,08	122.961.677.485,00

Rincian belanja hibah TA 2023 per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.32

Rincian Belanja Hibah per SKPD

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
-	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	-
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.175.229.762,00	12.522.589.755,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	-	260.000.000,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	500.000.000,00
	Jumlah	4.375.229.762,00	13.282.589.755,00
-	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26.443.257.200,00	-
	Jumlah	26.443.257.200,00	-
-	Belanja Hibah kepada BUMD		
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	40.000.000,00	20.000.000,00
	Jumlah	40.000.000,00	20.000.000,00
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia		
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.203.397.523,00	54.521.114.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	16.613.710.764,00	11.237.027.092,00
3	DINAS SOSIAL	10.000.000,00	10.000.000,00
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	120.000.000,00	265.000.000,00
5	DINAS PERIKANAN	1.627.660.859,00	1.965.839.000,00
6	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.973.992.000,00	2.567.109.629,00
7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	960.000.000,00	1.229.150.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	10.414.000.000,00	8.734.500.000,00
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.370.500.000,00	6.006.174.500,00
9	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	-	30.000.000,00
	Jumlah	56.293.261.146,00	86.565.914.221,00
-	Belanja Hibah Dana BOS		
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	59.921.251.722,00	21.669.348.009,00
	Jumlah	59.921.251.722,00	21.669.348.009,00
-	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.847.651.000,00	1.423.825.500,00
	Jumlah	2.847.651.000,00	1.423.825.500,00
	Jumlah total realisasi belanja hibah	149.920.650.830,00	122.961.677.485,00

- Belanja hibah kepada pemerintah pusat

Belanja Hibah kepada pemerintah pusat pada Bapenda sebesar Rp200.000.000,00 merupakan hibah uang untuk penilaian tanah dan ekonomi pertanahan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pada DPU merupakan hibah untuk :

- Pembangunan toilet Gedung Mako Polres Brebes sebesar Rp99.284.000,00
- Rehabilitasi prasarana kantor Polres Brebes sebesar Rp198.572.000,00
- Pembangunan kantor Polsek Jatibarang sebesar Rp1.950.302.427,00
- Rehab kantor CPM (Subdenpom IV-1 Brebes) sebesar Rp187.152.000,00
- Pengadaan sarana dan prasarana Polsek Bulakamba sebesar Rp95.685.000,00
- Pengadaan sarana dan prasarana Koramil Bulakamba sebesar Rp47.542.000,00
- Rehab rumah dinas Kejaksaan Negeri Brebes sebesar Rp199.395.000,00
- Pembangunan landscape rumah dinas Kapolres Brebes sebesar Rp198.725.000,00
- Pekerjaan rehab lapangan tenis Kodim Brebes sebesar Rp901.181.335,00
- Pekerjaan rehabilitasi pos polisi Cisanggarung Losari sebesar Rp98.837.000,00
- Pembangunan landscape Polsek Jatibarang sebesar Rp198.554.000,00
- Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya
Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya pada Bakesbangpol sebesar Rp26.443.257.200,00 yaitu hibah untuk KPUD Brebes sebesar Rp21.569.024.000,00 dan hibah kepada Bawaslu Brebes sebesar Rp4.874.233.200,00.
- Belanja Hibah kepada BUMD
Belanja hibah kepada BUMD pada Dinbudpar merupakan hibah kepada panitia pesta laut desa Krakahan dan Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung sebesar Rp40.000.000,00.
- Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Rincian realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia TA 2023 disajikan dalam **lampiran 5.4.**
- Belanja hibah dana BOS
Belanja hibah dana BOS pada Dindikpora sebesar Rp59.921.251.722,00 merupakan hibah kepada Satdikdas swasta yang ada di Kabupaten Brebes yaitu untuk SD/SMP yang sudah terdaftar di Kemendikbud dan sudah mempunyai NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) sebanyak 22 SD swasta dan 86 SMP swasta serta untuk BOP PAUD sebanyak 969 TK/KB dan BOP Kesetaraan yaitu kepada 56 PKBM.
Rincian realisasi belanja hibah dana BOS TA 2023 disajikan dalam **lampiran 5.5.**
- Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.847.651.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.847.651.000,00 atau 100,00% yaitu untuk partai politik PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, PKS, PPP dan PDI-P dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.33
Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	PAN	217.053.000,00	108.526.500,00
2	Partai Demokrat	197.073.000,00	98.536.500,00
3	Partai Gerindra	317.325.000,00	158.662.500,00
4	Partai Golkar	406.401.000,00	203.200.500,00
5	Partai Hanura	33.915.000,00	16.957.500,00
6	PKB	515.475.000,00	257.737.500,00
7	PKS	197.316.000,00	98.658.000,00
8	PPP	182.001.000,00	91.000.500,00
9	PDI P	781.092.000,00	390.546.000,00
	Jumlah	2.847.651.000,00	1.423.825.500,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 terealisasi sebesar Rp6.978.022.000 atau 92,84 % dari anggaran sebesar Rp7.515.895.500,00 yang merupakan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.34
Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.325.895.500,00	4.788.022.000,00	89,90	6.216.225.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	100,00	530.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	230.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	80.000.000,00
	Jumlah	7.515.895.500,00	6.978.022.000,00	92,84	7.056.225.000,00

Rincian realisasi belanja bantuan sosial per SKPD TA 2023 disajikan dalam lampiran 5.5.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Realisasi belanja modal TA 2023 sebesar Rp357.922.041.899,00 atau 94,74% dari anggaran sebesar Rp377.792.479.210,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.35
Rincian Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	260.000.000,00	227.500.000,00	87,50	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.070.537.516,00	89.682.122.849,00	87,86	114.071.627.073,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.880.808.720,00	52.721.300.467,00	96,07	166.066.285.008,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.433.440.723,00	191.528.125.702,00	98,00	183.852.539.769,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.842.303.895,00	20.410.604.553,00	97,93	12.576.379.281,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.305.388.356,00	3.352.388.328,00	77,86	4.105.452.483,00
	Jumlah	377.792.479.210,00	357.922.041.899,00	94,74	480.672.283.614,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah TA 2023 yaitu sebesar Rp227.500.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 atau 87,50 % yaitu pada SKPD Dinperwaskim yaitu belanja modal tanah untuk penggantian tanah jalan akibat longsor di Desa Ciputih Kec. Salem.

Tabel 5.36
Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	227.500.000,00	-
	JUMLAH	227.500.000,00	-

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp89.682.122.849,00 atau 87,86% dari anggaran sebesar Rp102.070.537.516,00, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.37
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	1.745.566.508,00	1.165.937.850,00	66,79	1.267.462.650,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.438.850.643,00	6.265.057.292,00	97,30	7.564.670.398,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	301.859.500,00	215.935.000,00	71,53	474.206.559,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.301.132.000,00	1.283.632.000,00	98,66	204.101.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.135.490.446,00	16.578.261.170,00	86,64	9.254.522.902,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	424.896.080,00	412.844.100,00	97,16	653.481.179,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	34.624.893.723,00	30.261.774.929,00	87,40	11.221.382.776,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	909.118.000,00	860.081.189,00	94,61	2.847.098.900,00
9	Belanja Modal Komputer	6.772.895.360,00	5.947.213.515,00	87,81	24.481.967.153,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	219.153.500,00	208.495.000,00	95,14	-
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	26.467.700,00
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	67.522.500,00
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	191.137.000,00
14	Belanja Modal Alat Peraga	964.000,00	964.000,00	100,00	252.293.000,00
15	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.326.880.000,00	2.259.228.500,00	97,09	11.377.500,00
16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.655.887.756,00	9.607.132.947,00	99,50	9.345.495.293,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.207.400.000,00	14.610.015.357,00	80,24	46.208.440.563,00
	Jumlah	102.070.537.516,00	89.682.122.849,00	87,86	114.071.627.073,00

Untuk belanja modal alat besar terealisasi sebesar Rp1.165.937.850,0 atau 66,79% dari anggaran sebesar Rp1.745.566.508,00, hal ini disebabkan:

- 1) Pada SETDA belanja modal alat besar yaitu untuk belanja modal hauler sebesar Rp520.000.000,00 tidak ada realisasi/tidak terserap anggarannya dikarenakan pihak penyedia dan juga pihak karoseri menolak/tidak bersedia dikarenakan waktu pengadaan yang terlalu pendek sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- 2) Pada DPU belanja modal alat besar yaitu untuk belanja modal pompa terealisasi sebesar Rp160.839.000,00 atau 74,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.653.353,00 dikarenakan ada perubahan/penurunan spesifikasi barang yang dibeli.

Untuk belanja modal alat bengkel dan alat ukur terealisasi sebesar Rp215.930.000,00 atau 71,53% dari anggaran sebesar Rp301.859.500,00, hal ini disebabkan untuk belanja modal alat bengkel dan alat ukur yang salah satunya ada pada SKPD Inspektorat yang dianggarkan sebesar Rp208.650.000,00 terealisasi sebesar Rp129.100.000,00 atau 61,87% dikarenakan proses pengadaan barang tersebut dilakukan melalui e-Purchasing dan e Katalog, dimana harga indeks SSH/yang dianggarkan nilainya terlalu tinggi dibandingkan dengan harga barang di pasaran, selain itu terdapat proses negosiasi harga sehingga terdapat efisiensi harga untuk pengadaan belanja modal tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Untuk belanja modal peralatan dan mesin BLUD terealisasi sebesar Rp14.610.015.357,00 atau 80,24% dari anggaran sebesar Rp18.207.400.000,00, hal ini disebabkan:

- Pada RSUD Brebes belanja modal peralatan dan mesin BLUD terealisasi sebesar Rp13.819.444.357,00 atau 80,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.253.900.000,00 dikarenakan ada beberapa pengadaan peralatan dan mesin yang belum dilaksanakan terkait dengan kondisi keuangannya yang terbatas dan juga menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.
- Pada RSUD Bumiayu belanja modal peralatan dan mesin BLUD terealisasi sebesar Rp790.571.000,00 dari anggaran Rp953.500.000,00 atau 82,91% dikarenakan ada beberapa pengadaan peralatan dan mesin yang belum dilaksanakan diantaranya elektrosurgical unit dan jasa as-built drawing karena terkait dengan kondisi keuangannya yang terbatas dan juga menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.38
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per SKPD

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	24.443.555.947,00	29.850.804.993,00
2	DINAS KESEHATAN	31.909.330.768,00	11.703.465.128,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	15.271.444.357,00	46.561.952.384,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	2.187.510.000,00	3.535.179.342,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.213.681.000,00	552.359.550,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	73.745.000,00	388.274.250,00
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	110.635.000,00	326.386.032,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.444.000,00	61.981.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	309.172.600,00	303.078.500,00
10	DINAS SOSIAL	121.975.000,00	157.136.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	857.689.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	358.225.050,00	3.567.195.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	304.854.000,00	822.452.550,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	53.780.000,00	879.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	2.818.948.500,00	731.144.559,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	490.850.000,00	1.465.991.400,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	28.300.000,00	437.685.890,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	124.679.020,00	462.226.600,00
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	106.100.000,00	43.805.000,00
20	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	249.617.000,00	474.262.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,	323.560.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN		
22	DINAS PERIKANAN	65.463.800,00	-
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	279.013.000,00	237.538.650,00
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.402.400.000,00	2.978.049.412,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	37.491.000,00	41.982.000,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	5.774.405.292,00	3.625.776.394,00
27	SEKRETARIAT DPRD	126.930.000,00	184.197.450,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	37.870.000,00	-
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	142.965.519,00	102.115.000,00
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.300.000,00	1.764.015.934,00
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	494.462.996,00	514.365.000,00
32	INSPEKTORAT	294.060.000,00	904.582.705,00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	113.143.750,00
34	KECAMATAN BREBES	286.061.000,00	245.318.800,00
35	KECAMATAN LARANGAN	1.800.000,00	147.380.000,00
36	KECAMATAN TONJONG	2.828.000,00	5.790.000,00
37	KECAMATAN PAGUYANGAN	44.970.000,00	75.778.000,00
38	KECAMATAN SIRAMPOG	13.700.000,00	52.470.000,00
39	KECAMATAN BANTARKAWUNG	10.876.000,00	22.300.000,00
40	KECAMATAN SONGGOM	2.700.000,00	82.562.500,00
41	KECAMATAN BULAKAMBA	7.119.000,00	55.466.000,00
42	KECAMATAN TANJUNG	15.140.000,00	41.589.400,00
43	KECAMATAN LOSARI	122.160.000,00	231.440.900,00
44	KECAMATAN WANASARI	-	70.550.000,00
45	KECAMATAN KERSANA	-	53.329.000,00
46	KECAMATAN KETANGGUNGAN	-	30.473.000,00
47	KECAMATAN BANJARHARJO	-	118.955.000,00
48	KECAMATAN BUMIAYU	-	12.835.000,00
49	KECAMATAN SALEM	-	44.875.000,00
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	10.800.000,00
	Jumlah	89.682.122.849	114.071.627.073

5.1.2.2.3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.721.300.467,00 atau 96,07% dari anggaran sebesar Rp54.880.808.720,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.39
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.498.308.720,00	49.532.998.707,00	96,18	135.521.272.705,00
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	49.424.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	583.042.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.382.500.000,00	3.188.301.760,00	94,26	29.912.546.303,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Jumlah	54.880.808.720,00	52.721.300.467,00	96,07	166.066.285.008,00

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.40
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per SKPD

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	30.763.863.688,00	18.537.764.351,00
2	DINAS KESEHATAN	6.513.453.382,00	349.068.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	1.194.939.000,00	29.792.931.303,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	1.993.362.760,00	119.615.000,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.167.755.232,00	91.465.923.085,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	98.543.000,00	161.198.450,00
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.421.750.000,00	481.642.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	207.560.000,00
9	DINAS SOSIAL	33.778.000,00	326.157.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	243.600.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	193.474.120,00	-
12	DINAS PERHUBUNGAN	3.097.793.075,00	348.693.000,00
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	185.435.000,00
14	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	548.402.000,00	3.955.505.233,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	97.517.281,00	-
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	156.609.258,00	199.703.000,00
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	322.629.447,00	7.855.507.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	1.150.762.443,00	-
19	DINAS PERIKANAN	396.262.770,00	-
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	404.064.389,00	454.738.000,00
21	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	263.263.000,00	6.646.368.000,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	20.000.000,00	-
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	266.857.290,00	256.641.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	-	418.334.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	199.251.000,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	504.673.000,00
27	KECAMATAN BREBES	621.377.000,00	787.550.000,00
28	KECAMATAN JATIBARANG	-	245.642.000,00
29	KECAMATAN BUMIAYU	114.789.000,00	99.700.000,00
30	KECAMATAN SIRAMPOG	192.949.000,00	199.463.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
31	KECAMATAN BANTARKAWUNG	96.603.000,00	198.946.090,00
32	KECAMATAN SALEM	168.006.932,00	198.755.090,00
33	KECAMATAN BULAKAMBA	104.814.400,00	-
34	KECAMATAN TANJUNG	95.640.000,00	-
35	KECAMATAN LOSARI	125.758.000,00	498.425.000,00
36	KECAMATAN KERSANA	-	1.029.679.406,00
37	KECAMATAN KETANGGUNGAN	96.283.000,00	-
38	KECAMATAN TONJONG	-	97.817.000,00
	JUMLAH	52.721.300.467,00	166.066.285.008,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp191.528.125.702,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp195.433.440.723,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.41
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	158.654.463.143,00	155.711.420.228,00	98,14	150.537.466.171,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	28.326.912.580,00	27.516.245.674,00	97,14	25.721.845.698,00
3	Belanja Modal Instalasi	372.440.000,00	372.440.000,00	100,00	97.257.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	8.079.625.000,00	7.928.019.800,00	98,12	7.194.017.900,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-	-	-	301.953.000,00
	Jumlah	195.433.440.723,00	191.528.125.702,00	98,00	183.852.539.769,00

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.42
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	73.270.131,00	132.257.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	-	301.953.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	137.144.236.151,00	137.020.516.171,00
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	15.927.452.153,00	23.801.802.698,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.406.891.800,00	17.670.470.000,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	168.139.000,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.900.000,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	-	2.016.989.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN	755.400.802,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	SAMPAH		
10	DINAS PERIKANAN	388.005.000,00	246.549.000,00
11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	184.447.000,00
12	KECAMATAN BREBES	1.832.869.665,00	2.305.516.900,00
	Jumlah	191.528.125.702,00	183.852.539.769,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp20.410.604.553,00 atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp20.842.303.895,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.43
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	220.000.000	219.000.000	99,55	235.056.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	600.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	285.000.000,00	282.658.300,00	99,18	360.133.200,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	19.477.303.895,00	19.391.187.140,00	99,56	11.979.350.581,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	860.000.000,00	517.759.113,00	60,20	1.239.500,00
	Jumlah	20.842.303.895,00	20.410.604.553,00	97,93	12.576.379.281,00

Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD terealisasi sebesar Rp517.759.113,00 dari anggaran sebesar Rp860.000.000,00 atau hanya 60,20% dikarenakan pada Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes dan Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu untuk pelaksanaan belanja modal tersebut kondisi keuangannya terbatas dan juga menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.44
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.451.187.140,00	12.181.428.581,00
2	DINAS KESEHATAN	517.759.113,00	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	-	1.239.500,00
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	600.000,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.905.600,00	-
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	60.273.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
7	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	159.000.000,00	29.978.000,00
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.248.000,00	36.642.000,00
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-	15.000.000,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	24.975.000,00	59.163.000,00
11	SEKRETARIAT DPRD	49.905.600,00	49.456.000,00
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	75.000.000,00	50.000.000,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	89.599.200,00
14	INSPEKTORAT	53.624.100,00	3.000.000,00
	JUMLAH	20.410.604.553,00	12.576.379.281,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset lainnya terealisasi sebesar Rp3.352.388.328,00 atau 77,86% dari anggaran sebesar Rp4.305.388.356,00. Belanja modal aset lainnya ini terdiri dari belanja modal aset lainnya berupa belanja modal aset tidak berwujud-software serta belanja modal aset lainnya BLUD pada Dinkes-UPTD Puskesmas.

Tabel 5.45
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya	140.109.356,00	137.870.000,00	98,40	-
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	4.165.279.000,00	3.214.518.328,00	77,17	4.105.452.483,00
	Jumlah	4.305.388.356,00	3.352.388.328,00	77,86	4.105.452.483,00

Untuk Belanja Modal Aset Lainnya BLUD terealisasi sebesar Rp3.214.518.328,00 dari anggaran sebesar Rp4.165.279.000,00 atau hanya 77,17% dikarenakan pada Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes dan Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu untuk pelaksanaan belanja modal tersebut kondisi keuangannya terbatas menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal aset lainnya per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.46
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	3.214.518.328,00	4.105.452.483,00
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	34.077.000,00	-
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14.916.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
4	SEKRETARIAT DAERAH	9.768.000,00	-
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.381.000,00	-
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49.728.000,00	-
		3.352.388.328,00	4.105.452.483,00

Belanja Modal Aset Tetap BLUD TA 2023 per RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas secara rinci disajikan dalam **lampiran 5.7**

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Untuk pengelolaan belanja tak terduga berpedoman pada Perbup Brebes Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja tak terduga selama TA 2023 sebesar Rp1.187.275.000,00 atau 19,16% dari anggaran sebesar Rp6.195.500.000,00.

Sedangkan realisasi belanja tak terduga tahun lalu adalah sebesar Rp3.717.196.960 dari anggaran sebesar Rp5.900.000.000,00 atau 63,00%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu realisasi belanja tak terduga TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.529.921.960,00 atau 68,06%. Salah satu faktor penyebab penurunan tersebut yaitu karena pada TA 2022 adanya realisasi belanja tak terduga untuk penanganan bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan angin putting beliung dan juga belanja tak terduga untuk pembatasan pergerakan masyarakat pada masa angkutan natal 2022 dan tahun baru 2023.

Untuk TA 2023 anggaran tidak direalisasikan seluruhnya dan tidak sama dengan realisasi tahun lalu dikarenakan memang sifat dari BTT itu sendiri yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak biasa/tidak terduga misalnya bencana alam atau bencana sosial yang cenderung tidak diharapkan terjadi lagi.

Realisasi BTT TA 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.47
Rincian Belanja Tak Terduga

No	SKPD Pelaksana	Uraian	SK Tanggap Darurat / Penetapan Bencana	Realisasi 2023 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)
		- Untuk Keperluan Darurat			
1	Dinperwaskim	Peningkatan Kualitas Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir Bandang di Desa Jatibarang Kidul dan Desa Dukuhmaja	Keputusan Bupati Brebes No. 360/59 Tahun 2023	39.800.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD Pelaksana	Uraian	SK Tanggap Darurat / Penetapan Bencana	Realisasi 2023 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)
		Kec. Jatibarang			
2	BPBD	Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Brebes	Keputusan Bupati Brebes No. 360/1577 Tahun 2023	57.475.000,00	-
3	BPBD	Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Ds Cenang Kec. Songgom	Keputusan Bupati Brebes No. 360/39 Tahun 2022	-	6.980.000,00
4	BPBD	Pembuatan Jalan Darurat Penanganan Bencana Longsor di Ds Jemasih Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No. 360/139 Tahun 2022	-	5.950.000,00
5	BPBD	Pembuatan Jembatan Darurat Penanganan Bencana Banjir di Ds Kamal Kec. Larangan Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No. 360/86 Tahun 2022	-	157.987.500,00
6	BPBD	Bantuan material perbaikan rumah yang terdampak bencana angin di Kec. Paguyangan	Keputusan Bupati Brebes No. 360/107 Tahun 2022	-	46.732.600,00
7	BPBD	Pengadaan Bronjong Penanganan Banjir Bandang di Kec. Bumiayu dan Kec. Sirampog.	Keputusan Bupati Brebes No. 360/107 Tahun 2022	-	191.750.000,00
8	BPBD	Penanganan Darurat Bencana Longsor Pada Jalan Kabupaten Ruas Manggis - Mlayang, Ds Manggis Kec. Sirampog .	Keputusan Bupati Brebes No. 360/ 3592 Tahun 2022	-	17.300.000,00
9	BPBD	Penanganan pembuatan tanggul darurat menggunakan alat berat di Ds Randusanga Wetan, Kec. Brebes,	Keputusan Bupati Brebes No. 360/3670 Tahun 2022	-	58.700.000,00
10	BPBD	Penanganan darurat pembuatan huntara dan penanganan pengungsi akibat bencana tanah bergerak di Ds Sridadi, Kec. Sirampog,	Keputusan Bupati Brebes No. 360/3668 Tahun 2022	-	225.822.460,00
11	BPBD	Penanganan Darurat Pemberian Bahan Matrial Untuk Rumah Terdampak Bencana Angin Puting Beliung di Ds Kebogadung Kec. Jatibarang Kab. Brebes.	Keputusan Bupati Brebes No. 360/3730 Tahun 2022	-	14.357.900,00
12	BPBD	Pembuatan Talud Pengaman Jalan dan Jembatan Kabupaten Ds Cinanas Kec. Bantarkawung Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No. 360/3743 Tahun 2022	-	258.501.000,00
13	BPBD	Perbaikan Rumah Terdampak Angin puting Beliung di Ds Losari Kidul Kec. Losari Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No.360/3746 Tahun 2022	-	16.503.000,00
14	BPBD	Pengadaan Logistik Untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19 Dosis Ke-2 di Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No. 360/113 Tahun 2022	-	192.712.500,00
		- Untuk Keperluan Mendesak			
1	Dinas Sosial	Bantuan Sosial Santunan Kematian	Keputusan Bupati Brebes No. 465.3/1496 Tahun 2023	1.062.000.000,00	-
2	Dinas Sosial	Bantuan Sosial Orang Tidak Mampu	Keputusan Bupati Brebes No. 465.3/1610 Tahun 2023	28.000.000,00	-
3	Satpol PP	Pembayaran Uang Transport Anggota Kodim 0713 Brebes Sebanyak 300 Personil x 2 Hari Rp. 100.000 Pada Tanggal 1 dan 2 Januari 2022	Keputusan Bupati Brebes No.300/131 Tahun 2022	-	60.000.000,00
4	DINHUB	Kegiatan Pengamanan Masa Angkutan Lebaran Tahun 2022 di Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No. 440/604 Tahun 2022	-	86.400.000,00
5	DINHUB	Kegiatan Pembatasan Pergerakan Masyarakat Dalam Masa Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023	Keputusan Bupati Brebes No.440/3745 Tahun 2022	-	600.000.000,00
6	DINSOS	Bantuan Sosial Santunan Kematian di Tahun Anggaran 2022	Keputusan Bupati Brebes No.465.3/1363 Tahun 2022	-	354.000.000,00
7	DINSOS	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Santunan Kematian di Tahun	Keputusan Bupati Brebes	-	834.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD Pelaksana	Uraian	SK Tanggap Darurat / Penetapan Bencana	Realisasi 2023 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)
		Anggaran 2022.	No.465.3/8749/X Tahun 2022		
8	DINSOS	Belanja Tidak Terduga untuk Membayar Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahun 2022.	Keputusan Bupati Brebes No. 465.3/1430 Tahun 2022	-	237.000.000,00
9	DPKP	Pasar Murah Dalam Rangka Penanggulangan Inflasi Daerah Dampak Kenaikan BBM di 16 Kecamatan	Keputusan Bupati Brebes No.521/3679 Tahun 2022	-	177.600.000,00
		- Untuk pengembalian pembayaran atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya			
1	DINBUDPAR	Belanja Tidak Terduga untuk Pengelolaan Obyek Wisata Waduk Malahayu Periode Bulan Desember 2020 s/d Mei 2022 Kepada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah.	Keputusan Bupati Brebes No. S/8104/900/VIII Tahun 2022	-	174.900.000,00
		Jumlah		1.187.275.000,00	3.717.196.960,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Belanja transfer terbagi menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp511.127.041.632,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp511.987.684.016,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.48
Rincian Belanja Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	23.688.091.416,00	17.447.235.932,00	73,65	15.302.204.088,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	488.299.592.600,00	493.679.805.700,00	101,10	639.117.593.000,00
	Jumlah	511.987.684.016,00	511.127.041.632,00	99,83	654.419.797.088,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja bagi hasil terealisasi sebesar Rp17.447.235.932,00 atau 73,65% dari anggaran sebesar Rp23.688.091.416,00.

Belanja bagi hasil disalurkan untuk 292 desa di 17 kecamatan yang diatur berdasarkan Perbup Brebes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes.

Belanja Bagi Hasil terdiri dari :

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Untuk TA 2023 dianggarkan sebesar Rp20.965.133.387,00 dan terealisasi sebesar Rp16.014.459.116,00 atau 76,39%, dengan rincian disajikan dalam **lampiran 5.8**.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa

Untuk TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.722.958.029,00 dan realisasinya sebesar Rp1.432.776.816,00 atau 52,62%.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa merupakan bagi hasil retribusi daerah kepada desa dengan rincian anggaran dan realisasi disajikan dalam **lampiran 5.9**.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp488.299.592.600,00 dan realisasi sebesar Rp493.679.805.700,00 atau 101,10%. Belanja Bantuan Keuangan ini merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.49
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	430.732.592.600,00	436.572.805.700,00	101,36
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	57.567.000.000,00	57.107.000.000,00	99,20
	Jumlah	488.299.592.600,00	493.679.805.700,00	101,10

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp436.572.805.700,00 atau 101,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp430.732.592.600,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.50
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA. 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Dana Desa	328.233.319.000,00	334.083.744.600,00	101,78
2	Alokasi Dana Desa	102.499.273.600,00	102.489.061.100,00	99,99



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
	Jumlah	430.732.592.600,00	436.572.805.700,00	101,36

1. Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pedoman Dana Desa TA 2023 berdasarkan Perbup Brebes Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Realisasi DD TA 2023 sebesar Rp334.083.744.600,00 atau 101,78 % dari anggaran sebesar Rp328.233.319.000,00. Realisasi Dana Desa TA 2023 untuk 292 Desa di 17 Kecamatan dengan rincian disajikan dalam **lampiran 5.10**.

2. Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Alokasi Dana Desa TA 2023 berpedoman pada Perbup Brebes Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa.

Realisasi Alokasi Dana Desa TA 2023 sebesar Rp102.489.061.100,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.499.273.600,00.

Realisasi ADD TA 2023 untuk 292 Desa di 17 kecamatan dengan rincian disajikan dalam **lampiran 5.11**.

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa

Dianggarkan sebesar Rp60.069.893.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.297.893.000,00 atau 97,05% disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.51
 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi
 atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan TMMD	3.453.000.000,00	3.453.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	54.114.000.000,00	53.654.000.000,00	99,15
	Jumlah	57.567.000.000,00	57.107.000.000,00	99,20

1. Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan TMMD

Bantuan Keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) direalisasikan sebesar Rp3.453.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Bantuan Keuangan diperuntukkan bagi kegiatan TMMD Sengkuyung di Desa Wanasari Kec. Wanasari, Desa Jatisawit Kec. Bumiayu, Desa Kubangputat Kec. Tanjung dan Desa Kaliloka Kec. Sirampog.

2. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa realisasi sebesar Rp53.654.000.000,00 atau 99,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.114.000.000,00. Bantuan keuangan ini diperuntukkan bagi desa-desa tertentu yang ada di Kabupaten Brebes untuk pengadaan sarana prasarana desa diantaranya pembuatan papan reklame desa, pembangunan/rehab mushola, pembuatan talud jalan, pengaspalan jalan/betonisasi, pembuatan drainase, pembuatan taman dan lain-lain.

Surplus/(Defisit) LRA	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	85.996.544.000,01	(101.463.568.681,86)

Realisasi Surplus/(Defisit) LRA Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2023 sebesar Rp85.996.544.000,01 dengan perhitungan sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.52
 Surplus / (Defisit) LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	3.102.607.861.008,00	3.075.011.179.072,01	99,11	2.989.821.990.874,14
2	Belanja	3.150.908.123.881,00	2.989.014.635.072,00	94,86	3.091.285.559.556,00
	Surplus/(Defisit)	(48.300.262.873,00)	85.996.544.000,01	-178,05	(101.463.568.681,86)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp70.804.272.811,43 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.800.262.873,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.53
Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.790.262.873,00	70.790.262.873,43	100,00	185.749.436.555,29
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00	14.009.938,00	140,10	4.395.000,00
	Jumlah	70.800.262.873,00	70.804.272.811,43	100,01	185.753.831.555,29

1. Realisasi SiLPA tahun sebelumnya merupakan SiLPA TA 2022 yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2022 sebesar Rp70.790.262.873,43.
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.009.938,00 atau 140,10% yaitu berupa pengembalian piutang ex-dana bergulir yang berasal dari Investasi Non Permanen Lainnya yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Penerimaan pokok pinjaman tersebut dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pada LO penerimaan pokok dicatat sebagai penambah Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya dan pada Neraca mengurangi nilai piutang pokok ex-dana bergulir yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan bunga/jasa pinjaman dianggarkan pada Lain-lain PAD yang Sah. Pada LO penerimaan bunga/jasa dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO dan pada Neraca mengurangi piutang bunga/jasa yang bersangkutan.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2023 sebesar Rp22.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp22.500.000.000,00 yaitu untuk penyertaan modal daerah, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.54

Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	13.500.000.000,00
	Jumlah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	13.500.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp22.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp22.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD sesuai Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.55

Penyertaan Modal kepada BUMD

No	BUMD	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Perumda Air Minum Tirta Baribis	14.500.000.000,00	13.500.000.000,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Jawa Tengah	5.500.000.000,00	-
3	Perumda Percetakan Puspa Grafika	500.000.000,00	-
4	Perumda BPR Bank Brebes	500.000.000,00	-
5	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cab. Brebes	500.000.000,00	-
6	PT. BPR BKK Banjarharjo (Perseroda)	1.000.000.000,00	-
	Jumlah	22.500.000.000,00	13.500.000.000,00

5.1.3.3. Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar Rp48.304.272.811,43 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp48.300.262.873,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.56

Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	70.800.262.873,00	70.804.272.811,43	100,01	185.753.831.555,29
2	Pengeluaran Pembiayaan	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	13.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	48.300.262.873,00	48.304.272.811,43	100,01	172.253.831.555,29

5.1.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2023 (Rp)

Tahun 2022 (Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

134.300.816.811,44 70.790.262.873,43
SiLPA Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2023 sebesar
Rp134.300.816.811,44 dengan perhitungan sesuai yang disajikan dalam tabel
berikut ini.

Tabel 5.57
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan	3.102.607.861.008,00	3.075.011.179.072,01	99,11	2.989.821.990.874,14
2	Belanja	3.150.908.123.881,00	2.989.014.635.072,00	94,86	3.091.285.559.556,00
3	Surplus/(Defisit)	(48.300.262.873,00)	85.996.544.000,01	-178,05	(101.463.568.681,86)
4	Pembiayaan Netto	48.300.262.873,00	48.304.272.811,43	100,008	172.253.831.555,29
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	134.300.816.811,44	100,00	70.790.262.873,43

SiLPA TA 2023 sebesar Rp134.300.816.811,44 tersebut sesuai yang
disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.58
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Saldo Kas di Rekening Giro Bank Jateng A/C No. 1.028.00001.2	117.654.188.656,00	41.962.032.335,00
2	Saldo Kas di BLUD	16.293.308.712,44	28.749.807.022,43
3	Saldo Kas Dana BOS	353.319.443,00	78.423.516,00
	Jumlah	134.300.816.811,44	70.790.262.873,43

Penjelasan mengenai rincian SiLPA TA 2023 adalah sebagai berikut :

- a. SiLPA TA 2023 Kab. Brebes sebesar Rp134.300.816.811,44 terdiri dari Saldo Kas di BUD (RKUD) sebesar Rp117.654.188.656,00, Saldo Kas di BLUD sebesar Rp16.293.308.712,44 dan saldo kas Dana BOS sebesar Rp353.319.443,00.
- b. SiLPA TA 2023 di BUD sebesar Rp117.654.188.656,00 terdiri dari dana terikat sebesar Rp81.326.223.542,00 dan dana bebas sebesar Rp36.327.965.114,00 dengan rincian sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.59
Rincian SiLPA di BUD

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1)	Dana Terikat sebesar :	<u>81.326.223.542,00</u>	<u>9.143.005.913,00</u>
	DAU PPPK	53.930.200.140,00	-
	DAU Tambahan ut 50% TPG dan Gaji ke 13 Guru	17.707.300.000,00	-
	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)	414.930.341,00	-
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-	1.468.412.504,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020	-	39.648.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021	-	858.594.286,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022	43.723.389,00	591.660.047,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023	424.653.437,00	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik :	-	-
	- Tunjangan Profesi Guru	6.052.718.218,00	977.755.700,00
	- Tambahan Penghasilan	89.224.320,00	191.750.000,00
	- BOK	2.473.764.975,00	3.195.351.093,00
	- BOKB	181.431.197,00	1.618.360.121,00
	- P3A	-	63.710.625,00
	- ADMINDUK	-	32.411.947,00
	- P2UKM	6.652.600,00	4.991.087,00
	- DANA KETAPANG PERTANIAN	1.624.925,00	186.303,00
	- Hutang Titipan Bagi Hasil Retribusi ke Provinsi.	-	100.174.200,00
2)	Dana Bebas	36.327.965.114,00	32.819.026.422,00
	Jumlah	117.654.188.656,00	41.962.032.335,00

- c. SiLPA TA 2023 di BLUD sebesar Rp16.293.308.712,44 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.60
Rincian SiLPA di BLUD

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Saldo Kas di RSUD Brebes	11.391.753.503,44	13.623.742.595,43
2	Saldo Kas di RSUD Bumiayu	1.040.500.879,00	10.254.432.338,00
3	Saldo Kas di Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	320.310.922,00	955.736.410,00
4	Saldo Kas di Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	1.853.879.238,00	1.567.068.834,00
5	Saldo Kas di Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	280.132.692,00	983.189.830,00
6	Saldo Kas di Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	536.568.085,00	791.662.581,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
7	Saldo Kas di Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	870.163.393,00	573.974.434,00
	Jumlah	16.293.308.712,44	28.749.807.022,43

- d. SiLPA TA 2023 yang berasal dari dana BOS sebesar Rp353.319.443,00. Saldo tersebut merupakan saldo tunai sebesar Rp260.539.942,00 dan saldo bank sebesar Rp92.779.501,00 yang tersebar pada 939 sekolah yaitu sebanyak 862 SD dan 77 SMP.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). SAL merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2023 adalah sebagai berikut :

5.2.1. SAL Awal

Nilai SAL awal sebesar Rp70.790.262.873,43 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2021. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan TA 2023 adalah seluruh SAL akhir TA 2022. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan TA 2023 adalah sebesar Rp70.790.262.873,43.

5.2.3. SiLPA / SiKPA

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA, nilai SiLPA pada akhir TA 2023 adalah sebesar Rp134.300.816.811,44.

5.2.4. SAL Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA TA yang lalu dan TA yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada TA 2023 adalah sebesar Rp134.300.816.811,44.

5.3. Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aset Lancar	Rp223.657.065.652,85	Rp160.968.370.769,22

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp223.657.065.652,85 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan dan Belanja Dibayar Dimuka, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.61
Rincian Aset Lancar

ASET LANCAR	TH. 2023	TH. 2022
Kas di Kas Daerah	117.654.188.656,00	41.962.032.335,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	6.934.458,00
Kas di BLUD	16.379.265.768,44	28.749.807.022,43
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
Kas Dana BOS	357.221.643,00	776.670.003,17
Kas Lainnya	-	-
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	27.173.073.439,00	28.677.796.139,50
Piutang Retribusi Daerah	487.142.401,00	208.848.751,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	954.765.060,00	898.122.799,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.465.234.663,84	14.830.189.396,46
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	7.312.338.169,00	2.936.420.982,00
Piutang Lainnya	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

ASET LANCAR	TH. 2023	TH. 2022
Penyisihan Piutang	(14.340.121.087,61)	(17.663.572.120,00)
Beban Dibayar Dimuka	75.030.681,96	77.856.971,63
Persediaan	55.138.926.258,22	59.507.264.031,03
JUMLAH ASET LANCAR	223.657.065.652,85	160.968.370.769,22

5.3.1.1.1 Kas

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Kas Rp134.390.676.067,44 Rp71.495.443.818,60

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp134.390.676.067,44 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, serta Kas Lainnya dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.62

Rincian Kas

Kas	Th. 2023	Th.2022
Kas di Kas Daerah	117.654.188.656,00	41.962.032.335,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	6.934.458,00
Kas di BLUD	16.379.265.768,44	28.749.807.022,43
Kas Dana BOS	357.221.643,00	776.670.003,17
Jumlah	134.390.676.067,44	71.495.443.818,60

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.654.188.656,00. Saldo Kas tersebut dalam bentuk rekening giro di Bank Jateng Nomor 1.028.00001.2 sebagai penampungan Kas Umum. Saldo Kas Umum Daerah hanya memiliki satu rekening giro dan ditempatkan di Bank Jateng sebagai Bank Umum yang ditunjuk.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 nihil, Adapun saldo 2022 berupa pajak DPMPTSP sebesar Rp6.934.458,00 telah disetor ke Kas Negara.

5.3.1.1.1.3 Kas di BLUD

Saldo Kas BLUD 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.379.265.768,44 dan Rp28.749.807.022,43.

Rincian kas di BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.63

Rincian Kas di BLUD

Uraian	Saldo Kas BLUD 2023	Saldo Kas BLUD 2022
Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	320.310.922,00	955.736.410,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	1.854.295.538,00	1.567.068.834,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	287.780.432,00	983.189.830,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Kas BLUD 2023	Saldo Kas BLUD 2022
Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	870.427.710,00	573.974.434,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	536.568.085,00	791.662.581,00
RSUD BREBES	11.391.753.503,44	13.623.742.595,43
RSUD BUMIAYU	1.118.129.578,00	10.254.432.338,00
Jumlah Kas di BLUD	16.379.265.768,44	28.749.807.022,43

Kas tersebut berada pada rekening bank masing-masing BLUD. Kas tersebut merupakan SiLPA BLUD 31 Desember 2023.

Saldo kas di BLUD sebesar Rp16.379.265.768,44 terdiri dari saldo kas SILPA 2023 sebesar Rp16.293.308.712,44, sedangkan sisanya adalah pajak pusat maupun pajak daerah yang belum disetor sebesar Rp85.957.056,00. Adapun saldo sebesar Rp16.239.308.712,44 tersebut terdiri atas saldo kas dari sumber dana BLUD sebesar Rp15.880.131.283,44 dan sumber dana BOK sebesar Rp499.134.485,00 dengan rincian per sumber dana dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas BLUD

Uraian	Pajak Blm Disetor (Rp)	SILPA 2023 (Rp)	Kas di BLUD 2023 (Rp)
Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	-	238.481.467,00	238.481.467,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	-	1.689.701.230,00	1.689.701.230,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	96.300,00	146.835.496,00	146.931.796,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	168.917,00	797.200.222,00	797.369.139,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	-	497.764.570,00	497.764.570,00
RSUD BREBES	-	11.391.753.503,44	11.391.753.503,44
RSUD BUMIAYU	77.628.699,00	1.040.500.879,00	1.118.129.578,00
Jumlah Kas di BLUD	77.893.916,00	15.802.237.367,44	15.880.131.283,44

2. Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Uraian	Pajak Blm Disetor (Rp)	SILPA 2023 (Rp)	Kas di BLUD 2023 (Rp)
Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	-	81.829.455,00	81.829.455,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	416.300,00	164.178.008,00	164.594.308,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	7.551.440,00	133.297.196,00	140.848.636,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	95.400,00	72.963.171,00	73.058.571,00
Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	-	38.803.515,00	38.803.515,00
RSUD BREBES	-	-	-
RSUD BUMIAYU	-	-	-
Jumlah Kas di BLUD	8.063.140,00	491.071.345,00	499.134.485,00

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BOS



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kas ini merupakan kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp357.221.643,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	URAIAN	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Dana BOS 2022	776.670.003,17	
2	Setoran Pajak 2022	698.246.487,17	
3	Saldo Kas Dana BOS 2022 setelah pengembalian (1-2)		78.423.516,00
4	Penerimaan Tahun 2023 :		
5	Pendapatan BOS Reguler 2023	200.664.421.564,00	
6	Pendapatan BOS Kinerja 2023	4.877.500.000,00	
7	Pendapatan BOP Kesetaraan 2023	12.166.995.000,00	
8	Pendapatan BOP PAUD Reguler 2023	25.059.484.200,00	
9	Pendapatan BOP PAUD Kinerja 2023	60.000.000,00	
10	Penerimaan Kelebihan Pembayaran 2022	139.549.000,00	
11	Jumlah (5 s.d 11)		242.967.949.764,00
12	Pengeluaran Tahun 2023 :		
13	Belanja Pegawai BOS	0,00	
14	Belanja Barang Jasa BOS	153.773.482.028,00	
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.514.172.147,00	
16	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	19.484.147.940,00	
17	Belanja Hibah BOS Reguler ke Sekolah Swasta	59.921.251.722,00	
18	Jumlah (13 s.d 17)		242.693.053.837,00
19	SILPA BOS (3+11-18)		353.319.443,00
20	Pajak Daerah/Restoran BOS belum disetor per 31 Des 2023		3.902.200,00
21	SALDO KAS DANA BOS TAHUN 2023 (19+20)		357.221.643,00

Saldo kas BOS merupakan bagian dari SiLPA tahun 2023. Saldo kas tersebut berada pada rekening SD dan SMP Negeri di Kabupaten Brebes. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp78.423.516,00.
2. Pendapatan BOS sebesar Rp242.967.949.764,00 merupakan:
 - a. Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik BOS dicatat pada SKPD BPKAD berupa BOS reguler, BOS Kinerja, BOP Kesetaraan, BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja sebesar Rp242.828.400.764,00;
 - b. Pendapatan lain-lain berupa penerimaan kelebihan pembayaran atas belanja SMPN 1 Salem tahun 2022 dicatat pada SKPD Dindikpora sebesar Rp139.549.000,00;
3. Pengeluaran Dana BOS diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan Mesin BOS dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp242.693.053.837,00 pada Dinas Pendidikan.
4. SiLPA TA 2023 yang berasal dari dana BOS sebesar Rp353.319.443,00.
5. Pajak BOS yang belum disetorkan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.902.200,00.

Sehingga saldo BOS 31 Desember 2023 sebesar Rp357.221.643,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Adapun saldo kas yang berada pada bendahara BOS sekolah sebesar Rp357.221.643,00 terdiri dari:

- Kas bank BOS 2023 sebesar Rp260.539.942,00;
- Kas tunai BOS 2023 sebesar Rp91.783.301,00;
- Kas tunai pajak BOS 2023 belum disetor sebesar Rp3.902.200,00;
- Kas tunai sisa kas BOS SMPN 1 Salem TA.2021 sebesar Rp996.200,00.

Penjelasan Perbedaan Kas Neraca 2023 dibandingkan SiLPA pada LRA dan Sisa Kas pada LAK

Saldo kas menurut neraca dibandingkan dengan SiLPA menurut LRA terdapat selisih dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.64

Rincian Kas menurut Neraca dan SiLPA di LRA

URAIAN	SALDO KAS 2023	SILPA	SELISIH	KETERANGAN
Kas di Kas Daerah	117.654.188.656,00	117.654.188.656,00	-	Selisih merupakan pajak belum disetor pada BLUD dan Dindikpora
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	
Kas di BLUD	16.379.265.768,44	16.293.308.712,44	85.957.056,00	
Kas BOS	357.221.643,00	353.319.443,00	3.902.200,00	
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	
JUMLAH	134.390.676.067,44	134.300.816.811,44	89.859.256,00	

Sedangkan saldo kas menurut neraca dibandingkan dengan Kas menurut LAK terdapat selisih dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.65

Rincian Kas menurut Neraca dan LAK

Uraian	Saldo Kas Neraca 2023	Kas LAK	SELISIH	KETERANGAN
Kas di Kas Daerah	117.654.188.656,00	117.654.188.656,00	-	tidak ada selisih
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	
Kas di BLUD	16.379.265.768,44	16.379.265.768,44	-	
Kas BOS	357.221.643,00	357.221.643,00	-	
JUMLAH	134.390.676.067,44	134.390.676.067,44	-	

5.3.1.1.2 Piutang

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Piutang	Rp48.392.553.732,84	Rp47.551.378.067,96

Dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.66



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Piutang

Uraian Piutang	Saldo Piutang 2023	Saldo Piutang 2022
Piutang Pajak Daerah	27.173.073.439,00	28.677.796.139,50
Piutang Retribusi Daerah	487.142.401,00	208.848.751,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	954.765.060,00	898.122.799,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.465.234.663,84	14.830.189.396,46
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	7.312.338.169,00	2.936.420.982,00
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	48.392.553.732,84	47.551.378.067,96

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah 31 Desember 2023 sebesar Rp27.173.073.439,00 sesuai dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.67

Rincian Piutang Pajak Daerah

Uraian Piutang	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th 2023
Piutang Pajak					
Piutang BPHTB Kurang Bayar	BAPENDA	7.554.109,00		(7.554.109,00)	-
Piutang Pajak Reklame	BAPENDA	242.347.325,00	104.845.950,00	(155.299.550,00)	191.893.725,00
Piutang Pajak PBB-P2	BAPENDA	28.310.859.663,00	8.399.503.545,00	(9.783.886.446,00)	26.926.476.762,00
Piutang Pajak ABT	BAPENDA	117.035.042,50	6.402.900,00	(68.734.990,50)	54.702.952,00
JUMLAH		28.677.796.139,50	8.510.752.395,00	(10.015.475.095,50)	27.173.073.439,00

1. Piutang BPHTB merupakan penyerahan dari KPP Pratama berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-13/WPJ.10/KP.0101/2010.
2. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp191.893.725,00, dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.68

Rincian Piutang Pajak Reklame

URAIAN	SALDO 2022	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2023
Pajak Reklame					
Tahun Pajak 2014	4.595.000,00		(4.595.000,00)		-
Tahun Pajak 2015	10.200.000,00		(10.200.000,00)		-
Tahun Pajak 2016	13.568.000,00		(13.568.000,00)		-
Tahun Pajak 2017	24.483.500,00		(24.483.500,00)		-
Tahun Pajak 2018	6.846.000,00				6.846.000,00
Tahun Pajak 2019	21.450.000,00				21.450.000,00
Tahun Pajak 2020	15.936.250,00				15.936.250,00
Tahun Pajak 2021	31.205.675,00		(668.250,00)		30.537.425,00
Tahun Pajak 2022	114.062.900,00		(7.995.000,00)	(93.789.800,00)	12.278.100,00
Tahun Pajak 2023		104.845.950,00			104.845.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	SALDO 2022	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2023
JUMLAH	242.347.325,00	104.845.950,00	(61.509.750,00)	(93.789.800,00)	191.893.725,00

- a. Penambahan sebesar Rp104.845.950,00 merupakan tagihan pajak reklame tahun 2023 yang belum diterima pembayarannya.
 - b. Koreksi sebesar (Rp61.509.750,00) merupakan pengurangan piutang karena penghapusan sebesar Rp52.846.500,00 dan koreksi salah catat setoran pajak tahun 2021-2022 sebesar Rp8.663.250,00 karena piutang tersebut ternyata telah diterima pembayarannya. Adapun penghapusan piutang pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes No.973/1558 Tahun 2023.
 - c. Setoran sebesar Rp93.789.000,00 merupakan penerimaan piutang tahun 2022 sehingga saldo 2023 sebesar Rp191.893.725,00.
3. Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp26.926.476.762,00 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.69
Rincian Piutang Pajak PBB-P2

URAIAN	SALDO 2022	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2023
Tahun Pajak 2014	1.086.558.531,00		(1.039.848.040,00)	(46.710.491,00)	-
Tahun Pajak 2015	1.455.338.269,00		(1.401.220.468,00)	(54.117.801,00)	-
Tahun Pajak 2016	1.681.445.117,00		(1.613.248.877,00)	(68.196.240,00)	-
Tahun Pajak 2017	1.106.329.122,00		(1.045.306.446,00)	(61.022.676,00)	-
Tahun Pajak 2018	2.256.964.437,00		(3.487.921,00)	(146.002.311,00)	2.107.474.205,00
Tahun Pajak 2019	3.184.239.250,00		(4.875.466,00)	(213.649.650,00)	2.965.714.134,00
Tahun Pajak 2020	3.709.614.896,00		(10.537.306,00)	(297.006.438,00)	3.402.071.152,00
Tahun Pajak 2021	4.656.458.413,00		(11.920.555,00)	(584.929.116,00)	4.059.608.742,00
Tahun Pajak 2022	9.173.911.628,00		(12.274.103,00)	(3.169.532.541,00)	5.992.104.984,00
Tahun Pajak 2023		8.399.503.545,00			8.399.503.545,00
TOTAL PIUTANG PBB-P2	28.310.859.663,00	8.399.503.545,00	(5.142.719.182,00)	(4.641.167.264,00)	26.926.476.762,00

- a. Penambahan sebesar Rp8.399.503.545,00 merupakan pajak tahun 2023 yang belum diterima pembayarannya.
- b. Koreksi sebesar Rp5.142.719.182,00 merupakan penghapusan piutang kadaluarsa tahun 2014-2017 sesuai Keputusan Bupati Brebes No.973/1558 Tahun 2023 sebesar Rp5.099.623.831,00. Koreksi tahun pajak 2018 s.d 2022 sebesar Rp43.095.351,00 merupakan koreksi atas objek pajak yang berubah fungsi menjadi tanah wakaf, tanah terkena abrasi, tanah berubah fungsi menjadi fasum/fasos/tanah tol serta koreksi karena dobel catat objek pajak maupun koreksi atas objek pajak tidak ada.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- c. Setoran sebesar Rp4.641.167.264,00 merupakan penerimaan pajak tahun 2014-2022.
4. Piutang Pajak ABT tahun 2022 sebesar Rp54.702.952,00 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.70
Rincian Pajak Air Bawah Tanah (ABT)

URAIAN	SALDO 2022	PENAMBAHAN	KOREKSI	SETORAN	SALDO 2023
Pajak ABT					
Tahun Pajak 2017	6.649.840,50		(6.649.840,50)		-
Tahun Pajak 2018	29.384.456,00				29.384.456,00
Tahun Pajak 2019	6.658.130,00				6.658.130,00
Tahun Pajak 2020	5.548.700,00				5.548.700,00
Tahun Pajak 2021	8.126.366,00		(3.151.600,00)		4.974.766,00
Tahun Pajak 2022	60.667.550,00		(217.000,00)	(58.716.550,00)	1.734.000,00
Tahun Pajak 2023		6.402.900,00			6.402.900,00
JUMLAH	117.035.042,50	6.402.900,00	(10.018.440,50)	(58.716.550,00)	54.702.952,00

Saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp117.035.042,50 bertambah sebesar Rp6.402.900,00 yang merupakan Pajak ABT tahun 2023 yang belum dibayar. Tahun 2023 terdapat koreksi atas pajak tahun 2017, 2021 dan 2022 sebesar (Rp10.018.440,50) karena telah dibayar. Penerimaan/setoran piutang 2023 sebesar Rp58.716.550,00, sehingga saldo 2023 sebesar Rp54.702.952,00.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi sebesar Rp487.142.401,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.71
Rincian Piutang Retribusi Daerah

URAIAN	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Setoran	Saldo Th 2023
RET. SEWA TEMPAT DI OW	DINBUDPAR	-	224.000.000,00	-	224.000.000,00
RET. SEWA TANAH	BPPKAD	206.685.651,00	66.050.870,00	(31.559.120,00)	241.177.401,00
RET. MENARA	DINKOMINFO	2.163.100,00	21.965.000,00	(2.163.100,00)	21.965.000,00
TOTAL		208.848.751,00	312.015.870,00	(33.722.220,00)	487.142.401,00

- a. Piutang Retribusi Sewa Tempat tahun 2023 pada Dinbudpar merupakan sewa loos/kios obyek wisata Waduk Malahayu a.n Geger Halang sebesar Rp280.000.000,00. Penerimaan retribusi ini dibagi



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

menjadi beberapa termin dalam setahun. Sampai dengan akhir tahun 2023 baru diterima pembayaran sebesar Rp56.000.000,00 sehingga kekurangan penerimaan retribusi ini dicatat sebagai piutang sebesar Rp224.000.000,00.

- b. Piutang Retribusi Sewa Tanah pada BPKAD merupakan tagihan kepada penyewa perorangan yang memanfaatkan tanah ex-bengkok dan tanah persawahan milik Pemkab Brebes namun belum diterima pembayarannya. Piutang saldo tahun 2022 sebesar Rp206.685.651,00, diterima pembayaran sebesar Rp31.559.120,00 dan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp66.050.870,00 sehingga saldo tahun 2023 sebesar Rp241.177.401,00.
- c. Piutang retribusi menara pada Dinkominfotik merupakan retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kab. Brebes. Saldo tahun 2022 sebesar Rp2.163.100,00, penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp21.965.000,00. Selama tahun 2023 mendapatkan setoran sebesar Rp2.163.100,00 sehingga saldo 2023 sebesar Rp21.965.000,00.

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 5.72
Rincian Piutang Bagian Laba/Deviden PMPD

Uraian	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Setoran	Saldo Th 2023
Piutang Bagian Laba atas PMPD berupa Deviden dari BUMD	PPKD	898.122.799,00	954.765.060,00	(898.122.799,00)	954.765.060,00

1. Piutang ini merupakan bagian laba/deviden yang harus diterima oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemilik modal/saham.
2. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp898.122.799,00. Atas saldo tersebut telah diterima seluruhnya yaitu dari BKK Banjarharjo sebesar Rp508.510.419,00 dan BPR Bank Brebes sebesar Rp389.612.380,00.
3. Sesuai notulen rapat perhitungan hasil usaha dan modal disetor dan pembagian deviden, bahwa BKK Jateng berkewajiban membayar deviden 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp388.171.882,00. Selanjutnya PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) berkewajiban membayar deviden 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp588.593.178,00. Atas hal tersebut dicatat sebagai piutang sehingga saldo piutang pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp954.765.060,00.
4. Deviden tahun 2023 yang wajib disetorkan oleh Bank Jateng, BPR Bank Brebes serta perusahaan daerah non lembaga keuangan sampai dengan laporan ini disusun belum diperoleh perhitungannya karena belum ditetapkan dalam RUPS.

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp14.830.189.396,46 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.73
Rincian Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2023
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (pokok)	DPKP, DPKH, DINPERINAKER, DINKOPUMDAG	2.864.244.246,00	-	(20.153.993,00)	(14.009.938,00)	2.830.080.315,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	DINKES	429.082.000,00	-	-	(429.082.000,00)	-
Piutang Denda Pajak PBB-P2	BAPENDA	6.658.628.981,54	3.139.182.287,28	(3.399.606.405,98)	-	6.398.204.862,84
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang dan Jasa	DPU	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan BLUD	RSUD/ DINKES- UPTD PUSK.	3.390.390.707,00	2.998.996.836,00	(325.000)	(3.390.065.707,00)	2.998.996.836,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	DPKP, DPKH, DINPERINAKER, DINKOPUMDAG	242.142.150,00	-	(3.256.450,00)	(933.050,00)	237.952.650,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	DINDIKPORA	1.245.701.311,92	-	-	(1.245.701.311,92)	-
JUMLAH		14.830.189.396,46	6.138.179.123,28	3.423.341.848,98	(5.079.792.006,92)	12.465.234.663,84

1. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)

- Piutang ini merupakan **pokok pinjaman** modal atau pinjaman alat/mesin kepada kelompok tani/petani, peternak, Badan Usaha Koperasi maupun Perorangan sejak tahun 2000 hingga tahun 2008. Piutang tersebut berasal dari reklasifikasi investasi non permanen lainnya ex-dana bergulir pada DPKP, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinperinaker dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah jatuh tempo namun belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2023. Sedangkan **jasa/bunga pinjaman** dicatat pada akun Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa).
- Saldo tahun 2022 sebesar Rp2.864.244.246,00. Terdapat penerimaan selama tahun 2023 sebesar Rp34.163.931,00 dalam bentuk setoran dan koreksi *crash program* pada SKPD sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.74



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Setoran Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

NAMA SKPD	SETORAN RKUD Pokok	CRASH PROGRAM Pokok	JUMLAH
DINKOPUMDAG	3.485.000,00		3.485.000,00
KOP. PERWANGGA	3.485.000,00		
DINPERINAHER	7.331.448,00	5.576.557,00	12.908.005,00
BAROKAH/SUSILOWATI	3.600.000,00		
CARSONO	673.037,00	1.104.645,00	
ENOK ASJUWITA	957.659,00		
H. SOBARUDIN	2.100.752,00	4.471.912,00	
DPKP	3.193.490,00	14.577.436,00	17.770.926,00
ROHMAN	1.170.227,00	6.511.591,00	
SLAMET RIYANTO		5.402.340,00	
SUTRISNO	2.023.263,00	2.663.505,00	
TOTAL	14.009.938,00	20.153.993,00	34.163.931,00

- 1) Terdapat setoran pokok ke RKUD sebesar Rp14.009.938,00.
 - 2) Koreksi piutang ex-dana bergulir sebesar Rp20.153.993,00 merupakan pelunasan melalui *crash program* Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.
 - c. Saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp2.830.080.315,00.
2. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari :
- a. Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) a.n Sdr. Mardiyah (Kepala Puskesmas Kemurang) sebesar Rp13.800.000,00 merupakan piutang kerugian daerah atas kehilangan sepeda motor Honda Vario Tahun 2017 a.n Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung dengan Nopol G 9890 RG. Pencatatan piutang ini mendasari pada SKTJM tanggal 24 November 2021 dan dicatat pada Laporan Keuangan Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung. Selama tahun 2023 terdapat setoran sebesar Rp6.000.000,00, sehingga saldo tahun 2023 nihil.
 - b. Tuntutan Perbendaharaan (TP) a.n Sdr. Akhmad Maulana Yusuf (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2017) sebesar Rp423.082.000,00 merupakan piutang kerugian daerah atas kehilangan uang tunai akibat pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 04 Juni 2017 di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Atas kejadian tersebut telah dilakukan penelusuran oleh Inspektorat Kabupaten Brebes sesuai Nota Dinas Nomor 700/039/Rhs/2017 tanggal 13 Juli 2017 perihal Laporan Hasil Penelusuran, Pengumpulan Bukti-Bukti yang Terkait atas Kejadian Pencurian dengan Kekerasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Serta telah dilaporkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan surat Kepala Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kesehatan Nomor 900/556/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal pemberitahuan terjadinya kehilangan uang. Piutang ini telah mendapat rekomendasi hapus buku dan hapus tagih dari Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI karena tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai surat BPK-RI No.6/S/II/2024 tanggal 23 Januari 2024. Atas hal tersebut piutang dikoreksi dan saldo tahun 2023 nihil.

3. Piutang Denda Pajak PBB-P2

Piutang Denda Pajak PBB sebesar Rp6.398.204.862,84 merupakan piutang wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2 tahun pajak 2014 sampai tahun 2023 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.75
Rincian Piutang Denda PBB-P2

Uraian	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2023
Denda Pajak PBB-P2						
Th 2014	BAPENDA	325.967.559,30		(325.967.559,30)		-
Th 2015	BAPENDA	436.601.480,70		(436.601.480,70)		-
Th 2016	BAPENDA	504.433.535,10		(504.433.535,10)		-
Th 2017	BAPENDA	331.898.736,60		(331.898.736,60)		-
Th 2018	BAPENDA	677.089.331,10		(44.847.069,60)		632.242.261,50
Th 2019	BAPENDA	955.434.318,24		(65.557.534,80)		889.876.783,44
Th 2020	BAPENDA	1.112.884.468,80		(92.263.123,20)		1.020.621.345,60
Th 2021	BAPENDA	1.396.937.523,90		(179.054.901,30)		1.217.882.622,60
Th 2022	BAPENDA	917.382.027,80	1.836.032.184,70	(955.782.717,30)		1.797.631.495,20
Th 2023	BAPENDA		1.303.150.102,58	(463.199.748,08)		839.950.354,50
Jumlah		6.658.628.981,54	3.139.182.287,28	(3.399.606.405,98)	-	6.398.204.862,84

- a. Ketentuan pengenaan denda adalah 2% per bulan dari nilai sisa piutang pajak dengan maksimal denda 15 bulan atau 30% dihitung dari bulan setelah tanggal jatuh tempo. Adapun tanggal jatuh tempo pajak PBB-P2 tahun 2014-2023 adalah 30 Agustus 2014, 31 Agustus 2015, dan 30 September 2016, 31 Agustus 2017, 31 Agustus 2018, 31 Agustus 2019, 30 Agustus 2020, 30 September 2021, 31 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2023. Perhitungan penambahan, koreksi serta setoran denda secara otomatis dihasilkan dari aplikasi SISMIOP.
- b. Saldo tahun 2022 piutang denda PBB-P2 sebesar Rp6.658.628.981,54. Pada tahun 2023 mengalami penambahan piutang denda sebesar Rp3.139.182.287,28. Koreksi kurang sebesar Rp3.399.606.405,98 karena hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Adanya kebijakan penghapusan denda seluruh tahun pajak di tahun 2023 mengakibatkan pembayaran pajak tidak dikenakan denda sama sekali. Hal ini berpengaruh pada perubahan perhitungan denda berkurang sebesar Rp1.800.705.094,28.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Penghapusan piutang PBB tahun 2014-2017 yang selanjutnya berpengaruh pada penghapusan piutang denda pajak PBB tahun 2014-2017 sebesar Rp1.598.901.311,70.
4. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa saldo tahun 2023 nihil.
5. Piutang Pendapatan BLUD

Tabel 5.76

Rincian Piutang Pendapatan BLUD

Uraian	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2023
	DINAS KESEHATAN :					-
Piutang Th 2022	BPJS DINKES-UPTD PUSK. BREBES	114.310.000,00		(325.000,00)	(113.985.000,00)	-
Piutang Th 2023	BPJS DINKES-UPTD PUSK. BREBES		22.050.000,00			22.050.000,00
Jumlah		114.310.000,00	22.050.000,00	(325.000,00)	(113.985.000,00)	22.050.000,00
Piutang Th 2022	BPJS DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	109.006.000,00			(109.006.000,00)	-
Piutang Th 2023	BPJS DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG		24.325.000,00			24.325.000,00
Jumlah		109.006.000,00	24.325.000,00	-	(109.006.000,00)	24.325.000,00
Piutang Th 2022	BPJS DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	186.881.000,00			(186.881.000,00)	-
Piutang Th 2023	BPJS DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO		48.220.000,00			48.220.000,00
Jumlah		186.881.000,00	48.220.000,00	-	(186.881.000,00)	48.220.000,00
Piutang Th 2022	BPJS DINKES-UPTD PUSK. PAGUYANGAN	158.480.000,00			(158.480.000,00)	-
Piutang Th 2023	BPJS DINKES-UPTD PUSK. PAGUYANGAN		23.980.000,00			23.980.000,00
Jumlah		158.480.000,00	23.980.000,00	-	(158.480.000,00)	23.980.000,00
Piutang Th 2022	BPJS DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	199.976.405,00			(199.976.405,00)	-
Piutang Th 2023	BPJS DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU					-
Jumlah		199.976.405,00	-	-	(199.976.405,00)	-
Piutang Th 2022	BPJS RSUD BREBES	893.133.406,00			(893.133.406,00)	-
Piutang COVID-19 Th 2022	RSUD BREBES	900.030.500,00			(900.030.500,00)	-
Piutang JS RAHARJA Th 2022	RSUD BREBES	30.164.587,00			(30.164.587,00)	-
Piutang TCM Th 2022	RSUD BREBES	91.075.000,00			(91.075.000,00)	-
Piutang MDR Th 2022	RSUD BREBES	407.603.775,00			(407.603.775,00)	-
Piutang Th 2023	BPJS RSUD BREBES		1.691.053.000,00			1.691.053.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2023
Piutang JS RAHARJA Th 2023	RSUD BREBES		310.804.274,00			310.804.274,00
Piutang TCM Th 2023	RSUD BREBES		75.825.000,00			75.825.000,00
Piutang MDR Th 2023	RSUD BREBES		790.298.562,00			790.298.562,00
Jumlah		2.322.007.268,00	2.867.980.836,00	-	(2.322.007.268,00)	2.867.980.836,00
Piutang BPJS Th 2022	RSUD BUMIAYU	299.730.034,00			(299.730.034,00)	-
Piutang COVID-19 Th 2023	RSUD BUMIAYU		12.441.000,00			12.441.000,00
Jumlah		299.730.034,00	12.441.000,00	-	(299.730.034,00)	12.441.000,00
TOTAL		3.390.390.707,00	2.998.996.836,00	(325.000,00)	(3.390.065.707,00)	2.998.996.836,00

Saldo piutang BLUD tahun 2022 sebesar Rp3.390.390.707,00, mendapatkan penambahan tahun 2023 sebesar Rp2.998.996.836,00, koreksi salah catat saldo 2022 sebesar Rp325.000,00. Penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp3.390.065.707,00, sehingga saldo akhir piutang BLUD sebesar Rp2.998.996.836,00.

6. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)
Piutang Bunga/Jasa Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada DPKP, Dinas Koperasi dan Dinperinaker merupakan piutang bunga/jasa ex-dana bergulir yang sebelumnya merupakan Investasi Non Permanen yang telah dipindahbukukan ke Piutang karena macet dan telah dihentikan penyalurannya. Saldo tahun 2022 sebesar Rp242.142.150,00. Selama tahun 2023 mendapat setoran sebesar Rp933.050,00 dan koreksi penghapusan karena adanya *crash program* Kementerian Keuangan untuk piutang yang diserahkan kepada KPKNL Tegal sebesar Rp3.256.450,00. Saldo tahun 2023 sebesar Rp237.952.650,00. Adapun mutasi tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.77
Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Uraian	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2023
Bunga/Jasa Kemitraan Bawang Merah Organik (th 2003 jt.2004)	DPKP	9.000.000,00				9.000.000,00
Bunga/Jasa Pinjaman Fasilitasi Agribisnis Kentang th 2008	DPKP	6.600.000,00				6.600.000,00
Bunga pinjaman ex-bergulir keg. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Sarprodi) Th 2008	DPKP	3.070.000,00		(190.000,00)		2.880.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	SKPD	Saldo Th 2022	Penambahan	Koreksi	Setoran	Saldo Th 2023
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Koperasi th 2003 s.d th 2008	DINKOP	151.978.950,00				151.978.950,00
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Modal/Mesin th 2002 s.d th 2006	DINPERINDAG	71.493.200,00		(3.066.450,00)	(933.050,00)	67.493.700,00
JUMLAH		242.142.150,00		(3.256.450,00)	(933.050,00)	237.952.650,00

Rincian pengurangan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa) dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.78

Rincian Pengurangan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

NAMA SKPD	SETORAN	CRASH PROGRAM	JUMLAH
	Jasa	Jasa	
DINPERINAKER	933.050,00	3.066.450,00	3.999.500,00
BAROKAH/SUSILOWATI	299.800,00		
CARSONO		1.600.000,00	
ENOK ASJUWITA	633.250,00		
H. SOBARUDIN		1.466.450,00	
DPKP		190.000,00	190.000,00
SLAMET RIYANTO		190.000,00	
TOTAL	933.050,00	3.256.450,00	4.189.500,00

7. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya tahun 2022 sebesar Rp1.245.701.311,92 yang terdiri dari Piutang dobel bayar TPP-TPG Th 2020-2022 dan piutang remunerasi dana bagi hasil *Treasury Deposit Facility (TDF)* seluruhnya telah diterima pembayarannya. Selama tahun 2023 tidak ada penambahan nilai piutang sehingga saldo piutang ini tahun 2023 nihil.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan kurang salur pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023 yang terdiri dari piutang BHP PKB, BBNKB, PBBKP dan PAP. Saldo tahun 2022 sebesar Rp2.936.420.982,00 telah diterima seluruhnya pada tahun 2023. Sedangkan piutang tahun 2023 sebesar Rp7.312.338.169,00 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi No 13/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2023 tanggal 23 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp959.327.249,00.
2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp775.640.141,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp5.574.364.254,00.
4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp3.006.525,00.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

5.3.1.1.3.1 Penyisihan piutang

	<u>31 Des 2023</u>	<u>31 Des 2022</u>
Penyisihan Piutang	14.340.121.087,61	17.663.572.120,00

Penyisihan masing-masing akun piutang tahun 2023 rinciannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.79
Penyisihan Piutang

URAIAN	NILAI PIUTANG	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Piutang Pajak Daerah	27.173.073.439,00	6.405.071.407,68	9.038.924.865,40
Piutang Retribusi Daerah	487.142.401,00	103.814.109,25	78.760.179,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	954.765.060,00	4.773.825,31	4.490.614,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.465.234.663,84	7.826.461.745,38	8.526.714.356,18
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	7.312.338.169,00	-	14.682.104,92
Piutang Lainnya	-	-	-
Jumlah	48.392.553.732,84	14.340.121.087,61	17.663.572.120,00

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.80
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

URAIAN	NILAI PIUTANG	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Piutang Pajak			
Piutang BPHTB Kurang Bayar	-	-	7.554.109,00
Piutang Pajak Reklame	191.893.725,00	30.344.907,25	72.279.007,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Piutang Pajak PBB-P2	26.926.476.762,00	6.338.535.738,33	8.932.749.771,55
Piutang Pajak ABT	54.702.952,00	36.190.762,10	26.341.977,85
JUMLAH	27.173.073.439,00	6.405.071.407,68	9.038.924.865,40

Lebih lanjut mengenai piutang ini dijelaskan sebagai berikut :

- Penyisihan Piutang Pajak BPHTB nihil
- Penyisihan Piutang Pajak Reklame

Tabel 5.81
Penyisihan Piutang Pajak Reklame

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Pajak Reklame					
Tahun Pajak 2014	-	9 TH	100%	-	4.595.000,00
Tahun Pajak 2015	-	8 TH	100%	-	10.200.000,00
Tahun Pajak 2016	-	7 TH	100%	-	13.568.000,00
Tahun Pajak 2017	-	6 TH	100%	-	24.483.500,00
Tahun Pajak 2018	6.846.000,00	5 TH	100%	6.846.000,00	3.423.000,00
Tahun Pajak 2019	21.450.000,00	4 TH	50%	10.725.000,00	10.725.000,00
Tahun Pajak 2020	15.936.250,00	3 TH	50%	7.968.125,00	1.593.625,00
Tahun Pajak 2021	30.537.425,00	2 TH	10%	3.053.742,50	3.120.567,50
Tahun Pajak 2022	12.278.100,00	1-2 TH	10%	1.227.810,00	570.314,50
Tahun Pajak 2023	104.845.950,00	<1TH	0,5%	524.229,75	
JUMLAH	191.893.725,00			30.344.907,25	72.279.007,00

c. Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2

Tabel 5.82
Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Pajak PBB-P2					
Tahun Pajak 2014	-	9 TH	100%	-	1.086.558.531,00
Tahun Pajak 2015	-	8 TH	100%	-	1.455.338.269,00
Tahun Pajak 2016	-	7 TH	100%	-	1.681.445.117,00
Tahun Pajak 2017	-	6 TH	100%	-	1.106.329.122,00
Tahun Pajak 2018	2.107.474.205,00	5 TH	100%	2.107.474.205,00	1.128.482.218,50
Tahun Pajak 2019	2.965.714.134,00	4 TH	50%	1.482.857.067,00	1.592.119.625,00
Tahun Pajak 2020	3.402.071.152,00	3 TH	50%	1.701.035.576,00	370.961.489,60
Tahun Pajak 2021	4.059.608.742,00	2 TH	10%	405.960.874,20	465.645.841,30
Tahun Pajak 2022	5.992.104.984,00	1-2 TH	10%	599.210.498,40	45.869.558,15
Tahun Pajak 2023	8.399.503.545,00	<1TH	0,5%	41.997.517,73	
TOTAL PIUTANG PBB-P2	26.926.476.762,00			6.338.535.738,33	8.932.749.771,55



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

d. Penyisihan Piutang Pajak ABT

Tabel 5.83
Penyisihan Piutang Pajak ABT

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Pajak ABT					
Tahun Pajak 2017	-	6 TH	100%	-	6.649.840,50
Tahun Pajak 2018	29.384.456,00	5 TH	100%	29.384.456,00	14.692.228,00
Tahun Pajak 2019	6.658.130,00	4 TH	50%	3.329.065,00	3.329.065,00
Tahun Pajak 2020	5.548.700,00	3 TH	50%	2.774.350,00	554.870,00
Tahun Pajak 2021	4.974.766,00	2 TH	10%	497.476,60	812.636,60
Tahun Pajak 2022	1.734.000,00	1-2 TH	10%	173.400,00	303.337,75
Tahun Pajak 2023	6.402.900,00	<1TH	0,5%	32.014,50	
JUMLAH	54.702.952,00			36.190.762,10	26.341.977,85

2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.84
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

URAIAN	NILAI PIUTANG	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
RET. SEWA TEMPAT DI OW	224.000.000,00	1.120.000,00	-
RET. SEWA TANAH	241.177.401,00	102.584.284,25	77.342.434,00
RET. MENARA	21.965.000,00	109.825,00	1.417.745,50
TOTAL	487.142.401,00	103.814.109,25	78.760.179,50

Lebih lanjut tentang piutang retribusi per-SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyisihan piutang retribusi pada Dinbudpora dan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.85
Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinbudpar

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
--------	---------------	------	--------------	--------------------	--------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Pengelolaan objek wisata waduk malahayu oleh (GEGER HALANG) per tahun RP280.000.000,00. Pembayaran 2023 di termin pertama sebesar Rp.56.000.000 (22/12/2023) Perjanjian No. 900/0808/X/2023 dan 07/P.GH/IX/2023 tgl 26/10/23 s.d 26/10/24	224.000.000,00	<1 th	0,5%	1.120.000,00	
JUMLAH	224.000.000,00			1.120.000,00	-

- b. Penyisihan piutang retribusi pada BPKAD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.86
Penyisihan Piutang Retribusi pada BPKAD

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Retribusi sewa tanah Th 2017	12.425.000,00	>3 th	100%	12.425.000,00	12.425.000,00
Retribusi sewa tanah Th 2018	15.997.000,00	>3 th	100%	15.997.000,00	15.997.000,00
Retribusi sewa tanah Th 2019	36.184.272,00	>3 th	100%	36.184.272,00	36.184.272,00
Retribusi sewa tanah Th 2020	19.961.880,00	>3 th	100%	19.961.880,00	9.980.940,00
Retribusi sewa tanah Th 2021	21.575.100,00	2-3 th	50%	10.787.550,00	2.257.510,00
Retribusi sewa tanah Th 2022	68.983.279,00	1-2 th	10%	6.898.327,90	497.712,00
Retribusi sewa tanah Th 2023	66.050.870,00	<1 th	0,5%	330.254,35	-
JUMLAH	241.177.401,00			102.584.284,25	77.342.434,00

- c. Penyisihan piutang retribusi pada Dinkominfotik disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.87
Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinkominfotik

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Piutang Retribusi Menara Th 2017	-	>3 th	100%	-	1.414.000,00
Piutang Retribusi Menara Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	3.745,50



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Piutang Retribusi Menara Th 2023	21.965.000,00	0-1 th	0,50%	109.825,00	
JUMLAH	21.965.000,00			109.825,00	1.417.745,50

3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.88

Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Piutang Bagian Laba atas PMPD berupa Deviden dari BUMD	954.765.060,00	> 1 TH	0,5%	4.773.825,31	4.490.614,00

4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.89

Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

URAIAN	NILAI PIUTANG	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (pokok)	2.830.080.315,00	2.830.080.315,00	2.864.244.246,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	42.908.200,00
Piutang Denda Pajak PBB-P2	6.398.204.862,84	4.743.433.796,20	5.134.516.394,58
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
Piutang Pendapatan BLUD	2.998.996.836,00	14.994.984,18	16.951.953,54
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	237.952.650,00	237.952.650,00	242.142.150,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	-	-	225.951.412,07
JUMLAH	12.465.234.663,84	7.826.461.745,38	8.526.714.356,18

- a. Penyisihan piutang hasil pengelolaan dana bergulir (pokok) masing-masing SKPD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.90

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
--------	---------------	------	-----------------	-----------------------	-----------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Pinjaman Modal Kemitraan Bawang Merah Organik dan pinjaman modal alsintan th 2002- 2008(Pokok)	413.778.752,00	14-20 th	100%	413.778.752,00	431.549.678,00
Pinjaman Bergulir Kepada Koperasi (Pokok)	1.376.127.599,00	13-18 th	100%	1.376.127.599,00	1.379.612.599,00
Pinjaman Bergulir Modal/Mesin Kepada Industri Kecil Binaan (Pokok)	803.757.873,00	15-19 th	100%	803.757.873,00	816.665.878,00
Pinjaman Bergulir Kepada Kelompok Temak Binaan (Pokok)	236.416.091,00	13-20 th	100%	236.416.091,00	236.416.091,00
JUMLAH	2.830.080.315,00			2.830.080.315,00	2.864.244.246,00

- b. Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bersaldo nihil
c. Penyisihan Piutang Denda PBB-P2 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.91
Penyisihan Piutang Denda PBB-P2

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Denda Pajak PBB- P2					
Th 2014	-	9 th	100%	-	325.967.559,30
Th 2015	-	8 th	100%	-	436.601.480,70
Th 2016	-	7 th	100%	-	504.433.535,10
Th 2017	-	6 th	100%	-	331.898.736,60
Th 2018	632.242.261,50	5 th	100%	632.242.261,50	677.089.331,10
Th 2019	889.876.783,44	4 th	100%	889.876.783,45	955.434.318,25
Th 2020	1.020.621.345,60	3 th	100%	1.020.621.345,60	1.112.884.468,80
Th 2021	1.217.882.622,60	2 th	100%	1.217.882.622,61	698.468.761,96
Th 2022	1.797.631.495,20	1-2 th	50%	898.815.747,60	91.738.202,78
Th 2023	839.950.354,50	< 1th	10%	83.995.035,45	
Total	6.398.204.862,84			4.743.433.796,20	5.134.516.394,58

- d. Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan Atas Pengadaan Barang dan Jasa bersaldo nihil.
e. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD masing-masing BLUD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.92
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	Penyisihan %	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
--------	---------------	------	-----------------	-----------------------	--------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	Penyisihan %	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
DINAS KESEHATAN :					
DINKES-UPTD PUSKESMAS BREBES					
Piutang BPJS Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	571.550,00
Piutang BPJS Th 2023	22.050.000,00	<1 th	0,5%	110.250,00	
Jumlah	22.050.000,00			110.250,00	571.550,00
DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG					
Piutang BPJS Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	545.030,00
Piutang BPJS Th 2023	24.325.000,00	<1 th	0,50%	121.625,00	
Jumlah	24.325.000,00			121.625,00	545.030,00
DINKES-UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO					
Piutang BPJS Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	934.405,00
Piutang BPJS Th 2023	48.220.000,00	<1 th	0,50%	241.100,00	
Jumlah	48.220.000,00			241.100,00	934.405,00
DINKES-UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN					
Piutang BPJS Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	792.400,00
Piutang BPJS Th 2023	23.980.000,00	<1 th	0,50%	119.900,00	
Jumlah	23.980.000,00			119.900,00	792.400,00
DINKES-UPTD PUSKESMAS BUMIAYU					
Piutang BPJS Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	999.882,03
Piutang BPJS Th 2023	-	<1 th	0,50%	-	-
Jumlah	-			-	999.882,03
RSUD BREBES					
Piutang BPJS Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	4.465.667,03
Piutang COVID-19 Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	4.500.152,50
Piutang JS RAHARJA Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	150.822,94
Piutang TCM Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	455.375,00
Piutang MDR Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	2.038.018,88
Piutang BPJS Th 2023	1.691.053.000,00	<1 th	0,50%	8.455.265,00	
Piutang JS RAHARJA Th 2023	310.804.274,00	<1 th	0,50%	1.554.021,37	
Piutang TCM Th 2023	75.825.000,00	<1 th	0,50%	379.125,00	
Piutang MDR Th 2023	790.298.562,00	<1 th	0,50%	3.951.492,81	
Jumlah	2.867.980.836,00			14.339.904,18	11.610.036,34
RSUD BUMIAYU					
Piutang BPJS Th 2022	-	1-2 th	10,00%	-	1.498.650,17
Piutang COVID-19 Th 2023	12.441.000,00	<1 TH	0,50%	62.205,00	
Jumlah	12.441.000,00			62.205,00	1.498.650,17
TOTAL	2.998.996.836,00			14.994.984,18	16.951.953,54

f. Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa) masing-masing SKPD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.93



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)

URAIAN	NILAI PIUTANG	UMUR	% Penyisihan	Penyisihan th 2023	Penyisihan th 2022
Bunga/Jasa Kemitraan Bawang Merah Organik (th 2003 jt.2004)	9.000.000,00	19 th	100%	9.000.000,00	9.000.000,00
Bunga/Jasa Pinjaman Fasilitas Agribisnis Kentang (th 2008 j.t 12 th)	6.600.000,00	15 th	100%	6.600.000,00	6.600.000,00
Bunga pinjaman ex-bergulir keg. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Sarprodi) Th 2008	2.880.000,00	15 th	100%	2.880.000,00	3.070.000,00
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Koperasi th 2003 s.d th 2008	151.978.950,00	15-19 th	100%	151.978.950,00	151.978.950,00
Bunga/Jasa Pinjaman Bergulir Modal/Mesin th 2002 s.d th 2006	67.493.700,00	16-20 th	100%	67.493.700,00	71.493.200,00
JUMLAH	237.952.650,00			237.952.650,00	242.142.150,00

5. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 dan 2022 nihil
6. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2023 bersaldo nihil.
7. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya tahun 2023 dan 2023 bersaldo nihil.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Beban dibayar dimuka	Rp75.030.681,96	Rp77.856.971,64

Rincian Beban Dibayar Dimuka (BDDM) disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.94
 Beban Dibayar Dimuka

SKPD	TH. 2023	TH. 2022
Dinas Kominfotik	5.045.560,17	6.084.049,67
Dinas Pertanian TPH	14.583.333,33	25.833.333,33
Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo	46.758.855,00	38.508.855,00
Dinkes-UPTD Pusk. Tanjung	3.184.600,13	7.430.733,63
BPKAD	5.458.333,33	-
Jumlah	75.030.681,96	77.856.971,64

1. Beban Dibayar Dimuka pada Dinkominfotik merupakan Belanja Sewa Frekuensi Radio Singosari TOP FM Paguyangan dan Radio Singosari Brebes serta Iuran Penyelenggaraan Penyiaran untuk 12 bulan. Perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.95
 Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinkominfotik



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bln)	Umur per 31 Des 2023 (bln)	Sisa Umur per 31 Des 2023 (bln)	Beban per bulan	Beban s.d 2023	BDDM 2023
Belanja sewa alat bantu lainnya - Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan - Sewa Frekuensi Singosari TOP FM Paguyangan	2.894.194,00	periode 25 feb 2022 s.d 24 feb 2023	12	12	0	241.182,83	2.894.194,00	-
Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Singosari FM Brebes	1.450.000,00	periode th 2024	12	0	12	120.833,33	-	1.450.000,00
Ijin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Singosari 2 TOP FM Paguyangan	1.375.000,00	periode Maret 2023 s.d Feb 2024	12	9	3	114.583,33	1.031.250,00	343.750,00
Sewa Frekuensi Radio Singosari TOP FM Paguyangan	2.952.079,00	periode Feb 2023 s.d Jan 2024	12	10	2	246.006,58	2.460.065,83	492.013,17
Hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) Radio Singosari FM Brebes	2.759.797,00	periode th 2024	12	0	12	229.983,08	-	2.759.797,00
JUMLAH	17.032.754,00						11.987.193,83	5.045.560,17

2. Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pertanian KP merupakan sewa gedung/kantor/tempat BPP Larangan, Tonjong dan Bulakamba untuk 24 bulan, 36 bulan dan 12 bulan. Perhitungannya disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 5.96

Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pertanian KP

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bln)	Umur per 31 Des 2023 (bln)	Sisa Umur per 31 Des 2023 (bln)	Beban per bulan	Beban s.d 2023	BDDM 2023
Sewa tempat BPP Tonjong	15.000.000,00	September 2022 s.d Agustus 2025	36	16	20	416.666,67	6.666.666,67	8.333.333,33
Sewa tempat BPP Larangan	15.000.000,00	September 2022 s.d Agustus 2024	24	16	8	625.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
Sewa tempat BPP Bulakamba	15.000.000,00	Feb 2023 s.d Feb 2024	12	11	1	1.250.000,00	13.750.000,00	1.250.000,00
JUMLAH	45.000.000,00						30.416.666,67	14.583.333,33

3. Beban Dibayar Dimuka pada Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo merupakan sewa gedung kantor untuk 24 bulan dan 12 bulan. Serta beban dibayar di muka atas pengembalian/retur obat ke penyedia jasa namun



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

sampai dengan laporan ini disusun barang penggantinya belum diterima. Perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.97

Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bln)	Umur per 31 Des 2023 (bln)	Sisa Umur per 31 Des 2023 (bln)	Beban per bulan	Beban s.d 2023	BDDM 2023
Sewa Bangunan Kantor	88.000.000,00	Okt 2021 s.d Sep 2023	24	24	0	3.666.666,67	88.000.000,00	-
Retur Persediaan ke Penyedia Jasa namun belum diterima barang penggantinya	5.508.855,00	sampai dengan diterima barang pengganti						5.508.855,00
Sewa Bangunan Kantor	55.000.000,00	Okt 2023 s.d Sep 2024	12	3	9	4.583.333,33	13.750.000,00	41.250.000,00
JUMLAH	148.508.855,00						101.750.000,00	46.758.855,00

4. Beban Dibayar Dimuka pada Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung merupakan biaya premi asuransi kendaraan untuk 24 bulan. Perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.98

Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bln)	Umur per 31 Des 2023 (bln)	Sisa Umur per 31 Des 2023 (bln)	Beban per bulan	Beban s.d 2023	BDDM 2023
Premi Asuransi Kendaraan	8.492.267,00	20 Okt 2022 - 20 Okt 2024	24	15	9	353.844,46	5.307.666,88	3.184.600,13
JUMLAH	8.492.267,00						5.307.666,88	3.184.600,13

5. Beban Dibayar Dimuka pada BPKAD merupakan biaya internet tahunan untuk 12 bulan. Perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.99

Rincian Beban Dibayar Dimuka BPKAD

Uraian	Nilai Transaksi	Masa Berlaku	Masa Manfaat (bln)	Umur per 31 Des 2023 (bln)	Sisa Umur per 31 Des 2023 (bln)	Beban per bulan	Beban s.d 2023	BDDM 2023
Belanja internet tagihan BIZNET Metronet 4A	65.500.000,00	periode Februari 2023 s.d Februari 2024	12	11	1	5.458.333,33	60.041.666,67	5.458.333,33
JUMLAH	65.500.000,00						60.041.666,67	5.458.333,33



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.1.5 Persediaan

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Persediaan	55.138.926.258,22	59.507.264.031,03

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasannya berpindah. Pada akhir periode persediaan dicatat disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Metode penilaian persediaan adalah FIFO. Rincian persediaan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.100
Rekapitulasi Persediaan

Jenis Persediaan	Th 2023	Th 2022
Persediaan Bahan	55.684.970,00	97.343.065
Persediaan Suku Cadang	135.000,00	4.665.000
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.228.043.760,73	5.111.548.888
Persediaan Obat-Obatan	49.529.891.755,49	54.053.565.846
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	156.442.558,00	96.208.310
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.253.296,00	57.884.446
Persediaan Natura dan Pakan	98.474.918,00	86.048.476
Persediaan Penelitian	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-
JUMLAH	55.138.926.258,22	59.507.264.031

Saldo persediaan tersebut tidak termasuk di dalamnya barang kadaluarsa. Mutasi tambah/kurang persediaan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.101
Mutasi Tambah/ Kurang Persediaan

URAIAN	SALDO	KETERANGAN
Saldo Awal	59.507.264.031,03	
Penambahan :		
Koreksi (+) Saldo Awal	7.907.768.199,50	salah perhitungan persediaan alat kontrasepsi saldo th 2022, pencatatan kembali persediaan COVID, koreksi salah catat
Pengadaan / Pembelian	99.864.295.121,00	Sesuai Belanja Barang LRA
Pengadaan / Pembelian BOS	69.626.792.470,00	Reklasifikasi dr Beban Jasa BOS
Pengadaan / Pembelian BLUD	65.208.063.333,00	Reklasifikasi dr Beban Jasa BLUD
Jumlah Pengadaan	234.699.150.924,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	SALDO	KETERANGAN
Reklas Dari Aset Tetap/B. Modal	3.130.595.290,00	
Reklas Dari Extracomtabel	9.972.320,00	
Mutasi / Transfer Masuk antar SKPD/Unit	52.547.108.570,00	
Hibah Masuk	38.813.409.026,00	
Hutang Persediaan	8.983.882.960,00	
Jumlah Penambahan	346.091.887.289,50	
Pengurangan		
Koreksi (-) Saldo Awal	48.292.876,37	salah perhitungan persediaan alat kontrasepsi saldo th 2022
Pemakaian	276.995.942.578,57	
Mutasi Keluar antar SKPD/Unit	52.547.108.570,00	
Hibah Keluar	14.126.390.294,00	
Reklas Ke Aset Tetap	155.663.500,00	
Reklas Ke Beban Pemeliharaan	4.245.000,00	
Pindah Ke Kadaluarsa/Rusak	2.838.609.236,37	
Pembayaran Hutang Persediaan Tahun Lalu	3.743.973.007,00	
Jumlah Pengurangan	350.460.225.062,31	
Saldo Akhir	55.138.926.258,22	

Mutasi persediaan sebagai berikut.

1. Penambahan

- a. Koreksi Tambah Saldo Awal sebesar Rp7.907.768.199,50 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.102
Koreksi Tambah Saldo Awal Persediaan

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINKES – UPTD PUSK. BUMIAYU (PKM BENTAR)	5.120,00	salah perhitungan persediaan AC swab saldo th 2022
DINKES - GUDANG FARMASI	990.589.000,00	perhitungan kembali persediaan COVID saldo th 2022
DINKES – UPTD PUSK. BREBES	6.636.890.024,00	perhitungan kembali persediaan COVID saldo th 2022
DINKES – UPTD PUSK. TANJUNG	100.944.821,00	perhitungan kembali persediaan COVID saldo th 2022
DINKES – UPTD PUSK.TANJUNG (PKM SIWULUH)	0,38	koreksi salah catat nilai persediaan
DINKES – UPTD PUSK. BANJARHARJO	40.524.035,00	perhitungan kembali persediaan COVID saldo th 2022
DINKES – UPTD PUSK. PAGUYANGAN	138.794.800,00	perhitungan kembali persediaan COVID saldo th 2022
RSUD BREBES	20.399,12	Koreksi penyesuaian volume obat
JUMLAH	7.907.768.199,50	

- b. Pengadaan/pembelian selama tahun 2023 sebesar Rp234.699.150.924,00 terdiri dari Belanja Barang pada LRA sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rp99.864.295.121,00, pengadaan persediaan BOS (tercatat pada akun belanja jasa BOS) sebesar Rp69.626.792.470,00, dan pengadaan persediaan BLUD (tercatat pada belanja jasa BLUD) sebesar Rp65.208.063.333,00. Realisasi belanja persediaan ini termasuk pembayaran utang persediaan tahun sebelumnya.

- c. Reklasifikasi dari belanja modal/aset tetap sebesar Rp3.130.595.290,00 merupakan penambahan persediaan yang berasal dari Aset Tetap. Rinciannya dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.103
Reklasifikasi dari Belanja Modal / Aset Tetap

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	15.120.000,00	karpet
DINKES - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	9.966.690,00	peralatan laboratorium habis pakai (gelas ukur, pipet, box dll)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO KETANGGUNGAN	25.039.800,00	bantal, spre, center, klem
DINAS PEKERJAAN UMUM	2.188.823.000,00	bahan bangunan
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	17.415.000,00	sepatu keamanan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.600.000,00	sepatu keamanan, jas hujan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	126.396.000,00	sarung tangan, baju selam, tas, helm, kunci pas, tenda, selang dll
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	55.513.000,00	suku cadang alat laboratorium
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.050.000,00	fitras, kain polos, buket bunga
KEC.BREBES - KEL.PASARBATANG	205.000,00	Connector RJ 45
KEC. BREBES - KEL LIMBANGAN KULON	125.000,00	Connector RJ 45
DINAS PERHUBUNGAN	677.341.800,00	armatur lampu LED
TOTAL	3.130.595.290,00	

- d. Reklasifikasi dari ekstrakomtabel sebesar Rp9.972.320,00 merupakan penambahan persediaan dari ekstrakomtabel tahun lalu. Rinciannya dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.104
Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINKES - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	9.336.420,00	peralatan laboratorium habis pakai (gelas ukur, rak tabung, box container, laci plastik, sikat dll)
DINKES	635.900,00	box plastik, alat pel



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	(Rp)	Keterangan
JUMLAH	9.972.320,00	

- e. Mutasi masuk antar SKPD/Unit Kerja sebesar Rp52.547.108.570,00 merupakan transfer masuk persediaan yang diterima antar SKPD/Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Brebes. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.105

Rincian Mutasi Masuk Persediaan antar SKPD/Unit

SKPD	(Rp)	Klasifikasi Barang
DINKES - UPTD PUSKESMAS	43.753.921.275,00	Obat
DINKES - UPTD PUSKESMAS	3.482.747.364,00	Obat-obatan Lainnya/Alkon
RSUD BREBES	3.425.514.991,00	Obat
RSUD BREBES	467.385.056,00	Obat-obatan Lainnya/Alkon
RSUD BUMIAYU	1.381.292.640,00	Obat
RSUD BUMIAYU	36.247.244,00	Obat-obatan Lainnya/Alkon
JUMLAH	52.547.108.570,00	

Mutasi/transfer persediaan di lingkungan SKPD/Unit kerja berupa obat-obatan dan alat kontrasepsi.

- f. Hibah masuk persediaan sebesar Rp38.813.409.026,00 merupakan penerimaan hibah barang persediaan dari pihak lain di luar instansi Pemerintah Kabupaten Brebes yang meliputi logistik Covid maupun non Covid dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.106

Hibah Masuk Persediaan

SKPD	Pemberi	Lembaga	Ket. Barang	(Rp)
BPBD	Pemerintah Provinsi	BPBD Jateng	selimut, karung, kaos, jas hujan, sembako dll	162.827.902,00
	Pemerintah Pusat	BNPB	sembako, karung plastik, dolken	121.200.000,00
DISDUKPI	Pemerintah Pusat	Dirjen Dukupil Kemendagri	barang cetakan kependudukan	997.486.300,00
DP3KB	Pemerintah Provinsi	BKKBN	alat kontrasepsi	3.845.457.100,00
DINKES	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	Yayasan KNCV	obat & BHP alkes	51.131.168,00
		Yayasan Simpul	obat program gizi	155.939.000,00
	Pemerintah Kabupaten/Kota Lain	Dinkes Kota Pekalongan	BHP alkes	3.740.000,00
		Dinkes Pemalang	vaksin DPT-HB/Hib	61.920.000,00
	Pemerintah Provinsi	Dinkes Jateng	vaksin rutin, obat ARV HIV/AIDS, malaria, TB, hepatitis, vaksin COVID	33.232.959.626,00
Pemerintah Pusat	Kemenkes	BHP alkes untuk program gizi	180.747.930,00	
JUMLAH				38.813.409.026,00

- g. Hutang Belanja Barang/Persediaan merupakan hutang pengadaan barang persediaan yang per tanggal 31 Desember 2023 belum dibayar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

karena barang telah diterima namun proses pembayarannya belum selesai. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.107
Hutang Pengadaan Persediaan

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINKES - UPTD PUSK. PAGUYANGAN	69.931.400,00	BMHP/ALKES
RSUD BREBES	787.500.000,00	BANK DARAH
RSUD BREBES	3.985.557.959,00	BMHP/ALKES
RSUD BREBES	3.211.450.379,00	OBAT-OBATAN
RSUD BREBES	<u>22.196.171,00</u>	REAGEN
Jumlah	8.006.704.509,00	
RSUD BUMIAYU	52.070.000,00	BANK DARAH
RSUD BUMIAYU	199.733.015,00	BMHP/ALKES
RSUD BUMIAYU	51.730.440,00	ISI TABUNG GAS
RSUD BUMIAYU	592.505.488,00	OBAT-OBATAN
RSUD BUMIAYU	<u>11.208.108,00</u>	REAGEN
Jumlah	907.247.051,00	
JUMLAH	8.983.882.960,00	

2. Pengurangan

- a. Koreksi Kurang Saldo tahun 2023 sebesar Rp48.292.876,37 merupakan salah catat persediaan obat-obatan dan alat kontrasepsi. Rinciannya dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.108
Koreksi Kurang Saldo Awal

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINKES – UPTD PUSK. BUMIAYU (PKM BENTAR)	47.752.876,00	salah perhitungan persediaan alat kontrasepsi saldo th 2022
DINKES – UPTD PUSK. BANJARHARJO	0,37	koreksi salah entri harga obat
DINKES – UPTD PUSK. PAGUYANGAN	540.000,00	penyesuaian dengan kondisi fisik
JUMLAH	48.292.876,37	

- b. Pemakaian persediaan tahun 2023 sebesar Rp276.995.942.578,57.
c. Mutasi keluar antar SKPD/Unit Kerja sebesar Rp52.547.108.570,00 merupakan transfer keluar antar SKPD/unit Kerja di lingkungan Kabupaten Brebes. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.109
Rincian Mutasi Keluar Persediaan antar SKPD/Unit

SKPD	(Rp)	Keterangan
------	------	------------



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINAS KESEHATAN	48.743.324.006,00	Obat Gudang Farmasi
DINAS KESEHATAN	552.960.000,00	Reagen BMHP Surveillance Air Minum
DP3KB	3.250.824.564,00	Obat-obatan Lainnya/Alkon
JUMLAH	52.547.108.570,00	

Mutasi/transfer keluar persediaan di lingkungan SKPD/Unit kerja berupa obat-obatan, reagen dan alat kontrasepsi.

- d. Bantuan Sosial/Hibah persediaan sebesar Rp14.126.390.294,00 merupakan hibah kepada pihak di luar instansi Pemerintah Kabupaten Brebes. Rinciannya disajikan sesuai tabel berikut ini.

Tabel 5.110
Bantuan Sosial Persediaan

SKPD	(Rp)	Penerima	Keterangan
BPBD	336.384.558,00	Masyarakat korban bencana	logistik bencana, sembako, kawat bronjong dll
	<u>3.610.000,00</u>	SMK Muhammadiyah Bumiayu	sabun cuci tangan/handsanitizer
	339.994.558,00		
DP3KB	349.230.000,00	Kelompok Masyarakat RS dan klinik swasta	alat kontrasepsi
	<u>375.884.863,00</u>		alat kontrasepsi
	725.114.863,00		
Dinkes-UPTD FARMASI	79.551.784,00	DINKES Kab. Batang	vaksin HPV
	37.502,00	DINKES Kota Tegal	obat-obatan
	948.376,00	DINKES Prov Jateng	obat-obatan
	<u>1.187.058.561,00</u>	RS dan klinik swasta	obat dan BHP alkes
	1.267.596.223,00		
DPKP	173.222.100,00	Kelompok tani/petani	bibit tanaman
DINPERWASKIM	11.592.944.000,00	Masyarakat penerima program jambanisasi	bahan baku pembangunan jamban
DINAS SOSIAL	27.518.550,00	Masyarakat penyandang disabilitas	walker, hearing aids, tongkat tuna netra, kursi roda, walker dll
JUMLAH	14.126.390.294,00		

- e. Reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp155.663.500,00 rinciannya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.111
Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINKES - UPTD PUSK. PAGUYANGAN (PKM TONJONG)	1.475.000,00	jemuran
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	63.900.000,00	meterai Rp10.000,00 untuk pensertifikatan tanah
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	77.975.000,00	bahan baku bangunan untuk rehab bangunan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	985.000,00	harddisk eksternal
KECAMATAN BREBES	10.328.500,00	bahan baku bangunan untuk rehab bangunan
KEC. BREBES - KEL.GANDASULI	1.000.000,00	slumpang/backdrop
JUMLAH	155.663.500,00	

- f. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp4.245.000,00 merupakan reklasifikasi persediaan Bahan Lainnya ke Beban Pemeliharaan Kendaraan (Pajak Kendaraan Dinas).
- g. Pindah kedaluwarsa sebesar Rp2.838.609.236,37 berupa perlengkapan rumah tangga dan obat-obatan. Persediaan yang sudah kedaluwarsa tidak dicatat dalam neraca. Persediaan yang telah kedaluwarsa bisa diusulkan SKPD untuk dilakukan pemusnahan atau penghapusan. Rincian barang persediaan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.112
Reklasifikasi Persediaan ke Kedaluwarsa

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINAS KESEHATAN		
GUDANG FARMASI	1.642.232.961,00	obat-obatan
DINKES-UPTD PUSK. BREBES	570.457.743,00	obat-obatan
DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	75.864.867,00	obat-obatan
DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	45.356.992,00	obat-obatan
DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	26.866.041,00	obat-obatan
DINKES-UPTD PUSK. PAGUYANGAN	<u>28.159.065,00</u>	obat-obatan
	2.388.937.669,00	
RSUD BREBES	163.247.540,67	obat-obatan
RSUD BUMIAYU	265.988.800,70	obat-obatan
DINKOPUMDAG	20.435.226,00	karcis pasar
JUMLAH	2.838.609.236,37	

- h. Pembayaran hutang persediaan sebesar Rp3.743.973.007,00. Belanja atas pembayaran hutang ini dihitung sebagai pengurang nilai persediaan karena merupakan belanja tahun 2023 namun barang persediaan telah diterima pada tahun sebelumnya. Pembayaran utang tersebut berupa obat-obatan pada Dinkes dan Dinkes-UPTD Puskesmas, RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu serta karcis pasar pada Dinkopumdag.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Investasi Jangka Panjang tahun 2023 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen 31 Desember 2023 sebesar Rp225.398.487.088,77 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp193.661.007.479,07.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen tahun 2023 nihil.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp225.398.487.087,77	Rp193.661.007.479,07

Investasi Jangka Panjang permanen sebesar Rp225.398.487.087,77 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode ekuitas dan metode biaya dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.113
Investasi Permanen-PMPD BUMD

Perusahaan Daerah	Saldo PMPD 2023	Saldo PMPD 2022
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :		
BPD JATENG	57.102.000.000,00	51.602.000.000,00
BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.570.000.000,00	13.070.000.000,00
PD. BPR BKK BANJARHARJO	10.952.920.310,27	9.765.255.341,57
PD. BPR PUSPA KENCANA/BANK BREBES	16.264.620.214,00	14.978.514.507,00
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :		
PDAM TIRTA BARIBIS	123.539.960.454,00	100.964.926.973,00
PERUSDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50
PERUSDA PERCETAKAN	3.378.129.870,00	2.575.810.686,00
PERUSDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	220.924.511,00	334.568.243,00
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00
JUMLAH	225.398.487.087,77	193.661.007.479,07

Pada tahun 2023 terdapat penambahan penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp22.500.000.000,00 sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Baribis sebesar Rp14.500.000.000,00 yang dibayar dengan SP2D nomor: 00987/4/LS/03/23 tanggal 17 Maret 2023, 01855/4/LS/04/23 tanggal 13 April 2023, 02464/4/LS/05/23 tanggal 12 Mei 2023, 03555/4/LS/06/23 tanggal 27 Juni 2023, 04752/4/LS/07/23 tanggal 31 Juli 2023, 05910/4/LS/09/23 tanggal 01 September 2023 dan 08760/4/LS/11/23 tanggal 10 November 2023. Penyertaan modal kepada PDAM sesuai dengan perda nomor:14 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal untuk program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2. BPR Bank Brebes sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayar dengan SP2D nomor 04758/4/LS/08/23 tanggal 01 Agustus 2023.
3. Bank Jateng sebesar Rp5.500.000.000,00 yang dibayar dengan SP2D nomor 03549/4/LS/06/23 tanggal 27 Juni 2023.
4. PT BPR BKK Banjarharjo sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dibayar dengan SP2D nomor 06380/4/LS/09/23 tanggal 13 September 2023.
5. PT BPR BKK Jateng sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayar dengan SP2D nomor 06379/4/LS/09/23 tanggal 13 September 2023.
6. Perumda Percetakan Puspa Grafika sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayar dengan SP2D nomor 04513/4/LS/07/2023 tanggal 25 Juli 2023.

Rincian perhitungan PMPD dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.114
Rincian PMPD BUMD

Perusahaan Daerah	Modal Disetor	Nilai Modal di LK BUMD	Kepemilikan Daerah (%)	Saldo PMPD	Metode
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :					
BANK JATENG	57.102.000.000,00	57.102.000.000,00	1,17%	57.102.000.000,00	BIAYA
PT BPR BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.570.000.000,00	13.570.000.000,00	3,57%	13.570.000.000,00	BIAYA
PT.BPR BKK BANJARHARJO	7.320.000.000,00	24.255.032.545,00	45,16%	10.952.920.310,27	EKUITAS
BPR BANK BREBES	11.500.000.000,00	16.264.620.214,00	100%	16.264.620.214,00	EKUITAS
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :					
PDAM TIRTA BARIBIS	94.274.393.640,00	123.539.960.454,00	100%	123.539.960.454,00	EKUITAS
PERUSDA PERBENGKELAN	900.000.000,00	124.931.728,50	100%	124.931.728,50	EKUITAS
PERUMDA PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA	2.685.000.000,00	3.378.129.870,00	100%	3.378.129.870,00	EKUITAS
PERUMDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	950.000.000,00	220.924.511,00	100%	220.924.511,00	EKUITAS
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00	0,33%	245.000.000,00	BIAYA
JUMLAH	188.546.393.640,00	238.700.599.322,50		225.398.487.087,77	

- a. Perhitungan PMPD pada PD BKK Banjarharjo dan PD BPR Puspa Kencana/Bank Brebes serta Perusda non perbankan dicatat dengan **metode ekuitas** di mana PMPD merupakan nilai ekuitas BUMD dikali persentase kepemilikan. Penyertaan Modal Bank Jateng, BKK Brebes dan PRPP Jawa Tengah di mana kepemilikan Pemkab Brebes atas saham pada perusahaan tersebut kurang dari 20%, maka dicatat dengan **metode biaya**.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b. Saldo PMPD tahun 2023 sebesar Rp255.398.487.087,77 diperoleh dari nilai PMPD tahun 2022 sebesar Rp193.661.007.479,07. Penambahan selama tahun 2023 sesuai realisasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp22.500.000.000,00. Diperoleh selisih PMPD akibat hasil perhitungan ekuitas. Adapun selisih tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.237.479.608,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115

Rincian Kenaikan/Penurunan PMPD

Perusahaan Daerah	Saldo PMPD 2023	Saldo PMPD 2022	Selisih PMPD th 2023 - PMPD 2022	PMPD 2023 sesuai SP2D Pengeluarn Pembiayaan	Kenaikan/ Penurunan PMPD karena perhitungan Ekuitas
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :					
BANK JATENG	57.102.000.000,00	51.602.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-
PT BPR BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.570.000.000,00	13.070.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
PT.BPR BKK BANJARHARJO	10.952.920.310,27	9.765.255.341,57	1.187.664.968,70	1.000.000.000,00	187.664.968,70
BPR BANK BREBES	16.264.620.214,00	14.978.514.507,00	1.286.105.707,00	500.000.000,00	786.105.707,00
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :					
PDAM TIRTA BARIBIS	123.539.960.454,00	100.964.926.973,00	22.575.033.481,00	14.500.000.000,00	8.075.033.481,00
PERUMDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50	-	-	-
PERUSDA PERCETAKAN	3.378.129.870,00	2.575.810.686,00	802.319.184,00	500.000.000,00	302.319.184,00
PERUMDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	220.924.511,00	334.568.243,00	(113.643.732,00)	-	(113.643.732,00)
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-	-
JUMLAH	225.398.487.087,77	193.661.007.479,07	31.737.479.608,70	22.500.000.000,00	9.237.479.608,70

- c. Nilai penyertaan modal yang disajikan dihitung berdasarkan pada Laporan Keuangan BUMD audited dan unaudited tahun 2023.

Penjelasan masing-masing BUMD yang sebagian atau seluruhnya dimiliki pemkab Brebes adalah sebagai berikut :

1) PT BPR BKK Banjarharjo

PT BPR BKK Banjarharjo merupakan BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng dan Pemkab Brebes. Kepemilikan Pemkab Brebes atas saham tersebut sebesar 45,16%. PMPD dihitung sesuai nilai ekuitas dikalikan dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu sebesar Rp10.952.920.310,27. Dibandingkan PMPD tahun 2022, PMPD 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.187.664.968,00 karena persentase kepemilikan saham Pemkab



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Brebes naik dengan adanya penambahan modal Pemkab Brebes sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kenaikan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp187.664.968,70 karena adanya perolehan laba tahun 2023. Laporan Keuangan PT BPR BKK Banjarharjo telah diaudit dan memperoleh opini WTP sesuai Laporan Auditor Independen KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso nomor: 000152/2.0282/AU.2/07/0182-1/1/II/2024.

2) Perumda BPR Bank Brebes

Kepemilikan Pemkab Brebes atas saham PD BPR Bank Brebes sebesar 100%. PMPD tahun 2023 dihitung sesuai nilai ekuitas dikalikan dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu sebesar Rp16.264.620.214,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.286.105.707,00 dikarenakan adanya penambahan modal Pemkab Brebes sebesar Rp500.000.000,00 dan kenaikan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp786.105.707,00 karena adanya perolehan laba tahun 2023. Sampai dengan laporan ini disusun Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Brebes masih dalam proses audit.

3) PDAM Tirta Baribis

Kepemilikan Pemkab Brebes atas saham PDAM sebesar 100%. Pada tahun 2023 Perumda Tirta Baribis menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp14.500.000.000,00. PMPD dihitung sesuai nilai ekuitas dikalikan dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu sebesar Rp123.539.960.454,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp22.575.033.481,00 jika dibandingkan PMPD tahun 2022. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan modal pemda sebesar Rp14.500.000.000,00 dan kenaikan ekuitas PDAM sebesar Rp8.075.033.481,00 karena adanya perolehan laba pada tahun 2023. Laporan Keuangan Perumda Tirta Baribis telah diaudit dan memperoleh opini WTP sesuai Laporan Auditor Independen KAP Soekamto, Adi, Syahril & Rekan nomor: 00092/2.1301/AU.2/10/04.21-2/1/II/2024.

4) Perusda Perbengkelen

Laporan keuangan Perusda Perbengkelen terakhir yang disajikan adalah laporan keuangan per 31 Desember 2014 (audited) dan telah diaudit dan memperoleh opini tidak menyatakan pendapat sesuai Laporan Auditor Independen KAP Kumalahadi & Sugeng Pamudji Nomor 11/K.SP-SMG/LAI/IV/2015. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Perusda Perbengkelen sudah tidak beroperasi karena mengalami kerugian secara terus menerus, sehingga nilai PMPD mengalami penurunan secara signifikan dari nilai PMPD awal sebesar Rp900.000.000,00 menjadi sebesar Rp124.931.728,50 pada 31 Desember 2022. Namun demikian Pemkab Brebes belum menetapkan status Perusda Perbengkelen lebih lanjut.

5) Perumda Percetakan Puspa Grafika

Kepemilikan Pemkab Brebes atas saham Perumda Percetakan Puspa Grafika sebesar 100%. PMPD dihitung sesuai nilai ekuitas dikalikan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu sebesar Rp3.378.129.870,00. Dibandingkan PMPD tahun 2022, PMPD 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp802.319.184,00 karena adanya penambahan modal sebesar Rp500.000.000,00 dan kenaikan ekuitas sebesar Rp302.319.184,00 karena adanya perolehan laba tahun 2023. Laporan Keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika telah diaudit dan memperoleh opini WDP sesuai Laporan Auditor Independen KAP Dr, Raharja. M.Si CPA No. 00046/2.0920/AU.2/05/0611-1/II/2024.

6) Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan

Kepemilikan Pemkab Brebes atas saham Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan sebesar 100%. Pada tahun 2023 Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan tidak menerima tambahan penyertaan modal. PMPD dihitung sesuai nilai ekuitas dikalikan dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu sebesar Rp220.924.511,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp113.643.732,00 jika dibandingkan PMPD tahun 2022. Penurunan ekuitas ini dikarenakan adanya kerugian tahun 2023. Laporan Keuangan Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan telah diaudit dan memperoleh opini Tidak Wajar sesuai Laporan Auditor Independen KAP Dr, Raharja. M.Si CPA No. 00044/2.0920/AU.2/05/0611-1/II/2024. Pada tahun-tahun sebelumnya Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan mengalami kerugian secara terus menerus, sehingga nilai PMPD mengalami penurunan secara signifikan dari nilai PMPD awal sebesar Rp950.000.000,00 menjadi sebesar Rp220.924.511,00 per 31 Desember 2023.

5.3.1.3 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>Th 2023</u>	<u>Th 2022</u>
ASET TETAP	Rp3.610.784.887.020,79	Rp3.651.946.333.067,43

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penatausahaan aset tetap telah mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Mutasi aset tetap per kelompok barang tersaji dengan rincian dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.116
Rincian Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

JENIS BARANG	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
TANAH	409.557.016.978,00	37.840.571.855,00	77.656.609.842,00	369.740.978.991,00
PERLATAN DAN MESIN	1.030.297.847.322,27	99.894.231.879,00	38.820.348.104,00	1.091.371.731.097,27
GEDUNG DAN BANGUNAN	2.008.397.873.235,00	99.262.365.867,00	6.656.606.085,00	2.101.003.633.017,00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.989.364.132.076,00	201.119.029.784,00	10.976.918.354,00	3.179.506.243.506,00
ASET TETAP LAINNYA	248.314.784.855,33	19.836.755.465,00	4.800.192.914,00	263.351.347.406,33
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	16.908.477.891,00	378.662.001,00	3.140.944.000,00	14.146.195.892,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.050.893.799.290,17)	(373.725.983.029,81)	(16.284.539.431,17)	(3.408.335.242.889)
TOTAL	3.651.946.333.067,43	84.605.633.821,19	125.767.079.867,83	3.610.784.887.020,79

Tabel 5.117

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO AWAL 2023	6.702.840.132.357,60
1	BELANJA MODAL	354.569.653.571,00
2	REKLAS DARI B. PEGAWAI	19.360.000,00
3	REKLAS DARI B. JASA	6.733.008.667,00
4	REKLAS DARI B. PERSEDIAAN	155.663.500,00
5	REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	832.308.599,00
6	HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	27.233.911.164,00
7	HIBAH MASUK (PEMERINTAH PROVINSI)	308.812.992,00
8	HIBAH MASUK (PIHAK KE-3)	11.498.189.222,00
9	MUTASI MASUK	14.346.926.791,00
10	HUTANG ASET	211.958.154,00
11	REKLAS DARI ASET LAINNYA (RUSAK BERAT)	5.000.000,00
12	REKLAS ASET TETAP DARI KDP	3.104.444.000,00
13	KOREKSI TAMBAH (HIBAH MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	34.539.669.653,00
14	KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	1.252.737.157,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
15	KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI DETAIL ENGEENERING KE ASET TETAPNYA TAHUN SEBELUMNYA)	36.500.000,00
16	KOREKSI TAMBAH	268.955.053,00
17	REKLAS DARI BM ASET LAINNYA BLUD	3.214.518.328,00
	JUMLAH PENAMBAHAN	458.331.616.851,00
1	EXTRAKOMTABLE	805.272.035,00
2	REKLAS KE B. PERSEDIAAN	3.130.595.290,00
3	REKLAS KE B. PEMELIHARAAN	7.229.331.000,00
4	REKLAS KE B. JASA	4.000.000,00
5	HIBAH KELUAR	13.615.252.009,00
6	MUTASI KELUAR	14.346.926.791,00
7	REKLAS DARI KDP KE ASET TETAP	3.140.944.000,00
8	RUSAK BERAT	3.643.384.574,00
9	PENGHAPUSAN BARANG B/RR	18.412.005.781,00
10	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	317.658.300,00
11	KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	1.252.737.157,00
12	KOREKSI KURANG (BHP TAHUN SEBELUMNYA)	6.487.520,00
13	KOREKSI KURANG	76.147.024.842,00
	JUMLAH PENGURANGAN	142.051.619.299,00
	SALDO AKHIR 2023	7.019.120.129.909,60

5.3.1.3.1 Tanah

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tanah	Rp369.740.978.991,00	Rp409.557.016.978,00

Menurut PSAP 07 Paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tanah yang tercatat dalam Neraca tahun 2023 dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp369.740.978.991,00. Tanah yang bersertifikat di Pemerintah Kabupaten Brebes berjumlah 1.585 bidang dari 3.337 bidang tanah.

Terdapat kenaikan saldo aset tetap tanah sebesar Rp36.330.986.855,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2023, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.118
Mutasi Aset Tetap Tanah

URAIAN	JUMLAH
Tanah	
SALDO AWAL	409.557.016.978,00
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	227.500.000,00
REKLAS DARI B. JASA	1.196.155.000,00
REKLAS DARI B. PERSEDIAAN	63.900.000,00
HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	594.484.000,00
HIBAH MASUK (PIHAK KE -3)	962.801.600,00
MUTASI MASUK	1.509.585.000,00
KOREKSI TAMBAH (HIBAH MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	33.017.191.203,00
KOREKSI TAMBAH (REKLAS DARI ASET LAIN-LAIN)	268.955.052,00
JUMLAH PENAMBAHAN	37.840.571.855,00
PENGURANGAN :	
MUTASI KELUAR	1.509.585.000,00
KOREKSI KURANG (PROPERTI INVESTASI)	76.147.024.842,00
JUMLAH PENGURANGAN	77.656.609.842,00
SALDO AKHIR 2023	369.740.978.991,00

Penambahan tanah sebesar Rp37.840.571.855,00 selama tahun 2023 berasal dari:

- Belanja modal sebesar Rp227.500.000,00
- Reklas dari belanja jasa berupa kode rekening belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp1.196.155.000,00 pada Dinperwaskim berupa biaya sertifikat tanah tahun 2023 berupa biaya sertifikat tanah.
- Reklas dari belanja persediaan sebesar Rp63.900.000,00 pada Dinperwaskim berupa biaya materai untuk sertifikasi tanah.
- Hibah masuk dari Pemerintah Pusat sebesar Rp594.484.000,00 terdiri dari:
 - Hibah masuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) sebesar Rp525.928.000,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah sebanyak 3 (tiga) bidang tanah seluas ± 1.940 m² dari Kementerian Pertanian. Tiga bidang tanah tersebut ada di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog dan dua bidang tanah di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Hibah masuk Kecamatan Brebes sebesar Rp68.556.000,00 berupa 1 (satu) bidang tanah untuk makam dari Ibu Ani Indah Alfiani. Hibah sebagian tanah hak milik nomor 06417 tahun 2008 NIB. 11.33.16.09.02831 yang terletak di belakang masjid agung kauman Kelurahan Brebes.
- e. Hibah masuk dari pihak ketiga sebesar Rp962.801.600,00 berupa 2 (dua) bidang tanah untuk jalan khusus dari PT Arto Putra Bumi dan 1 (satu) bidang tanah bangunan pos jaga. Hibah lainnya berupa 2 (dua) bidang tanah untuk jalan khusus dari PT Anugrah Jaya Land dan PT Ivana.
- f. Mutasi masuk tanah sebesar Rp1.509.585.000,00 terdiri dari:
Mutasi masuk antar SKPD dapat dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 5.119

Mutasi Masuk Antar SKPD Tanah

No	Nama SKPD Penerima	Nominal (Rp)	Nama SKPD Pemberi	Keterangan
1	PPKD	4.170.000,00	Dinperwaskim	Tanah sawah irigasi
2	DPSDAPR	27.920.000,00	Dinperwaskim	Tanah untuk bangunan pengembangan rawa dan polder
	DPU	1.215.635.000,00	Dinperwaskim	Tanah untuk jalan kabupaten
3	Sekretariat Daerah	82.000.000,00	Kecamatan Bumiayu	Tanah Pendopo Bumiayu (eks Kawedanan)
4	Kecamatan Bumiayu	179.860.000,00	Sekretariat Daerah	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis
	Total	1.509.585.000,00		

- g. Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya pada Dinperwaskim sebesar Rp33.017.191.203,00.
- h. Koreksi tambah reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp268.955.052,00 terdiri dari koreksi pada PPKD sebesar Rp232.475.500,00 berupa pengembalian 5 (lima) tanah bangunan pertokoan oleh PT MEP. Koreksi tambah pada Kecamatan Brebes sebesar Rp36.479.552,00 berupa pengembalian tanah bangunan pasar dan tanah untuk bangunan sarana olah raga oleh CV Jaya Bae sesuai dengan BAST nomor B/1972/028/X/2023 No. 01-JB/II/X/-2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Pengurangan saldo aset tetap tanah sebesar Rp1.509.585.000,00, terdiri dari transaksi sebagai berikut :

- a. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp1.509.585.000,00 sesuai dengan tabel 5.....
- b. Koreksi kurang reklasifikasi ke properti investasi sebesar Rp76.147.024.842,00 terdapat pada SKPD berikut ini:
- Kecamatan Brebes sebesar Rp42.332.624.122,00 berupa tanah rawa/sawah/tambak.
 - PPKD sebesar Rp33.814.400.720,00 berupa tanah bangunan pertokoan dan tanah sawah irigasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Peralatan Mesin	Rp1.091.371.731.097,27	Rp 1.030.297.847.322,27

Tabel 5.120
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN	JUMLAH
Peralatan Mesin	
SALDO AWAL	1.030.297.847.322,27
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	89.682.122.849,00
REKLAS DARI B. PEGAWAI	9.320.000,00
REKLAS DARI B. JASA	2.800.000,00
REKLAS DARI B. PERSEDIAAN	3.460.000,00
REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	102.258.200,00
HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	1.331.038.498,00
HIBAH MASUK (PEMERINTAH PROVINSI)	308.812.992,00
MUTASI MASUK	8.254.235.309,00
KOREKSI TAMBAH (HIBAH MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	7.700.000,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	1.985.000,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE BM)	190.499.031,00
JUMLAH PENAMBAHAN	99.894.231.879,00
PENGURANGAN :	
EXTRAKOMTABLE	799.432.035,00
REKLAS KE B. PERSEDIAAN	264.430.490,00
REKLAS KE B. PEMELIHARAAN	54.622.000,00
REKLAS KE B. JASA	4.000.000,00
HIBAH KELUAR	13.615.252.009,00
MUTASI KELUAR	8.254.235.309,00
RUSAK BERAT	3.353.879.574,00
PENGHAPUSAN BARANG B/RR	12.431.024.167,00
REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	35.000.000,00
KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	1.985.000,00
KOREKSI KURANG (BHP TAHUN SEBELUMNYA)	6.487.520,00
JUMLAH PENGURANGAN	38.820.348.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH
SALDO AKHIR 2023	1.091.371.731.097,27

Terdapat kenaikan saldo aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp61.073.883.775,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp99.894.231.879,00 disebabkan:

- Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp89.682.122.849,00
- Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp9.320.000,00 yaitu pada BPKAD sebesar Rp3.720.000,00 berupa honorarium pengadaan barang dan jasa, pada Dinas Kesehatan yaitu pada Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo sebesar Rp5.600.000,00 berupa honorarium panitia penerima hasil pekerjaan.
- Reklasifikasi dari belanja jasa sebesar Rp2.800.000,00 berupa honorarium pengadaan barang dan jasa yang telah diatribusi pada aset induknya.
- Reklasifikasi dari belanja persediaan sebesar Rp3.460.000,00 reklas belanja persediaan tersebut berasal dari belanja persediaan SKPD namun barangnya berupa aset tetap sehingga di reklas ke aset tetap kemudian dicatat pada KIB. Reklas belanja persediaan terdapat pada SKPD seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.121
Reklasifikasi dari Belanja Persediaan

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	1.475.000,00	jemuran
2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	985.000,00	Hardisk eksternal
3	Kecamatan Brebes	1.000.000,00	Backrop
	Total	3.460.000,00	

- Reklas dari pemeliharaan sebesar Rp102.258.200,00 merupakan pengadaan aset tetap dengan menggunakan belanja pemeliharaan pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Hibah masuk dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp1.331.038.498,00 terdapat pada SKPD seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.122
Hibah Masuk dari Pemerintah Pusat

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	50.292.920,00	Hibah dari Kementerian Kesehatan
2	Dinperwaskim	894.867.328,00	Hibah dari Kementerian PUPR



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
3	DPKP	385.878.250,00	Hibah dari Kementerian Pertanian
	Total	1.331.038.498,00	

- g. Hibah masuk Pemerintah Provinsi sebesar Rp308.812.992,00 terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan berupa peralatan laboratorium.
- h. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp8.254.235.309,00 dengan rincian seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.123
Mutasi Masuk Antar SKPD Peralatan Mesin

No	Nama SKPD Penerima	Nominal (Rp)	Nama SKPD Pemberi	Nama Barang	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	55.913.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/026/V/2023
2	Dinas Kesehatan	10.200.000,00	DINDUKCAPIL	Meja kerja pejabat	BAST NO. 028 / 1.012.A / TAHUN 2023
3	Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	1.789.919.958,00	DINAS KESEHATAN	Mobil ambulance, USG, pediatric unit, ICU bed, laboratory fridge	BAST NO.05599/360.3/VII/2023,B .06258/360.3/VIII/2023, 027.4/05377/2023, B.08044/360.3/X/2023
4	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	1.147.297.969,00	DINAS KESEHATAN	Mobil ambulance, USG, pediatric unit, ICU bed, laboratory fridge	BAST NO.028/12115/XII/2023
5	Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	734.864.290,00	DINAS KESEHATAN	Hematology Analyzer, Centrifuge, Freezer, electrocardiograph	BAST NO. 0102010001400007.M2300 35
		4.916.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/038/V/2023
6	Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	597.105.328,00	DINAS KESEHATAN	USG, Autoclave , electrocardiograph	BAST NO. 028/12117/XII/2023
		2.485.000	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/036/V/2023
7	Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	2.431.000	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO.028/036/V/2023
		499.745.525,00	DINAS KESEHATAN	USG, Autoclave, Lap Top	BAST NO.08595/4/LS/1-02.0-00.0-00.1.0.0/1 1/23
8	RSUD Brebes	4.862.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/036/V/2023
9	DPU	4.970.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/036/V/2023
10	DPSDAPR	4.970.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/036/V/2023
11	Dinperwaskim	114.850.000,00	BAPENDA	mobil	BAST NO. 028/0723/IV/2023
12	Satpol PP	227.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Sepeda motor, mobil	BAST NO: B/0731/028/III/2023,B/1106/028/III/2023, B/1774/028/VII/2023
13	BPBD	2.485.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO.028/029/V/2023
14	Dinas Sosial	4.970.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/019/V/2023
15	DLHPS	12.425.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	
16	DP3KB	2.485.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	
17	Dinas Perhubungan	295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	mobil	BAST NO. B/1797/028/VIII/2023



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Nama SKPD Penerima	Nominal (Rp)	Nama SKPD Pemberi	Nama Barang	Keterangan
		17.233.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/018/V/2023
18	Dinlopumdag	61.909.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/042/VI/2023
19	DPMPTSP	572.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	mobil	BAST NO. B/1766/028/VII/2023
20	Dinbudpar	9.940.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/027/V/2023
21	Dinarpus	86.020.000,00	BAPERLITBANGDA	Rool Opec / Lion	BAST NO. B/0082/028/I/2023
22	DPKP	32.251.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	
23	DPKH	9.778.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO.028/025/V/2023
24	Dinperinaker	2.485.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO 028/023/V/2023
25	Sekretariat Daerah	242.850.000,00	SATPOL PP	mobil	BAST NO.028/0435/2023
		4.970.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO.028/921/V/2023
26	Inspektorat	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Mobil	BAST NO. B/1787/028/VIII/2023
		240.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Mobil	BAST NO. B/1394/028/V/2023
27	Baperlitbangda	360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Mobil	BAST NO.B/1767/028/VII/20 23
		237.250.000	SEKRETARIAT DAERAH	Mobil	BAST NO.B/1394/028/V/202 3
28	BPKAD	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Mobil	BAST NO. B/1796/028/VIII/2023
29	Sekretariat DPRD	421.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	Mobil	BAST NO. 01999/4/LS/4-01.0- 00.0-00.1.0.8/04/23
		2.485.000	DINPERWASKIM	Papan nama	
30	Kecamatan Wanasari	12.150.000,00	BAPENDA	motor	BAST NO. 028/0721/IV/2023
31	Kecamatan Bulakamba	4.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Alat pemadam, meja	BAST NO. B/0885/028/III/2023
		2.485.000	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO. 028/039/V/2023
32	Kecamatan Bumiayu	7.455.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	
33	Kecamatan Bantarkawung	38.844.239,00	DP3KB	motor	BAST NO. 028/0330/2023
		4.970.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	BAST NO.028/034/2023
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.485.000,00	DINPERWASKIM	Papan nama	
	Total	8.254.235.309,00			

- i. Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya sebesar Rp7.700.000,00 pada Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST nomor:10695/gustugcovidjateng/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
- j. Koreksi tambah reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar 1.985.000,00 pada Dindikpora.
- k. Koreksi tambah reklasifikasi antar kode belanja modal sebesar Rp190.499.031,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.820.348.104,00 selama tahun 2023 berasal dari:

- a. Ekstrakomtable sebesar Rp799.432.035,00
- b. Reklasifikasi ke beban persediaan sebesar Rp264.430.490,00.
Belanja modal berupa aset tetap yang di reklas ke beban persediaan telah dicatat pada laporan persediaan, terdapat pada SKPD seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.124
Reklasifikasi Aset ke Beban Persediaan

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	15.120.000,00	karpas
2	Dinas Kesehatan	5.006.490,00	Volumetric flask, Erlenmeyer, Tabung reaksi, breaker glass,
3	DPSDAPR	17.415.000,00	Sepatu boot
4	Dinperwaskim	12.600.000,00	Sepatu safety boot, jas hujan
5	BPBD	126.396.000,00	Helmet safety, sleeping bag, headlamp, selang pemadam
6	DLHPS	55.513.000,00	Cartridge dust,mist,fume, Bottle Wide mouth, Beaker
5	DPKP	2.050.000,00	Buket bunga, kain,
6	Kecamatan Brebes	330.000,00	connect RJ 45 6CAT
	Total	264.430.490,00	

- c. Reklasifikasi ke beban pemeliharaan sebesar Rp54.622.000,00 dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap terdapat pada SKPD sebagai berikut:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp44.622.000,00 berupa Updating Aplikasi SIMPUS
 - Dinperinaker sebesar Rp10.000.000,00 berupa pembaharuan website.
- d. Reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp4.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- e. Hibah keluar sebesar Rp13.615.252.009,00 pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.125
Hibah Keluar SKPD

No	Nama SKPD Pemberi	Nominal (Rp)	Penerima Hibah	Keterangan
1	Dinkes	13.562.752.009,00	Desa-desa di Kabupaten Brebes	06381/4/LS/1-02.0-00.0-00.1.0.0/0 9/23 Tgl 13 September 2023
2	BPBD	52.500.000,00	Desa Cilibur, Desa Babakan, dan Desa Jatisawit	No. BAST : 463/028/V/2023 Tgl. 29-05-2023
	Total	13.615.252.009,00		

- f. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp8.254.235.309,00 terdapat pada SKPD seperti yang tercantum dalam tabel 5.123



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- g. Reklas ke aset lainnya karena rusak berat atas usulan perubahan kondisi dari SKPD sebesar Rp3.353.879.574,00.
- h. Penghapusan barang baik dan rusak ringan sebesar Rp12.431.024.167,00 sesuai dengan SK Bupati yang telah di terbitkan pada SKPD yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.126
Penghapusan Barang Baik dan Rusak Ringan

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Nomor SK	Keterangan
1	Dindikpora	9.819.989.811,00	028/1677 Tahun 2023	meja, kursi, papan tulis, dll
2	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	39.885.000,00	028/1573/2023	Sepeda motor
3	Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	751.430.406,00	028/1677 Tahun 2023	PC unit, kipas angin, AC Split, oxygen regulator dll
4	Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	20.898.450,00	050/1551 Tahun 2023	Timbangan bayi, alat kedokteran, printer
5	RSUD Brebes	466.528.000,00	028/1677 Tahun 2023	Wheel chair, kipas angin, kompor gas, pompa air, exhause fan
6	DPU	28.000.000,00	028/1573/2023	Sepeda motor
7	DPSDAPR	133.850.000,00	028/1573/2023	Truk, Tosa
8	Dinperwaskim	17.758.000,00	028/1573/2023	Sepeda motor
9	Satpol PP	87.000.000,00	028/1573/2023	mobil
10	Dinas Perhubungan	411.412.000,00	028/1573/2023	mobil
11	Dinkominfotik	15.700.000,00	028/1573/2023	sepeda motor
12	Dinkopumdag	77.841.500,00	028/1573/2023	sepeda motor, tosa
13	DPMPTSP	136.500.000,00	028/1573/2023	sepeda motor, mobil
14	Dinbudpar	134.641.000,00	028/1573/2023	sepeda motor, mobil
15	Dinas Perikanan	28.395.000,00	028/1573/2023	sepeda motor
16	DPKP	200.000.000,00	028/1573/2023	mobil
17	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	028/1573/2023	mobil
18	Kecamatan Larangan	12.500.000,00	028/1573/2023	sepeda motor
19	Kecamatan Salem	22.505.000,00	028/1573/2023	sepeda motor
20	Bakesbangpol	6.190.000,00	028/166 /2023	filling cabinet, AC Split
	Total	12.431.024.167,00		

- i. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp35.000.000,00 terdapat pada BKPSDMD yang berasal dari PC unit menjadi software DIJABAT BESTI.
- j. Koreksi kurang (reklasifikasi antar kode aset tetap) sebesar Rp1.985.000,00 pada Dindikpora berupa dispencer.
- k. Koreksi kurang BHP tahun sebelumnya sebesar Rp6.487.520,00 berupa barang laboratorium.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Gedung dan Bangunan Rp2.101.003.633.017,00 Rp2.008.397.873.235,00

Tabel 5.127
Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan

URAIAN	JUMLAH
Gedung dan Bangunan	
SALDO AWAL	2.008.397.873.235,00
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	52.721.300.467,00
REKLAS DARI B. PEGAWAI	10.040.000,00
REKLAS DARI B. JASA	552.162.517,00
REKLAS DARI B. PERSEDIAAN	10.328.500,00
REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	521.972.587,00
HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	25.308.388.666,00
HIBAH MASUK (PIHAK KE-3)	2.742.891.920,00
MUTASI MASUK	3.723.766.232,00
HUTANG ASET	211.958.154,00
REKLAS DARI ASET LAINNYA (RUSAK BERAT)	5.000.000,00
REKLAS ASET TETAP DARI KDP	1.773.541.000,00
KOREKSI TAMBAH (MUTASI MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	642.601.600,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	786.211.053,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI DETAIL ENGEENERING KE ASET TETAPNYA TAHUN SEBELUMNYA)	36.500.000,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE BM)	10.215.703.171,00
JUMLAH PENAMBAHAN	99.262.365.867,00
PENGURANGAN :	
REKLAS KE B. PERSEDIAAN	677.341.800,00
MUTASI KELUAR	3.723.766.232,00
PENGHAPUSAN BARANG B/RR	1.469.287.000,00
KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	786.211.053,00
JUMLAH PENGURANGAN	6.656.606.085,00
SALDO AKHIR 2023	2.101.003.633.017,00

Terdapat kenaikan saldo aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp92.605.759.782,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2023.

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.262.365.867,00 disebabkan:

- a. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp52.721.300.467,00.
- b. Reklas dari belanja pegawai sebesar Rp10.040.000,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
 - Dinsos berupa honorarium pengadaan barang dan jasa bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp2.040.000,00
 - Kecamatan Brebes berupa honorarium pengadaan barang dan jasa bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp2.040.000,00
 - Kecamatan Losari berupa DE Rumah dinas sebesar RP5.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- c. Reklas dari belanja jasa sebesar Rp552.162.517,00 terdapat pada SKPD seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5.128
Reklas Aset Tetap dari Belanja Jasa

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	106.353.800,00	DED dan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lanjutan RSUD
2	DPSDAPR	10.255.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan
3	Dinperwaskim	19.860.000,00	pemasangan lampu penerang jalan
4	Dinas Sosial	7.360.000,00	DE
5	DLHPS	5.810.850,00	Jasa Konsultasi Pembangunan RTH Bumiayu
6	Dinas Perhubungan	119.285.000,00	Jasa konsultasi dan DE
7	Dinkopumdag	49.668.000,00	DED Rehabilitasi Pasar
8	DPMPTSP	7.300.817,00	Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan
9	Dinbudpar	67.182.750,00	Jasa Instalasi Telepon, air dan listrik
10	Dinarpus	21.736.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan dan pengawasan
11	DPKP	23.499.940,00	Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan
12	DPKH	54.549.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan
13	BKPSDMD	13.609.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan
14	Kecamatan Brebes	16.206.000,00	DE Rehab Gedung Kantor
15	Kecamatan Bulakamba	2.845.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur
16	Kecamatan Tanjung	3.815.000,00	DE
17	Kecamatan Ketanggungan	3.000.000,00	paving halaman
18	Kecamatan Bumiayu	6.844.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur
19	Kecamatan Sirampog	4.961.700,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-
20	Kecamatan Bantarkawung	2.908.000,00	DE
21	Kecamatan Salem	5.112.660,00	DE rehab Aula
		552.162.517,00	

- d. Reklas dari belanja persediaan sebesar Rp10.328.500,00 pada Kecamatan Brebes berupa bahan konstruksi pembangunan toilet untuk gedung pos jaga.
- e. Reklas dari belanja pemeliharaan sebesar Rp521.972.587,00 terdapat pada SKPD seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.129
Reklas Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinsos	173.645.000,00	Pemeliharaan bangunan gedung kantor
2	Dinbudpar	64.375.937,00	Rehab kolam renang, kanopi



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
3	DPKH	84.361.000,00	Pekerjaan beton dan pemasangan RPH, atap dan sanitasi RPH
4	Bapenda	46.087.000,00	Rehab mushola
5	Kecamatan Brebes	133.803.650,00	DE , Rehab gedung kantor
6	Kecamatan Sirampog	19.700.000,00	Rehab garasi
	Total	521.972.587,00	

- f. Hibah masuk dari Pemerintah Pusat sebesar Rp25.308.388.666,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
- Dinperwaskim menerima hibah sebesar Rp19.622.799.382,00 dari Kementerian PUPR berupa rumah susun.sesuai dengan BAST nomor: 2438/BA/Dr/2023 tanggal 20 Desember 2023.
 - Dinkopumdag menerima hibah sebesar Rp5.535.073.284,00 dari Kementerian Perdagangan berupa pasar Winduaji dan pasar Kersana sesuai dengan BAST nomor: 385/M-DAG/BAST/09/2023 tanggal 5 September 2023.
 - DPKP menerima hibah dari Kementerian Pertanian sebesar Rp150.516.000,00 4 (empat) gedung kantor sesuai dengan SK Hibah Kementerian Pertanian nomor: 6371/PL.130/E.1/10/2023-BAST No. 6372/PL.130/E.1/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023.
- g. Hibah masuk dari Pihak Ketiga sebesar Rp2.742.891.920,00 terdapat pada SKPD berikut ini:
- Dinperwaskim berupa bangunan penerangan jalan, bangunan gedung tempat ibadah dan gedung pos jaga permanen sebesar Rp2.405.391.920,00 sesuai dengan BAST nomor: B/1770/475.21/VII/2023,B/1768/475.21/VII/2023, B/1771/475.21/VII/2023.
 - Dinas Perhubungan berupa bangunan sebesar Rp337.500.000,00 sesuai dengan BAST nomor:B/028/2149/2023 tanggal 17 Juli 2023.
- h. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp3.723.766.232,00 terdapat pada SKPD seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.130
Mutai Masuk Antar SKPD Gedung dan Bangunan

No	Nama SKPD Penerima	Nominal (Rp)	Nama SKPD Pemberi	Uraian Barang	Keterangan
1	DINKES-UPTD PUSK. BREBES	743.010.000,00	Dinas Kesehatan	Bangunan klinik/puskesmas, bangunan puskesmas pembantu	B.09152/027.4/X/2023 , B.09792/027.4/XI/2023, B.10004/027.4/XI/2023
2	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	794.565.000,00	Dinas Kesehatan	Bangunan klinik/puskesmas, bangunan puskesmas pembantu	028/12115/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023
3	DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	271.320.000,00	Dinas Kesehatan	Bangunan klinik/puskesmas, bangunan puskesmas	08336/4/LS/1-02.0-00.0-00.1.0.0/1 1/23,08687/4/LS/1-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Nama SKPD Penerima	Nominal (Rp)	Nama SKPD Pemberi	Uraian Barang	Keterangan
				pembantu	02.0-00.0-00.1.0.0/1 1/23
4	DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	193.881.000,00	Dinas Kesehatan	Bangunan klinik/puskesmas	028/12117/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023
5	DINKES-UPTD PUSK. PAGUYANGAN	398.187.000,00	Dinas Kesehatan	Bangunan klinik/puskesmas, bangunan puskesmas pembantu	07982/4/LS/1-02.0- 00.0-00.1.0.0/1 0/23
6	DPU	49.424.000,00	Dinperwaskim	Tugu batas jalan	028/0258/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023
7	Sekretariat Daerah	397.927.000,00	DPU	Pembangunan bangunan penunjang dan landscape pendopo, Pembangunan ruang media center KPT	050/12430B Tanggal 24 Maret 2023
8	BPKAD	49.925.000,00	Sekretariat Daerah	Bangunan Gedung Perusda	B/1735/028/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023
9	Sekretariat DPRD	774.412.232,00	DPU	Rehab atap Gedung paripurna DPRD	050/45129A tanggal 23 Oktober 2023
10	Kecamatan Jatibarang	51.115.000,00	DPU	Peningkatan jalan kantor kecamatan	050/30586 A/2023 tanggal 17 Juli 2023
	Total	3.723.766.232,00			

- i. Hutang aset sebesar Rp211.958.154,00 pada Dindikpora berupa pembangunan dan rehab gedung pendidikan yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2023.
- j. Reklas dari aset lainnya (rusak berat) sebesar Rp5.000.000,00 pada Dindikpora berupa rumah dinas SDN Lembarawa 02.
- k. Reklas aset tetap dari KDP sebesar Rp1.773.541.000,00 terdapat pada SKPD seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.131
Reklas Aset Tetap dari KDP

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinkes	59.555.000,00	KDP Gedung Laboratorium BSL 2
2	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	27.446.000,00	DE, Pembuatan teralis gedung dan rehab ringan sarana dan prasarana gedung
3	RSUD Brebes	731.010.000,00	DE Bangunan Kesehatan, DE Rehabilitasi Ruang Rawat Jiwa
4	DPU	2.367.000,00	Peningkatan Jalan Kantor Kecamatan Jatibarang Kec. Jatibarang
5	Dinperwaskim	208.506.000,00	Gedung Aula Besar
6	Dinkopumdag	744.657.000,00	DED Pasar Kersana, DED Pasar Winduaji, DE Pasar Seng, Pengurukan Lahan untuk Kantor UPTD Metrologi



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
	Total	1.773.541.000,00	

- l. Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya sebesar Rp642.601.600,00 pada Dinperwaskim berupa 2 (dua) mushola perumahan.
- m. Koreksi tambah reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar Rp786.211.053,00 terdapat pada SKPD berikut ini:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp182.469.053,00
 - DLHPS sebesar Rp7.500.000,00
 - Kecamatan losari sebesar Rp498.425.000,00
 - Kecamatan Tonjong sebesar Rp97.817.000,00
- n. Koreksi tambah reklasifikasi DE ke aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp36.500.000,00 pada Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo.
- o. Koreksi tambah reklasifikasi antar kode BM sebesar Rp10.215.703.171,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.656.606.085,00 selama tahun 2023 berasal dari:

- a. Reklas ke beban persediaan sebesar Rp677.341.800,00 terdapat pada Dinas Perhubungan berupa lampu penerangan jalan.
- b. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp3.723.766.232,00 terdapat pada SKPD seperti yang tercantum pada tabel 5.135.
- c. Penghapusan barang baik/ rusak ringan sebesar Rp1.469.287.000,00 terdapat pada SKPD seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.132
Penghapusan Barang Baik/ Rusak Ringan

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Nomor SK	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	435.870.000,00	028 / 1517 TAHUN 2023	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen
2	Dinas Perikanan	49.754.000,00	028/204 Tahun 2023	Gedung Ocean Bulakamba
3	DPKP	877.913.000,00	028/204/2023,028/126/2023	Bangunan Gedung Kantor Permanen BPP Bulakamba, Gedung 2 UPTD Bulakamba
4	Kecamatan Banjarharjo	105.750.000,00	028/1517 Tahun 2023	Rumah dinas
	Total	1.469.287.000,00		

- d. Koreksi kurang reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar Rp786.211.053,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jalan jaringan dan irigasi	Rp3.179.506.243.506,00	Rp2.989.364.132.076,00

Tabel 5.133



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan

URAIAN	JUMLAH
Jalan Irigasi Jaringan	
SALDO AWAL	2.989.364.132.076,00
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	191.528.125.702,00
REKLAS DARI B. JASA	4.882.435.150,00
REKLAS DARI B. PERSEDIAAN	77.975.000,00
REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	31.268.962,00
HIBAH MASUK (PIHAK KE-3)	7.792.495.702,00
MUTASI MASUK	859.340.250,00
REKLAS ASET TETAP DARI KDP	1.330.903.000,00
KOREKSI TAMBAH (HIBAH MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	872.176.850,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	464.541.104,00
JUMLAH PENAMBAHAN	207.839.261.720,00
PENGURANGAN :	
REKLAS KE B. PERSEDIAAN	2.188.823.000,00
REKLAS KE B. PEMELIHARAAN	7.174.709.000,00
MUTASI KELUAR	859.340.250,00
RUSAK BERAT	289.505.000,00
KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	464.541.104,00
KOREKSI KURANG REKLASIFIKASI KODE BM	6.720.231.936,00
JUMLAH PENGURANGAN	17.697.150.290,00
SALDO AKHIR 2023	3.179.506.243.506,00

Terdapat kenaikan saldo aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp190.142.111.430,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2023, yang terdiri dari:

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp207.839.261.720,00 selama tahun 2023 berasal dari:

- a. Belanja modal sebesar Rp191.528.125.702,00.
- b. Reklas dari belanja jasa sebesar Rp4.882.435.150,00 terdapat pada SKPD berikut ini:
 - DPU sebesar Rp4.109.599.150,00 berupa jasa konsultasi perencanaan jalan dan jasa konsultasi pengawasan jalan.
 - DPSDAPR sebesar Rp296.724.000,00 berupa DE dan jasa konsultasi perencanaan.
 - Dinperwaskim sebesar Rp442.756.000,00 berupa peningkatan jalan lingkungan
 - DLHPS sebesar Rp9.948.000,00 berupa jasa konsultasi dan DE
 - DPKH sebesar Rp4.861.000,00 berupa jasa konsultasi Pengawasan.
 - Kecamatan Brebes sebesar Rp18.547.000,00 berupa DE.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- c. Reklas dari belanja persediaan sebesar Rp77.975.000,00 pada DPKH berupa pembangunan *polyurethane flooring* RPU.
- d. Reklas dari belanja pemeliharaan sebesar Rp31.268.962,00 pada Dinas Kesehatan berupa bangunan tempat sampah.
- e. Hibah masuk dari pihak ke-3 sebesar Rp7.792.495.702,00 pada Dinperwaskim berupa Jalan lingkungan dan saluran drainase.
- f. Mutasi masuk Dinperwaskim sebesar Rp859.340.250,00 dari Kecamatan Brebes berupa 9 (Sembilan) jalan lingkungan sesuai dengan BAST nomor: 000.2.3.2/620/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.
- g. Reklas aset tetap dari KDP sebesar Rp1.330.903.000,00 pada DPU berupa jasa konsultasi perencanaan peningkatan jalan sebanyak 14 paket.
- h. Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya sebesar Rp872.176.850,00 pada Dinperwaskim berupa darinase perumahan Pasar Batang Kecamatan Brebes dan saluran drainase perumahan lembah Sakinah Kecamatan Bumiayu
- i. Koreksi tambah reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar Rp464.541.104,00

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp17.697.150.290,00 selama tahun 2023 berasal dari:

- a. Reklas ke beban persediaan sebesar Rp2.188.823.000,00 pada DPU berupa Belanja Material Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar.
- b. Reklas ke beban pemeliharaan sebesar Rp7.174.709.000,00 terdapat pada SKPD berikut ini:
 - Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung sebesar Rp12.735.000,00 berupa instalasi jaringan listrik.
 - DPU sebesar Rp7.161.974.000,00 berupa pemeliharaan berkala jalan poros dan jalan kabupaten.
- c. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp859.340.250,00 dari Kecamatan Brebes ke Dinperwaskim berupa jalan lingkungan sesuai dengan BAST nomor: 000.2.3.2/620/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.
- d. Rusak Berat sebesar Rp289.505.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- e. Koreksi kurang reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar Rp464.541.104,00
- f. Koreksi kurang reklasifikasi kode BM sebesar Rp6.720.231.936,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aset tetap lainnya	Rp263.351.347.406,33	Rp248.314.784.855,33

Tabel 5.134
 Rincian Aset Tetap Lainnya

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Lainnya	
SALDO AWAL	248.314.784.855,33



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH
PENAMBAHAN :	
BELANJA MODAL	20.410.604.553,00
REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	176.808.850,00
JUMLAH PENAMBAHAN	20.587.413.403,00
PENGURANGAN :	
EXTRAKOMTABLE	5.840.000,00
PENGHAPUSAN BARANG B/RR	4.511.694.614,00
REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	282.658.300,00
KOREKSI KURANG REKLASIFIKASI KODE BM	750.657.938,00
JUMLAH PENGURANGAN	5.550.850.852,00
SALDO AKHIR 2023	263.351.347.406,33

Terdapat kenaikan saldo aset tetap lainnya sebesar Rp15.036.562.551,00 yang disebabkan penambahan dan pengurangan pada TA 2023, yang terdiri dari:

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.587.413.403,00 selama tahun 2023 berasal dari:

- Belanja Modal sebesar Rp20.410.604.553,00.
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp176.808.850,00 terdapat pada Dindikpora berupa pengadaan buku yang bersumber dari dana BOS.

Pengurangan Aset tetap lainnya sebesar Rp5.550.850.852,00 selama tahun 2023 berasal dari:

- Extrakomtable sebesar Rp5.840.000,00 pada Dindikpora berupa buku sesuai SK Penghapusan nomor:028/1677 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023.
- Penghapusan barang baik/ rusak ringan sebesar Rp4.511.694.614,00 pada SKPD sebagai berikut:
 - Penghapusan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.340.046.164,00 berupa
 - Penghapusan pada DPKH sesuai dengan SK penghapusan nomor: 028/1601 Tahun 2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp171.648.450,00 berupa 15 sapi potong yang sudah tidak produktif untuk dijual dan hasil penjualannya masuk ke kas daerah.
- Reklas ke aset tak berwujud sebesar Rp282.658.300,00
- Koreksi kurang reklasifikasi kode BM sebesar Rp750.657.938,00.

Aset Tetap Renovasi

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 bahwa aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Aset Tetap Renovasi dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.135

Daftar Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Renovasi

No	Kode Barang	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	1.3.5.07.01.01.007	1945	Jaringan Irigasi Prupuk	1	38.229.225.955,00
2	1.3.5.07.01.01.007	1999	Saluran Sekunder Tanjung	1	14.524.715.250,00
3	1.3.5.07.01.01.007	2016	Renovasi Pasar Desa Klampok	1	197.603.000,00
	Jumlah				52.951.544.205,00

1) Aset Tetap Renovasi (ATR) DPSDAPR

Aset tetap renovasi berupa pemeliharaan atau rehab konstruksi jaringan irigasi bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp52.753.941.205,00 yang tercatat di KIB E Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Rekonsiliasi atas Aset Tetap Renovasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019 dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dengan hasil bahwa 30 kegiatan sebesar Rp10.975.245.500,00 merupakan kewenangan pusat (BBWS Cimanuk Cisanggarung). Rekonsiliasi kedua telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, dengan hasil bahwa Aset Tetap Renovasi Pemerintah Kabupaten Brebes sebanyak 187 kegiatan dengan nilai Rp18.537.780.455,00 merupakan kewenangan pemerintah pusat (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana), sedangkan sisanya sebesar Rp23.240.915.250,00 merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes. Proses hibah ATR masih terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

2) Aset Tetap Renovasi (ATR) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Aset Tetap Renovasi yang tercatat pada KIB Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp197.603.000,00 perolehan tahun 2016 merupakan renovasi pasar pada Desa Klampok. Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan proses hibah ATR ke Pemerintah Desa.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp14.146.195.892,00	Rp16.908.477.891,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian KDP per SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.136
Rincian Konstruksi Dalam pengerjaan

SKPD	NILAI KDP 2023	NILAI KDP 2022
DPU	11.460.813.991,00	12.794.083.991,00
KEC. LARANGAN	249.033.000,00	249.033.000,00
DINKOPUMDAG	327.239.000,00	1.071.896.000,00
KEC. BREBES	1.030.956.900,00	823.554.900,00
DINAS KESEHATAN	166.026.000,00	126.125.000,00
DINKES-UPTD PUSK. BREBES	147.365.000,00	147.365.000,00
DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	101.445.000,00	121.571.000,00
DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	-	36.500.000,00
DPSDAPR	68.576.000,00	68.576.000,00
DLHPS	48.900.000,00	48.900.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	109.257.000,00	109.257.000,00
DINAS PENDIDIKAN	247.883.000,00	247.883.000,00
RSUD BREBES	188.701.000,00	855.227.000,00
DINPERWASKIM	-	208.506.000,00
BPKAD	1,00	-
JUMLAH	14.146.195.892,00	16.908.477.891,00

Mutasi selama tahun 2023 adalah terjadi penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.762.281.999,00 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.137
Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	JUMLAH
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
SALDO AWAL	16.908.477.891,00
PENAMBAHAN :	
REKLAS DARI B. JASA	99.456.000,00
KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI KODE BM)	279.206.000,00
KOREKSI TAMBAH	1,00
JUMLAH PENAMBAHAN	378.662.001,00
PENGURANGAN :	
REKLAS DARI KDP KE ASET TETAP	3.140.944.000,00
JUMLAH PENGURANGAN	3.140.944.000,00
SALDO AKHIR 2023	14.146.195.892,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penambahan KDP selama 2023 sebesar Rp378.662.001,00 berasal dari:

- Reklas dari belanja jasa sebesar Rp99.456.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa DED Pembangunan ruang farmasi, poli, ICU, IBS RSUD Ir Soekarno.
- Koreksi tambah sebesar Rp 1,00 pada BPKAD berupa aset gedung dan bangunan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes hasil kerjasama BGS dari CV Jaya Bae yang belum dinilai.
- Koreksi tambah reklasifikasi kode BM sebesar Rp279.206.000,00

Pengurangan KDP sebesar Rp3.140.944.000,00 selama tahun 2023 berasal dari reklas dari KDP ke Aset Tetap terdapat pada SKPD seperti yang tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.138
Reklas dari KDP ke Aset Tetap

No	Nama SKPD	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	59.555.000,00	Jasa konsultan perencanaan gedung Labkes BSL2
2	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	27.446.000,00	DE perencanaan puskesmas losari, Bojongsari dan kecipir
3	Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	36.500.000,00	Rehab Gedung Poned Puskesmas Sitanggal
4	RSUD Brebes	731.010.000,00	Rehabilitasi Ruang Rawat Inap
5	DPU	1.333.270.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan
6	Dinperwaskim	208.506.000,00	Rehab Aula Kantor Dinperwaskim
7	Dinkopumdag	744.657.000,00	Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal, Rehab pasar seng, DED Pasar Winduaji dan Kersana
	Total	3.140.944.000,00	

Mutasi KDP per SKPD dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.139
Mutasi Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

OPD	NILAI KDP 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	NILAI KDP 2023
DPU	12.794.083.991,00	-	(1.333.270.000,00)	11.460.813.991,00
KEC. LARANGAN	249.033.000,00	-	-	249.033.000,00
DINKOPUMDAG	1.071.896.000,00	-	(744.657.000,00)	327.239.000,00
KEC. BREBES	823.554.900,00	207.402.000,00	-	1.030.956.900,00
DINAS KESEHATAN	126.125.000,00	99.456.000,00	(59.555.000,00)	166.026.000,00
DINKES-UPTD PUSK. BREBES	147.365.000,00	-	-	147.365.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

OPD	NILAI KDP 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	NILAI KDP 2023
DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	121.571.000,00	7.320.000,00	(27.446.000,00)	101.445.000,00
DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	36.500.000,00	-	(36.500.000,00)	-
DPSDAPR	68.576.000,00	-	-	68.576.000,00
DLHPS	48.900.000,00	-	-	48.900.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	109.257.000,00	-	-	109.257.000,00
DINAS PENDIDIKAN	247.883.000,00	-	-	247.883.000,00
RSUD BREBES	855.227.000,00	64.484.000,00	(731.010.000,00)	188.701.000,00
DINPERWASKIM	208.506.000,00	-	(208.506.000,00)	-
BPKAD	-	1,00	-	1,00
JUMLAH	16.908.477.891,00	378.662.001,00	(3.140.944.000,00)	14.146.195.892,00

Penambahan nilai KDP sebesar Rp378.662.001,00 selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.140
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

NO	SKPD	NO KONTRAK	TGL KONTRAK	Penambahan	KETERANGAN
1	KEC. BREBES	SPK No.050/006/PPK-SPK.DE/V/2023	29-Mei-23	6.323.000,00	Pekerjaan Desain Engineering (DE) Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Warga (Balai seni, Budaya dan Olahraga) Kel. Gandasuli
2	KEC. BREBES	SPK.410/18/SPK/VII/2023	27-Jul-23	193.079.000,00	Pek. Pembuatan Gedung Balai Pertemuan Warga (Balai Pelatihan Seni, Budaya dan Olahraga) Kel. Gandasuli
3	KEC. BREBES			8.000.000,00	Belanja Kilometer Listrik
4	DINAS KESEHATAN	SPK No.050/03/SPK-JK/XI/2023	16-Nov-23	99.456.000,00	DED pembangunan ruang (KRIS, ICU, IBS, Poli, Farmasi) Ir. Soekarno
5	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	0246.a/050/V/2023	24-Mei-23	7.320.000,00	DE Pembuatan Ruang Tunggu Pasien, Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut ,dan Pemasangan Partisi Ruang Laboratorium Puskesmas Kemurang Wetan
6	RSUD BREBES	Surat Pesanan Pekerjaan (SPP) Nomor :0000.3.2/15543/SPP/X/2023	23-Okt-22	64.484.000,00	DE Pembangunan Gedung Rawat Inap Kris
7	BPKAD/PPKD			1,00	Kios hasil Bangun Guna Serah a.n CV Jaya Bae
	TOTAL			378.662.001,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengurangan nilai KDP sebesar Rp3.140.944.000,00 selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.141
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

NO	KEGIATAN	NO KONTRAK	TGL KONTRAK	Pengurangan	KETERANGAN
1	DPU			1.333.270.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 9 - 24 dengan rincian sebagai berikut :
2	DINKOPUMDAG	050/01416.B/SPK/XI/2018	12-Nov-18	201.608.000,00	Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal Tahap I
3	DINKOPUMDAG	050/1387/IX/2019	24-Sep-19	280.358.000,00	Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal Tahap II
4	DINKOPUMDAG	050/911.2/PPK-SPK DE/IX/2020	28-Sep-20	64.152.000,00	Rehab/Pembangunan Pasar Seng
5	DINKOPUMDAG	027.2/0225	24-Mar-22	99.187.000,00	Penyusunan DED Pasar Winduaji
6	DINKOPUMDAG	027.2/0223	24-Mar-22	99.352.000,00	Penyusunan DED Pasar Kersana
7	DINAS KESEHATAN	SPK No.B.11027/027.2/XI/2022	30-Nov-22	59.555.000,00	Jasa konsultan perencanaan gedung Labkes BSL2
8	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	0491/050/VIII/2022	25-Agu-22	9.150.000,00	DE Perencanaan Pembangunan Gedung LB3 dan Pavingisasi Halaman Puskesmas Losari
9	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	0457/050/VIII/2022	08-Agu-22	9.148.000,00	DE Perencanaan Pembangunan Tralis intu ,Jendela ,Interior Pendaftaran dan Penutupan Saluran Air Puskesmas Bojongsari
10	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	0491/050/VIII/2022	25-Agu-22	9.148.000,00	DE Perencanaan Penataan Sarana Prasarana Ruang Pelayanan (Instalasi dan perbaikan Plafon) Puskesmas Kecipir
11	DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	B-0170.B/027/VII/2021	27-Jul-21	36.500.000,00	Rehab Gedung Poned Puskesmas Sitanggal
12	RSUD BREBES	027/6353/2021	19-Okt-21	681.532.000,00	Pengadaan Bangunan Gedung Penunjang
13	RSUD BREBES	Surat Pesanan Pekerjaan (SPP) Nomor :027/3758/SPP/XI/2022	23-Nov-22	49.478.000,00	Rehabilitasi Ruang Rawat Inap - Rehabilitasi Ruang Rawat Jiwa - Konsultan Perencana (DE)
14	DINPERWASKIM	075/027.2/SPK-SEKR/IX/2022	12-Sep-22	208.506.000,00	Rehab Aula Kantor Dinperwaskim Kab. Brebes
	TOTAL			3.140.944.000,00	

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Akumulasi penyusutan aset tetap	(Rp3.408.335.242.888,81)	(Rp3.050.893.799.290,17)

Saldo akhir akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 dan 2022 sebesar (Rp3.408.335.242.888,81) dan (Rp3.050.893.799.290,17)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.142
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	NOMINAL
I	SALDO AWAL	3.050.893.799.290,17
II	PENAMBAHAN :	
	Perhitungan Beban Penyusutan	372.050.749.100,81
	Hibah Masuk Aset Tetap	508.146.572,00
	Penambahan karena proses kapitalisasi	1.053.731.839,00
	Perubahan antar kode aset tetap	94.785.000,00
	Perbaikan perhitungan AKP	18.569.700,00
	Koreksi pembulatan tambah	818,00
	JUMLAH PENAMBAHAN	373.725.983.029,81
III	PENGURANGAN :	
	Perubahan kondisi ke Rusak Berat	3.404.628.841,00
	Penghapusan barang B/RR	12.780.344.047,00
	Reklas Aset tetap ke BHP	5.040.020,00
	Perubahan antar kode aset tetap	94.525.000,00
	Koreksi Pembulatan kurang	1.523,17
IV	JUMLAH PENGURANGAN	16.284.539.431,17
V	SALDO AKHIR	3.408.335.242.888,81

1. Penambahan akumulasi penyusutan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp372.050.749.100,81 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	(Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99.797.662.989,81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.560.063.084,00
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	232.093.623.720,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	599.399.307,00
JUMLAH	372.050.749.100,81



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b. Hibah masuk aset tetap sebesar Rp508.146.572,00 merupakan koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyusutan karena hal-hal sebagai berikut.

Tabel 5.143

Rincian Penambahan Akumulasi Peny. Aset Tetap karena Hibah Masuk

URAIAN	KLASIFIKASI BARANG	(Rp)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	SEPEDA MOTOR, BANGUNAN GEDUNG	494.704.590,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SALURAN DRAINASE, BANGUNAN GEDUNG/TEMPAT IBADAH	13.441.982,00
JUMLAH	-	508.146.572,00

Akumulasi penyusutan hibah masuk aset tetap dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp494.704.590,00 merupakan pencatatan akumulasi penyusutan hibah masuk sepeda motor dan bangunan gedung pada DPKP dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya sebesar Rp13.441.982,00 hibah masuk aset tetap saluran drainase, bangunan gedung tempat ibadah pada Dinperwaskim dari Kementerian PUPR.

- c. Pencatatan akumulasi penyusutan karena proses kapitalisasi adalah sebesar Rp1.053.731.839,00, dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 5.144

Rincian Koreksi Penambahan Akumulasi Peny. Aset Tetap karena Proses Kapitalisasi

URAIAN	KLASIFIKASI BARANG	(Rp)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN (1984)	3.900.000,00
DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	359.853,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	PERSONAL KOMPUTER	1.162.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	1.037.128.083,00
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10.699.640,00
DINAS PERIKAMAN	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	481.763,00
JUMLAH		1.053.731.839,00

- d. Koreksi penambahan akumulasi penyusutan karena perubahan kode aset tetap adalah sebesar Rp94.785.000,00 dengan rincian dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.145

Rincian Penambahan Akumulasi Peny. Aset Tetap karena Perubahan Kode AT

URAIAN	KLASIFIKASI BARANG	(Rp)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	900.000
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ALAT PELINDUNG LAINNYA	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DISPENSER	1.085.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ALAT PELINDUNG LAINNYA	67.800.000,00
JUMLAH		94.785.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- e. Koreksi penambahan akumulasi penyusutan karena perbaikan perhitungan akumulasi penyusutan dengan rincian dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.146

Rincian Penambahan Akumulasi Peny. Aset Tetap karena Perbaikan Perhitungan Ak. Penyusutan

URAIAN	KLASIFIKASI BARANG	(Rp)
DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	9.000.000,00
DINKES-UPTD PUSK. BREBES	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	3.392.400,00
DINKES-UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5.088.600,00
DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	1.088.700,00
JUMLAH		18.569.700,00

- f. Koreksi penambahan akumulasi penyusutan karena pembulatan pada aplikasi sebesar Rp818,00 terjadi di seluruh SKPD.
2. Pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2023 sebagai berikut.
- a. Pengurangan akumulasi penyusutan karena perubahan kondisi Rusak Berat (RB) sebesar Rp3.404.628.841,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang disebabkan hal-hal berikut.

Tabel 5.147

Rincian Pengurangan Akumulasi Peny AT Perubahan Kondisi ke RB

SKPD	(Rp)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	844.555.600,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	204.562.500,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	333.535.998,00
DINAS KESEHATAN	770.974.097,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	712.448.122,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	155.531.500,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	79.581.778,00
KECAMATAN BANJARHARJO	19.800.000,00
KECAMATAN LOSARI	188.561.700,00
KECAMATAN SALEM	95.077.546,00
JUMLAH	3.404.628.841,00

- b. Pengurangan akumulasi penyusutan karena penghapusan barang B/RR adalah sebesar Rp12.780.344.047,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148

Rincian Pengurangan Akumulasi Peny. Karena Penghapusan barang B/RR



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URAIAN	KLASIFIKASI BARANG	(Rp)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR, ALAT PENDINGIN	6.190.000,00
DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	ALAT UKUR, ALAT KANTOR, KOMPUTER, MEBELAIR	734.067.102,00
DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	ALAT KANTOR, ALAT KEDOKTERAN, KOMPUTER	20.898.450,00
DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	KENDARAAN RODA 2	39.885.000,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KENDARAAN RODA 2	134.641.000,00
DINKOMINFOTIK	KENDARAAN RODA 2	15.700.000,00
DINKOPUMDAG	KENDARAAN	77.841.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	KENDARAAN RODA 2	28.000.000,00
DPMPSTP	KENDARAAN	136.500.000,00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KENDARAAN, ALAT KANTOR, KOMPUTER, MEBELAIR	9.817.189.811,00
DPSDAPR	ALAT BESAR, KENDARAAN	133.850.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	KENDARAAN	537.632.091,00
DINAS PERIKANAN	KENDARAAN , BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	35.360.560,00
DPKP	KENDARAAN , BANGUNAN GEDUNG KANTOR	403.852.531,00
DINPERWASKIM	KENDARAAN RODA 2	17.758.000,00
KECAMATAN BANJARHARJO	KENDARAAN RODA 2	29.145.000,00
KECAMATAN LARANGAN	KENDARAAN RODA 2	12.500.000,00
KECAMATAN SALEM	KENDARAAN RODA 2	22.505.000,00
RSUD BREBES	ALAT KANTOR, ALAT DAPUR, ALAT RT, ALAT KEDOKTERAN	464.528.002,00
SATPOL PP	KENDARAAN	87.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	KENDARAAN	20.000.000,00
DINDIKPORA	ALAT BERCORAK KESENIAN/ALAT MUSIK	5.300.000,00
JUMLAH		12.780.344.047,00

- c. Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan karena reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp5.040.020,00 terjadi pada Dinas Kesehatan atas alat-alat laboratorium.
- d. Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan karena perubahan kode aset tetap sebesar Rp94.525.000,00 secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.149

Rincian Koreksi Pengurangan Akumulasi Peny. Perubahan Kode Aset Tetap

URAIAN	KLASIFIKASI BARANG	(Rp)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ALAT KHUSUS SAR	25.640.000,00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ALAT KANTOR	1.085.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ALAT KEAMANAN, ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	67.800.000,00
JUMLAH		94.525.000,00

- e. Koreksi kurang karena pembulatan perhitungan aplikasi terjadi pada seluruh SKPD sebesar Rp1.523,17.

5.3.1.4 Dana Cadangan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk tahun 2023 adalah nihil/nol.

5.3.1.5 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti yang menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif ataupun dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 sebesar Rp 76.147.024.842,00. Properti ini meliputi 322 bidang tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain maupun yang berpotensi untuk dimanfaatkan yang tercatat pada KIB BPKAD selaku PPKD sebanyak 24 bidang dan Kecamatan Brebes sebanyak 298 bidang. Adapun saldo akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2023 adalah nihil dikarenakan seluruh aset properti investasi berupa tanah. Secara rinci tanah yang tercatat sebagai properti investasi disajikan pada **Lampiran 5.15**

5.3.1.6 Aset Lainnya

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aset Lainnya	Rp95.228.914.538,31	Rp96.645.058.856,74

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 Rp95.228.914.538,31 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.150
Aset Lainnya

Uraian	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Tagihan Jangka Panjang	384.542.424,00	399.742.424,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	279.455.052,00
Aset Tidak Berwujud	7.446.425.064,00	6.990.896.764,00
Aset Lain-Lain	93.576.211.791,31	94.438.515.936,74
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.178.264.741,00)	(5.463.551.320,00)
Jumlah	95.228.914.538,31	96.645.058.856,74

5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp384.542.424,00 merupakan reklasifikasi dari piutang TP-TGR yang telah kadaluarsa.

Tabel 5.151
Tagihan Jangka Panjang (TP-TGR)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nama Debitur	Saldo Aset Lainnya TGR Th 2022	Mutasi Th 2023	Saldo Aset Lainnya TGR Th 2023	Keterangan	
				SK Penetapan	Jangka Waktu
Irawati Fatmah, S.Ag	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-	SK Bupati 970/474/2010	2 tahun
Ibnu Komara	14.718.000,00	-	14.718.000,00	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun
H. AFS Noval Djuwawin	80.000.000,00	-	80.000.000,00	SK Bupati 970/736.B/2009	2 tahun
Drs H Rosichin	74.900.000,00	(800.000,00)	74.100.000,00	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun
Sugianto, SIP	44.650.000,00	(2.050.000,00)	42.600.000,00	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun
Anjar Asmoro P, SE	85.000.000,00	-	85.000.000,00	SK Bupati 970/474/2010	2 tahun
Bambang Setiawan, SP	5.200.000,00	(5.200.000,00)	-	SK Bupati 558 Thn 2013	2 tahun
Indah Margiasih, BA	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	SK Bupati 970/209/2012	2 tahun
Suharyanto	1.774.424,00	(1.150.000,00)	624.424,00	SK Bupati 970/657/2018	1 tahun
Abdul Gofur	87.500.000,00	-	87.500.000,00	SK Bupati 970/657/2018	1 tahun
JUMLAH	399.742.424,00	(15.200.000,00)	384.542.424,00		

5.3.1.6.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Pihak Ketiga pada Kabupaten Brebes berbentuk Bangun Kelola Serah (BKS) atas aset pemda yang dikerjasamakan pembangunan dan pengelolaannya dengan dua pihak swasta, sebagai berikut :

1. Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp242.975.500,00, merupakan Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas Bangun Kelola Serah (BKS) antara Pemkab Brebes dengan PT Marianaguna Ekacipta Persada sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 511.3/03816 tanggal 20 Desember 1991. Pemkab Brebes menyertakan modal berupa tanah senilai Rp232.475.500,00 terdiri atas tanah bekas terminal bus Bumiayu seluas 1.600 m², tanah Ruko Jatibarang seluas 582 m², tanah Ruko Ketanggungan seluas 620 m², tanah Ruko dan Kios Pasar Bawang Lama seluas 433 m², tanah Ruko dan Kios Pasar Bawang Klampok seluas 2.000 m² dan berupa bekas bangunan di lokasi tersebut senilai Rp10.500.000,00. Kemitraan ini berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 2023. Dengan berakhirnya perjanjian BKS tersebut selanjutnya aset yang diperjanjikan diambil alih oleh Pemkab Brebes dan saldo BKS ini dikoreksi. Saldo tahun 2023 nihil.
2. Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp36.479.552,00 merupakan Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas Bangun Kelola Serah (BKS) antara Pemkab Brebes dengan CV Jaya Bae sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 028/315/IX/2022 dan 01-IX/Jaya-Bae/2022 tanggal 16 September 2022. Pemkab Brebes menyertakan modal berupa tanah yang merupakan tanah yang tidak dimanfaatkan seluas 1.086 m² yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah seluas 665m² senilai Rp19.125.000,00 dan seluas 421 m² senilai Rp17.354.552,00. Atas kemitraan tersebut diperjanjikan pembangunan 37 unit kios yang berlokasi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes. Kemitraan ini berlaku selama 15 tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2036.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BGS yaitu sampai dengan saat ini mitra BGS baru menyelesaikan pembangunan kios sebanyak 10 unit dari total target 37 unit. Mitra BGS dalam hal ini adalah CV Jaya Bae



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

mengalami kesulitan finansial dan terjadi kenaikan harga material, disamping itu kios yang telah terbangun belum ada yang menyewa. Mitra BGS berharap ada *addendum* dalam perjanjian BGS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengirimkan surat teguran kepada CV Jaya Bae dengan nomor: 800/540/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. Atas kondisi ini CV Jaya Bae menyerahkan kembali kios yang telah dibangun kepada Pemkab Brebes dan Pemkab Brebes telah mengambil alih aset tanah yang diperjanjikan. Adapun kios hasil BKS belum dapat dimanfaatkan dan belum dilakukan penilaian. Kios tersebut dicatat Rp1,00 sebagai KDP.

5.3.1.6.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Brebes berupa *software* memiliki saldo sebesar Rp7.446.425.064,00 dengan mutasi yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.152
Aset Tidak Berwujud (Software)

URAIAN	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Aset Tidak Berwujud – Software	6.990.896.764,00	3.670.046.628,00	3.214.518.328,00	7.446.425.064,00
JUMLAH	6.990.896.764,00	3.670.046.628,00	3.214.518.328,00	7.446.425.064,00

Penambahan software diperoleh dari belanja pengadaan software tahun 2023, reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud, reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tidak Berwujud. Sedangkan pengurangannya merupakan reklasifikasi ke aset tetap BLUD. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.153
Mutasi Aset Tidak Berwujud (Software)

URAIAN	Nominal
Saldo Awal	6.990.896.764,00
Penambahan :	
- Belanja Modal AL-Software	137.870.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal ATL-Software	282.658.300,00
- Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.214.518.328,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ATB	35.000.000,00
Jumlah Penambahan	3.670.046.628,00
Pengurangan :	
- Reklasifikasi Software ke Aset Tetap BLUD karena penganggaran ke BM Aset Lainnya BLUD	3.214.518.328,00
Jumlah Pengurangan	3.214.518.328,00
Saldo Akhir	7.446.425.064,00

Lebih lanjut penambahan software tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Lainnya-Software sebesar Rp137.870.000,000.
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Software sebesar Rp282.658.300,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp3.214.518.328,00 *termapping* sebagai *software* merupakan belanja aset Dinkes-UPTD Puskesmas.
4. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ATB sebesar Rp35.000.000,00 pada BKPSDMD berupa aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu Kepegawaian yang sebelumnya dianggarkan pada Belanja Modal Personal Komputer.
5. Penambahan ATB-*software* secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.154

Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud-Software

URAIAN	SKPD/UNIT	(Rp)
Aplikasi Emonevbang	SEKRETARIAT DAERAH	9.768.000,00
Sistem Manajemen Data Pnggiat Keagamaan / SIMDA (PENGAMAN)	SEKRETARIAT DAERAH	24.975.000,00
Website Sekretariat DPRD / aplikasi simpen bakwan	SEKRETARIAT DPRD	49.905.600,00
Peningkatan Menu dan Fitur Aplikasi Pelayanan DPKP : penambahan database SPPT (aktivasi filter luas lahan) dan penambahan fitur laporan penyaluran pupuk	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29.248.000,00
Aplikasi SINANDA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14.916.000,00
Aplikasi Sipercil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	34.077.000,00
Aplikasi SIPERNAS BPKAD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.381.000,00
Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49.728.000,00
Aplikasi Mata Inspektorat	INSPEKTORAT	53.624.100,00
Sistem Informasi Pengajuan Dokumen Berbasis Situs Web (DIJABAT-BESTI)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	35.000.000,00
Sistem Informasi Data Terpadu Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	75.000.000,00
Sistem Informasi Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DINPERWASKIM	49.905.600,00
JUMLAH		455.528.300,00

Sedangkan pengurangan software merupakan reklasifikasi software ke aset tetap BLUD sebesar Rp3.214.518.328,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.155

Reklasifikasi Software ke Aset Tetap BLUD

URAIAN	SKPD/UNIT	(Rp)
Salah penganggaran BM BLUD ke BM Aset Lainnya	DINKES-UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	1.820.001.888,00
	DINKES-UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	337.984.760,00
	DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG	1.056.531.680,00
JUMLAH		3.214.518.328,00

5.3.1.6.4 Aset Lain-lain

Aset lain-lain sebesar Rp93.576.211.791,31 merupakan aset lainnya rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dikurangi akumulasi penyusutan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.156
Aset Lain-Lain

URAIAN	Saldo Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2023
Aset Lain-lain :				
Aset Lain-lain Barang Rusak Berat	69.453.277.243,00	3.643.384.574,00	4.591.747.379,00	68.504.914.438,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	173.494.800.396,00	-	175.920.900,00	173.318.879.496,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	4.505.488.265,00	4.441.583.000,00	4.505.488.265,00	4.441.583.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya :				
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(153.015.049.967,26)	(3.404.628.841,00)	(3.730.513.665,57)	(152.689.165.142,69)
JUMLAH	94.438.515.936,74	4.680.338.733,00	5.542.642.878,43	93.576.211.791,31

Masing-masing akun dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Lain-lain Barang Rusak Berat

Aset ini sebelumnya merupakan aset tetap yang digunakan untuk operasional pemerintah namun karena kondisinya yang telah rusak dan tidak memungkinkan untuk digunakan maka direklasifikasi menjadi aset lainnya. Mutasi aset lain-lain barang rusak berat tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.157
Mutasi Aset Lain-Lain Barang Rusak Berat

URAIAN	(Rp)	Keterangan
SALDO AWAL	69.453.277.243,00	
PENAMBAHAN :		
PERUBAHAN KONDISI RUSAK BERAT/ TD	3.643.384.574,00	
JUMLAH PENAMBAHAN	3.643.384.574,00	
PENGURANGAN :		
PENGHAPUSAN BARANG RB/TD	4.586.747.379,00	
REKLAS KE ASET TETAP	5.000.000,00	Rumdin SDN Lembarawa 02
JUMLAH PENGURANGAN	4.591.747.379,00	
SALDO AKHIR 2023	68.504.914.438,00	

Perubahan kondisi barang baik (B)/rusak ringan (RR) ke barang rusak berat (RB) terjadi pada SKPD dengan rincian sesuai tabel berikut ini :

Tabel 5.158
Perubahan Kondisi Barang B/RR ke RB per SKPD

SKPD	(Rp)	Keterangan
KEC. BANJARHARJO	20.200.000,00	
BKPSDMD	852.385.000,00	
BPBD	204.562.500,00	
DINDUKCAPIL	333.535.998,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	(Rp)	Keterangan
DINKES	1.000.640.430,00	
DINKOMINFOTIK	712.448.122,00	
DINPERINAKER	155.531.500,00	
DPKH	80.381.778,00	
KEC. LOSARI	188.621.700,00	
KEC. SALEM	95.077.546,00	
JUMLAH	3.643.384.574,00	

SKPD melaksanakan penjualan/penghapusan barang RB rinciannya sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5.159

SKPD Yang Melaksanakan Penjualan/penghapusan Barang RB

SKPD	(Rp)	Nomor SK Hapus	Keterangan
BAKESBANGPOLDA	12.392.500,00	SK No.028/166 Tahun 2023	alat kantor
	19.300.000,00	SK No.028/1677 Tahun 2023	kendaraan roda 2
RSUD BREBES	67.050.250,00	SK No.028/1677 Tahun 2023	alat kantor, alat kedokteran
DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	796.648.150,00	SK No.050/1551 Tahun 2023	alat kantor, alat kedokteran
DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	45.000.000,00	SK No.028/1573 Tahun 2023	kendaraan roda 4
DPU	52.785.000,00	SK No.028/1573 Tahun 2023	kendaraan roda 2
DINBUDPAR	169.189.250,00	SK No.028/108 Tahun 2023	alat kantor, bangunan
	770.383.300,00	SK No.028/1616 Tahun 2023	
DINDIKPORA	3.062.500,00	SK No.028/108 Tahun 2023	alat kantor, buku
	408.847.115,00	SK No.028/1677 Tahun 2023	
DINDUKCAPIL	1.076.752.300,00	SK No.028/1677 Tahun 2023	alat kantor, alat komunikasi
DINKAN	6.500.000,00	SK No.028/1573 Tahun 2023	kendaraan roda 2
DINKES	265.268.989,00	SK No.028/1677 Tahun 2023	genset, Instalasi air, alat komunikasi, alat kantor, alat laboratorium
DINKOMINFOTIK	21.560.000,00	SK No.028/205 Tahun 2023	alat kantor
DINPERMADES	320.144.500,00	SK No.028/1706 Tahun 2023	alat kantor
DP3KB	191.922.150,00	SK No.028/108 Tahun 2023	alat kantor, alat komunikasi
DPKP	3.500.000,00	SK No.028/204 Tahun 2023	bangunan
	4.000.000,00	SK No.028/1573 Tahun 2023	kendaraan roda 2
DPSDAPR	2.675.000,00	SK No.028/1677 Tahun 2023	alat kantor, alat ukur
KEC. BULAKAMBA	106.124.700,00	SK No.028/1677 Tahun 2023	alat kantor
KEC. KETANGGUNGAN	130.363.675,00	SK No.028/3770 Tahun 2022	alat kantor
KEC. LOSARI	108.278.000,00	SK No.028/167 Tahun 2023	alat kantor
KEC. BANTARKAWUNG	5.000.000,00	SK No.028/157 Tahun 2023	kendaraan roda 2
JUMLAH	4.586.747.379,00		

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah tahun 2023 sebesar Rp173.318.879.496,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.160

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam operasional Pemerintah

URAIAN	SKPD	Saldo Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2023
Aset Hibah Keluar Hasil Sensus Belum Dihapus	DINKAN, DPU	169.200.433.917,00			169.200.433.917,00
Ex- Dana Bergulir Ternak yang berstatus macet	BPKAD	1.213.302.750,00			1.213.302.750,00
Detail Engineering (DE) belum dibangun fisiknya/lift Pusk. Jatibarang	DINKES-UPTD PUSK. BREBES	17.605.000,00			17.605.000,00
Detail Engineering (DE) belum dibangun fisiknya/mastepan OW Th.2018	DINBUDPAR	502.274.000,00			502.274.000,00
Aset yang tidak ditemukan	DINDIKPORA, KEC. LOSARI, UPTD PUSK TANJUNG	2.561.184.729,00		175.920.900,00	2.385.263.829,00
JUMLAH		173.494.800.396,00	-	175.920.900,00	173.318.879.496,00

- a. Aset Hibah Keluar Hasil Sensus belum dihapus sebesar Rp169.200.433.917,00 merupakan aset yang telah dihibahkan namun belum dihapus dan baru ditetapkan keputusan penghapusannya serta dihapus sebagian dari KIB Dinas Perikanan pada tahun 2021 sebesar Rp249.349.000,00 berupa alat produksi perikanan yang dihibahkan kepada kelompok/masyarakat dan DPU sebesar Rp168.951.084.917,00 berupa jalan, saluran drainase dan prasarana lingkungan desa.
 - b. Ex-Dana Bergulir ternak yang berstatus macet merupakan hasil reklasifikasi investasi dana bergulir berupa ternak kambing/domba dan sapi yang digulirkan pada kelompok ternak di Kabupaten Brebes pada tahun 2004 dan 2006 di mana perguliran tersebut mengalami kemacetan. Nilai awal realisasi pinjaman tersebut sebesar Rp1.591.901.000,00 dan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.213.302.750,00.
 - c. Detail Engineering (DE) pembangunan lift puskesmas Jatibarang sebesar Rp17.605.000,00 fisiknya belum dilaksanakan.
 - d. Aset Lainnya Detail Engineering (DE) belum dibangun fisiknya sebesar Rp502.274.000,00 merupakan Aset Lainnya DE pada Dinbudpar. DE ini berupa *master plan* obyek wisata th 2018 yang fisiknya belum dilaksanakan.
 - e. Aset tidak ditemukan sebesar Rp2.561.184.729,00 pada SKPD Dindikpora, Kec. Losari dan Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung. Atas aset tersebut telah dilakukan penghapusan kendaraan dan alat telekomunikasi Dindikpora senilai Rp175.920,000,00 sehingga saldo tahun 2023 sebesar Rp2.385.263.829,00.
3. *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah secara non-tunai berupa penyimpanan dana di Bank Indonesia. Saldo tahun 2023 sebesar Rp4.441.583.000,00 merupakan dana bagi hasil pemerintah pusat (DBH-TDF) yang masih berada pada rekening Bank Indonesia dan akan disalurkan di tahun 2024. Rincian dana bagi hasil tersebut dijelaskan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.161

Rincian Aset Lainnya DBH Treasury Deposit Facility (DBH-TDF) Tahun 2023

Uraian	(Rp)	Klasifikasi
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	329.730.000,00	DBH PBB-LO
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D02.DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah)	10.456.000,00	DBH PBB-LO
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	106.379.000,00	DBH PBB-LO
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D04.DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah)	647.184.000,00	DBH PBB-LO
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	10.242.000,00	DBH PBB-LO
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	12.972.000,00	DBH PBB-LO
DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	35.960.000,00	DBH PPh Pasal 21-LO
DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	2.771.655.000,00	DBH PPh Pasal 21-LO
DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	454.858.000,00	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	24.728.000,00	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
DBH SDA Minyak Bumi 15% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	1.343.000,00	DBH SDA Minyak Bumi-LO
DBH SDA Minyak Bumi 15% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	31.465.000,00	DBH SDA Minyak Bumi-LO
DBH SDA Minyak Bumi 0.5% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	1.050.000,00	DBH SDA Minyak Bumi-LO
DBH SDA Minerba - luran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	227.000,00	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
DBH SDA Panas Bumi - luran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	3.334.000,00	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
Jumlah	4.441.583.000,00	

Adapun DBH-TDF tahun 2022 sebesar Rp4.505.488.265,00 telah ditransfer seluruhnya ke RKUD pada tahun 2023 sehingga bersaldo nihil.

4. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar (Rp152.689.165.142,69) dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.162

Rincian Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

URAIAN	Saldo Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2023
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(37.326.464.469,12)	(3.404.628.841,00)	(3.554.592.765,57)	(37.176.500.544,55)
Akumulasi Penyusutan Barang Tidak Ditemukan	(1.814.686.178,00)	-	(175.920.900,00)	(1.638.765.278,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Keluar Belum Dihapus	(113.873.899.320,14)	-	-	(113.873.899.320,14)
JUMLAH	(153.015.049.967,26)	(3.404.628.841,00)	(3.730.513.665,57)	(152.689.165.142,69)

Rincian akumulasi penyusutan barang rusak berat terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. Akumulasi penyusutan barang rusak berat sebesar (Rp37.176.500.544,55). Mutasi nilai ini secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.163
Mutasi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

URAIAN	Nominal	Keterangan
SALDO AWAL	(37.326.464.469,12)	
PENAMBAHAN :		
PERUBAHAN KONDISI BAIK KE RUSAK BERAT	(3.404.628.841,00)	10 SKPD
JUMLAH PENAMBAHAN	(3.404.628.841,00)	
PENGURANGAN :		
PENGHAPUSAN BARANG RUSAK BERAT	(3.554.592.765,57)	19 SKPD
JUMLAH PENGURANGAN	(3.554.592.765,57)	
SALDO AKHIR	(37.176.500.544,55)	

- a. Penambahan akumulasi penyusutan RB karena perubahan kondisi barang B/RR menjadi RB pada Kec. Banjarharjo, BKPSDMD, BPBD, Dunducapil, Dinkes, Dinkominfotik, Dinperinaker, DPKH, Kec. Losari, Kec. Salem sebesar (Rp3.404.628.841,00)
- b. Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan RB karena penghapusan pada SKPD Bakesbangpolda, RSUD Brebes, Dinkes-UPTD Pusk. Bumiayu, Dinkes-UPTD Pusk. Tanjung, DPU, Dinbudpar, Dindikpora, Dindukcapil, Dinkan, Dinkes, Dinkominfotik, Dinpermades, DP3KB, DPKP, DPSDAPR, Kec. Bulakamba, Kec. Ketanggungan, Kec. Losari, Kec. Bantarkawung sebesar (Rp3.554.592.765,57).
- c. Saldo tahun 2023 dengan rincian dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.164
Saldo Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

NAMA SKPD	(Rp)
DINAS PENDIDIKAN	(13.233.795.608,80)
DINAS KESEHATAN	(5.688.227.187,53)
DINKES-UPTD PUSK. BREBES	(1.187.396.467,00)
DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	(94.837.503,34)
DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	(579.434.355,00)
DINKES-UPTD PUSK. PAGUYANGAN	(346.477.803,00)
DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	(526.188.900,00)
RSUD BREBES	(949.724.465,97)
RSUD BUMIAYU	(177.329.630,00)
DPU	(4.912.757.544,00)
BPBD	(333.193.481,20)
DINAS SOSIAL	(39.644.300,00)
DINDUKPIL	(347.345.948,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NAMA SKPD	(Rp)
DINPERMADES	(6.758.000,00)
DINKOMINFOTIK	(719.116.122,00)
DINKOPUMDAG	(43.983.000,00)
DPMPTSP	(6.000.000,00)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(498.432.483,57)
DINAS PERIKANAN	(767.753.967,00)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(73.341.800,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(131.176.635,14)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	(155.531.500,00)
SEKRETARIAT DAERAH	(895.230.837,00)
SEKRETARIAT DPRD	(139.700.000,00)
KEC. BREBES	(2.103.471.825,00)
KEC. SONGGOM	(26.855.000,00)
KEC. TANJUNG	(6.010.000,00)
KEC. LOSARI	(233.286.700,00)
KEC. KERSANA	(72.194.800,00)
KEC. BANJARHARJO	(53.645.000,00)
KEC. LARANGAN	(16.600.000,00)
KEC. TONJONG	(136.010.000,00)
KEC. SIRAMPOG	(2.030.000,00)
KEC. SALEM	(96.977.546,00)
INSPEKTORAT	(280.408.800,00)
BAPERLITBANGDA	(1.442.400.735,00)
BKPSDMD	(844.555.600,00)
BAKESBANGPOL	(8.677.000,00)
JUMLAH	(37.176.500.544,55)

2. Akumulasi Penyusutan Barang yang Tidak Ditemukan sebesar Rp1.638.765.278,00. Rincian dari nilai ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.165
Saldo Akumulasi Penyusutan Barang Tidak Ditemukan

NAMA SKPD	JENIS ASET	Th 2022	MUTASI	Th 2023
DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG	PERALATAN & MESIN	27.781.021,00		27.781.021,00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PERALATAN & MESIN	1.754.130.157,00	(175.920.900,00)	1.578.209.257,00
	GEDUNG & BANGUNAN	18.500.000,00		18.500.000,00
KECAMATAN LOSARI	PERALATAN & MESIN	14.275.000,00		14.275.000,00
JUMLAH		1.814.686.178,00	(175.920.900,00)	1.638.765.278,00

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Barang yang Tidak Ditemukan sebesar (Rp175.920.900,00) merupakan penghapusan kendaraan dan pesawat telepon pada Dindikpora.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan akumulasi penyusutan aset pada Dinkan dan DPU. Akumulasi penyusutan Dinkan merupakan akumulasi penyusutan atas aset yang telah dihibahkan dan telah ditetapkan keputusan penghapusannya sebagian di tahun 2021. Sisa yang belum dihapuskan per tahun 2023 sebesar Rp233.529.357,14. Sedangkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada DPU adalah sebesar Rp113.640.369.963,00. Nilai ini merupakan nilai akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan ke desa berupa jalan, saluran drainase dan prasarana lingkungan.

5.3.1.6.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud tahun 2023 dan 2022 sebesar (Rp6.178.264.741,00) dan (Rp5.463.551.320,00). Selama tahun 2023 amortisasi aset tidak berwujud mendapat penambahan beban amortisasi sebesar (Rp714.713.421,00) dan tidak terdapat mutasi pengurangan.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp48.347.316.447,32	Rp35.185.817.721,46

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp48.347.316.447,32 dan Rp35.185.817.721,46. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.166
Rincian Kewajiban

Uraian	2023	2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	89.859.256,00	705.180.945,17
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.010.117.010,32	1.298.881.818,79
Utang Belanja	46.079.132.027,00	33.181.754.957,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	168.208.154,00	-
JUMLAH	48.347.316.447,32	35.185.817.721,46



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.167
Rincian Mutasi Utang PFK

Uraian	SKPD	Saldo Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2023
Utang PFK					
Pajak belum disetor Th. 2022	DPMPTSP	6.934.458,00		(6.934.458,00)	-
BOS					
Pajak Dana BOS Th. 2022	DINDIKPORA	698.246.487,17		(698.246.487,17)	-
Pajak Dana BOS Th. 2023	DINDIKPORA		3.902.200,00		3.902.200,00
BLUD & BOK					
Pajak belum disetor Th. 2023	DINKES-UPTD Pusk. Tanjung		416.300,00		416.300,00
Pajak belum disetor Th. 2023	DINKES-UPTD Pusk. Banjarharjo		7.647.740,00		7.647.740,00
Pajak belum disetor Th. 2023	DINKES-UPTD Pusk. Bumiayu		264.317,00		264.317,00
Pajak belum disetor Th. 2023	RSUD BUMIAYU		<u>77.628.699,00</u>		<u>77.628.699,00</u>
Jumlah BLUD & BOK			85.957.056,00		85.957.056,00
Jumlah		705.180.945,17	89.859.256,00	(705.180.945,17)	89.859.256,00

1. Utang PFK tahun 2022 berupa hutang pajak atas pengadaan barang jasa yang belum dibayar pada DPMPTSP sebesar Rp6.934.458,00 telah disetor ke Kas Negara, sehingga tahun 2023 bersaldo nihil.
 2. Utang PFK Pajak Dana BOS tahun 2022 sebesar Rp698.246.487,17 berupa pajak daerah telah disetor ke kas daerah, adapun tahun 2023 mendapat penambahan utang pajak daerah/katering sebesar Rp3.902.200,00.
 3. Tahun 2023 terdapat penambahan pajak belum disetor dari Dinke-UPTD Puskesmas berupa PPh dan PPN serta pajak daerah dari transaksi bersumber dana BLUD dan BOK sebesar Rp85.957.056,00.
- Saldo Utang PFK 2023 sebesar Rp89.859.256,00.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima dimuka	<u>Th 2023</u>	<u>Th 2022</u>
	2.010.117.010,32	1.298.881.818,79

Saldo Pendapatan Diterima di Muka tahun 2023 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.168
Pendapatan Diterima di Muka

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022
Dinkopumdag	73.057.621,39	120.611.859,19



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022
Dinbudpar	88.998.663,07	0,00
BPKAD	397.777.870,47	5.646.646,58
BAPENDA	1.450.282.855,39	1.172.623.313,02
Jumlah	2.010.117.010,32	1.298.881.818,79

Mutasi Pendapatan Diterima di Muka masing-masing pada SKPD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi pada Dinas Koperasi UM & Perdagangan dijelaskan sesuai tabel berikut ini.

Tabel 5.169

Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Dinkopumdag

Uraian	Sewa Loos
Saldo Awal	120.611.859,19
Penyesuaian Pendapatan-LO tahun 2023 yang merupakan Pendapatan Diterima Di Muka	-
Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya telah menjadi Pendapatan-LO	(47.554.237,80)
Saldo Akhir	73.057.621,39

Rincian saldo pendapatan diterima di muka pada Dinas Koperasi UM Perdagangan berupa sewa loos pasar dengan masa sewa selama 5 tahun yaitu sewa tahun 2017-2021. Sewa tahun 2017 telah habis masa sewa sehingga PDDM atas sewa 2017 bersaldo nihil sedangkan sewa tahun 2018-2021 masih berlaku. Selanjutnya di tahun 2022 tidak lagi diterima pembayaran sewa loos ini. Secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.170

Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka Dinas Koperasi UM Perdagangan

URAIAN	PENERIMAAN KAS PEND. DITERIMA DI MUKA	PENDAPATAN S.D TH 2022	PENDAPATAN TH 2023	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 2023
Sewa loos 2017 (5th)	72.175.000,00	72.174.406,05	593,95	-
Sewa loos 2018 (5th)	100.430.000,00	92.147.596,91	8.256.478,35	25.924,74
Sewa loos 2019 (5th)	35.890.000,00	27.337.663,88	5.868.923,78	2.683.412,33
Sewa loos 2020 (5th)	64.525.000,00	33.981.156,10	13.304.348,29	17.239.495,61
Sewa loos 2021 (5th)	100.622.500,00	27.389.817,87	20.123.893,42	53.108.788,71
JUMLAH	701.238.500,00	580.626.640,81	47.554.237,80	73.057.621,39

- b. Mutasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijelaskan sesuai table berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.171

Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Dinbudpar

Uraian	Sewa Tempat
Saldo Awal	-
Koreksi salah catat saldo 2023	-
Penyesuaian Pendapatan-LO tahun 2023 yang merupakan Pendapatan Diterima Di Muka	88.998.663,07
Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya telah menjadi Pendapatan-LO	-
Saldo Akhir	88.998.663,07

Perhitungan pendapatan diterima di muka pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa retribusi sewa tempat di objek wisata. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.172

Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka Dinbudpar

URAIAN	PENERIMAAN KAS PEND. DITERIMA DI MUKA	PENDAPATAN S.D TH 2022	PENDAPATAN TH 2023	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 2023
Pengelolaan objek wisata waduk malahayu oleh GEGER HALANG periode th 26 okt 2023-26 okt 2024	56.000.000,00		10.098.360,66	45.901.639,34
Pengelolaan objek wisata malahayu oleh Bpk. Casta/BBM periode 13 Mar 2023-13 Mar 2024	25.000.000,00		20.013.661,20	4.986.338,80
Kerjasama pemanfaatan Wisma Kencana oleh PT Pelangi Hotel Internasional, periode 11/12/2023-10/12/2024	40.320.000,00		2.209.315,07	38.110.684,93
JUMLAH	121.320.000,00	-	32.321.336,93	88.998.663,07

- c. Mutasi pendapatan diterima di muka pada BPKAD dijelaskan sesuai tabel berikut ini.

Tabel 5.173

Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka BPKAD

Uraian	Retribusi Sewa Aset
Saldo Awal	5.646.646,58
Penyesuaian Pendapatan-LO tahun 2023 yang merupakan Pendapatan Diterima Di Muka	397.777.870,47



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Retribusi Sewa Aset
Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya telah menjadi Pendapatan-LO	(5.646.646,58)
Saldo Akhir	397.777.870,47

Pendapatan diterima di muka pada BPKAD berupa retribusi sewa tanah dan bangunan yang telah diterima pembayarannya namun masa sewanya melebihi periode akuntansi tahun 2023. Rincian perhitungan pendapatan diterima di muka BPKAD disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.174
Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka BPKAD

Uraian	STS Nilai (Rp)	Nama Debitur	Pendapatan s.d 2022	Pendapatan Th 2023	Pendapatan Diterima Di Muka
Sewa Tanah di Saditan Brebes tgl 08/10/2018-07/10/2023	10.351.000,00	Ponpes Assalafiyah	8.768.573,15	1.582.426,85	-
SEWA TANAH PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH II SADITAN BREBES 07/10/23-07/10/28	10.626.000,00	Ponpes Assalafiyah (ULIL ALBAB)	-	494.367,82	10.131.632,18
Sewa Tanah/Bangunan PMI tgl 01/04/2022-01/04/2023	2.173.600,00	PMI Kab. Brebes	1.637.643,84	535.956,16	-
Sewa Tanah/Bangunan PMI tgl 03/04/2023-03/04/2024	10.626.000,00	PMI Kab. Brebes	-	7.896.918,03	2.729.081,97
Sewa Tanah/Bangunan Ds. Lemah Abang tgl 02/05/2022-02/05/2023	10.626.000,00	Desa Lemah Abang	7.103.408,22	3.522.591,78	-
SEWA TANAH LOK.SANGKAL PUTUNG Tgl 02/01/2023-02/01/2028	10.626.000,00	AROPAH	-	2.112.397,59	8.513.602,41
SEWA TANAH EKS BLK DS.BULAKAMBA tgl 03/10/22-01/10/27	10.626.000,00	H MUHADI.S.B	-	2.644.848,68	7.981.151,32
SEWA TANAH UTK TANDON/BANGUNAN tgl 30/04/2023-30/04/2025	10.626.000,00	DEDI ANJAR PRIYANTO, S.E	-	3.561.381,67	7.064.618,33
SEWA TANAH BPP KERSANA tgl 03/04/2023-03/04/2024	10.626.000,00	BPP Kersana	-	7.896.918,03	2.729.081,97
SEWA LAHAN EX. BPP KALIWADAS tgl 04/10/23-03/10/2024	46.600.000,00	NUR SALIM	-	11.235.068,49	35.364.931,51



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	STS Nilai (Rp)	Nama Debitur	Pendapatan s.d 2022	Pendapatan Th 2023	Pendapatan Diterima Di Muka
SEWA TANAH DAN BANGUNAN GUDANG PANGAN DESA LEMAH ABANG tgl 15/05/2023-15/05/2025	10.626.000,00	IKO WARKODIM		3.343.337,89	7.282.662,11
SEWA TANAH DAN BANGUNAN GUDANG PANGAN KELURAHAN BREBES tgl 15/05/2023-15/05/2025	10.626.000,00	MAHFUDIN		3.343.337,89	7.282.662,11
PEMANFAATAN RUKO EX-BGS PT MEP					
SEWA TANAH DAN BANGUNAN(RUKO) PSR BAWANG KLAMPOK tgl 09/10/2023-08/10/2024	112.654.500,00	11 debitur	-	25.617.324,66	87.037.175,34
SEWA TANAH DAN BANGUNAN(RUKO) PSR BAWANG LAMA tgl 09/10/2023-08/10/2024	31.878.000,00	3 debitur	-	7.248.969,86	24.629.030,14
SEWA TANAH DAN BANGUNAN(RUKO) PSR JATIBARANG tgl 09/10/2023-08/10/2024	116.886.000,00	11 debitur	-	26.579.556,16	90.306.443,84
SEWA TANAH DAN BANGUNAN(RUKO) PSR KETANGGUNGAN tgl 09/10/2023-08/10/2024	127.512.000,00	12 debitur	-	28.995.879,45	98.516.120,55
SEWA TANAH DAN BANGUNAN(RUKO) KOMPLEK EKS TERMINAL PASAR BUMIAYU tgl 09/10/2023-08/10/2024	10.626.000,00	Bank BCA		2.416.323,29	8.209.676,71
Jumlah	554.315.100,00		17.509.625,21	139.027.604,32	397.777.870,47

- d. Mutasi pendapatan diterima di muka pada Bapenda dijelaskan sesuai tabel berikut ini.

Tabel 5.175

Mutasi Pendapatan Diterima di Muka Bapenda

Uraian	Pajak Reklame
Saldo Awal	1.172.623.313,02
Penyesuaian Pendapatan-LO tahun 2023 yang merupakan Pendapatan Diterima Di Muka	1.450.282.855,39
Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya telah menjadi Pendapatan-LO	(1.172.623.313,02)
Saldo Akhir	1.450.282.855,39



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan diterima di muka Pajak Reklame merupakan pajak reklame yang telah diterima pembayarannya namun masih berlaku masa tayang reklame tersebut sampai melebihi periode akuntansi tahun 2023. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.176
Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka Bapenda

URAIAN	PENERIMAAN KAS PEND. DITERIMA DI MUKA	PENDAPATAN S.D TH 2022	PENDAPATAN TH 2023	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 2023
Pajak Reklame Th 2022	2.518.300.199,84	1.345.676.886,82	1.172.623.313,02	-
Pajak Reklame Th 2023	3.097.770.475,00	-	1.647.487.619,61	1.450.282.855,39
JUMLAH	5.616.070.674,84	1.345.676.886,82	2.820.110.932,63	1.450.282.855,39

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

	<u>Th 2023</u>	<u>Th 2022</u>
Utang Belanja	Rp46.079.132.027,00	Rp33.181.754.957,50

Adapun rincian saldo utang belanja tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.177
Rekapitulasi Utang Belanja

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022
Utang Belanja Pegawai	14.864.025.849,00	11.894.314.452,00
Utang Belanja Barang	8.983.882.960,00	3.810.481.067,00
Utang Belanja Jasa	22.221.066.718,00	17.254.499.438,50
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.890.500
Utang Belanja Pemeliharaan	10.156.500,00	3.552.000
Utang Bantuan Sosial	0,00	201.017.500
Jumlah	46.079.132.027,00	33.181.754.957,50

Rincian mutasi masing-masing Utang Belanja disajikan dalam tabel berikut ini:

1. Utang Belanja Pegawai :

Tabel 5.178
Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai

Uraian	SALDO 2022	TAMBAH	Koreksi Tambah	KURANG	Koreksi Kurang	SALDO 2023
Utang 2023						



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	SALDO 2022	TAMBAH	Koreksi Tambah	KURANG	Koreksi Kurang	SALDO 2023
Utang Belanja BPJS Kesehatan	-	2.159.945.552,00				2.159.945.552,00
Utang Belanja Kekurangan Gaji dan Tunjangan	-	51.398.807,00				51.398.807,00
Utang Belanja Jasa Medis/Jasa Pelayanan ASN	-	998.926.280,00				998.926.280,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional	-	1.658.437.726,00				1.658.437.726,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	-	8.169.213.333,00				8.169.213.333,00
Utang Belanja Tunjangan PPh	-	43.898.223,00				43.898.223,00
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak	-	1.702.668.423,00				1.702.668.423,00
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	-	79.537.505,00				79.537.505,00
Utang 2022						
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	6.393.261,00			6.393.261,00		-
Utang Belanja Iuran BPJS Kesehatan	1.960.668.482,00			1.960.668.482,00		-
Utang Belanja Jasa Medis/Pelayanan (ASN)	441.648.779,00			441.648.779,00		-
Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai PNS	7.086.440.024,00			7.086.440.024,00		-
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	90.397.500,00		450.000,00	87.390.000,00	3.457.500,00	-
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak	2.308.766.406,00			2.308.766.406,00		-
Jumlah	11.894.314.452,00	14.864.025.849,00	450.000,00	11.891.360.952,00	3.457.500,00	14.864.025.849,00

Penjelasan :

- a. Saldo awal utang belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp11.894.314.452,00.
- b. Penambahan Utang Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp14.864.025.849,00 berupa :
 - 1) Utang Belanja BPJS Kesehatan atas belanja pegawai sebesar Rp2.159.945.552,00 pada Dinkes-UPTD Pusk. Paguyangan dan RSUD Bumiayu.
 - 2) Utang Belanja Kekurangan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp51.398.807,00 pada Dinkes-UPTD Pusk. Paguyangan dan RSUD Bumiayu
 - 3) Utang Belanja Jasa Medis/Jasa Pelayanan bagi ASN sebesar Rp998.926.280,00 pada BLUD.
 - 4) Utang Belanja Tunjangan Fungsional sebesar Rp1.658.437.726,00 atas rapel tenaga fungsional yang diangkat karena penyederhanaan birokrasi.
 - 5) Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp8.169.213.333,00 pada seluruh SKPD.
 - 6) Utang Tunjangan PPh sebesar Rp43.898.223,00 pada SKPD Diarpus, Dinkan, DPKP, Dinbudpar, Dinkes, Dinperinaker, Dinpermades, Dinsos, DP3KB, Kesbangpol dan SETDA.
 - 7) Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak sebesar Rp 1.702.668.423,00 pada SKPD Bapenda.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 8) Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi sebesar Rp79.537.505,00.
- c. Koreksi tambah Utang Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp450.000,00 merupakan koreksi salah perhitungan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Pesanggrahan pada SKPD Dinbudpar.
- d. Pengurangan Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 yang telah dibayar sebesar Rp11.891.306.952,00,00 berupa :
- 1) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6.393.261,00.
 - 2) Utang Belanja Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp1.960.668.482,00.
 - 3) Utang Belanja Jasa Medis/Pelayanan bagi ASN sebesar Rp441.648.779,00 pada RSUD Bumiayu.
 - 4) Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp7.086.440.024,00.
 - 5) Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi sebesar Rp87.390.000,00 pada SKPD Dinbudpar.
 - 6) Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak sebesar Rp2.308.766.406,00 pada SKPD Bapenda.
- e. Koreksi kurang Utang Belanja Pegawai sebesar Rp3.457.500,00 merupakan koreksi salah perhitungan Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada SKPD Dinbudpar.
2. Utang Belanja Barang dan Jasa
- a. Utang Belanja Barang :
- Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang persediaan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.179
Rekapitulasi Utang Belanja Barang/Persediaan

Uraian	SALDO 2022	TAMBAH	Koreksi Tambah	KURANG	Koreksi Kurang	SALDO 2023
Utang 2023						
Utang Belanja Pengadaan Bank Darah		839.570.000,00				839.570.000,00
Utang Belanja Pengadaan BHP Alkes		4.255.222.374,00				4.255.222.374,00
Utang Belanja Pengadaan Isi Tabung Gas Elpiji/Oksigen		51.730.440,00				51.730.440,00
Utang Belanja Pengadaan Makan Minum Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-				-
Utang Belanja Pengadaan Obat-obatan		3.803.955.867,00				3.803.955.867,00
Utang Belanja Pengadaan Reagen		33.404.279,00				33.404.279,00
Utang 2022						
Utang Belanja Alat/Bahan Kebersihan	1.454.100,00			1.454.100,00		-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	SALDO 2022	TAMBAH	Koreksi Tambah	KURANG	Koreksi Kurang	SALDO 2023
Utang Belanja Pengadaan Bank Darah	327.295.000,00			327.295.000,00		-
Utang Belanja Pengadaan Barang Cetak	1.440.000,00			1.440.000,00		-
Utang Belanja Pengadaan BHP Alkes	1.864.551.328,00		500,00	1.850.958.768,00	13.593.060,00	-
Utang Belanja Pengadaan Isi Tabung Gas Elpiji/Oksigen	35.856.330,00			35.856.330,00		-
Utang Belanja Pengadaan Kertas Tensi/BHP Alkes	23.369.940,00			23.369.940,00		-
Utang Belanja Pengadaan Obat	1.378.282.543,00		3.000.000,00	1.381.282.543,00		-
Utang Belanja Pengadaan Reagen	122.316.326,00			122.316.326,00		-
Utang Belanja BHP TP A.N AKHMAD MAULANA YUSUF	55.915.500,00				55.915.500,00	-
Jumlah	3.810.481.067,00	8.983.882.960,00	3.000.500,00	3.743.973.007,00	69.508.560,00	8.983.882.960,00

Penjelasan :

- 1) Saldo awal tahun 2023 utang belanja barang/persediaan sebesar Rp3.810.481.067,00.
- 2) Penambahan tahun 2023 sebesar Rp8.983.882.960,00 berupa :
 - a) Utang pengadaan bank darah pada RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu sebesar Rp839.570.000,00.
 - b) Utang pengadaan BHP Alkes pada Dinkes-UPTD Pusk. Paguyangan, RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu sebesar Rp4.255.222,374,00.
 - c) Utang pengisian tabung gas elpiji/oksigen pada RSUD Bumiayu sebesar Rp51.730.440,00.
 - d) Utang pengadaan obat-obatan pada RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu sebesar Rp3.803.955.867,00.
 - e) Utang pengadaan reagen pada RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu sebesar Rp33.404.279,00.
- 3) Utang pengadaan pada RSUD merupakan utang kepada penyedia jasa karena barang tersebut telah diterima oleh RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas terkait namun masih menunggu proses penyelesaian administrasi pembayaran.
- 4) Saldo utang belanja barang/persediaan tahun 2022 mendapatkan koreksi tambah sebesar Rp3.000.500,00 yaitu utang pengadaan BHP alkes pada RSUD Brebes sebesar Rp500,00 karena salah pencatatan dan utang pengadaan obat-obatan sebesar Rp3.000.000,00 pada RSUD Bumiayu karena kurang pencatatan.
- 5) Utang belanja barang/persediaan tahun 2022 telah dibayar seluruhnya sehingga bersaldo nihil. Adapun pembayaran utang sebesar Rp3.743.973.007,00 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Utang pengadaan alat/bahan kebersihan sebesar Rp1.454.100,00.
 - b) Utang pengadaan bank darah sebesar Rp327.295.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- c) Utang pengadaan barang cetakan sebesar Rp1.440.000,00.
 - d) Utang pengadaan BHP/Alkes sebesar Rp1.850.958.768,00.
 - e) Utang pengisian tabung gas sebesar Rp35.856.330,00.
 - f) Utang pengadaan kertas tensi sebesar Rp23.369.940,00.
 - g) Utang pengadaan obat-obatan sebesar Rp1.381.282.543,00.
 - h) Utang pengadaan reagen sebesar Rp122.316.326,00.
- 6) Saldo utang belanja barang/persediaan tahun 2022 mendapatkan koreksi kurang sebesar Rp69.508.560,00 yaitu berupa utang pengadaan BHP/Alkes pada RSUD Bumiayu sebesar Rp13.593.060,00 dan utang belanja pada Dinas Kesehatan atas kasus pencurian dengan kekerasan tahun 2017 yang mengakibatkan tuntutan perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf sebesar Rp55.915.500,00.
- 7) Sisa hutang tuntutan perbendaharaan sebagaimana poin 5) dikoreksi/dihapusbukukan. Hal ini dikarenakan sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai Surat Majelis TP BPK-RI No.6/S/II/2024 tgl 23 Jan 2024. Sehingga baik piutang kerugian daerah maupun utang belanja yang terkait dengan kasus tersebut dihapusbukukan. Penghapusan juga meliputi seluruh utang yang terkait baik utang barang, utang jasa, utang perjalanan dinas maupun utang belanja bantuan sosial.
- 8) Rincian utang yang dihapusbukukan sebagaimana poin 6) adalah sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.660.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.300.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	12.155.500,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	<u>22.800.000,00</u>
Jumlah	55.915.500,00

b. Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.180
Rekapitulasi Utang Belanja Jasa

Uraian	SALDO 2022	TAMBAH	Koreksi Tambah	KURANG	Koreksi Kurang	SALDO 2023
Utang 2023						
Utang Belanja Air		74.964.400,00				74.964.400,00
Utang Belanja BPJS Kesehatan		788.881.583,00				788.881.583,00
Utang Belanja BPJS Ketenagakerjaan		6.575.268,00				6.575.268,00
Utang Belanja Jasa Gaji BLUD		1.984.040.714,00				1.984.040.714,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	SALDO 2022	TAMBAH	Koreksi Tambah	KURANG	Koreksi Kurang	SALDO 2023
Utang Belanja Jasa Tenaga Kontrak		185.749.281,00				185.749.281,00
Utang Belanja Internet		166.978.755,00				166.978.755,00
Utang Belanja Jasa Konsultan Perencanaan/Pengawas		48.078.000,00				48.078.000,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Medis		12.569.978.453,00				12.569.978.453,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Medis Persalinan		12.406.400,00				12.406.400,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Hemodialisa		1.632.443.041,00				1.632.443.041,00
Utang Belanja Lisrik		4.641.600.133,00				4.641.600.133,00
Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah/Limbah Medis		84.821.731,00				84.821.731,00
Utang Belanja Sewa Mesin Fotokopi		2.828.960,00				2.828.960,00
Utang Belanja Sewa Tempat		2.000.000,00				2.000.000,00
Utang Belanja Surat Kabar		2.730.000,00				2.730.000,00
Utang Belanja Telepon		16.989.999,00				16.989.999,00
Utang 2022						-
Utang Belanja Air	93.375.550,00			93.375.550,00		-
Utang Belanja Air Bawah Tanah	-					-
Utang Belanja Lisrik	4.528.897.543,00		27.987.100,00	4.556.884.643,00		-
Utang Belanja Telepon	21.665.243,00		24.216,00	21.320.659,00	368.800,00	-
Utang Belanja Surat Kabar	1.930.000,00			1.930.000,00		-
Utang Belanja Faksimili						-
Utang Belanja Jasa Gaji BLUD/Jasa Tenaga Kesehatan	7.905.333.966,00			7.905.333.966,00		-
Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi	299.264.060,00			299.264.060,00		-
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-					-
Utang Belanja faksimili/Internet	191.480.229,00		1.830.950,00	193.311.179,00		-
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan						-
Utang Belanja Jasa Layanan Laboratorium	4.750.000,00			4.750.000,00		-
Utang Belanja Jasa Kebersihan	34.170.880,00			34.170.880,00		-
Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah/Limbah Medis	104.601.938,00			104.601.938,00		-
Utang Belanja Tenaga Ahli	-					-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Medis/Persalinan	2.856.571.665,50			2.856.571.665,50		-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Medis Covid-19	-					-
Utang Belanja Layanan Radiologi	-					-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	SALDO 2022	TAMBAH	Koreksi Tambah	KURANG	Koreksi Kurang	SALDO 2023
Utang Belanja Sewa Mesin Fotokopi	5.215.670,00			5.215.670,00		-
Utang Belanja Layanan Kesehatan ke RS lain yang ditunjuk untuk pasien Jamkesda/SKTM	1.058.984.194,00			1.058.984.194,00		-
<i>(Eliminasi/Pencatatan Kembali Utang Belanja SKTM)</i>						-
Utang Belanja Terhutang Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhdad Maulana Yusuf	148.258.500,00				148.258.500,00	-
Utang Belanja Jasa Transport Pramu	-					-
Jumlah	17.254.499.438,50	22.221.066.718,00	29.842.266,00	17.135.714.404,50	148.627.300,00	22.221.066.718,00

Penjelasan :

- 1) Saldo awal Utang Belanja Jasa tahun 2023 sebesar Rp17.254.499.438,50.
- 2) Selama tahun 2023 mendapatkan penambahan Utang baru sebesar Rp22.221.066.718,00. Penambahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Utang belanja yang bersifat rutin berupa belanja air sebesar Rp74.964.400,00, belanja listrik sebesar Rp4.641.600.133,00, belanja surat kabar sebesar Rp2.730.000,00, belanja telepon sebesar Rp16.989.999,00 dan belanja internet sebesar Rp166.978.755,00 pada seluruh SKPD di Kabupaten Brebes.
 - b) Utang belanja jasa tenaga administrasi/ Pegawai Tenaga Kontrak sebesar Rp185.749.281,00 pada Bapenda, Baperlitbangda, Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo, BPKAD, DPKP, Dindikpora, Dinhub, Dinkopumdag, Dinperinaker, Dinperwaskim, DLHPS, DPSDAPR, DPU, Kec. Salem, Kec. Tonjong, Kesbangpol, Setda dan Sekretariat DPRD.
 - c) Utang belanja honor tenaga BLUD sebesar Rp1.984.040.714,00 merupakan gaji tenaga BLUD bulan Desember 2023 pada Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo, Dinkes-UPTD Pusk. Brebes, RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu.
 - d) Utang belanja Jasa Layanan Pelayanan Medis sebesar Rp12.569.978.453,00 pada Dinkes-UPTD Pusk. Bumiayu, Dinkes-UPTD Pusk. Tanjung, RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu.
 - e) Utang belanja Jasa Layanan Persalinan sebesar Rp12.406.400,00 pada Dinkes-UPTD Pusk. Brebes.
 - f) Utang belanja pengolahan sampah/limbah sebesar Rp84.821.731,00 pada Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo, Dinkes-UPTD Pusk. Brebes, Dinkes-UPTD Pusk.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Paguyangan, Dinkes-UPTD Pusk. Tanjung, Dinkes dan RSUD Brebes.
- g) Utang belanja sewa mesin fotocopy sebesar Rp2.828.960,00 pada Dinkes-UPTD Pusk. Bumiayu.
 - h) Utang belanja jasa pelayanan Hemodialisa sebesar Rp1.632.443.041,00 pada RSUD Brebes.
 - i) Utang belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawas pada kegiatan DAK PAUD TA. 2023 dan jasa konsultan perencanaan kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp48.078.000,00 pada Dindikpora.
 - j) Utang belanja jasa sewa tempat pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan DAK SD TA. 2023 sebesar Rp2.000.000,00 pada Dindikpora.
 - k) Utang belanja BPJS Kesehatan sebesar Rp788.881.583,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp6.575.268.000,00 atas pembayaran honorarium tenaga kontrak.
- 3) Utang belanja jasa mendapatkan koreksi tambah sebesar Rp29.842.266,00. Koreksi penambahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :
- l) Koreksi tambah pencatatan Utang Belanja Internet sebesar Rp1.830.950,00 pada Dinkes (RSUD Ir. Soekarno) dan Kec. Bumiayu.
 - m) Koreksi tambah pencatatan Utang Belanja Listrik sebesar Rp27.987.100,00 pada Dinkes (RSUD Ir. Soekarno).
 - n) Koreksi tambah pencatatan Utang Belanja Telepon sebesar Rp24.216,00 pada Dinkes (RSUD Ir. Soekarno).
- 4) Mendapatkan pengurangan sebesar Rp17.135.714.404,00 yang merupakan pembayaran utang belanja jass sisa tahun sebelumnya.
- 5) Koreksi kurang pencatatan utang belanja sebesar Rp148.627.300,00, terdiri dari:
- a) Koreksi kurang catat utang belanja telepon sebesar Rp368.800,00 pada Kec. Bumiayu.
 - b) Koreksi penghapusbukuan utang jasa tahun 2017 yang belum dibayar sebesar Rp148.258.500,00 karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Rincian utang yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.795.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	23.750.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	40.310.500,00
Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi	<u>16.402.500,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Berorientasi Bidang-Kesehatan

Jumlah

148.258.500,00

- c. Utang Belanja Perjalanan Dinas dan Bantuan Sosial
Utang Belanja Perjalanan Dinas dan Bantuan Sosial sebesar Rp218.908.000,00 merupakan utang belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp17.890.500,00, bantuan sosial barang kegiatan jambanisasi keluarga pra-sejahtera sebesar Rp179.000.000,00 dan bantuan sosial uang kegiatan pemberdayaan kesehatan anak usia sekolah remaja sebesar Rp22.017.500,00 yang belum terbayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Sehubungan kasus ini telah dihentikan karena sdr.Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum maka utang ini pun dihapusbukukan sehingga bersaldo nihil.
- d. Utang belanja pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp10.156.500,00 merupakan pemeliharaan bangunan RSUD Bumiayu sebesar Rp5.661.000,00 dan utang pemeliharaan *lift* RSUD Bumiayu sebesar Rp4.495.500,00 yang per 31 Desember 2023 belum dibayar. Sedangkan Utang belanja pemeliharaan alat kedokteran sebesar Rp3.552.000,00 pada RSUD Bumiayu telah dibayar sehingga bersaldo nihil.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya tahun 2023 sebesar Rp168.208.154,00 merupakan utang pengadaan aset tetap pada Dindikpora yang belum dibayar. Adapun rinciannya dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.181
Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	OPD	Saldo Th. 2023
Utang Pengadaan Aset Tetap		
Pengadaan/Rehab/Revitalisasi Bangunan Sekolah :		
REVITALISASI DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SD NEGERI KALENPANDAN KEC. LARANGAN	DINDIKPORA	36.011.303,00
REVITALISASI DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SD NEGERI SEMBUNG 02 KEC. LARANGAN	DINDIKPORA	47.241.053,00
REVITALISASI DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SD NEGERI WINDUAJI 01 KEC. PAGUYANGAN	DINDIKPORA	30.041.765,00
REVITALISASI DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SIRAMPOG	DINDIKPORA	47.114.366,00
Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 4 Banjarharjo	DINDIKPORA	2.924.804,00
Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 4 Banjarharjo	DINDIKPORA	4.874.863,00
JUMLAH		168.208.154,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang tahun 2023 adalah nihil.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nilai Ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp4.182.869.062.694,40. Penjelasan lebih rinci mengenai ekuitas dijelaskan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	<u>2.777.242.755.239,54</u>	<u>3.160.885.264.272,77</u>

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp2.777.242.755.239,54. Sedangkan, nilai Pendapatan-LO tahun lalu sebesar Rp3.160.885.264.272,77. Sehingga, nilai Pendapatan-LO tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,14%. Rincian Pendapatan-LO tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.182
Rincian Pendapatan LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan-LO				
1	PAD – LO	494.006.383.554,54	411.799.788.733,77	82.206.594.820,77	19,96
2	Pendapatan Transfer – LO	2.190.826.703.281,00	2.110.059.161.920,00	80.767.541.361,00	3,83
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	92.409.668.404,00	639.026.313.619,00	(546.616.645.215,00)	(85,54)
	Jumlah	2.777.242.755.239,54	3.160.885.264.272,77	(383.642.509.033,23)	(12,14)

5.4.1.1 PAD-LO

PAD-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp494.006.383.554,54. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 19,96% dari nilai PAD-LO tahun lalu yang besarnya Rp411.799.788.733,77. Kelompok PAD-LO dari empat jenis pendapatan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.183
PAD-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
----	--------	-----------------	-----------------	---------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	PAD-LO				
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	183.254.886.663,63	154.990.344.735,33	28.264.541.928,30	18,24
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	18.335.456.080,84	19.701.159.082,55	(1.365.703.001,71)	(6,93)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	21.975.145.912,70	5.944.107.666,83	16.031.038.245,87	269,70
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	270.440.894.897,37	231.164.177.249,06	39.276.717.648,31	16,99
	Jumlah	494.006.383.554,54	411.799.788.733,77	82.206.594.820,77	19,96

Rincian masing-masing jenis penerimaan PAD-LO adalah sebagai berikut.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp183.254.886.663,63. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan nilai tahun lalu sebesar 18,24%. Rincian masing-masing Pendapatan Pajak Daerah- LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.184
Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	PAD-LO				
1	Pajak Hotel-LO	568.617.536,00	404.695.532,00	163.922.004,00	40,51
2	Pajak Restoran-LO	6.839.408.823,00	5.443.995.193,00	1.395.413.630,00	25,63
3	Pajak Hiburan-LO	506.850.680,00	315.932.383,00	190.918.297,00	60,43
4	Pajak Reklame-LO	3.819.735.447,63	3.407.224.153,33	412.511.294,30	12,11
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	69.634.476.123,00	64.410.760.959,00	5.223.715.164,00	8,11
6	Pajak Parkir-LO	527.671.946,00	399.207.377,00	128.464.569,00	32,18
7	Pajak Air Tanah-LO	975.501.620,00	893.884.509,00	81.617.111,00	9,13
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.468.066.365,00	275.168.846,00	1.192.897.519,00	433,51
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	58.450.679.007,00	50.906.368.316,00	7.544.310.691,00	14,82
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	40.463.879.116,00	28.533.107.467,00	11.930.771.649,00	41,81
	Jumlah	183.254.886.663,63	154.990.344.735,33	28.264.541.928,30	18,24

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp18.335.456.080,84, sedangkan nilai tahun lalu sebesar Rp19.701.159.082,55. Artinya nilai tahun ini mengalami penurunan sebesar 6,93% dibandingkan nilai tahun lalu. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi-LO disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.185
Pendapatan Retribusi-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
1	Retribusi Jasa Umum-LO	4.389.468.402,00	3.390.664.166,00	998.804.236,00	29,46
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	10.530.696.193,84	9.712.793.718,55	817.902.475,29	8,42
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	3.415.291.485,00	6.597.701.198,00	(3.182.409.713,00)	(48,24)
	Jumlah	18.335.456.080,84	19.701.159.082,55	(1.365.703.001,71)	(6,93)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp21.975.145.912,70. Nilai ini merupakan penyesuaian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2023, pencatatan piutang laba PMPD dan penerimaan laba atau deviden. Adapun penyesuaian saldo penyertaan modal pada perusda ini diakibatkan karena penyesuaian perhitungan penyertaan modal dengan metode ekuitas.

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar 269,70%. Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun lalu adalah sebesar Rp5.944.107.666,83.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp270.440.894.897,37. Sedangkan, nilai tahun lalu sebesar 231.164.177.249,06. Sehingga, nilai tahun ini mengalami kenaikan sebesar 16,99%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.186
Lain-Lain PAD yang Sah-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.065.255.075,00	2.023.911.450,00	(958.656.375,00)	(47,37)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		134.819.446,00	(134.819.446,00)	(100,00)
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	730.170.060,00	706.314.960,00	23.855.100,00	3,38
4	Jasa Giro-LO	1.614.681.807,00	6.566.386.999,00	(4.951.705.192,00)	(75,41)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	282.877,00	-	282.877,00	100,00
5	Pendapatan Bunga-LO	1.526.027.382,00	1.091.660.508,92	434.366.873,08	39,79
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	45.350.000,00	-	45.350.000,00	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	-	737.502.887,00	(737.502.887,00)	(100,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	3.139.182.287,28	2.614.621.293,00	524.560.994,28	20,06



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.030.845.813,00	2.795.458.542,00	(764.612.729,00)	(27,35)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	259.204.771.686,01	214.487.501.163,14	44.717.270.522,87	20,85
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	986.967.523,00	6.000.000,00	980.967.523,00	16.349,46
13	Remunerasi-LO	97.360.387,08	-	97.360.387,08	-
	Jumlah	270.440.894.897,37	231.164.177.249,06	39.276.717.648,31	16,99

Rincian Pendapatan BLUD-LO untuk masing-masing BLUD disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.187
Pendapatan BLUD-LO per BLUD

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan BLUD-LO				
1	RSUD Brebes	131.605.541.254,01	102.546.057.712,14	29.059.483.541,87	28,34
2	RSUD Bumiayu	23.766.696.229,00	17.114.512.878,00	6.652.183.351,00	38,87
3	Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes	19.224.854.606,00	17.882.957.452,00	1.341.897.154,00	7,50
4	Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	23.738.671.745,00	21.860.902.140,00	1.877.769.605,00	8,59
5	Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	33.120.860.808,00	30.575.863.899,00	2.544.996.909,00	8,32
6	Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	14.613.272.831,00	12.335.740.277,00	2.277.532.554,00	18,46
7	Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	13.134.874.213,00	12.171.466.805,00	963.407.408,00	7,92
	Jumlah	259.204.771.686,01	214.487.501.163,14	44.717.270.522,87	20,85

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 sebesar Rp2.190.826.703.281,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 3,83% dibandingkan tahun lalu yang nilainya sebesar Rp2.110.059.161.920,00. Rincian Pendapatan transfer-LO disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.188
Pendapatan Transfer – LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan Transfer – LO				
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan- LO	1.922.292.596.566,00	1.856.632.525.037,00	65.660.071.529,00	3,54
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.837.859.000,00	-	5.837.859.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	262.696.247.715,00	253.426.636.883,00	9.269.610.832,00	3,66
	Jumlah	2.190.826.703.281,00	2.110.059.161.920,00	80.767.541.361,00	3,83

Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO merupakan transfer dana perimbangan yang pada tahun 2023 nilainya sebesar Rp1.922.292.596.566,00. Dibandingkan dengan tahun lalu, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 3,54%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.189
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO				
	Dana Bagi Hasil	40.481.446.000,00	42.635.875.946,00	(2.154.429.946,00)	(5,05)
2	Dana Alokasi Umum	1.331.727.139.428,00	1.235.937.517.360,00	95.789.622.068,00	7,75
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	108.178.591.500,00	119.268.684.105,00	(11.090.092.605,00)	(9,30)
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	441.905.419.638,00	458.790.447.626,00	(16.885.027.988,00)	(3,68)
		1.922.292.596.566,00	1.856.632.525.037,00	65.660.071.529,00	3,54

5.4.1.2.1.1 Dana transfer umum-DBH-LO tahun 2023 sebesar Rp40.481.446.000,00, rinciannya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.190
Rincian Dana Transfer Umum-DBH-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.245.968.000,00	13.429.388.119,00	(6.183.420.119,00)	(46,04)
2	DBH PPh Pasal 21	16.949.516.000,00	14.510.298.081,00	2.439.217.919,00	16,81
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.358.796.000,00	1.521.018.382,00	(162.222.382,00)	(10,67)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12.550.385.000,00	9.314.587.425,00	3.235.797.575,00	34,74
5	DBH SDA Minyak Bumi	83.279.000,00	85.335.684,00	(2.056.684,00)	(2,41)
6	DBH SDA Gas Bumi	109.204.000,00	481.630.622,00	(372.426.622,00)	(77,33)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	11.813.000,00	261.239.350,00	(249.426.350,00)	(95,48)
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	227.000,00	2.262.213,00	(2.035.213,00)	(89,97)
9	Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Mineral dan Batubara-Royalty	679.000,00	1.857.050,00	(1.178.050,00)	(63,44)
10	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	660.141.000,00	912.254.000,00	(252.113.000,00)	(27,64)
11	DBH SDA Perikanan	1.511.438.000,00	2.116.005.020,00	(604.567.020,00)	(28,57)
	Jumlah	40.481.446.000,00	42.635.875.946,00	(2.154.429.946,00)	(5,05)

5.4.1.2.1.2 Dana transfer umum-DAU-LO tahun 2023 sebesar Rp1.331.727.139.428,00.

5.4.1.2.1.3 Dana transfer khusus-DAK Fisik - LO tahun 2023 sebesar Rp108.178.591.500,00 rinciannya dijelaskan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.191

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan	33.619.665.523,00	38.529.184.000,00	(4.909.518.477,00)	(12,74)
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB	23.631.506.302,00	22.689.127.467,00	942.378.835,00	4,15
3	DAK Fisik-Bidang Pertanian	-	13.082.285.940,00	(13.082.285.940,00)	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Jalan	27.810.090.000,00	26.524.883.000,00	1.285.207.000,00	4,85
5	DAK Fisik-Bidang Air Minum	14.121.318.675,00	8.575.706.000,00	5.545.612.675,00	64,67
6	DAK Fisik-Bidang Sanitasi	8.996.011.000,00	5.288.766.000,00	3.707.245.000,00	70,10
7	DAK Fisik-Bidang Irigasi	-	2.389.321.698,00	(2.389.321.698,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.189.410.000,00	(2.189.410.000,00)	(100,00)
	Jumlah	108.178.591.500,00	119.268.684.105,00	(11.090.092.605,00)	(9,30)

5.4.1.2.1.4 Dana transfer khusus –DAK Non Fisik – LO tahun 2023 sebesar Rp441.905.419.638,00 rinciannya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.192

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	177.159.489.042,00	198.102.947.005,00	(20.943.457.963,00)	(10,57)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.877.500.000,00	181.794.227.358,00	(176.916.727.358,00)	(97,32)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	199.531.604.000,00	-	199.531.604.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.137.394.320,00	3.573.550.000,00	3.563.844.320,00	99,73
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	221.960.000,00	23.240.080.000,00	(23.018.120.000,00)	(99,04)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	648.200.000,00	8.942.900.000,00	(8.294.700.000,00)	(92,75)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35.308.829.287,00	27.974.690.387,00	7.334.138.900,00	26,22
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	15.795.075.379,00	14.035.090.292,00	1.759.985.087,00	12,54
9	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	339.308.913,00	383.432.200,00	(44.123.287,00)	(11,51)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	412.971.824,00	(412.971.824,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	475.888.697,00	330.558.560,00	145.330.137,00	43,97
12	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	410.170.000,00	-	410.170.000,00	100,00
	Jumlah	441.905.419.638,00	458.790.447.626,00	(16.885.027.988,00)	(3,68)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp5.837.859.000 yang merupakan Dana Insentif Daerah.

5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah-LO
Dana Insentif Daerah-LO tahun 2023 bernilai sebesar Rp5.837.859.000. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 100% dari nilai tahun lalu yang sebesar nihil.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Antar Daerah –LO
Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nilai Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO tahun ini sebesar Rp262.696.247.715,00, sedangkan nilai tahun lalu sebesar Rp253.426.636.883,00. Sehingga, nilai Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO tahun ini mengalami kenaikan sebesar 3,66% dibandingkan nilai tahun lalu. Rincian dana perimbangan –LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.193
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO				
1	PendapatanBagiHasil-LO	246.348.244.669,00	227.491.333.605,00	18.856.911.064,00	8,29
2	BantuanKeuangan	16.348.003.046,00	25.935.303.278,00	(9.587.300.232,00)	(36,97)
	Jumlah	262.696.247.715,00	253.426.636.883,00	9.269.610.832,00	3,66

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp246.348.244.669,00. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.194
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak –LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	51.436.650.839,00	51.270.008.913,00	166.641.926,00	0,33
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -LO	40.234.909.080,00	32.793.316.870,00	7.441.592.210,00	22,69
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	64.909.782.616,00	60.026.964.591,00	4.882.818.025,00	8,13
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	139.160.956,00	134.444.860,00	4.716.096,00	3,51
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	89.627.741.178,00	83.266.598.371,00	6.361.142.807,00	7,64
	Jumlah	246.348.244.669,00	227.491.333.605,00	18.856.911.064,00	8,29

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan – LO

Bantuan Keuangan-LO tahun 2023 sebesar Rp16.348.003.046,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar 92.409.668.404,00. Sedangkan, nilai Lain-lain Pendaptan Daerah yang Sah-LO tahun lalu sebesar Rp639.026.313.619,00. Sehingga, nilai tahun ini



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

mengalami penurunan sebesar 85,54% dibandingkan nilai tahun lalu. Rincian dari pendapatan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.195
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
1	Pendapatan Hibah – LO	92.409.668.404,00	639.026.313.619,00	(546.616.645.215,00)	(85,54)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-	-
	Jumlah	92.409.668.404,00	639.026.313.619,00	(546.616.645.215,00)	(85,54)

Rincian masing-masing jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan di bawah ini.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah tahun 2023 adalah sebesar Rp92.409.668.404,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 85,54% dibandingkan tahun lalu. Rincian Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.196
Pendapatan Hibah –LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan Hibah – LO				
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	46.865.592.494,00	36.135.736.771,00	10.729.855.723,00	29,69
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	33.770.260.520,00	372.540.848.940,00	(338.770.588.420,00)	(90,94)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	11.566.745.222,00	228.801.705.008,00	(217.234.959.786,00)	(94,94)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	207.070.168,00	1.548.022.900,00	(1.340.952.732,00)	(86,62)
	Jumlah	92.409.668.404,00	639.026.313.619,00	(546.616.645.215,00)	(85,54)

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Nilai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2023 adalah Nihil.

5.4.2 Beban LO

Beban	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
	2.686.420.092.778,20	2.868.477.861.623,7



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp2.686.420.092.778,20. Sedangkan, nilai Beban-LO tahun 2022 sebesar 2.868.477.861.623,7. Sehingga, nilai Beban-LO tahun ini mengalami penurunan sebesar 6,35% dibandingkan tahun lalu. Rincian Beban-LO tahun 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.197

Beban-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Beban				
1	Beban Pegawai	1.117.067.692.048,00	1.021.268.634.238,00	95.799.057.810,00	9,38
2	Beban Persediaan	276.995.942.578,57	519.388.187.523,18	(242.392.244.944,61)	(46,67)
3	Beban Jasa	495.883.879.738,17	469.318.752.619,22	26.565.127.118,95	5,66
4	Beban Pemeliharaan	64.720.127.042,00	60.789.800.031,00	3.930.327.011,00	6,47
5	Beban Perjalanan Dinas	57.185.404.693,00	51.280.758.430,00	5.904.646.263,00	11,51
6	Beban Hibah	103.614.651.117,00	165.633.602.893,00	(62.018.951.776,00)	(37,44)
7	Beban Bantuan Sosial	21.104.412.294,00	12.057.204.705,00	9.047.207.589,00	75,04
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	372.765.462.521,81	367.066.573.642,69	5.698.888.879,12	1,55
9	Beban Penyisihan Piutang	39.223.713,65	1.074.250.453,61	(1.035.026.739,96)	(96,35)
10	Beban Lain-lain	-	-	-	-
11	Beban Transfer	177.043.297.032,00	200.600.097.088,00	(23.556.800.056,00)	(11,74)
	Jumlah	2.686.420.092.778,20	2.868.477.861.623,70	(182.057.768.845,50)	(6,35)

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai selama tahun 2023 sebesar Rp1.117.067.692.048,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 9,38% dibandingkan tahun lalu yang nilainya sebesar Rp1.021.268.634.238,00. Rincian Beban Pegawai-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.198

Beban Pegawai

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	740.051.578.548,00	671.817.089.771,00	68.234.488.777,00	10,16
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	117.751.805.997,00	95.592.601.118,00	22.159.204.879,00	23,18
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	222.219.240.974,00	218.714.911.044,00	3.504.329.930,00	1,60
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.998.476.535,00	32.072.815.654,00	2.925.660.881,00	9,12
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.308.089.994,00	1.810.731.741,00	(502.641.747,00)	(27,76)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	738.500.000,00	958.000.000,00	(219.500.000,00)	(22,91)
7	Beban Pegawai BLUD	-	302.484.910,00	(302.484.910,00)	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	1.117.067.692.048,00	1.021.268.634.238,00	95.799.057.810,00	9,38

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp894.785.354.051,74. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 18,71% jika dibandingkan tahun lalu yang nilainya sebesar Rp1.100.777.498.603,40. Rincian dari Beban Barang dan Jasa tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.199
Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Uraian Beban	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Persediaan	276.995.942.578,57	519.388.187.523,18	(242.392.244.944,61)	(46,67)
2	Beban Jasa	495.883.879.738,17	469.318.752.619,22	26.565.127.118,95	5,66
3	Beban Pemeliharaan	64.720.127.042,00	60.789.800.031,00	3.930.327.011,00	6,47
4	Beban Perjalanan Dinas	57.185.404.693,00	51.280.758.430,00	5.904.646.263,00	11,51
	Jumlah	894.785.354.051,74	1.100.777.498.603,40	(205.992.144.551,66)	(18,71)

Adapun penjelasan masing-masing beban akan dijelaskan berikut ini.

1. Beban Persediaan

Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp276.995.942.578,57. Sedangkan nilai Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp519.388.187.523,18. Nilai Beban Persediaan tahun ini mengalami penurunan sebesar 46,67% dibandingkan tahun lalu. Rincian Beban Persediaan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.200
Rincian Beban Persediaan

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.871.957.087,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.881.388.957,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.522.077.938,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	83.355.195,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	801.124.124,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	121.597.787,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	841.975.908,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	91.114.132,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.540.433.649,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	745.986.615,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.200.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.000.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	83.410.700,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	50.391.419,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	11.056.500,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	44.116.823,00
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.875.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.967.734.681,51
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.461.690.650,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.743.500,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	849.981.350,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	12.915.500,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.521.273.185,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.893.296.144,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.667.836.609,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.335.328.663,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.802.560.978,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	389.029.309,00
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.693.885.601,00
30	Beban Obat-Obatan-Obat	71.297.478.019,08
31	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	40.835.334.931,98
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	576.942.973,00
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	598.000,00
34	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	254.169.296,00
35	Beban Natura dan Pakan-Natura	46.887.243.204,00
36	Beban Natura dan Pakan-Pakan	-
37	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	823.838.150,00
	Jumlah	276.995.942.578,57

2. Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp495.883.879.738,17. Nilai ini jika dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 5,66%. Rincian Beban Jasa disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.201
Beban Jasa

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	412.670.768.504,17	404.603.574.010,00	8.067.194.494,17	1,99
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.603.026.978,50	29.761.317.125,88	16.841.709.852,62	56,59
3	Beban Sewa Tanah	9.860.000,00	8.000.000,00	1.860.000,00	100,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.224.222.568,50	3.691.168.723,00	533.053.845,50	14,44
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.310.985.508,00	2.462.965.669,34	(151.980.161,34)	(6,17)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	42.800.000,00	30.892.100,00	11.907.900,00	38,55
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.519.754.425,00	3.990.862.450,00	3.528.891.975,00	88,42
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.363.763.860,00	2.700.517.930,00	(336.754.070,00)	(12,47)
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.632.443.041,00	-	1.632.443.041,00	100,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.720.889.754,00	12.523.465.563,00	(4.802.575.809,00)	(38,35)
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	8.326.874.034,00	6.478.052.865,00	1.848.821.169,00	28,54
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.164.425.000,00	2.632.986.700,00	(1.468.561.700,00)	(55,78)
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.292.566.065,00	434.949.483,00	857.616.582,00	197,18
	Jumlah	495.883.879.738,17	469.318.752.619,22	26.565.127.118,95	5,66

3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp64.720.127.042,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 6,47% dibandingkan tahun lalu yang besarnya Rp60.789.800.031,00. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.202
Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	24.480.000,00	(24.480.000,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.059.519.462,00	19.737.483.986,00	(1.677.964.524,00)	(8,50)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.866.178.679,00	9.873.970.063,00	3.992.208.616,00	40,43
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.423.832.881,00	31.023.881.572,00	1.399.951.309,00	4,51
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	182.931.020,00	129.984.410,00	52.946.610,00	40,73
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	187.665.000,00	-	187.665.000,00	100,00
	Jumlah	64.720.127.042,00	60.789.800.031,00	3.930.327.011,00	6,47

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp57.185.404.693,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 11,51% dari nilai tahun 2022 yang besarnya Rp51.280.758.430,00.

5.4.2.3 Beban Bunga

Beban Bunga tahun 2023 yang merupakan Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank adalah Nihil.

5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp103.614.651.117,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 37,44% dibandingkan nilai tahun lalu yang besarnya Rp165.633.602.893,00. Rincian Beban-Hibah disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.203
Beban Hibah

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.375.229.762,00	13.285.723.705,00	(8.910.493.943,00)	(67,07)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	26.495.757.200,00	1.448.216.433,00	25.047.540.767,00	100,00
3	Beban Hibah Uang kepada BUMD	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.856.013.155,00	127.786.489.246,00	(57.930.476.091,00)	(45,33)
5	Beban Hibah Dana BOS		21.669.348.009,00	(21.669.348.009,00)	100,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.847.651.000,00	1.423.825.500,00	1.423.825.500,00	100,00
	Jumlah	103.614.651.117,00	165.633.602.893,00	(62.018.951.776,00)	(37,44)

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp21.104.412.294,00. Bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan sosial, bantuan penyandang disabilitas, jaring pengaman sosial dan sebagainya. Beban Bantuan Sosial tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 75,04% dibandingkan tahun lalu yang nilainya sebesar Rp12.057.204.705,00. Rincian Beban Bantuan Sosial disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.204
Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.975.800.550,00	7.830.952.355,00	(2.855.151.805,00)	(36,46)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.060.000.000,00	530.000.000,00	1.530.000.000,00	288,68
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	12.681.015.521,00	3.616.252.350,00	9.064.763.171,00	250,67
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.387.596.223,00	80.000.000,00	1.307.596.223,00	1.634,50
	Jumlah	21.104.412.294,00	12.057.204.705,00	9.047.207.589,00	75,04

5.4.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp372.765.462.521,81 dengan rincian masing-masing untuk Beban Penyusutan sebesar Rp372.050.749.100,81 dan Beban Amortisasi sebesar Rp714.713.421,00.

1. Beban penyusutan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,58% dibandingkan tahun lalu yang nilainya sebesar Rp366.270.019.139,69. Rincian Beban Penyusutan disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.205

Rincian beban Penyusutan

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Beban Penyusutan Aset tetap				
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99.797.662.989,81	109.544.789.340,49	(9.747.126.350,68)	(8,90)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.560.063.084,00	37.918.226.192,00	1.641.836.892,00	4,33
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	232.093.623.720,00	214.953.095.382,00	17.140.528.338,00	7,97
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	599.399.307,00	3.853.908.225,20	(3.254.508.918,20)	(84,45)
	Jumlah	372.050.749.100,81	366.270.019.139,69	5.780.729.961,12	1,58

2. Nilai Beban Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp. Rp714.713.421,00. Sedangkan, nilai beban tersebut untuk tahun lalu adalah sebesar Rp.796.554.503,00. Sehingga, nilai Beban Amortisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar 10,27% dibandingkan tahun lalu. Rincian Beban Amortisasi tahun 2023 untuk masing-masing SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.206

Rincian Beban Amortisasi Per SKPD

No	SKPD	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	51.190.000,00	51.190.000,00	-	-
2	DINAS KESEHATAN	53.251.521,00	59.021.021,00	(5.769.500,00)	(9,78)
3	DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	28.650.000,00	28.650.000,00	-	-
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	24.000.000,00	62.720.000,00	(38.720.000,00)	(61,73)
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	9.860.000,00	19.796.000,00	(9.936.000,00)	(50,19)
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.866.520,00	7.885.400,00	9.981.120,00	126,58
8	DINAS SOSIAL	8.258.400,00	8.258.400,00	-	-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.815.400,00	-	6.815.400,00	100,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.160.000,00	4.040.000,00	(2.880.000,00)	(71,29)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(100,00)
12	DINAS PERHUBUNGAN	9.658.000,00	27.131.642,00	(17.473.642,00)	(64,40)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	24.729.600,00	28.729.600,00	(4.000.000,00)	(13,92)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40.539.800,00	93.027.800,00	(52.488.000,00)	(56,42)
15	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	11.976.600,00	11.976.600,00	-	-
16	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	13.178.000,00	7.328.400,00	5.849.600,00	79,82
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.895.200,00	17.856.000,00	(6.960.800,00)	(38,98)
19	SEKRETARIAT DAERAH	103.395.200,00	126.382.200,00	(22.987.000,00)	(18,19)
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70.337.000,00	64.460.800,00	5.876.200,00	9,12
21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	81.665.440,00	71.719.840,00	9.945.600,00	13,87
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	69.379.000,00	47.379.000,00	22.000.000,00	46,43
23	INSPEKTORAT	10.724.820,00	-	10.724.820,00	100,00
24	SEKRETARIAT DPRD	29.822.920,00	19.841.800,00	9.981.120,00	50,30
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.960.000,00	11.960.000,00	-	-
	Jumlah	714.713.421,00	796.554.503,00	(81.841.082,00)	(10,27)

5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp39.223.713,65. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 96,35% dibandingkan tahun lalu. Rincian Beban Penyisihan Piutang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.207
Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Beban Penyisihan Piutang				
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	9.848.784,25	37.484.765	(27.635.980,25)	(73,73)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	26.361.850,25	54.333.462	(27.971.611,35)	(51,48)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	283.211,31	1.948.062	(1.664.850,59)	(85,46)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.729.867,84	937.031.420	(934.301.552,30)	(99,71)
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	2.723.492	(2.723.491,88)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	40.729.254	(40.729.253,59)	(100,00)
	Jumlah	39.223.713,65	1.074.250.453,61	(1.035.026.739,96)	(96,35)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.2.8 Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp177.043.297.032,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 11,74% dibandingkan tahun lalu. Rincian beban tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.208
Beban Transfer

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil	17.447.235.932,00	15.302.204.088,00	2.145.031.844,00	14,02
2	Beban Bantuan Keuangan	159.596.061.100,00	185.297.893.000,00	(25.701.831.900,00)	(13,87)
	Jumlah	177.043.297.032,00	200.600.097.088,00	(23.556.800.056,00)	(11,74)

- a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2023 merupakan transfer atau bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Desa, yaitu sebesar Rp16.014.459.116,00
- b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2023 merupakan transfer atau bagi hasil retribusi daerah ke Pemerintah Desa, yaitu sebesar Rp1.432.776.816,00.
- c. Beban Bantuan Keuangan
Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp159.596.061.100,00 merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp90.822.662.461,34 dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.209
Surplus/Defisit dari Operasi

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan - LO	2.777.242.755.239,54	3.160.885.264.272,77	(383.642.509.033,23)	(12,14)
2	Beban - LO	2.686.420.092.778,20	2.868.477.861.623,70	(182.057.768.845,50)	(6,35)
	Surplus/Defisit dari Operasi	90.822.662.461,34	292.407.402.649,08	(201.584.740.187,73)	(68,94)

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

Dalam Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, dirinci dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.210
Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-	-	-
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	3.296.956.103,04	2.815.507.644,70	481.448.458,35	17,10
	Jumlah	3.296.956.103,04	2.815.507.644,70	481.448.458,35	17,10
	DEFISIT NON OPERASIONAL				
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	703.487.139,43	285.881.429,00	417.605.710,43	146,08
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	10.124.707.051,37	25.046.697.504,35	(14.921.990.452,98)	(59,58)
	Jumlah	10.828.194.190,80	25.332.578.933,35	(14.504.384.742,55)	(57,26)
	SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO	(7.531.238.087,76)	(22.517.071.288,66)	14.985.833.200,90	(66,55)

5.4.3.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp3.296.956.103,04. Nilai ini pada tahun lalu adalah sebesar Rp2.815.507.644,70, sehingga nilai tahun ini mengalami kenaikan sebesar 17,10%. Rincian Surplus Non Operasional disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.211
Rincian Surplus Non Operasional

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.296.956.103,04	2.815.507.644,70	481.448.458,35	17,10
	Jumlah	3.296.956.103,04	2.815.507.644,70	481.448.458,35	17,10

5.4.3.1.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO tahun 2023 sebesar Nihil.

5.4.3.1.2 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp3.296.956.103,04. Adapun rincian nya dijelaskan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.212
Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi	1.307.920,50
2	Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD	4.686.837,21
3	Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak	2.643.702.241,97
4	Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak	391.082.598,38
5	Pengurangan Penyisihan Piutang ex-Dana Bergulir	14.942.988,00
6	Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	14.682.104,91
7	Pengurangan Penyisihan Piutang TGR	600.000,00
8	Pengurangan Penyisihan Piutang Remunerasi TDF	5.463,59
9	Pengurangan Penyisihan Piutang Dobel TPP-TPG	225.945.948,48
	Jumlah	3.296.956.103,04

5.4.3.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp10.828.194.190,80. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 57,26% dibandingkan tahun lalu yang nilainya sebesar Rp25.332.578.933,35. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.213
Rincian Defisit Non Operasional-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	703.487.139,43	285.881.429,00	417.605.710,43	146,08
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-		
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	10.124.707.051,37	25.046.697.504,35	(14.921.990.452,98)	(59,58)
	Jumlah	10.828.194.190,80	25.332.578.933,35	(14.504.384.742,55)	(57,26)

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan Aset/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO tahun 2023 sebesar Rp703.487.139,43,00 merupakan penghapusan aset tetap karena proses penjualan. Rincian besarnya untuk masing-masing SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.214
Rincian Defisit Penjualan Aset Non Lancar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	5.123.527,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	4.427.400,00
	DINKES-UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	33.592.155,00
3	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	591.264.499,57
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.608.315,00
5	KECAMATAN BULAKAMBA	160.000,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.118.500,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	48.512.742,86
8	KECAMATAN LOSARI	7.580.000,00
9	KECAMATAN KETANGGUNGAN	5.100.000,00
	Jumlah	703.487.139,43

5.4.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO

Defisit dari kegiatan Non Operasional lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp10.124.707.051,37. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.215

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi persediaan kadaluwarsa	2.838.609.236,37
2	Pengurangan Piutang TGR	12.350.000,00
3	Reklasifikasi aset tetap mejadi barang extracomtable	805.272.035,00
4	Penghapusan barang baik (B)/rusak ringan (RR)	18.412.005.781,00
5	Penghapusan akumulasi penyusutan barang B/RR yang dihapuskan	(12.780.344.047,00)
6	Penghapusan barang rusak berat	328.667.474,00
7	Pencatatan akumulasi penyusutan hibah masuk aset tetap	508.146.572,00
	Jumlah	10.124.707.051,37

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional-LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 adalah sebesar (Rp7.531.238.087,76) dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.216

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	3.296.956.103,04	2.815.507.644,70	481.448.458,35	17,10
2	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	10.828.194.190,80	25.332.578.933,35	(14.504.384.742,55)	(57,26)
	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(7.531.238.087,76)	(22.517.071.288,66)	14.985.833.200,90	(66,55)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 adalah sebesar Rp83.291.424.373,58 dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.217

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus/Defisit Dari Operasi	90.822.662.461,34	292.407.402.649,07	(201.584.740.187,73)	(68,94)
2	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(7.531.238.087,76)	(22.517.071.288,66)	14.985.833.200,90	(66,55)
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	83.291.424.373,58	269.890.331.360,41	(186.598.906.986,83)	(69,14)

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Beban Tak Terduga

Beban tak terduga dibelanjakan untuk membiayai kondisi darurat dan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tahun anggaran sebelumnya atau merupakan bentuk akrual dari Belanja Tidak Terduga. Beban Tak terduga tahun 2023 sebesar Rp1.187.275.000,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 64,38% dibandingkan tahun lalu yang nilainya sebesar Rp3.332.734.460,00.

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 adalah sebesar (Rp1.187.275.000) dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.218

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-	
2	Beban Tak Terduga	1.187.275.000,00	3.332.734.460,00	(2.145.459.460,00)	(64,38)
	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(1.187.275.000,00)	(3.332.734.460,00)	2.145.459.460,00	(64,38)

Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp82.104.149.373,58 dengan perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.219

Surplus/Defisit-LO

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
----	--------	-----------------	-----------------	------------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	83.291.424.373,58	269.890.331.360,41	(186.598.906.986,83)	(69,14)
2	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(1.187.275.000,00)	(3.332.734.460,00)	2.145.459.460,00	(64,38)
	Surplus/Defisit LO	82.104.149.373,58	266.557.596.900,41	(184.453.447.526,83)	(69,20)

Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp134.300.816.811,44 memiliki perbedaan dengan jumlah nilai surplus/(defisit) Laporan Operasional Tahun 2023 yang sebesar Rp82.104.149.373,00. Perhitungan perbedaan nilai tersebut akan dijelaskan pada sub penjelasan di bawah ini.

Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LO dengan Pendapatan-LRA

a. Pendapatan Pajak Daerah

LO	LRA	SELISIH
Rp183.254.886.663,63	Rp179.815.467.425,00	Rp3.439.419.238,63

Selisih antara pendapatan pajak daerah-LO dengan pendapatan pajak daerah LRA sebesar Rp3.439.419.238,63 dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.220

Selisih antara pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak- LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Pencatatan Piutang Pajak	58.561.927.857,00
2)	Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan LO	1.172.623.313,02
	Jumlah penambahan	59.734.551.170,02
	Pengurangan :	
1)	Penerimaan piutang pajak tahun lalu	54.844.849.076,00
2)	Penyesuaian Pendapatan LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	1.450.282.855,39
	Jumlah pengurangan	56.295.131.931,39
	Jumlah selisih	3.439.419.238,63



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Pendapatan Retribusi Daerah

LO	LRA	SELISIH
Rp18.335.456.080,84	Rp18.490.738.080,00	(Rp155.281.999,16)

Selisih pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi- LRA tahun 2023 sebesar minus Rp155.281.999,16, dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.221

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi- LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan LO	53.200.884,38
2)	Pencatatan Piutang Retribusi baru	312.015.870,00
	Jumlah penambahan	365.216.754,38
	Pengurangan :	
1)	Penyesuaian Pendapatan LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	486.776.533,54
2)	Penerimaan piutang retribusi tahun lalu	33.722.220,00
	Jumlah pengurangan	520.498.753,54
	jumlah selisih	(155.281.999,16)

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LO	LRA	SELISIH
Rp21.975.145.912,70	Rp12.681.024.043,00	Rp9.294.121.869,70

Selisih Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA sebesar Rp9.294.121.869,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.222

Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Pencatatan Penyesuaian saldo PMPD th 2023 akibat perhitungan dengan metode ekuitas	9.237.479.608,70
2)	Pencatatan piutang Bagian Laba PMPD tahun 2023	954.765.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah penambahan	10.192.244.668,70
1)	Pengurangan :	
	Penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD	898.122.799,00
	Jumlah pengurangan	898.122.799,00
	jumlah selisih	9.294.121.869,70

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

LO	LRA	SELISIH
Rp270.440.894.897,37	Rp268.948.915.843,01	Rp1.491.979.054,36

Selisih antara pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA tahun 2023 adalah sebesar Rp1.491.979.054,36 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.223
Selisih antara Lain-Lain PAD yang Sah -LO dengan Lain-Lain PAD yang Sah- LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	
1)	Pencatatan Piutang TGR	
2)	Pencatatan Piutang BLUD	2.998.996.836,00
3)	Pencatatan Piutang Denda Pajak	3.139.188.287,28
	Jumlah penambahan	6.138.185.123,28
	Pengurangan :	
1)	Penerimaan piutang TGR	8.850.000,00
2)	Penerimaan Piutang BLUD	3.390.715.707,00
3)	Penerimaan Piutang Denda Pajak tahun lalu	6.000,00
4)	Penerimaan Piutang Jasa ex Dana Bergulir	933.050,00
5)	Penerimaan Piutang Remunerasi TDF tahun lalu	1.092.717,92
6)	Penerimaan Piutang Dobel Bayar TPP-TPG	1.244.608.594,00
	Jumlah pengurangan	4.646.206.068,92
	Jumlah selisih	1.491.979.054,36

1. Pendapatan Transfer

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

LO	LRA	SELISIH
Rp1.922.292.596.566,00	Rp2.316.361.498.153,00	(Rp394.068.901.587,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Selisih pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat -LRA tahun 2023 sebesar minus Rp394.068.901.587,00 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.224

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat –LRA

No	Uraian	Jumlah
1)	Penambahan : Pencatatan Piutang TDF	4.441.583.000,00
	Jumlah penambahan	4.441.583.000,00
1)	Penerimaan Piutang TDF tahun lalu	4.505.488.265,00
2)	Penerimaan Dana Desa	334.083.744.600,00
3)	Pengurangan Pendapatan Hibah Dana Bos untuk Sekolah Swasta	59.921.251.722,00
	Jumlah Pengurangan	398.510.484.587,00
	Jumlah selisih	(394.068.901.587,00)

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

LO	LRA	SELISIH
Rp5.837.859.000,00	Rp5.837.859.000,00	Rp0,00

Tidak terdapat selisih antara nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO dengan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

LO	LRA	SELISIH
Rp262.696.247.715,00	Rp258.320.330.528,00	Rp4.375.917.187,00

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO merupakan penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp4.375.917.187,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.225

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dengan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LRA

No	Uraian	Jumlah
	Penambahan :	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
1)	Penetapan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	7.312.338.169,00
	Jumlah penambahan	7.312.338.169,00
	Pengurangan :	
1)	Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	2.936.420.982,00
	Jumlah pengurangan	2.936.420.982,00
	Jumlah selisih	4.375.917.187,00

2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan Hibah

LO	LRA	SELISIH
Rp92.409.668.404,00	Rp14.555.346.000,00	Rp77.854.322.404,00

Selisih Pendapatan Hibah LRA-dengan Pendapatan Hibah LO sebesar Rp77.854.322.404,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.226

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penambahan :	
1	Pencatatan hibah masuk aset	39.040.913.378,00
2	Pencatatan hibah masuk persediaan	38.813.409.026,00
	Jumlah Selisih	77.854.322.404,00

2) Pendapatan Lainnya

Untuk Pendapatan Lainnya – LO dengan Pendapatan Lainnya - LRA tidak ada saldo atau Nihil.

Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

1) Beban Pegawai

LO	LRA	SELISIH
Rp1.117.067.692.048,00	Rp1.114.115.933.151,00	Rp2.951.758.897,00

Pada LO tahun 2023 nilai realisasi Beban Pegawai sebesar Rp1.117.067.692.048,00, sedangkan nilai belanja pegawai pada LRA tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

sebesar Rp1.114.115.933.151,00. Adapun selisih sebesar Rp2.951.758.897,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.227

Selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai –LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penambahan :	
	Pencatatan Utang Beban Pegawai ini yang belum dibayar	14.864.025.849,00
	Jumlah Penambahan	14.864.025.849,00
1 2	Pengurangan :	
	Pembayaran utang beban pegawai tahun lalu	11.891.306.952,00
	Pengurangan Reklasifikasi beban pegawai ke aset tetap	20.960.000,00
	Jumlah Pengurangan	11.912.266.952,00
	Jumlah Selisih	2.951.758.897,00

2) Beban Persediaan

LO	LRA	SELISIH
Rp276.995.942.578,57	Rp99.864.295.121,00	Rp177.131.647.457,57

Pada LO tahun 2023 nilai realisasi Beban Persediaan sebesar Rp276.995.942.578,57, sedangkan nilai belanja persediaan pada LRA sebesar Rp99.864.295.121,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp177.131.647.457,57. Adapun selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.228

Selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan –LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 7	Penambahan :	
	Hibah masuk barang persediaan	38.813.409.026,00
	Reklasifikasi belanja persediaan BOS	69.626.792.470,00
	Reklasifikasi belanja persediaan BLUD	65.208.063.333,00
	Reklasifikasi aset tetap ke persediaan	3.140.567.610,00
	Pencatatan utang belanja tahun ini	8.983.882.960,00
	Koreksi tambah saldo awal persediaan	7.907.768.199,50
Penggunaan atau pemakaian saldo persediaan awal	59.507.264.031,03	
	Jumlah Penambahan	253.187.747.629,53
	Pengurangan :	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi kurang saldo awal persediaan	48.292.876,37
2	Reklasifikasi persediaan ke aset tetap	155.663.500,00
3	Pembayaran utang belanja persediaan tahun lalu	3.743.973.007,00
4	Reklasifikasi persediaan ke Kadaluausa/Usang/Rusak	2.838.609.236,37
5	Pencatatan saldo akhir persediaan	55.138.926.258,22
6	Hibah keluar persediaan	14.126.390.294,00
7	Reklasifikasi beban persediaan ke beban jasa	4.245.000,00
	Jumlah Pengurangan	76.056.100.171,96
	Jumlah Selisih	177.131.647.457,57

3) Beban Jasa

LO	LRA	SELISIH
Rp495.883.879.738,17	Rp665.608.040.282,00	(Rp169.724.160.543,83)

Nilai Beban Jasa pada LO tahun 2023 sebesar Rp495.883.879.738,17, sedangkan nilai Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp665.608.040.282,00. Adapun selisih sebesar minus Rp169.724.160.543,83 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.229
Selisih antara Beban Jasa -LO dengan Belanja Jasa -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penambahan :	
1	Penambahan beban dibayar di muka tahun lalu yang telah menjadi Beban Jasa	55.830.183,17
2	Pencatatan utang belanja yang belum dibayar tahun ini	22.221.066.718,00
3	Reklasifikasi Belanja Jasa BOS	62.106.562.084,00
4	Reklasifikasi Belanja Jasa BLUD	166.488.246.183,00
5	Reklasifikasi aset tetap ke beban jasa	4.000.000,00
6	Reklasifikasi beban persediaan ke beban jasa	4.245.000,00
	Jumlah Penambahan	250.879.950.168,17
	Pengurangan :	
1	Pengurangan pembayaran utang belanja tahun lalu	17.135.714.404,50
2	Pengurangan reklasifikasi beban jasa ke aset tetap	6.775.158.667,00
3	Pengurangan beban jasa tahun ini yang merupakan Belanja dibayar di muka	53.003.893,50
4	Reklasifikasi beban jasa BOS ke beban lainnya	153.773.482.028,00
5	Reklasifikasi beban jasa BLUD ke beban lainnya	242.866.751.719,00
	Jumlah Pengurangan	420.604.110.712,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah Selisih	(169.724.160.543,83)

4) Beban Pemeliharaan

LO	LRA	SELISIH
Rp64.720.127.042,00	Rp37.965.574.530,00	Rp26.754.552.512,00

Nilai Beban Pemeliharaan pada LO tahun 2023 sebesar Rp64.720.127.042,00, sedangkan nilai Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp37.965.574.530,00. Selisih sebesar Rp26.754.552.512,00 dijelaskan sebagai berikut .

Tabel 5.230

Selisih antara Beban Pemeliharaan -LO dengan Belanja Pemeliharaan -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penambahan :	
1	Reklasifikasi Belanja Modal/Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	7.229.331.000,00
2	Reklasifikasi beban pemeliharaan BLUD	8.645.990.416,00
3	Reklasifikasi beban pemeliharaan BOS	11.704.935.195,00
4	Pencatatan utang belanja tahun ini yang belum dibayar	10.156.500,00
	Jumlah Penambahan	27.590.413.111,00
	Pengurangan :	
1	Reklasifikasi beban pemeliharaan ke aset tetap	832.308.599,00
2	Pengurangan pembayaran utang belanja tahun lalu	3.552.000,00
	Jumlah Pengurangan	835.860.599,00
	Jumlah Selisih	26.754.552.512,00

5) Beban Perjalanan Dinas

LO	LRA	SELISIH
Rp57.185.404.693,00	Rp44.325.760.627,00	Rp12.859.644.066,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp57.185.404.693,00 , sedangkan nilai Belanja Perjalanan Dinas pada LRA sebesar Rp44.325.760.627,00. Selisih keduanya Rp12.859.644.066,00 dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.231

Selisih antara Beban Perjalanan Dinas -LO dengan Belanja Perjalanan Dinas -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penambahan :	
1	Reklasifikasi beban perjalanan dinas BLUD	2.524.451.787,00
2	Reklasifikasi beban perjalanan dinas BOS	10.335.192.279,00
	Jumlah Penambahan	12.859.644.066,00
	Jumlah Selisih	12.859.644.066,00

6) Beban Bunga

Baik Beban Bunga-LO ataupun Beban Bunga-LRA tidak terdapat saldo atau Nihil.

7) Beban Subsidi

Nilai saldo Beban Subsidi tahun 2023 adalah sebesar Nihil.

8) Beban Hibah

LO	LRA	SELISIH
<u>Rp103.614.651.117,00</u>	<u>Rp149.920.650.830,00</u>	<u>(Rp46.305.999.713,00)</u>

Beban Hibah pada LO adalah sebesar Rp103.614.651.117,00, sedangkan nilai Belanja Hibah pada LRA sebesar Rp149.920.650.830,00. Selisih keduanya dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5.232

Selisih antara Beban Hibah -LO dengan Beban Hibah -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencatatan hibah keluar aset tetap kepada organisasi kemasyarakatan	13.562.752.009,00
2	Pencatatan hibah keluar aset tetap kepada pemerintah daerah lainnya	52.500.000,00
	Jumlah Penambahan	13.615.252.009,00
	Pengurangan :	
1	Pengurangan Beban Hibah Dana Bos ke Sekolah Swasta	59.921.251.722,00
	Jumlah Pengurangan	59.921.251.722,00
	Jumlah selisih	(46.305.999.713,00)

9) Beban Bantuan Sosial

LO	LRA	SELISIH
----	-----	---------



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rp21.104.412.294,00

Rp6.978.022.000,00

Rp14.126.390.294,00

Selisih antara Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.233

Selisih antara Beban Bantuan Sosial -LO dengan Beban Bantuan Sosial -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penambahan :	
1	Pencatatan bantuan sosial persediaan kepada masyarakat	12.858.794.071,00
2	Pencatatan bantuan sosial persediaan kepada Lembaga Non Pemerintah	1.267.596.223,00
	Jumlah Selisih	14.126.390.294,00

10) Beban Penyusutan dan Amortisasi

LO	LRA	SELISIH
Rp372.765.462.521,81	Rp0,00	Rp372.765.462.521,81

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp372.765.462.521,81 adalah beban yang terjadi akibat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu atas aset tetap pada SKPD di Kabupaten Brebes.

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui atau disajikan pada LO.

11) Beban Penyisihan Piutang

LO	LRA	SELISIH
Rp39.223.713,65	Rp0,00	Rp39.223.713,65

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada LO yakni sebesar Rp39.223.713,65. Rincian dari beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.234

Penjelasan Beban Penyisihan Piutang-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Pajak	9.848.784,25
2	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Retribusi	26.361.850,25
3	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang BLUD	2.729.867,84
4	Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba/Deviden pada BUMD	283.211,31



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah selisih	39.223.713,65

12) Beban Lain-Lain

Pada tahun 2023 nilai beban lain-lain adalah Nihil.

13) Beban Transfer

LO	LRA	SELISIH
Rp177.043.297.032,00	Rp511.127.041.632,00	(Rp334.083.744.600,00)

Beban Transfer pada LO sebesar Rp177.043.297.032,00, sedangkan pada LRA sebesar Rp0. Selisih sebesar minus Rp334.083.744.600,00. Nilai tersebut adalah pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban operasional pemerintah kabupaten/kota.

14) Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2023 sebesar 357.922.041.899,00. Nilai ini tidak masuk pada LO karena merupakan pembelian atas aset yang pencatatannya masuk pada Neraca.

15) Beban Tak Terduga

LO	LRA	SELISIH
Rp1.187.275.000,00	Rp1.187.275.000,00	Rp0,00

Antara Beban Luar Biasa-LO dan Beban Luar Biasa-LRA tahun 2023 tidak terdapat perbedaan nilai.

5. 5. Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	3.074.055.193.997,01	2.987.888.004.874,14
Arus Kas Keluar	2.631.092.593.173,00	2.610.613.275.942,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	442.962.824,01	377.274.728.932,14

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2023 terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp442.962.824,01 yang merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp3.074.055.193.997,01 dengan arus kas keluar sebesar Rp2.610.613.275.942,00. Arus kas dari aktivitas operasi dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 235
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
5.5.1.1	Arus Kas Masuk		
5.5.1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	179.815.467.425,00	150.321.269.360,00
5.5.1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	18.490.738.080,00	19.577.537.040,00
5.5.1.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.681.024.043,00	10.978.000.615,00
5.5.1.1.4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	267.992.930.768,01	236.584.622.980,14
5.5.1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	40.545.351.265,00	42.362.068.675,00
5.5.1.1.6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.331.727.139.428,00	1.230.091.817.360,00
5.5.1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	108.178.591.500,00	119.268.684.105,00
5.5.1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	501.826.671.360,00	458.790.447.626,00
5.5.1.1.9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.837.859.000,00	-
5.5.1.1.12	Penerimaan Dana Desa	334.083.744.600,00	453.819.700.000,00
5.5.1.1.13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	241.972.327.482,00	226.946.635.230,00
5.5.1.1.14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	16.348.003.046,00	25.935.303.278,00
5.5.1.1.15	Penerimaan Hibah	14.555.346.000,00	13.211.918.605,00
5.5.1.1.17	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	3.074.055.193.997,01	2.987.888.004.874,14
5.5.1.2	Arus Kas Keluar		
5.5.1.2.1	Pembayaran Pegawai	1.114.115.933.151,00	1.018.858.634.434,00
5.5.1.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	847.763.670.560,00	803.599.744.975,00
5.5.1.2.3	Pembayaran Bunga	-	-
5.5.1.2.5	Pembayaran Belanja Hibah	149.920.650.830,00	122.961.677.485,00
5.5.1.2.6	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	6.978.022.000,00	7.056.225.000,00
5.5.1.2.7	Pembayaran Tidak Terduga	1.187.275.000,00	3.717.196.960,00
5.5.1.2.8	Pembayaran Belanja Bagi Hasil	17.447.235.932,00	15.302.204.088,00
5.5.1.2.9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	493.679.805.700,00	-
5.5.1.2.11	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	-	639.117.593.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.631.092.593.173,00	2.610.613.275.942,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	442.962.600.824,01	377.274.728.932,14

Pada arus kas dari aktivitas operasi ini terdapat perbedaan nilai dengan nilai yang tertera pada LRA yaitu pada Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak termasuk pendapatan dari penjualan aset yaitu sebesar Rp955.985.075,00. Adapun rincian



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pendapatan yang dikurangkan untuk penjualan aset disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 236
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar per SKPD

No.	Uraian	SKPD	31 Des 2022 (Rp)
1	Penjualan barang bekas bongkaran Gedung dan Bangunan	BPKAD	137.043.799,00
2	Penjualan barang bekas peralatan kantor yang tidak terpakai	Dinpermedes	5.000.000,00
3	Penjualan barang bekas peralatan kantor yang tidak terpakai	Inspektorat	6.500.000,00
4	Hasil Lelang Penjualan kendaraan	BPKAD	807.441.276,00
		Jumlah	955.985.075,00

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Ar,us Kas Masuk	955.985.075,00	1.933.986.000,00
Arus Kas Keluar	357.922.041.899,00	480.672.283.614,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(356.966.056.824,00)	(478.738.297.614,00)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp356.966.056.824,00 merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp955.985.075,00 dan arus kas keluar sebesar Rp357.922.041.899,00. Aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2023 dan tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.27
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
5.5.2.1	Arus Kas Masuk		
5.5.2.1.1	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	818.941.276,00	845.989.500,00
5.5.2.1.2	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	137.043.799,00	1.087.996.500,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	955.985.075,00	1.933.986.000,00
5.5.2.2	Arus Kas Keluar		
5.5.2.2.1	Perolehan Tanah	227.500.000,00	-
5.5.2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	89.682.122.849,00	114.071.627.073,00
5.5.2.2.3	Perolehan Bangunan dan Gedung	52.721.300.467,00	166.066.285.008,00
5.5.2.2.4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.528.125.702,00	183.852.539.769,00
5.5.2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	20.410.604.553,00	12.576.379.281,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
5.5.2.2.6	Perolehan Aset Lainnya	3.352.388.328,00	4.105.452.483,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	357.922.041.899,00	480.672.283.614,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(356.966.056.824,00)	(478.738.297.614,00)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	14.009.938,00	4.395.000,00
Arus Kas Keluar	22.500.000.000,00	13.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22.485.990.062,00)	(13.495.605.000,00)

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus Rp22.485.990.062,00 adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dari aktivitas ini adalah sebesar Rp14.009.938,00, sedangkan arus kas keluarnya adalah sebesar Rp22.500.000.000,00. Aliran kas dari aktivitas pendanaan tahun 2023 dan tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.238
Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
5.5.3.1	Arus Kas Masuk		
5.5.3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	-	-
5.5.3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5.5.3.1.3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	14.009.938,00	4.395.000,00
5.5.3.1.4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	14.009.938,00	4.395.000,00
5.5.3.2	Arus Kas Keluar		
5.5.3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
5.5.3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	22.500.000.000,00	13.500.000.000,00
5.5.3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		-
	Jumlah Arus Kas Keluar	22.500.000.000,00	13.500.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22.485.990.062,00)	(13.495.605.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	171.095.375.564,00	94.794.049.460,39
Arus Kas Keluar	171.710.697.253,17	94.140.309.896,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(615.321.689,17)	653.739.564,17

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp615.321.689,17 adalah selisih antara arus kas masuk sebesar Rp171.095.375.564,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp171.710.697.253,17 Aliran kas dari aktivitas transitoris tahun 2023 dan tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.239
Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
5.5.4.1	Arus Kas Masuk		
5.5.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	171.095.375.564,00	94.794.049.460,39
	Jumlah Arus Kas Masuk	171.095.375.564,00	94.794.049.460,39
5.5.4.2	Arus Kas Keluar		
5.5.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	171.710.697.253,17	94.140.309.896,22
	Jumlah Arus Kas Keluar	171.710.697.253,17	94.140.309.896,22
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(615.321.689,17)	653.739.564,17

Penambahan dan pengurangan PFK belanja gaji pegawai dan setoran pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara/Pihak Ketiga tahun 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.240
Rincian Perhitungan Pihak Ketiga

NO.	URAIAN	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Uang Jaminan Pemeliharaan		-
2	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	8.778.460.852,00	8.778.460.852,00
3	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	30.987.935.319,00	30.987.935.319,00
4	Taperum	-	-
5	BPJS Kesehatan PNS	33.838.384.894,00	33.838.384.894,00
6	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.200.832.731,00	1.200.832.731,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
7	Jaminan Kematian (JKM)	3.624.739.510,00	3.624.739.510,00
8	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	2.579.550,00	2.579.550,00
9	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	35.529.112.251,00	35.529.112.251,00
10	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.481.386.209,00	1.481.386.209,00
11	PPh Pasal 23 Jasa	252.521.012,00	252.521.012,00
12	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	4.369.155,00	4.369.155,00
13	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	5.446.621.740,00	5.446.621.740,00
14	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	42.880.132.867,00	42.880.132.867,00
15	IWP (3,25%) Iuran Wajib Pegawai PPPK	4.643.717.230,00	4.643.717.230,00
16	BPJS Kesehatan Non PNS	1.483.629.377,00	1.483.629.377,00
17	BPJS Kesehatan Non PNS 5%	179.295.138,00	179.295.138,00
18	PPh Pasal 21 Honor/dll Non PNS	671.798.473,00	671.798.473,00
19	Retensi BLUD		-
20	Pajak belum setor (RSUD Bumiayu)	77.628.699,00	-
21	Pajak belum setor (Dinkes-UPTD Pusk. Bumiayu)	264.317,00	-
22	Pajak belum setor (Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo)	96.300,00	-
23	Pajak belum setor, Dana BOK (Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo)	7.551.440,00	-
24	Pajak belum setor, Dana BOK (Dinkes-UPTD Pusk. Tanjung)	416.300,00	-
25	Pajak belum setor (DPMPSTP)	-	6.934.458,00
26	PPN/PPh dana BOS		698.246.487,17
27	Pajak belum setor dana BOS (Pajak Daerah/Pajak Restoran)	3.902.200,00	-
	Jumlah	171.095.375.564,00	171.710.697.253,17

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	62.895.232.248,84	(114.305.434.117,69)

Kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2023 sebesar Rp62.895.232.248,84 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD tahun 2023 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.241
Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

No.	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	442.962.600.824,01	377.274.728.932,14
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(356.966.056.824,00)	(478.738.297.614,00)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(22.485.990.062,00)	(13.495.605.000,00)
4	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	(615.321.689,17)	653.739.564,17



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
	Jumlah	62.895.232.248,84	(114.305.434.117,69)

5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD

	1 Jan 2023 (Rp)	1 Jan 2022 (Rp)
Saldo Awal kas di BUD	41.962.032.335,00	84.299.735.940,00

Saldo awal kas di BUD sebesar Rp41.962.032.335,00 merupakan saldo Kas di BUD per 1 Januari 2023.

5.5.7. Saldo Awal Kas di BLUD

	1 Jan 2023 (Rp)	1 Jan 2022 (Rp)
Saldo Awal kas di BLUD	28.749.807.022,43	100.749.728.268,29

Saldo awal Kas di BLUD sebesar Rp28.749.807.022,73 merupakan saldo Kas di RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas per 1 Januari 2023. Adapun saldo kas awal di RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.242
Saldo Awal Kas di BLUD

No	Nama BLUD	Saldo Awal 2023 (Rp)	Saldo Awal 2022 (Rp)
1	Dinkes-UPTD Pusk. Brebes	955.736.410,00	1.309.377.064,00
2	Dinkes-UPTD Pusk. Tanjung	1.567.068.834,00	3.952.587.644,00
3	Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo	983.189.830,00	1.544.423.461,00
4	Dinkes-UPTD Pusk. Bumiayu	791.662.581,00	1.340.901.733,00
5	Dinkes-UPTD Pusk. Paguyangan	573.974.434,00	434.066.127,00
6	RSUD BREBES	10.254.432.338,00	80.625.914.920,29
7	RSUD BUMIAYU	13.623.742.595,43	11.542.457.319,00
	Jumlah	28.749.807.022,43	100.749.728.268,29

5.5.8. Saldo Awal Kas Dana BOS

Saldo awal kas dana BOS sebesar Rp776.670.003,17.

Saldo ini merupakan kas BOS yang berada pada sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dindikpora.

5.5.9. Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo awal kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp6.934.458,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.934.458,00 merupakan pajak yang belum disetor pada DPMPTSP.

5.5.10. Saldo Akhir Kas di BUD

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Saldo Akhir kas di BUD	134.390.676.067,44	71.495.443.818,60

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp134.390.676.067,44 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Brebes per tanggal 31 Desember 2023. Perhitungan saldo akhir kas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.243
Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	62.895.232.248,84	(114.305.434.117,69)
2	Saldo Awal Kas di BUD	41.962.032.335,00	84.299.735.940,00
3	Saldo Awal Kas di BLUD	28.749.807.022,43	100.749.728.268,29
4	Saldo Awal Kas Dana BOS	776.670.003,17	701.279.709,00
6	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	6.934.458,00	50.134.019,00
	Saldo Akhir Kas	134.390.676.067,44	71.495.443.818,60

5.5.11. Saldo Akhir Kas di BUD (Kas Daerah)

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Saldo akhir kas di BUD	117.654.188.656,00	41.962.032.335,00

Saldo akhir Kas di BUD (Kas Daerah) per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.654.188.656,00 yang merupakan saldo kas di Rekening Giro Bank Jateng A/C Nomor 1.028.00001.2.

5.5.12. Saldo akhir kas di BLUD

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Saldo Akhir kas di BLUD	16.293.308.712,44	28.749.807.022,43



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp16.293.308.712,44 merupakan saldo Kas di RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas per 31 Desember 2023. Adapun rincian saldo kas di RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.244
Perhitungan Saldo Akhir Kas di RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas

No	Nama BLUD	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2022 (Rp)
1	Dinkes-UPTD Pusk. Brebes	320.310.922,00	955.736.410,00
2	Dinkes-UPTD Pusk. Tanjung	1.853.879.238,00	1.567.068.834,00
3	Dinkes-UPTD Pusk. Banjarharjo	280.132.692,00	983.189.830,00
4	Dinkes-UPTD Pusk. Paguyangan	536.568.085,00	791.662.581,00
5	Dinkes-UPTD Pusk. Bumiayu	870.163.393,00	573.974.434,00
6	RSUD BUMIAYU	1.040.500.879,00	10.254.432.338,00
7	RSUD BREBES	11.391.753.503,44	13.623.742.595,43
	Jumlah	16.293.308.712,44	28.749.807.022,43

5.5.13. Saldo Akhir Kas dana BOS

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Saldo Akhir kas Dana BOS	357.221.643,00	776.670.003,17

Saldo akhir kas dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp357.221.643,00 merupakan Saldo Dana BOS yang berada pada sekolah-sekolah yang terdiri dari saldo kas sebesar Rp353.319.443,00 dan pajak yang belum disetor sebesar Rp3.902.200,00. Adapun saldo kas sebesar Rp357.221.643,00 terdiri dari saldo tunai sebesar Rp96.681.701,00 dan saldo bank sebesar Rp260.539.942,00 yang tersebar pada 937 sekolah yaitu sebanyak 860 SD dan 77 SMP di Kabupaten Brebes.

5.5.14. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	6.934.458,00

Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.15. Saldo Akhir Kas

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas	134.390.678.067,44	71.495.443.818,60



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo Akhir Kas sebesar Rp134.390.678.067,44 merupakan total seluruh saldo Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.245
Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di BUD	117.654.188.656,00	41.962.032.335,00
2	Saldo Akhir Kas di BLUD	16.293.308.712,44	28.749.807.022,43
3	Saldo Akhir Kas Dana BOS	357.221.643,00	776.670.003,17
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	6.934.458,00
	Saldo Akhir Kas	134.304.719.011,44	71.495.443.818,60

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.246
Perubahan Ekuitas

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	4.068.034.952.451,00	3.811.424.435.564,49
Surplus/Defisit-Lo	82.104.149.373,58	266.557.596.900,42
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	32.729.960.869,83	(9.947.080.013,90)
Koreksi Nilai Persediaan	7.869.447.643,13	(2.644.561,32)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	24.860.513.226,70	(9.944.435.452,58)
Ekuitas Akhir	4.182.869.062.694,40	4.068.034.952.451,00

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp4.068.034.952.451,00 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 pada Laporan Neraca audited tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp3.811.424.435.564,49 terdapat kenaikan sebesar 6,73%.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat surplus-LO sebesar Rp82.104.149.373,58 dan apabila dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

saldo surplus-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp266.557.596.900,42 terdapat penurunan sebesar 69,20%.

5.6.3

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai (Rp32.729.960.869,82) yang terdiri dari koreksi nilai Persediaan tahun 2023 sebesar (Rp7.869.447.643,13) dan penambahan dan pengurangan nilai lain-lain sebesar (Rp24.860.513.226,69). Adapun rincian penambahan dan pengurangan nilai lain-lain disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.247
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>32.729.960.869,82</u>	<u>(9.947.080.013,90)</u>
Koreksi Nilai Persediaan	7.869.447.643,13	(2.644.561,32)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-Lain	24.860.513.226,69	(9.944.435.452,58)

5.6.3.1

Koreksi Nilai persediaan

Koreksi nilai Persediaan sebesar Rp7.869.447.643,13 merupakan koreksi saldo awal persediaan tahun 2023 karena koreksi salah pencatatan sebagai berikut.

Penambahan	:	Rp7.917.740.519,50
Pengurangan	:	<u>Rp48.292.876,37</u>
Koreksi	:	<u>Rp7.869.447.643,13</u>

Rincian koreksi nilai persediaan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.248
Rincian Koreksi Nilai Persediaan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
	Penambahan :		
1	Obat	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	100,944,821.00
2	Obat	DINKES-UPTD PUSK. TANJUNG	0.38
3	Obat	DINAS KESEHATAN	990,589,000.00
4	Obat	DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	40,524,035.00
5	Obat-obatan Lainnya	DINKES-UPTD PUSK. BUMIAYU	5,120.00
6	Obat	DINKES-UPTD PUSK. PAGUYANGAN	138,794,800.00
7	Obat	DINKES-UPTD PUSK. BREBES	6,636,890,024.00
8	Obat	RSUD BREBES	20,399.12



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
9	Obat-obatan Lainnya	DINAS KESEHATAN	9,336,420.00
10	Perabot Kantor	DINAS KESEHATAN	635,900.00
	Jumlah Penambahan		7,917,740,519.50
	Pengurangan :		
1	Obat	DINKES-UPTD PUSK. BANJARHARJO	0.37
2	Obat-obatan Lainnya	DINKES-UPTD PUSK.BUMIAYU	47,752,876.00
3	Obat	DINKES-UPTD PUSK. PAGUYANGAN	540,000.00
	Jumlah Pengurangan		48,292,876.37
	Jumlah Koreksi		7,869,447,643.13

Penambahan:

- SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung senilai Rp100.944.821,38 merupakan koreksi nilai persediaan obat vaksin/BMHP Covid, dimana logistik Covid harus dieliminasi dari akuntansi persediaan agar tidak double catat dengan Kementerian Kesehatan dan Rp0,38 merupakan koreksi pembulatan saldo awal obat.
- Sedangkan SKPD Dinas Kesehatan senilai Rp990.589.000,00 merupakan koreksi nilai persediaan obat vaksin/BMHP Covid, dimana logistik Covid harus dieliminasi dari akuntansi persediaan agar tidak double catat dengan Kementerian Kesehatan.
- SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo senilai Rp40.524.035,00 merupakan koreksi nilai persediaan obat dari saldo akhir vaksin/BMHP Covid, dimana logistik Covid harus dieliminasi dari akuntansi persediaan agar tidak double catat dengan Kementerian Kesehatan.
- SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu senilai Rp5.120,00 merupakan koreksi nilai persediaan obat lainnya karena salah catat.
- SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan senilai Rp138.794.800,00 merupakan koreksi nilai persediaan obat vaksin/BMHP Covid, dimana logistik Covid harus dieliminasi dari akuntansi persediaan agar tidak double catat dengan Kementerian Kesehatan.
- Koreksi tambah SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes senilai Rp6.636.890.024,00 merupakan koreksi nilai persediaan obat vaksin/BMHP Covid, dimana logistik Covid harus dieliminasi dari akuntansi persediaan agar tidak double catat dengan Kementerian Kesehatan.
- Koreksi tambah RSUD Brebes senilai Rp20.399,12 merupakan koreksi penyesuaian volume obat.
- Koreksi tambah SKPD Dinas Kesehatan senilai Rp9.972.320,00 merupakan koreksi obat lainnya senilai Rp9.336.420,00 dan koreksi perabot kantor (extrakomptabel) senilai Rp635.900,00.

Pengurangan:

- SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo senilai Rp0,37,00 merupakan koreksi pembulatan saldo awal obat.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b. Untuk SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu senilai Rp47.752.876,00 karena salah perhitungan.
- c. Sedangkan untuk SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan Rp540.000,00 karena salah catat.

5.6.3.2 Lain-Lain

Saldo Koreksi Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp24.860.513.226,71, apabila dibandingkan dengan Saldo lain-lain tahun 2022 sebesar (Rp9.944.435.452,58) terdapat kenaikan sebesar (349,93%). Lain-lain terdiri dari Koreksi Ekuitas Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.249
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Koreksi Nilai - Kas	-	-
2	Koreksi Nilai - Piutang	(9.067.575.330,48)	(1.575.048.230,90)
3	Koreksi Nilai - Penyisihan Piutang	65.718.643,00	(134.260.555,80)
4	Koreksi Nilai - Beban Dibayar Dimuka	-	-
5	Koreksi Nilai - Persediaan	7.869.447.643,13	(2.644.561,32)
6	Koreksi Mutasi SKPD Persediaan	-	-
7	Koreksi Nilai - Investasi	-	-
8	Koreksi Nilai - Aset Tetap	34.802.137.186,00	1.649.072.000,00
9	Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap	-	-
10	Koreksi Nilai - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.067.520.813,83)	(2.108.803.499,49)
11	Koreksi Nilai - Aset Lainnya	(279.455.051,98)	-
12	Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya	-	(1.280.000,00)
13	Koreksi Nilai - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(1.909.216.768,46)
14	Koreksi Nilai - Pendapatan Diterima Dimuka	-	109.849.315,07
15	Koreksi Nilai - Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
16	Koreksi Nilai - Utang Belanja	407.208.594,00	(5.974.747.713,00)
17	Koreksi Nilai - Utang Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	32.729.960.869,84	(9.947.080.013,89)

Masing-masing koreksi ekuitas lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi Nilai - Kas

Tidak ada koreksi nilai kas per 31 Desember 2022.

2. Koreksi Nilai – Piutang

Koreksi Nilai Piutang sebesar (Rp9.067.575.330,48) berasal dari koreksi catat saldo awal piutang dengan rincian berikut.

Penambahan	:	Rp4.460.747,00
Pengurangan	:	Rp9.072.036.077,48
Koreksi	:	<u>Rp(9.067.575.330,48)</u>



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.250
 Rincian Koreksi Nilai Piutang

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
	Penambahan :		
1	Koreksi saldo awal karena kesalahan pencatatan	DINKES-UPTD PUSKESMAS BREBES	325.000,00
2	Koreksi piutang dikarenakan kesalahan perhitungan akibat adanya NOP yang sudah terbayar akan tetapi terkena pengurangan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.135.747,00
	Jumlah Penambahan		4.460.747,00
	Pengurangan :		
1	Koreksi piutang atas rekomendasi dari BPK berdasarkan surat BPK-RI No.6/S/III/2024 tanggal 23 Januari 2024 a.n Sdr. Akhmad Maulana Yusuf (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2017)	DINAS KESEHATAN	423.082.000,00
2	Koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	14.577.436,00
3	Koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	5.576.557,00
4	Koreksi penghapusan piutang pajak dikarenakan sudah dibayarkan di tahun lalu	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.663.250,00
5	Koreksi penghapusan piutang pajak dikarenakan sudah kadaluarsa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	52.846.500,00
6	Koreksi penghapusan piutang pajak BPHTB dikarenakan sudah kadaluarsa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.554.109,00
7	Koreksi penghapusan piutang pajak dikarenakan sudah dibayarkan di tahun lalu	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.368.600,00
8	Koreksi penghapusan piutang pajak dikarenakan sudah kadaluarsa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.649.840,50
9	Koreksi penghapusan piutang PBB dikarenakan sudah kadaluarsa, wakaf, dobel pajak, dan objek pajak tidak ada	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.146.854.929,00
10	Adanya kebijakan penghapusan denda seluruh tahun pajak di tahun 2023 mengakibatkan pembayaran pajak tidak dikenakan denda sama sekali. Hal ini berpengaruh pada perubahan perhitungan denda berkurang sebesar Rp1.800.705.094,28. Selain itu adanya Penghapusan piutang PBB tahun 2014-2017 yang selanjutnya berpengaruh pada penghapusan piutang denda pajak PBB tahun 2014-2017 sebesar Rp1.598.901.311,70.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.399.606.405,98



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
11	Koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3.066.450,00
12	Koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	190.000,00
	Jumlah Pengurangan		9.072.036.077,48
		Jumlah Koreksi	(9.067.575.330,48)

Penambahan:

- Untuk SKPD Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes koreksi nilai piutang sebesar Rp325.000,00 dikarenakan adanya kesalahan kelebihan pencatatan piutang pada Puskesmas Sidamulya sebesar Rp700.000,00 dan piutang belum tercatat pada Puskesmas Wanasari sebesar Rp1.025.000,00.
- Untuk SKPD Badan Pendapatan Daerah koreksi nilai piutang sebesar Rp4.135.747,00 merupakan pencatatan kembali piutang PBB, karena adanya pengurangan piutang terhadap beberapa NOP yang sudah terbayarkan.

Pengurangan:

- Untuk SKPD Dinas Kesehatan koreksi nilai piutang sebesar Rp423.082.000,00 dikarenakan adanya koreksi piutang atas rekomendasi dari BPK berdasarkan surat BPK-RI No.6/S/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 a.n Sdr. Akhmad Maulana Yusuf (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2017) terkait TGR.
- Untuk SKPD Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan koreksi nilai piutang sebesar Rp14.577.436,00 dan Rp190.000,00 merupakan koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.
- Untuk SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja koreksi nilai piutang sebesar Rp5.576.557,00 dan Rp3.066.450,00 merupakan koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.
- Koreksi nilai piutang sebesar Rp8.663.250,00 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan koreksi pengurangan nilai piutang pajak reklame



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- yang dikarenakan beberapa surat ketetapan pajak daerah dengan total nilai tersebut sudah dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- e. Koreksi nilai piutang sebesar Rp52.846.500,00 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan penghapusan piutang pajak reklame yang telah kadaluarsa, dihapus dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 973/1558 Tahun 2023.
 - f. Koreksi nilai piutang sebesar Rp7.554.109,00 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan penghapusan piutang BPHTB yang telah kadaluarsa, dihapus dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 973/1558 Tahun 2023.
 - g. Koreksi nilai piutang sebesar Rp3.368.600,00 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan koreksi pengurangan nilai piutang pajak Air Bawah Tanah yang dikarenakan beberapa surat ketetapan pajak daerah dengan total nilai tersebut sudah dibayarkan pada tahun sebelumnya.
 - h. Koreksi nilai piutang sebesar Rp6.649.840,5 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan penghapusan piutang pajak ABT yang telah kadaluarsa, dihapus dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 973/1558 Tahun 2023.
 - i. Koreksi nilai piutang sebesar Rp5.146.854.929,00 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan koreksi karena penghapusan piutang PBB yang sudah kadaluarsa, dan adanya perubahan ketetapan pajak PBB karena adanya wakaf, dobel pajak, dan objek pajak tidak ada.
 - j. Koreksi nilai piutang sebesar Rp3.399.606.405,98 pada Badan Pendapatan Daerah merupakan penghapusan nilai denda pajak tahun 2014-2017 sebagai akibat dari penghapusan nilai pokok PBB yang dihapus dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 973/1558 Tahun 2023. selain itu, adanya kebijakan pembebasan denda pajak dan perubahan ketetapan baku pbb karena wakaf, dobel pajak, dan objek pajak tidak ada juga menyebabkan piutang denda pajak berkurang.
3. Koreksi Nilai - Penyisihan Piutang
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp(65.718.643,00) merupakan koreksi nilai penyisihan piutang yang disebabkan adanya koreksi saldo awal piutang, dengan rincian berikut.

Penambahan	:	Rp65.718.643,00
Pengurangan	:	Rp0,00
Koreksi	:	<u>Rp65.718.643,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.251
Koreksi Nilai - Penyisihan Piutang

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
1	Penambahan : Koreksi penyisihan piutang dikarenakan adanya koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	14.767.436,00
2	Koreksi penyisihan piutang dikarenakan adanya koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	8.643.007,00
3	Koreksi penyisihan piutang dikarenakan adanya koreksi piutang atas rekomendasi dari BPK berdasarkan surat BPK-RI No.6/S/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 a.n Sdr. Akhmad Maulana Yusuf (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2017)	DINAS KESEHATAN	42.308.200,00
	Jumlah Penambahan		65.718.643,00
	Pengurangan :		
	Jumlah Pengurangan		-
		Jumlah Koreksi	65.718.643,00

Penambahan :

- a. Untuk SKPD Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp14.767.436,00 dikarenakan adanya koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.
 - b. Untuk SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp8.643.007,00 dikarenakan adanya koreksi piutang ex-dana bergulir yang merupakan pelunasan melalui crash program Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara untuk piutang yang diserahkan ke KPKNL Tegal di mana mendapatkan keringanan angsuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2021.
 - c. Untuk SKPD Dinas Kesehatan koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp42.308.200,00 dikarenakan adanya koreksi piutang atas rekomendasi dari BPK berdasarkan surat BPK-RI No.6/S/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 a.n Sdr. Akhmad Maulana Yusuf (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2017) terkait TGR.
4. Koreksi Nilai - Beban Dibayar di Muka
Tidak ada koreksi nilai beban dibayar di muka per 31 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5. Koreksi Nilai – Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp7.869.447.643,13. Nilai koreksi ini telah dijelaskan pada poin 5.6.3.1 di atas.
6. Koreksi Mutasi SKPD Persediaan
Koreksi Mutasi Persediaan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi nilai persediaan yang disebabkan adanya mutasi persediaan antar SKPD/BLUD, dengan rincian berikut.

Penambahan	: Rp52.547.108.570,00
Pengurangan	: Rp52.547.108.570,00
Koreksi	: <u>Rp0,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.252
Rincian Koreksi Mutasi Persediaan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
	Penambahan :		
1	Mutasi masuk dari DP3KB dan Dinas Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	1.417.539.884,00
2	Mutasi masuk dari DP3KB	DINAS KESEHATAN	9.595.850,00
3	Mutasi masuk dari DP3KB dan Dinas Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	3.892.900.047,00
4	Mutasi masuk dari DP3KB, Dinas Kesehatan, Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes dan Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung	DINKES-UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	13.274.977.581,00
5	Mutasi masuk dari DP3KB dan Dinas Kesehatan	DINKES-UPTD PUSKESMAS BREBES	10.375.299.278,00
6	Mutasi masuk dari DP3KB, Dinas Kesehatan dan Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	DINKES-UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	6.283.305.839,00
7	Mutasi masuk dari DP3KB, Dinas Kesehatan dan Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG	10.835.280.582,00
8	Mutasi masuk dari DP3KB, DINKES dan Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	DINKES-UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	6.458.209.509,00
	Jumlah Penambahan		52.547.108.570,00
	Pengurangan :		
1	Mutasi keluar ke Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes, Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu, Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung, Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo, Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan, RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu	DINAS KESEHATAN	49.285.041.426,00
2	Mutasi keluar ke Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes, Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu, Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung, Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo, Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan, RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.250.824.564,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
3	Mutasi keluar ke Dinkes-UPTS Puskesmas Tanjung	DINKES-UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	684.460,00
4	Mutasi keluar ke Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	DINKES-UPTD PUSKESMAS BREBES	453.300,00
5	Mutasi keluar ke Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu	DINKES-UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	8.040.020,00
6	Mutasi keluar ke Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo	DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG	295.200,00
7	Mutasi keluar ke Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan dan Dinas Kesehatan	DINKES-UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	1.769.600,00
	Jumlah Pengurangan		52.547.108.570,00
		Jumlah Koreksi	-

Tabel 5.253

Rincian Klasifikasi Barang Mutasi Masuk Persediaan antar SKPD/Unit

SKPD	Klasifikasi Barang	(Rp)
DINKES - UPTD PUSKESMAS	OBAT	43.753.921.275,00
DINKES - UPTD PUSKESMAS	OBAT-OBATAN LAINNYA/ALKON	3.482.747.364,00
RSUD BREBES	OBAT	3.425.514.991,00
RSUD BREBES	OBAT-OBATAN LAINNYA/ALKON	467.385.056,00
RSUD BUMIAYU	OBAT	1.381.292.640,00
RSUD BUMIAYU	OBAT-OBATAN LAINNYA/ALKON	36.247.244,00
	JUMLAH	52.547.108.570,00

Mutasi/transfer persediaan di lingkungan SKPD/Unit kerja berupa obat-obatan dan alat kontrasepsi.

Tabel 5.254

Rincian Klasifikasi Barang Mutasi keluar Persediaan antar SKPD/Unit

SKPD	Klasifikasi Barang	(Rp)
DINKES	OBAT GUDANG FARMASI	48.743.324.006,00
DINKES	REAGEN BMHP SURVEILANCE AIR MINUM	552.960.000,00
DP3KB	OBAT-OBATAN LAINNYA/ALKON	3.250.824.564,00
	JUMLAH	52.547.108.570,00

Mutasi/transfer keluar persediaan di lingkungan SKPD/Unit kerja berupa obat-obatan, reagen dan alat kontrasepsi.

7. Koreksi Nilai - Investasi

Tidak ada koreksi nilai investasi per 31 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

8. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset tetap sebesar Rp34.802.137.186,00 merupakan pencatatan penilaian barang berlebih, hibah masuk aset tetap tahun-tahun sebelumnya, aset ex-BGS, koreksi barang habis pakai, reklasifikasi antar kode aset tetap sebagai berikut :

Tabel 5.255
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap

No	Uraian	Th 2023 (Rp)	Th 2022 (Rp)
1	Koreksi Nilai - Tanah	33.286.146.255,00	743.985.000,00
2	Koreksi Nilai - Peralatan Mesin	1.212.480,00	515.783.000,00
3	Koreksi Nilai - Gedung dan Bangunan	642.601.600,00	165.209.000,00
4	Koreksi Nilai - Jalan Irigasi dan Jaringan	872.176.850,00	199.595.000,00
5	Koreksi Nilai - Aset Tetap Lainnya	-	24.500.000,00
6	Koreksi Nilai - Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00	-
	Jumlah	34.802.137.186,00	1.649.072.000,00

Koreksi masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi Nilai – Tanah

Koreksi Nilai Tanah sebesar Rp33.286.146.255,00 merupakan pencatatan hibah masuk tahun-tahun sebelumnya, pencatatan barang berlebih dan pencatatan aset ex-GBS dengan perhitungan sebagai berikut.

Penambahan	:	Rp33.286.146.255,00
Pengurangan	:	<u>Rp0,00</u>
Koreksi	:	<u>Rp33.286.146.255,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.256
Rincian Koreksi Nilai Tanah

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
a)	Penambahan : Pencatatan Hibah Masuk tahun-tahun sebelumnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN BREBES	33.017.191.203,00
b)	Pencatatan Penilaian Barang Berlebih	BREBES	36.479.552,00
c)	Pencatatan aset ex-BGS	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	232.475.500,00
	Jumlah Penambahan		33.286.146.255,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
	Jumlah Koreksi		33.286.146.255,00

Penambahan:

- 1) Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya pada Dinperwaskim sebesar Rp33.017.191.203,00
- 2) Koreksi tambah reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp268.955.052,00 terdiri dari koreksi pada BPKAD sebesar Rp232.475.500,00 berupa pengembalian 5 (lima) tanah bangunan pertokoan oleh PT MEP. Koreksi tambah pada Kecamatan Brebes sebesar Rp36.479.552,00 berupa pengembalian tanah bangunan pasar dan tanah untuk bangunan sarana olah raga oleh CV Jaya Bae sesuai dengan BAST nomor B/1972/028/X/2023 No. 01-JB/II/X/-2023 tanggal 30 Oktober 2023.

b. Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin

Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.212.480,00 merupakan pencatatan hibah masuk tahun-tahun sebelumnya, koreksi BHP tahun sebelumnya dan reklasifikasi antar kode aset tetap dengan perhitungan sebagai berikut.

Penambahan	:	Rp9.685.000,00
Pengurangan	:	<u>Rp8.472.520,00</u>
Koreksi	:	<u>Rp1.212.480,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.257
Rincian Koreksi Nilai Peralatan Mesin

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
a)	Penambahan : Pencatatan Hibah Masuk tahun-tahun sebelumnya	DINAS KESEHATAN	7.700.000,00
b)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.985.000,00
	Jumlah Penambahan		9.685.000,00
a)	Pengurangan : Pencatatan Koreksi Barang Habis Pakai tahun-tahun sebelumnya	DINAS KESEHATAN	6.487.520,00
b)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.985.000,00
	Jumlah Pengurangan		8.472.520,00
	Jumlah Koreksi		1.212.480,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penambahan :

- 1) Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya Rp7.700.000,00 pada Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST nomor:10695/gustugcovidjateng/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022
- 2) Koreksi tambah reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar 1.985.000,00 pada Dindikpora.

Pengurangan :

- 1) Koreksi kurang BHP tahun sebelumnya sebesar Rp6.487.520,00 berupa barang laboratorium.
- 2) Koreksi kurang (reklasifikasi antar kode aset tetap) sebesar Rp1.985.000,00 pada Dindikpora berupa dispenser.

c. Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan

Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp642.601.600,00 merupakan pencatatan reklasifikasi antar kode aset tetap dan hibah masuk tahun sebelumnya dengan perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp 1.428.812.653,00
Pengurangan	:	<u>Rp786.211.053,00</u>
Koreksi	:	<u>Rp642.601.600,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.258
Rincian Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
	Penambahan :		
a)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	182.469.053,00
b)	Pencatatan Hibah Masuk tahun-tahun sebelumnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	642.601.600,00
c)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	7.500.000,00
d)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	KECAMATAN LOSARI	498.425.000,00
e)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	KECAMATAN TONJONG	97.817.000,00
		Jumlah Penambahan	1.428.812.653,00
	Pengurangan :		
a)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	182.469.053,00
b)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	7.500.000,00
c)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	KECAMATAN LOSARI	498.425.000,00
d)	Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	KECAMATAN	97.817.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
		TONJONG	
		Jumlah Pengurangan	786.211.053,00
	Jumlah Koreksi		642.601.600,00

Penambahan:

- 1) Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya sebesar Rp642.601.600,00 pada Dinperwaskim berupa 2 (dua) mushola perumahan.
- 2) Koreksi tambah reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar Rp786.211.053,00 terdapat pada SKPD berikut ini:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp182.469.053,00
 - DLHPS sebesar Rp7.500.000,00
 - Kecamatan losari sebesar Rp498.425.000,00
 - Kecamatan Tonjong sebesar Rp97.817.000,00

Pengurangan :

- 1) Koreksi kurang reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar Rp786.211.053,00.
- d. Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan
Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp872.176.850,00 merupakan pencatatan reklasifikasi antar kode aset tetap dan hibah masuk tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan	:	Rp1.336.717.954,00
Pengurangan	:	Rp464.541.104,00
Koreksi	:	<u>Rp872.176.850,00</u>

Tabel 5.259

Rincian Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
a)	Penambahan : Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	464.541.104,00
b)	Pencatatan Hibah Masuk tahun-tahun sebelumnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	872.176.850,00
		Jumlah Penambahan	1.336.717.954,00
a)	Pengurangan : Pencatatan Reklasifikasi antar kode Aset Tetap	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	464.541.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
		Jumlah Pengurangan	464.541.104,00
	Jumlah Koreksi		872.176.850,00

Penambahan:

- 1) Koreksi tambah reklasifikasi antar kode aset tetap sebesar Rp464.541.104,00.
 - 2) Koreksi tambah hibah masuk tahun sebelumnya sebesar Rp872.176.850 pada Dinperwaskim berupa drainase perumahan Pasar Batang Kecamatan Brebes dan saluran drainase perumahan lembah Sakinah Kecamatan Bumiayu.
- e. Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00.
- f. Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan
Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1,00 merupakan pencatatan aset ex-BGS CV. Jaya Bae dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan	:	Rp1,00
Pengurangan	:	Rp0,00
Koreksi	:	<u>Rp1,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.260
Rincian Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
a)	Penambahan : Pencatatan aset ex-BGS	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,00
		Jumlah Penambahan	1,00
	Jumlah Koreksi		1,00

Penambahan :

- 1) Koreksi tambah aset ex-BGS sebesar Rp 1,00 pada BPKAD berupa aset gedung dan bangunan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes hasil kerjasama BGS dari CV Jaya Bae yang belum dinilai.
9. Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap
Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap sebesar Rp14.346.926.791,00 merupakan koreksi mutasi yang disebabkan adanya mutasi aset tetap antar SKPD, dengan rincian berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penambahan	:	Rp14.346.926.791,00
Pengurangan	:	Rp14.346.926.791,00
Koreksi	:	<u>Rp0,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 5.261
Rincian Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
	Penambahan :		
1	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	55.913.000,00
2	Mutasi masuk aset dari DINDUKCAPIL	DINAS KESEHATAN	10.200.000,00
3	Mutasi masuk aset dari DINAS KESEHATAN	DINKES-UPTD PUSKESMAS BREBES	2.532.929.958,00
4	Mutasi masuk aset dari DINAS KESEHATAN	DINKES-UPTD PUSKESMAS TANJUNG	1.941.862.969,00
5	Mutasi masuk aset dari DINAS KESEHATAN dan DINPERWASKIM	DINKES-UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO	1.011.100.290,00
6	Mutasi masuk aset dari DINAS KESEHATAN dan DINPERWASKIM	DINKES-UPTD PUSKESMAS BUMIAYU	793.471.328,00
7	Mutasi masuk aset dari DINAS KESEHATAN dan DINPERWASKIM	DINKES-UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN	900.363.525,00
8	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	4.862.000,00
9	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.270.029.000,00
10	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	32.890.000,00
11	Mutasi masuk aset dari BAPENDA dan KECAMATAN BREBES	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	974.190.250,00
12	Mutasi masuk aset dari SETDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	227.440.000,00
13	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.485.000,00
14	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS SOSIAL	4.970.000,00
15	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	12.425.000,00
16	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.485.000,00
17	Mutasi masuk aset dari SETDA dan DINPERWASKIM	DINAS PERHUBUNGAN	312.233.000,00
18	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	61.909.000,00
19	Mutasi masuk aset dari SETDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	572.740.000,00
20	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9.940.000,00
21	Mutasi masuk aset dari BAPERLITBANGDA	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	86.020.000,00
22	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	32.251.000,00
23	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.778.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
24	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.485.000,00
25	Mutasi masuk aset dari SATPOL PP, DPU, DINPERWASKIM dan KECAMATAN BUMIAYU	SEKRETARIAT DAERAH	727.747.000,00
26	Mutasi masuk aset dari SETDA, DPU dan DINPERWASKIM	SEKRETARIAT DPRD	1.198.397.232,00
27	Mutasi masuk aset dari SETDA	INSPEKTORAT	420.500.000,00
28	Mutasi masuk aset dari SETDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	597.250.000,00
29	Mutasi masuk aset dari SETDA dan DINPERWASKIM	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	234.095.000,00
30	Mutasi masuk aset dari DPU	KECAMATAN JATIBARANG	51.115.000,00
31	Mutasi masuk aset dari BAPENDA	KECAMATAN WANASARI	12.150.000,00
32	Mutasi masuk aset dari SETDA dan DINPERWASKIM	KECAMATAN BULAKAMBA	7.085.000,00
33	Mutasi masuk aset dari SETDA dan DINPERWASKIM	KECAMATAN BUMIAYU	187.315.000,00
34	Mutasi masuk aset dari DP3KB dan DINPERWASKIM	KECAMATAN BANTARKAWUNG	43.814.239,00
35	Mutasi masuk aset dari DINPERWASKIM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.485.000,00
		Jumlah Penambahan :	14.346.926.791,00
		Pengurangan :	
1	Mutasi keluar aset ke Dinkes-UPTD Puskesmas Brebes, Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo, Dinkes-UPTD Puskesmas Tanjung, Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu dan Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan	DINAS KESEHATAN	7.167.465.070,00
2	Mutasi keluar aset ke SETDA, SETWAN, KECAMATAN JATIBARANG	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.223.454.232,00
3	Mutasi keluar aset ke DINDIKPORA, Dinkes-UPTD Puskesmas Banjarharjo, Dinkes-UPTD Puskesmas Bumiayu dan Dinkes-UPTD Puskesmas Paguyangan, RSUD BREBES, DPU, DPSDAPR, BPBD, DINSOS, DLHPS, DP3KB, DISHUB, DINKOPUMDAG, DINBUDPAR, DPKP, DPKH, DINPERINAKER, SETDA, SETWAN, BPKAD, KEC. BULAKAMBA, KEC. BUMIAYU, KEC. BANTARKAWUNG, dan KESBANGPOL	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.560.938.000,00
4	Mutasi keluar aset ke SETDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	242.850.000,00
5	Mutasi keluar aset ke DINKES	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.200.000,00
6	Mutasi keluar aset ke KEC. BANTARKAWUNG	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	38.844.239,00
7	Mutasi keluar aset ke SATPOL PP, DISHUB, DPMPSTP, SETWAN, INSPEKTORAT, BAPERLITBANGDA, BPKAD, KEC. BULAKAMBA dan KEC. BUMIAYU	SEKRETARIAT DAERAH	2.948.815.000,00
8	Mutasi keluar aset ke DINARPUS	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	86.020.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp)
9	Mutasi keluar aset ke DINPERWASKIM dan KEC. WANASARI	BADAN PENDAPATAN DAERAH	127.000.000,00
10	Mutasi keluar aset ke DINPERWASKIM	KECAMATAN BREBES	859.340.250,00
11	Mutasi keluar aset ke SETDA	KECAMATAN BUMIAYU	82.000.000,00
		Jumlah Pengurangan :	14.346.926.791,00
		Jumlah Koreksi :	-

10. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 adalah (Rp1.067.520.813,83) merupakan koreksi masa manfaat. Adapun perhitungan sebagai berikut:

Penambahan	:	Rp99.566.543,17
Pengurangan	:	<u>Rp1.167.087.357,00</u>
Koreksi	:	<u>(Rp1.067.520.813,83)</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam lampiran 5.12.

11. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Koreksi mutasi aset lainnya sebesar (Rp279.455.051,98) merupakan koreksi mutasi aset lainnya akibat adanya pemindahan aset lainnya pada SKPD. Adapun perhitungan sebagai berikut :

Penambahan	:	Rp0,00
Pengurangan	:	<u>Rp279.455.051,98</u>
Koreksi	:	<u>(Rp279.455.051,98)</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.262
Rincian Koreksi Mutasi Aset Lainnya

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
	Jumlah Penambahan		-
1	Pengurangan : Koreksi karena berakhirnya perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga yang berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 2023 antara Pemkab Brebes dengan PT Marianaguna Ekacipta Persada (MEP) sehingga adanya penyerahan dan pengambil alihan oleh Pemkab Brebes atas Bangunan Kelola Serah.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	279.455.051,98
	Jumlah Pengurangan		279.455.051,98



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
		Jumlah Koreksi	(279.455.051,98)

Pengurangan :

Koreksi aset lainnya sejumlah Rp279.455.051,98 berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Brebes (PPKD) dikarenakan berakhirnya perjanjian perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga yang berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 2023 antara Pemkab Brebes dengan PT Marianaguna Ekacipta Persada (MEP) sehingga adanya penyerahan dan pengambil alihan oleh Pemkab Brebes atas Bangunan Kelola Serah.

12. Koreksi Mutasi Aset Lainnya

Tidak ada koreksi mutasi aset lainnya per 31 Desember 2023.

13. Koreksi Nilai – Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023.

14. Koreksi Nilai - Pendapatan Diterima Dimuka

Tidak ada koreksi nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023.

15. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak ada koreksi nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023.

16. Koreksi Utang Belanja

Koreksi Nilai Utang Belanja sebesar Rp407.208.594,00 merupakan koreksi saldo awal utang yang berasal dari dua SKPD, adapun perhitungannya sebagai berikut.

Penambahan	:	Rp440.132.560,00
Pengurangan	:	<u>Rp32.923.966,00</u>
Koreksi	:	<u>Rp407.208.594,00</u>

Uraian lebih lanjut koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.263
Rincian Koreksi Nilai Utang Belanja

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
1	Penambahan : Koreksi karena salah perhitungan utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga tahun 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.457.500,00
2	Koreksi karena salah perhitungan utang belanja persediaan obat	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	13.593.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
3	Koreksi penghapusbukuan utang persediaan (utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	14.660.000,00
4	Koreksi penghapusbukuan utang persediaan (utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	6.300.000,00
5	Koreksi penghapusbukuan utang persediaan (utang belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	12.155.500,00
6	Koreksi penghapusbukuan utang persediaan (utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	22.800.000,00
7	Koreksi penghapusbukuan utang jasa (utang belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	67.795.500,00
8	Koreksi penghapusbukuan utang jasa (utang belanja jasa penyelenggaraan acara) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	23.750.000,00
9	Koreksi penghapusbukuan utang jasa (utang belanja lembur) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	40.310.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPD	Nilai (Rp).
10	Koreksi penghapusbukuan utang jasa (utang belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-kesehatan) tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	16.402.500,00
11	Koreksi penghapusbukuan utang belanja perjalanan dinas biasa tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	17.890.500,00
12	Koreksi penghapusbukuan utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	179.000.000,00
13	Koreksi penghapus bukuan utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.	DINAS KESEHATAN	22.017.500,00
	Jumlah Penambahan		440.132.560,00
	Pengurangan :		
1	Koreksi kerena salah perhitungan utang belanja telepon tahun 2022	DINAS KESEHATAN	24.216,00
2	Koreksi kerena salah perhitungan utang belanja listrik tahun 2022	DINAS KESEHATAN	27.987.100,00
3	Koreksi kerena salah perhitungan utang internet tahun 2022	DINAS KESEHATAN	1.462.150,00
4	Koreksi karena salah perhitungan utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/ pesanggrahan/vila tahun 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	450.000,00
5	Koreksi karena salah perhitungan utang belanja persediaan obat	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	3.000.000,00
6	Koreksi karena salah perhitungan utang belanja persediaan obat lainnya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	500,00
	Jumlah Pengurangan		32.923.966,00
	Jumlah Koreksi		407.208.594,00

Penambahan:

- a. Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.457.500,00 berasal dari koreksi utang belanja insentif bagi



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga tahun 2022 karena salah perhitungan.

- b. Untuk koreksi utang belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu sebesar Rp13.593.060,00 berasal dari koreksi utang belanja persediaan obat tahun 2022 karena salah perhitungan.
- c. Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp55.915.500,00 berasal dari koreksi penghapusbukuan utang persediaan tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Rincian utang yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.660.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.300.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	12.155.500,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	<u>22.800.000,00</u>
Jumlah	55.915.500,00

- d. Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp148.258.500,00 berasal dari koreksi penghapusbukuan utang jasa tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Rincian utang yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.795.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	23.750.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	40.310.500,00
Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	<u>16.402.500,00</u>
Jumlah	148.258.500,00

- e. Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.890.500,00 berasal dari koreksi penghapusbukuan utang perjalanan dinas dan Rp201.017.500,00 berasal dari koreksi penghapusbukuan utang bantuan sosial kepada keluarga Rp179.000.000,00 tahun 2017 dan koreksi penghapusbukuan utang bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp22.017.500,00 tahun 2017 yang belum dibayar karena kasus pencurian dan kekerasan pada Dinas Kesehatan tahun 2017 yang mengakibatkan Tuntutan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Perbendaharaan a.n Akhmad Maulana Yusuf. Utang tersebut dihapusbukukan karena sdr. Akhmad Maulana Yusuf tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Pengurangan:

- a. Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kesehatan berasal dari koreksi saldo awal utang belanja jasa telepon sebesar Rp24.216,00, utang belanja jasa listrik sebesar Rp27.987.100,00, utang belanja jasa internet sebesar Rp1.462.150 karena salah perhitungan.
- b. Untuk koreksi utang belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp450.000,00 berasal dari koreksi utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesangrahan/vila tahun 2022 karena salah perhitungan.
- c. Untuk koreksi utang belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu sebesar Rp3.000.000,00 berasal dari koreksi utang belanja persediaan obat tahun 2022 dan Rp500,00 berasal dari koreksi utang belanja persediaan obat lainnya karena salah perhitungan.

5.6.4

Ekuitas Akhir

Merupakan Saldo Ekuitas Awal ditambah surplus-LO atau dikurangi defisit LO dan ditambah Koreksi Ekuitas Lain-Lain. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Laporan Neraca. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.182.869.062.694,40 dibandingkan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.068.034.952.451,00 terdapat kenaikan sebesar 2,82%.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Umum

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya UU Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Brebes berkedudukan tetap di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, Jawa Tengah, Kode Pos 52219.

b. Letak Geografis



Gambar 6.1

Peta Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian utara paling barat, diantara 108°41'37,7" – 109°11'28,92" Bujur Timur dan 6°44'56,5" – 7°20'51,48" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Brebes meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di sebelah selatan, serta Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) di sebelah barat.

Wilayah terendah adalah Kecamatan Wanasari (1 m di atas permukaan air laut) dan Kecamatan Brebes dengan ketinggian 3 m dari permukaan laut, dan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 m dari permukaan laut.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030, pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Brebes ditetapkan seluas ± 6.261 ha. Sebagian besar terdapat di wilayah selatan Kabupaten Brebes, yaitu Kecamatan Paguyangan, Sirampog, Salem, Bantarkawung dan di wilayah tengah Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya
Kawasan ini berfungsi untuk melindungi kawasan di bawahnya sehingga dapat menjamin terselenggaranya fungsi hidrolis bagi kegiatan pemanfaatan lahan. Kawasan ini meliputi kawasan resapan air. Di Kabupaten Brebes, kawasan resapan air dengan luas $\pm 21.564,1$ ha meliputi:

- a) Kecamatan Banjarharjo (± 1.170 ha);
- b) Kecamatan Bantarkawung (± 2.813 ha);
- c) Kecamatan Bumiayu ($\pm 0,1$ ha);
- d) Kecamatan Ketanggungan (± 1.043 ha);
- e) Kecamatan Larangan (± 372 ha);
- f) Kecamatan Paguyangan (± 2.041 ha);
- g) Kecamatan Salem (± 10.550 ha);
- h) Kecamatan Sirampog (± 3.375 ha);
- i) Kecamatan Tonjong (± 200 ha).

3) Kawasan perlindungan setempat.

Kawasan ini terdiri dari:

- a. Sempadan pantai, terdapat di sepanjang Pantai Utara dari Kecamatan Brebes sampai Kecamatan Losari dengan luas areal ± 722 ha;
- b. Sempadan sungai, dengan luas areal ± 1.963 ha yang tersebar di sepanjang sungai–sungai di Kabupaten Brebes;
- c. Pengelolaan kawasan sempadan waduk, berada di Waduk Malahayu Kecamatan Banjarharjo dengan luas ± 925 ha dan Waduk Penjalin Kecamatan Paguyangan dengan luas ± 125 ha;
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH), proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas perkotaan. Di Kabupaten Brebes untuk RTH meliputi Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan, dan Bumiayu dengan luas ± 3.247 ha. Yang termasuk RTH adalah 30% dari luas tersebut yaitu sekitar ± 974 ha;
- e. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi :

1) Kawasan cagar alam

Kawasan cagar alam di Kabupaten Brebes ditetapkan di Telaga Ranjeng yang berlokasi di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dengan luas $\pm 48,50$ ha;

2) Kawasan muara sungai (estuari)

Kawasan muara sungai yang ditetapkan di Kabupaten Brebes, yaitu :

- Muara Sungai Kaligangsa dan muara Sungai Pemali di Kecamatan Brebes;
- Muara Sungai Balaikambang dan muara Sungai Luwungmalang di Kecamatan Wanasari;
- Muara Sungai Bangsri, muara Sungai Pakijangan, muara Sungai Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
- Muara Sungai Babakan, muara Sungai Kabuyutan, muara Sungai Sinung, muara Sungai Tanjung di Kecamatan Tanjung;
- Muara Sungai Bancang dan muara Sungai Cisanggarung di Kecamatan Losari;

3) Kawasan pantai berhutan bakau

Berfungsi sebagai penahan dan pemecah ombak untuk mengurangi dampak abrasi air laut. Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari;

4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Pendopo Kabupaten dan Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes, Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Fosil Kalijurang di Kecamatan Tonjong.

Selanjutnya kawasan budidaya di Kabupaten Brebes adalah :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi;

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Brebes yaitu hutan yang berada dalam pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Barat dan KPH Balapulang, serta hutan rakyat. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Brebes mencapai $\pm 43.860,98$ ha atau 26,04% dari luas wilayah Kabupaten Brebes di bawah pengawasan KPH. Untuk pengembangan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Brebes \pm seluas 23.651 ha, sementara kawasan hutan produksi terbatas \pm seluas 20.210 ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian

Terbagi menjadi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian hortikultura. Untuk pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dilakukan di seluruh kecamatan Kabupaten Brebes dengan luas lahan ± 60.634 ha. Sedangkan untuk pertanian lahan kering dibutuhkan penanganan yang optimal dengan menonjolkan tanaman pertanian lahan kering yang menjadi andalan Kabupaten Brebes. Luas lahan pengembangan mencapai ± 23.561 ha. Dan untuk pertanian hortikultura yang didasarkan pada luas lahan dan produktifitasnya, dikembangkan pada semua Kecamatan di Kabupaten Brebes dengan rencana pengembangan seluas ± 17.632 ha.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Kawasan peruntukan perkebunan
Luas areal kawasan perkebunan di Kabupaten Brebes mencapai ± 14.593 ha dimana 4% merupakan perkebunan PT Perkebunan Negara (PTPN) sedangkan 96% merupakan perkebunan rakyat. Kabupaten Brebes mempunyai komoditas andalan tanaman perkebunan yang bersifat tahunan, yaitu nilam, cengkeh, dan kapas. Daerah penghasil nilam dan cengkeh berada di wilayah selatan seperti Kecamatan Paguyangan, Bantarkawung, Sirampog, dan Salem. Sedangkan untuk kapas dihasilkan oleh Kecamatan Ketanggungan, Losari, dan Bulakamba.
- 4) Kawasan peruntukan perikanan
Dibedakan menjadi kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan. Kawasan perikanan tangkap merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk wilayah pesisir Kabupaten Brebes, dimana diharapkan mampu mendorong tingkat perekonomian wilayah. Sedangkan untuk kawasan budidaya perikanan terbagi menjadi budidaya perikanan tambak dan budidaya perikanan air tawar. Untuk budidaya perikanan tambak berada di sepanjang pantai wilayah pesisir Kabupaten Brebes yang terbentang di lima Kecamatan pesisir dengan luas areal ± 12.748 ha. Untuk budidaya perikanan air tawar dengan luas kolam ± 114 ha berada di Kecamatan Bantarkawung, Salem, Banjarharjo, Bumiayu, Ketanggungan, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong.
- 5) Kawasan peruntukan peternakan
Kawasan peternakan di Kabupaten Brebes merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan dan atau padang penggembalaan ternak untuk berbagai jenis hewan ternak, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Kawasan ini berada hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes.
- 6) Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan pertambangan di Kabupaten Brebes mencakup :
 - a. Eksploitasi bahan galian berupa pasir sungai, trass, batu pasir, andesit, lempung grabah, bentonit, gypsum dan batu gamping. Tersebar hampir merata di wilayah kecamatan Kabupaten Brebes.
 - b. Studi dan eksplorasi tambang batu gamping di Kecamatan Songgom dan Larangan. Emas, perak, dan platina di Kecamatan Salem, minyak bumi dan pirit (Fes) di Kecamatan Bantarkawung, batubara di Kecamatan Salem dan Bantarkawung, serta pasir besi di Kecamatan Brebes.
 - c. Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Sirampog, Paguyangan, Bumiayu dan Bantarkawung.
- 7) Kawasan peruntukan industri
Pengembangan industri di Kabupaten Brebes dengan membentuk kawasan atau zona sebagai berikut :
 - a. Kawasan industri menengah dan besar yang dikembangkan di sepanjang jalan Arteri Primer Pantura yang mencakup wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Kersana maupun daerah Brebes Pantura yang dilalui oleh Jalan Tol Pejagan sampai dengan Pintu Keluar Tol Brebes Timur di Banjarnayar;
 - b. Kawasan industri menengah dengan sifat kegiatan agro industri sekitar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- jalan arteri Kecamatan Paguyangan dengan pengawasan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) yang ketat.
- c. Pembentukan sentra–sentra industri kecil seperti industri rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu, batik tulis di Desa Bentar dan Desa Bentarsari Kecamatan Salem, keramik dan tembikar di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo, telur asin di beberapa desa di bagian pantai utara Kabupaten Brebes dan lain sebagainya.
- 8) Kawasan peruntukan pariwisata
Beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
- a. Potensi pariwisata alam, meliputi :
- a)1. Wisata Alam Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan;
 - a)2. Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan;
 - a)3. Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo;
 - a)4. Pantai Randusanga Indah di Kecamatan Brebes;
 - a)5. Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten di Kecamatan Sirampog;
 - a)6. Kawasan Perkebunan Kaligua di Kecamatan Paguyangan;
 - a)7. Kawasan Arum Jeram di Kecamatan Salem;
 - a)8. Kawasan Wisata Hutan Mangrove Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes;
 - a)9. Kawasan Gunung Nyapa Desa Karangbale Kecamatan Larangan.
- b. Potensi pariwisata buatan, meliputi :
- b)1. Pemandian air panas Cipanas Buaran di Kecamatan Bantarkawung;
 - b)2. Pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng di Kecamatan Paguyangan.
- 9) Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan permukiman di alokasikan pada lahan–lahan yang kurang produktif dan memiliki kemiringan lereng di bawah 15°. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah baik di pedesaan maupun perkotaan.
Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi kegiatan-kegiatan yang memiliki skala pelayanan lokal hingga regional. Pengembangan sistem pusat pelayanan di Kabupaten Brebes pada wilayah kota Kecamatan di sepanjang jalur pantai utara meliputi ibukota-ibukota kecamatan di Brebes, Wanasari, Tanjung, Bulakamba, dan Losari memerlukan rencana yang terpadu sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada;
- c. Demografi
Sejak diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwasanya untuk data kependudukan yang digunakan semua keperluan pelaksanaan pemerintahan bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang dalam hal ini adalah data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk yang ada



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

mencapai 2.054.278 jiwa yang terdiri dari 50,79% penduduk laki-laki atau sebanyak 1.043.406 jiwa dan 49,21% penduduk perempuan atau sebanyak 1.010.872 jiwa. Dengan demikian angka perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kabupaten Brebes sebesar 103,22, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 103 orang penduduk laki-laki. Selain itu angka *sex ratio* pada tahun 2023 di setiap kecamatan di Kabupaten Brebes juga berkisar diatas angka 100, hal ini mengindikasikan bahwa komposisi jumlah penduduk di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan, namun selisihnya tidak terlalu signifikan.

Selain itu angka kepadatan penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 1.008 jiwa/km² yang artinya setiap 1 km² didiami oleh sekitar 1.008 orang penduduk Kabupaten Brebes. Kepadatan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan Brebes, sedangkan kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Salem.

2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Brebes

Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan sebagai pengarah bagi *stakeholder* untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, diamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2022.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Visi pembangunan daerah berdasarkan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 adalah “Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera” yang mengarah pada pencapaian harapan masyarakat Kabupaten Brebes.

Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencapaiannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

a. Brebes.

Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. Madani. Madani adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi.

b. Madani

Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga lembaga swadaya untuk terlibat dalam pembangunan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi madani adalah terpeliharanya eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; terpelihara dan terjaminnya keamanan dan ketertiban serta keselamatan; tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh silaturahmi dan tenggang rasa; terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

c. Maju

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

d. Sejahtera

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Selanjutnya dalam Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Makin kuatnya karakter masyarakat yang berbasis pada agama dan nilai-nilai budaya, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bermoral, beretika berdasarkan pada falsafah Pancasila, yang akhirnya mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai manusia yang tangguh, kompetitif, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis.
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak; baiknya derajat kesehatan masyarakat didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global; berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial; tercapainya penduduk tumbuh seimbang; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.
- c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif. Makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- politik; meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya komitmen, dukungan, dan partisipasi stakeholders dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.
- d. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal. Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik; meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah; meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat (termasuk pengusaha) dalam penyediaan lapangan kerja.
 - e. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah. Makin meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan infrastruktur atau prasarana sarana wilayah yang andal; meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi; terbukanya isolasi daerah hingga terbentuknya pusat atau kawasan pertumbuhan baru; terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya; terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan.
 - f. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Makin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan; peningkatan kepedulian dan partisipasi stakeholders pada upaya pengurangan laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam.

3. Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Brebes meliputi 27 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 16 Bidang Urusan Wajib, tiga Bidang Urusan Pilihan dan delapan bidang Urusan Fungsi Penunjang. Pemerintah Kabupaten Brebes terdiri dari 49 Unit Organisasi atau SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 6.1
Daftar Unit Organisasi di Kabupaten Brebes
Berdasarkan Urusan dan Bidang

URUSAN DAN BIDANG		SKPD	
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
a.	Bidang Pendidikan	1)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
b.	Bidang Kesehatan	2)	Dinas Kesehatan
		3)	RSUD Brebes
		4)	RSUD Bumiayu
c.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5)	Dinas Pekerjaan Umum
		6)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
d.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		8)	Satuan Polisi Pamong Praja
		9)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
e.	Bidang Sosial	10)	Dinas Sosial
2.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
f.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
g.	Bidang Lingkungan Hidup	12)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
h.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	13)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
i.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	14)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
j.	Bidang Perhubungan	15)	Dinas Perhubungan
k.	Bidang Komunikasi dan Informatika	16)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
l.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
m.	Bidang Penanaman Modal	18)	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
n.	Bidang Kebudayaan	19)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
o.	Bidang Kearsipan	20)	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3.	URUSAN PILIHAN		
p.	Bidang Kelautan dan Perikanan	21)	Dinas Perikanan
q.	Bidang Pertanian	22)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		23)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
r.	Bidang Perindustrian	24)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4.	URUSAN FUNGSI PENUNJANG		
s.	Bidang Administrasi Pemerintahan	25)	Sekretariat Daerah
t.	Bidang Pengawasan	26)	Inspektorat
u.	Bidang Perencanaan	27)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
v.	Bidang Keuangan	28)	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		29)	Badan Pendapatan Daerah
w.	Bidang Kepegawaian	30)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
x.	Bidang Sekretariat DPRD	31)	Sekretariat DPRD
y.	Bidang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	32)	Kecamatan Brebes
		33)	Kecamatan Jatibarang
		34)	Kecamatan Wanasari
		35)	Kecamatan Songgom
		36)	Kecamatan Bulakamba
		37)	Kecamatan Tanjung



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

URUSAN DAN BIDANG		SKPD	
		38)	Kecamatan Losari
		39)	Kecamatan Kersana
		40)	Kecamatan Ketanggungan
		41)	Kecamatan Banjarharjo
		42)	Kecamatan Larangan
		43)	Kecamatan Tonjong
		44)	Kecamatan Bumiayu
		45)	Kecamatan Paguyangan
		46)	Kecamatan Sirampog
		47)	Kecamatan Bantarkawung
		48)	Kecamatan Salem
z.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	49)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Lembaga teknis daerah berbentuk badan, dinas dan kantor, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

4. Personalia

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Brebes terdiri dari 50 anggota, yang berasal dari berbagai unsur partai politik (Parpol) pemenang Pemilu. Adapun nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Brebes periode 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Nama-Nama Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes

Nama	Jabatan
a. Mokhamad Taufiq, S.Sn	Ketua DPRD
b. Zubad Fahilatah, SE	Wakil Ketua DPRD
c. Teguh Wahid T, SH	Wakil Ketua DPRD
d. Wurja, SE	Wakil Ketua DPRD
e. Heri Fitriansyah, S.T. MSi.	Ketua Komisi I
f. Nasikun Hms, SH	Ketua Komisi II
g. Achmad Mafrukhi, SE	Ketua Komisi III
h. Muhaimin Sadirun, S.H.,M.H.	Ketua Komisi IV

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah (KDh) Kabupaten Brebes disebut Bupati, yang untuk periode Tahun 2017-2022 dijabat oleh Hj. Idza Priyanti, SE.MH. dan Wakil Kepala Daerah (WKDh) dijabat oleh Narjo, SH yang berakhir masa jabatannya sampai dengan tanggal 4 Desember 2022. Adapun yang menjadi Penjabat Bupati Brebes mulai tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Urip Sihabudin, S.H.M.H. Kemudian mulai tanggal 13 Desember 2023 hingga sampai dilantiknya Bupati Brebes hasil Pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2024 Penjabat Bupati Brebes yaitu Iwanuddin Iskandar, S.H.M.Hum.

c. Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2023 sebanyak 12.465 orang yang terdiri dari 7.587 PNS dan 4.878 PPPK.

Untuk PNS terdiri dari pegawai Golongan I sebanyak 47 orang, Golongan II sebanyak 1.493 orang, Golongan III sebanyak 8.897 orang dan Golongan IV sebanyak 2.028 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 394 orang menduduki jabatan struktural, Tenaga Fungsional Pendidikan sebanyak 3.865 orang, Tenaga Fungsional Kesehatan sebanyak 1.485 orang, Tenaga Fungsional Lainnya sebanyak 465 orang dan Staf sebanyak 1.378 orang. Pegawai tersebut tersebar di 49 unit organisasi atau SKPD se Kabupaten Brebes.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Brebes di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Brebes yang lebih baik.

PJ. BUPATI BREBES

IWANUDDIN ISKANDAR